



PERBANAS
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL

Banking Beyond Growth: Powering a Sustainable and Inclusive Economy for 2025 Onward

2025 Economic Outlook



www.perbanas.org



Perhimpunan Bank Nasional



perbanas_official

KATA PENGANTAR

Kami, Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) dengan bangga mempersembahkan Kajian-kajian Strategis PERBANAS bertajuk "**Banking Beyond Growth: Powering a Sustainable and Inclusive Economy for 2025 Onward**". Kajian ini merupakan wujud komitmen kami dalam menggali peran strategis sektor perbankan dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam tiga bidang utama yang menjadi fokus pemerintah, yaitu: penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan, serta penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.

Sektor perbankan terus secara konsisten menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kajian ini menyoroti bagaimana perbankan dapat lebih berkontribusi dalam mendukung inisiatif penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, sebagai respons atas dinamika perubahan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi terkini. Selain itu, penguatan ketahanan pangan juga semakin menjadi isu krusial di tengah tantangan penambahan penduduk dunia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perubahan iklim, dan kebutuhan akan sistem pertanian yang lebih efisien. Peran perbankan dalam pembiayaan sektor agribisnis dan hilirisasi sektor pertanian menjadi aspek penting yang dibahas dalam kajian ini.

Tak kalah penting, kajian ini juga mendalami peran perbankan dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam lima tahun ke depan. Dengan menghadirkan solusi pembiayaan yang inovatif, inklusif serta tepat sasaran, sektor perbankan bersama-sama dengan Pemerintah memiliki peluang besar untuk memastikan akses MBR terhadap perumahan yang layak, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan perekonomian nasional. Terakhir, selain tiga kajian tematik di atas, buku ini juga membahas evaluasi terkini terkait kinerja Perekonomian Global dan Nasional, termasuk sektor Perbankan selama 2024. Lalu, kajian ini ditutup dengan proyeksi kami terhadap perekonomian nasional setahun ke depan.

Kami berharap kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi sektor perbankan terhadap pembangunan nasional, tetapi juga menjadi panduan strategis bagi para pemangku kepentingan, termasuk praktisi perbankan, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim yang telah menyusun kajian ini, mulai dari proses penelitian, penyusunan analisis yang mendalam hingga penulisan buku ini. Semoga kajian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi kita semua yang ingin mendorong pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dan berkualitas melalui sektor perbankan.

Kartika Wirjoatmodjo

Ketua Umum PERBANAS

TIM PENYUSUN

DEWAN PENGARAH

Anika Faisal dan Aviliani

KETUA TIM PENULIS

Dzulfian Syafrian

ANGGOTA TIM PENULIS

Outlook Ekonomi 2025

Dzulfian Syafrian, Syifa R. Rosyadah, Dendy Indramawan, dan Chairini Nugraharti.

Kajian Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas 2024-2029

Dzulfian Syafrian, M. Reza Hafiz Akbar, Chairini Nugraharti, dan Dendy Indramawan.

Strategi Penyaluran Kredit Sektor Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan 2024-2029

Dzulfian Syafrian, Prima Gandhi, Muthia Salsabila, dan Syifa R. Rosyadah.

Strategi Pembiayaan Mortgage Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dan Program Tiga Juta Rumah 2024-2029

Dzulfian Syafrian, Randhy Nugroho, Chairini Nugraharti, dan Dendy Indramawan.

REVIEWERS & KONTRIBUTOR

Rofikoh Rokhim, Winang Budoyo, David Sumual, Anton Hendranata, Andry Asmoro, Enrico Tanuwidjaja, dan Josua Pardede.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BOX	xiii
1. OUTLOOK EKONOMI 2025.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
1.1 EKONOMI GLOBAL.....	3
1.1.1 Inflasi dan Suku Bunga Acuan: Tren yang Menurun	4
1.1.2 Tantangan Ekonomi Global 2025.....	5
1.1.3 Ekonomi Amerika Serikat: Pemulihan dan Tantangan Utang.....	7
1.1.4 Ekonomi Tiongkok: Pemulihan Lambat dan Risiko Deflasi	9
1.1.5 Ekonomi Jepang: Pemulihan Melambat di Tengah Tantangan Inflasi	11
1.1.6 Ekonomi EU: Pulih Meski Manufaktur Kontraktif	13
1.2 EKONOMI DOMESTIK	15
1.2.1 Kinerja Ekonomi Regional	20
1.2.2 Inflasi	21
1.2.3 Neraca Pembayaran.....	23
1.2.4 Fiskal 2025	27
1.3 KINERJA PERBANKAN.....	29
1.3.1 Kredit Perbankan.....	30
1.3.2 Perkembangan Suku Bunga.....	34
1.4 OUTLOOK 2025	36

2.	KAJIAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BERKUALITAS 2024-2029	39
	RINGKASAN EKSEKUTIF	40
2.1	PENDAHULUAN	42
2.2	KILAS BALIK SATU DEKADE PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	44
2.2.1	Potret Penciptaan Lapangan Kerja: Apakah Berkualitas atau Tidak?	47
2.2.2	Potret Lapangan Kerja Formal-Informal Menurut Jenis Pekerjaan, Provinsi dan Sektor	52
2.2.2.1	Dinamika Lapangan Kerja Formal-Informal Menurut Jenis Pekerjaan Utama/Jabatan	52
2.2.2.2	Dinamika Lapangan Kerja Formal-Informal Berbasis Wilayah (Provinsi).....	53
2.2.2.3	Dinamika Lapangan Kerja Formal-Informal Menurut Sektor Usaha.....	56
2.2.3	Potret Lapangan Usaha Strategis.....	61
2.2.3.1	Perkembangan dan Komposisi Formal-Informal Penduduk Bekerja Sektor Strategis	61
2.2.3.2	Potret Penduduk Bekerja di Sektor Strategis Berdasarkan Status Rinci Formal-Informal	64
2.2.3.3	Gaji/Upah/Pendapatan Bersih Penduduk Bekerja Sektor Strategis.....	73
2.3	DETERMINAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	77
2.3.1	Pertumbuhan Ekonomi	80
2.3.2	Kredit	80
2.3.3	Investasi	86
2.3.4	Produktivitas	88
2.3.5	Upah Minimum	90
2.3.6	Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor/Lapangan Usaha	91
2.3.7	Demografi Usia Angkatan Kerja.....	94
2.3.8	Tingkat Pendidikan	97
2.3.9	Kondisi Eksternal (dummy COVID-19).....	98
2.4	UPAYA MENDORONG PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BERKUALITAS	98
2.4.1	Sisi <i>Supply</i> (Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kerja).....	98
2.4.2	Sisi <i>Demand</i> (Kebutuhan Industri dan Sektor Penciptaan Lapangan Kerja)	99
2.4.3	Aspek Institusi/Kelembagaan	103

DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	108
LAMPIRAN I. IDENTIFIKASI STUDI LITERATUR BASIS ANALISIS REGRESI DATA PANEL	108
LAMPIRAN II. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	111
3. STRATEGI PENYALURAN KREDIT SEKTOR PERTANIAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN 2024-2029	114
RINGKASAN EKSEKUTIF	115
3.1 PENDAHULUAN	117
3.1.1 Latar Belakang	117
3.1.2 Perumusan Masalah.....	118
3.1.3 Tujuan.....	119
3.1.4 Manfaat Penelitian.....	120
3.1.5 Ruang Lingkup Dan Sistematika Pembahasan	120
3.2 PEMBAHASAN	122
3.2.1 Analisis Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.....	122
3.2.2 Analisis Komoditas Pangan Dan Pertanian Yang Berperan Penting Bagi Perekonomian Nasional	123
3.2.2.1 Aspek Produksi.....	123
3.2.2.2 Aspek Konsumsi	125
3.2.2.3 Aspek Investasi dan Ekspor	128
3.2.2.4 Aspek Impor	130
3.2.2.5 Aspek Belanja Negara	132
3.2.2.6 Delapan Komoditas Pertanian Strategis	133
3.2.3 Nilai Ekonomi Minimum Delapan Komoditas Strategis.....	135
3.2.4 Analisis Kesesuaian Pemberian Kredit Dengan Komoditas Pangan Dan Pertanian Prioritas Bagi Pertumbuhan Ekonomi	144
3.3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	149
3.3.1 Kesimpulan.....	149
3.3.2 Rekomendasi Kebijakan.....	150

3.3.3	Rekomendasi Studi Berikutnya.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....		153
4.	STRATEGI PEMBIAYAAN MORTGAGE BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DAN PROGRAM TIGA JUTA RUMAH 2024-2029.....	155
RINGKASAN EKSEKUTIF		155
4.1	PENDAHULUAN	158
4.1.1	<i>Backlog</i> Rumah dan Visi Membangun Peradaban Maju	158
4.1.2	Perjalanan Membangun Perumahan dalam Lintas Kepemimpinan.....	161
4.1.3	Fokus Visi-Misi Prabowo-Gibran dalam <i>Backlog</i> Perumahan.....	163
4.1.4	Membedah Karakteristik <i>Backlog</i> dan Kemampuan Membeli MBR.....	165
4.1.5	Rekomendasi Target Masyarakat untuk Program 3 Juta Rumah.....	170
4.2	PERSPEKTIF AKAR MASALAH DALAM BACKLOG PERUMAHAN	174
4.2.1	Metode dan Analisis Data	174
4.2.2	Perspektif Regulator	175
4.2.2.1	Ketidaksesuaian (<i>mismatch</i>) antara daya beli dan hunian yang tersedia	175
4.2.2.2	Minimnya penggunaan sumber dana alternatif dari pasar keuangan	175
4.2.3	Perspektif Asosiasi	176
4.2.3.1	Dominasi Masyarakat Berpendhasilan Rendah (MBR) yang memerlukan perlakuan khusus dari Perbankan	176
4.2.3.2	Harga tanah yang semakin tinggi	177
4.2.3.3	Dukungan Perbankan bagi pengembang rumah subsidi	178
4.2.4	Perspektif Perbankan	178
4.2.4.1	Persaingan yang jenuh sehingga mengurangi daya tarik segmen KPR	178
4.2.4.2	Perlu adanya perubahan mekanisme manajemen risiko dalam penyaluran KPR untuk MBR.....	179
4.2.4.3	Butuhnya insentif dari pemerintah untuk menjaga permintaan rumah	179
4.3	STRATEGI KEUANGAN MORTGAGE DAN MASA DEPAN PERUMAHAN	180
4.3.1	Gambaran Umum Strategi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	180
4.3.2	Mendorong Daya Beli Masyarakat.....	180

4.3.2.1	Memastikan Keberlangsungan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal untuk Mendorong Daya Beli Masyarakat.....	180
4.3.2.2	Besaran Portofolio KPR Subsidi Sesuai Preferensi Bank.....	181
4.3.2.3	Mengoptimalkan Peran BP Tapera.....	182
4.3.3	Menjaga Kestabilan Harga Hunian dan Tanah	182
4.3.3.1	Perumahan Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)	182
4.3.3.2	Mencegah Spekulasi Lahan atau Hunian	183
4.3.3.3	Menjadikan Aksesibilitas Internet Sebagai Pemerataan Urbanisasi	183
4.3.3.4	Fokus pada Pembangunan Rumah Transit Oriented Development (TOD).....	184
4.3.4	PERBANAS <i>Mortgage Confidence Index</i> (PMCI) 2024	184
4.4	KESIMPULAN	185
4.5	REKOMENDASI KEBIJAKAN & PENELITIAN BERIKUTNYA	187
	DAFTAR PUSTAKA.....	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Inflasi di Berbagai Negara	4
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi AS Triwulanan (% ,yoy)	8
Gambar 1.3 Inflasi AS 2019 - 2024 (%).....	8
Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran AS 2019 - 2024 (%).....	8
Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Jepang Triwulan (% ,yoy).....	11
Gambar 1.6 Komponen PDB Jepang	12
Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Jepang (%).....	13
Gambar 1.8 Inflasi Jepang (%).....	13
Gambar 1.9 Pertumbuhan Upah Riil (%).....	13
Gambar 1.10 Pertumbuhan Ekonomi EU (%)	15
Gambar 1.11 Inflasi EU	15
Gambar 1.12 Tingkat Pengangguran EU (%).....	15
Gambar 1.13 Industrial Production Index (2021 = 100)	15
Gambar 1.14 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (% , yoy)	16
Gambar 1.15 Pertumbuhan Pendapatan Kelas Menengah Kebawah	18
Gambar 1.16 PDRB Q3-2024	20
Gambar 1.17 Proporsi PDRB (% , GDP).....	21
Gambar 1.18 Inflasi Indonesia (% , yoy)	21
Gambar 1.19 Harga Pangan	23
Gambar 1.20 Neraca Perdagangan (Miliar USD).....	24
Gambar 1.21 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)	25
Gambar 1.22 Neraca Investasi Indonesia (Juta USD)	26
Gambar 1.23 Neraca Investasi Modal (Juta USD)	26
Gambar 1.24 Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah.....	27
Gambar 1.25 Defisit Fiskal (%)	27
Gambar 1.26 Pertumbuhan Kredit dan DPK (%).....	30
Gambar 1.27 Pertumbuhan Kredit Jenis (% , yoy).....	31
Gambar 1.28 NPL Jenis (%)	31
Gambar 1.29 Porsi PDB serta Porsi dan Pertumbuhan Kredit (%)	33
Gambar 1.30 Porsi Tenaga Kerja Serta Porsi dan Pertumbuhan Kredit (%)	34
Gambar 1.31 Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Indonesia	35
Gambar 1.32 Suku Bunga.....	36
Gambar 2.1 Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja.....	45
Gambar 2.2 Perkembangan Penduduk Bekerja Tidak Penuh 2015-2024.....	46
Gambar 2.3 Perkembangan Porsi Tenaga Kerja Formal-Informal (atas) dan Pertumbuhan Lapangan Kerja Formal- Informal (bawah)	48
Gambar 2.4 Perkembangan Lapangan Pekerjaan Menurut Komponen Penyusun Status Formal dan Informal... ..	49
Gambar 2.5 Perkembangan Pendapatan Pekerja Formal dan Pekerja Informal	50
Gambar 2.6 Kuadran Penciptaan Lapangan Kerja Formal Menurut Sektor Lapangan Usaha	59
Gambar 2.7 Kuadran Penciptaan Lapangan Kerja Informal Menurut Sektor Lapangan Usaha	60
Gambar 2.8 Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Hasil Investasi PMA dan PMDN	87
Gambar 3.1 Diagram Alur Kajian.....	121
Gambar 3.2 Distribusi PDB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2023 (%).....	123

Gambar 3.3 Rata-rata Produksi Komoditas Pertanian dalam 10 Tahun Terakhir (juta ton)	124
Gambar 3.4 Produksi Beras Tahun 2020 - 2024 (juta ton).....	124
Gambar 3.5 Proporsi Pengeluaran Masyarakat Berdasarkan Komoditas	125
Gambar 3.6 Konsumsi Komoditas Indonesia 2023	126
Gambar 3.7 Konsumsi Komoditas Sub-sektor Tanaman Pangan Indonesia 2023.....	127
Gambar 3.8 Realisasi Investasi berdasarkan Sektor, 2010 - Q3 2024 (US\$ Ribu).....	128
Gambar 3.9 Ekspor Komoditas Pangan, 2024	129
Gambar 3.10 Impor Kelompok Pangan Indonesia, September 2024	130
Gambar 3.11 Perkembangan Impor Beras Januari 2020 - September 2024	131
Gambar 3.12 Perkembangan Impor Jagung Januari 2020 - September 2024.....	132
Gambar 3.13 Delapan Komoditas Pertanian Strategis Nasional.....	134
Gambar 3.14 Potensi Bisnis Kelapa Sawit.....	136
Gambar 3.15 Potensi Bisnis Kelapa.....	137
Gambar 3.16 Potensi Bisnis Kopi.....	138
Gambar 3.17 Potensi Bisnis Padi.....	139
Gambar 3.18 Potensi Bisnis Jagung	140
Gambar 3.19 Potensi Bisnis Tebu.....	141
Gambar 3.20 Potensi Bisnis Ikan (Tongkol, Tuna, dan Cakalang).....	142
Gambar 3.21 Potensi Bisnis Daging (Ayam dan Sapi).....	143
Gambar 3.22 Rantai Pasok Pupuk dan Benih.....	144
Gambar 3.23 Pinjaman/Kredit Rupiah Menurut Lapangan Usaha, 2023 (triliun Rp).....	145
Gambar 3.24 NPL/NPF berdasarkan Lapangan Usaha (%)	146
Gambar 3.25 Suku Bunga Rata-rata Kredit Bank Umum Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (%).....	146
Gambar 3.26 Realisasi KUR (Rp Triliun) Per Sub Sektor	147
Gambar 3.27 Target dan Realisasi KUR Sektor Pertanian hingga 19 November 2024, Rp Triliun	148
Gambar 3.28 Model Closed Loop Pertanian	149
Gambar 4.1 Kerangka Target 3 Juta Rumah	170
Gambar 4.2 Informasi Karakter Target 3 Juta Masyarakat	172
Gambar 4.3 Rekomendasi Realisasi 3 Juta Rumah.....	173
Gambar 4.4 Profil Masyarakat Target Program 3 Juta Rumah Berdasarkan Pekerjaan	176
Gambar 4.5 Profil Masyarakat untuk 3 Juta Rumah (Targeted) Berdasarkan Akses Kredit.....	177

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 - 2025	3
Tabel 1.2 Suku Bunga Acuan di Berbagai Negara	5
Tabel 1.3 Indikator Perekonomian Tiongkok	10
Tabel 1.4 Komposisi PDB Indonesia	16
Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor	19
Tabel 1.6 Pertumbuhan Kredit Sektoral (%yoy).....	32
Tabel 1.7 Proyeksi Indikator Ekonomi 2025	37
Tabel 1.8 Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025	38
Tabel 2.1 Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Tingkat Pengangguran 2015-2024 (juta orang)	44

Tabel 2.2 Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Tingkat Pengangguran 2015-2024 (juta orang)	46
Tabel 2.3 Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja Formal dan Informal Menurut Jenis Pekerjaan Utama	52
Tabel 2.4 Porsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal-Informal Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja Agregat Berdasarkan Provinsi	54
Tabel 2.5 Porsi dan Rata-Rata Pertumbuhan Lapangan Kerja Formal-Informal Berdasarkan Provinsi	55
Tabel 2.6 Porsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal-Informal Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja Agregat Berdasarkan Sektor	56
Tabel 2.7 Porsi dan Rata-Rata Pertumbuhan Lapangan Kerja Formal-Informal Berdasarkan Sektor	57
Tabel 2.8 Jumlah Tenaga Kerja dan Komposisi Formal-Informal Sektor Strategis	63
Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar (Formal)	65
Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Buruh/Karyawan/Pegawai (Formal)	66
Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Berusaha Sendiri (Informal)	67
Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar (Informal)	70
Tabel 2.13 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Pekerja Bebas Pertanian dan Non Pertanian (Informal)	71
Tabel 2.14 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar (Informal)	73
Tabel 2.15 Perkembangan Rata-rata Gaji/Upah/Pendapatan Bersih Pekerja Sektor Strategis	75
Tabel 2.16 Hasil Regresi Data Panel Pekerja Agregat (Model I), Pekerja Formal (Model II), Pekerja Informal (Model III)	79
Tabel 3.1 Sumbangan Kategori Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2019–2023 (%)	122
Tabel 3.2 Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian, 2022 - September 2024	129
Tabel 3.3 Subsidi Pupuk dan Subsidi Non-energi terhadap Total Belanja Pemerintah, 2020 - 2024	133
Tabel 4.1 Komponen Dasar Hak Bermukim (KDHB)	158
Tabel 4.2 Program Pembangunan Perumahan Rakyat	162
Tabel 4.3 Contoh Program Pendukung Perumahan Rakyat	164
Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan	166
Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Tempat Tinggal	166
Tabel 4.6 Penentuan Kelas Masyarakat Berdasarkan Pengeluaran	167
Tabel 4.7 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Rumah Sendiri Berdasarkan Kelas	168
Tabel 4.8 Rentang Cicilan Rumah Tangga	169
Tabel 4.9 Target Masyarakat untuk Berdasarkan Program 3 Juta Rumah Berdasarkan Rentang Cicilan	171
Tabel 4.10 Target Masyarakat untuk Berdasarkan Program 3 Juta Rumah Berdasarkan Rentang Cicilan	172
Tabel 4.11 Rekomendasi Kuota Pembangunan dan Renovasi Rumah per Tahun	174
Tabel 4.12 Kategori Perumahan dalam PADG 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG KLM)	181

DAFTAR BOX

Box 1 Target Penciptaan Lapangan Kerja Formal Indonesia Emas 2045 Mustahil Tercapai.....	51
Box 2 Kredit Sektoral: Dukungan <i>Terhadap</i> Padat Karya, Hilirisasi, Digitalisasi, dan Tren Ramah Lingkungan ..	76
Box 3 Urgensi Kuantitas dan Kualitas Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	82

Outlook Ekonomi 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian global pada tahun 2025 diprediksi akan mengalami sedikit penurunan performa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan India diperkirakan menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi. Risiko terbesar yang membayangi adalah eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang semakin besar setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden pada awal 2025. Ketegangan antara dua kekuatan ekonomi dunia ini diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat, tetapi juga bagi perekonomian global secara keseluruhan, termasuk Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan global dan nilai tukar.

Dalam konteks domestik, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 juga diproyeksikan melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Para analis memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan berada pada kisaran 5,00%, sedikit lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya. Faktor utama yang masih akan menekan kinerja ekonomi domestik adalah melemahnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, faktor eksternal berupa pelemahan nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap inflasi turut menambah tekanan, seiring dengan peningkatan kebijakan proteksionisme yang kemungkinan besar diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Trump.

Tekanan ekonomi global dan domestik juga akan dirasakan oleh sektor perbankan nasional. Perbankan di Indonesia perlu bersiap menghadapi risiko kredit yang meningkat, tekanan pada likuiditas, risiko nilai tukar, serta penurunan pertumbuhan dana pihak ketiga. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, bank-bank di Indonesia perlu memperkuat manajemen risiko, termasuk eksposur valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi operasional menjadi krusial dalam menjaga daya saing perbankan. Pendalaman pasar keuangan juga harus diupayakan guna meningkatkan resiliensi sektor perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembiayaan pembangunan. Langkah konkret lainnya yang harus dilakukan oleh perbankan nasional adalah diversifikasi portofolio pinjaman untuk mengurangi konsentrasi risiko pada sektor tertentu. Bank juga perlu meningkatkan cadangan risiko kredit sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan kredit bermasalah. Selain itu, penarikan dana murah atau *current account savings account* (CASA) harus dioptimalkan guna menjaga stabilitas likuiditas dan mendukung profitabilitas sektor perbankan.

Meskipun tantangan pada tahun 2025 tampak signifikan, terdapat peluang untuk memitigasi dampaknya melalui langkah-langkah strategis yang tepat. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan menjadi kunci dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Selain itu, penguatan fundamental ekonomi domestik, diversifikasi sumber pendapatan negara, dan penyesuaian kebijakan fiskal dapat membantu Indonesia menghadapi berbagai tekanan.

1.1 EKONOMI GLOBAL

Ekonomi global diproyeksikan tumbuh stagnan pada tahun 2025 akibat fragmentasi pertumbuhan di berbagai wilayah serta tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Beberapa lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 tidak jauh berbeda dibandingkan tahun ini. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% baik pada tahun 2025 maupun 2024. Di sisi lain, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu 3.3% pada 2024 dan 2025. Bank Dunia mengambil pandangan lebih pesimistis dengan proyeksi pertumbuhan hanya sebesar 2,7% (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 - 2025

Wilayah	IMF		World Bank		OECD	
	2024F	2025F	2024F	2025F	2024F	2025F
Global	3.2	3.2	2.6	2.7	3.3	3.3
Negara Maju	1.8	1.8	1.5	1.7	-	-
Negara Berkembang	4.2	4.2	4.0	4.0	-	-
Amerika Serikat	2.8	2.2	2.5	1.8	2.5	2.2
Uni Eropa	0.8	1.2	0.7	1.4	1.1	1.4
Tiongkok	4.8	4.5	4.8	4.1	4.7	4.6
India	7.0	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
Indonesia	5.0	5.1	5.0	5.1	5.1	5.2

Sumber: IMF, World Bank, OECD (2024)

Tahun 2025 diproyeksikan menjadi periode yang penuh tantangan meskipun tekanan inflasi global telah menunjukkan tren pelandaian dan suku bunga acuan di sejumlah negara diperkirakan mulai menurun. Meski kondisi moneter tampak lebih akomodatif, tantangan struktural dan geopolitik diprediksi akan mendominasi dinamika ekonomi global.

Salah satu tantangan utama adalah perang dagang yang terus berlangsung antara dua negara ekonomi terbesar dunia. Konflik ini tidak hanya memengaruhi stabilitas rantai pasok global, tetapi juga mendorong semakin ketatnya peraturan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan yang lebih restriktif diperkirakan akan menciptakan hambatan baru bagi perdagangan lintas negara, khususnya bagi

negara-negara berkembang yang sangat terdampak ketika terjadi gejolak perdagangan dan nilai tukar.

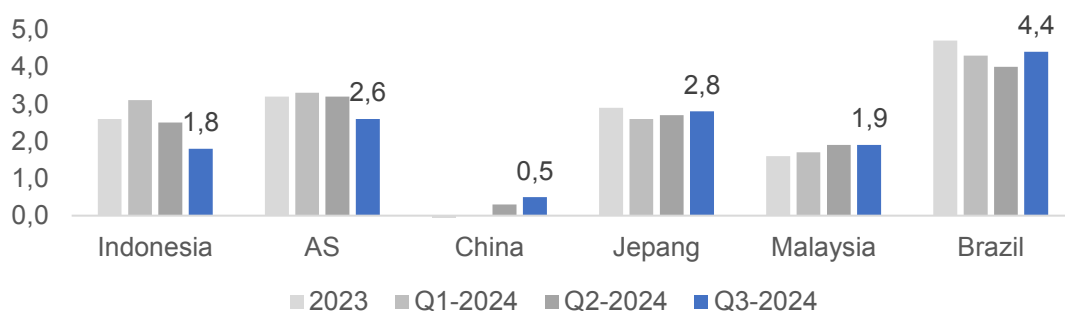
Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah menambah lapisan ketidakpastian terhadap ekonomi global. Di sisi lain, transisi pemerintahan yang akan berlangsung di beberapa negara besar turut memberikan dampak terhadap kinerja kebijakan fiskal. Proses pergantian kepemimpinan sering kali disertai dengan perubahan prioritas kebijakan yang dapat memengaruhi efektivitas stimulus fiskal dan daya dorongnya terhadap perekonomian. Respons kebijakan yang tepat, baik secara domestik maupun melalui koordinasi internasional, menjadi kunci untuk menghadapi ketidakpastian yang semakin kompleks di tahun 2025.

1.1.1 Inflasi dan Suku Bunga Acuan: Tren yang Menurun

Inflasi global pada tahun 2024 menunjukkan tren penurunan dibandingkan puncaknya pada tahun 2022. Penurunan inflasi diantaranya disebabkan oleh normalisasi harga komoditas pangan setelah el-nino berlalu dan waktu panen yang tiba. Selain itu, harga bahan bakar yang sempat melonjak akibat gangguan pasokan global berhasil terkendali. Penurunan ini didorong peningkatan produksi dari negara-negara produsen utama. Meskipun demikian, masih terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga, termasuk emas. Apresiasi harga emas mencerminkan ketidakpastian global yang masih tinggi, di mana aset *save haven* tetap menjadi pilihan utama investor.

Di Amerika Serikat, tren inflasi yang semakin mendekati target Federal Reserve (The Fed) mendorong langkah pelonggaran kebijakan moneter. Pada September 2024, The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,0%. Penyesuaian ini selaras dengan menurunnya tekanan inflasi domestik, sekaligus memberikan sinyal kebijakan moneter yang lebih ekspansif. Pemotongan suku bunga acuan The Fed kembali terjadi selama dua bulan berturut – turut sebesar 25 bps. Pada bulan November turun menjadi 4.75% dan kembali turun pada Desember menjadi 4.50%. Secara umum, tren pemotongan suku bunga BI mengikuti tren the Fed Rate, mengindikasikan bahwa dinamika yang terjadi di AS menjadi salah satu faktor penentu dalam penentuan kebijakan moneter di Indonesia.

Gambar 1.1 Inflasi di Berbagai Negara



Sumber: CEIC (2020)

Tren serupa juga diikuti oleh beberapa negara lain, termasuk Uni Eropa, yang berhasil menekan inflasi tinggi akibat kenaikan harga energi. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Sentral Eropa secara bertahap menurunkan suku bunga acuannya dari 4,5% pada Mei 2024 menjadi 4,25% pada Juni 2024, lalu kembali dipangkas menjadi 3,65% pada September 2024 dan 3,40% pada Oktober 2024.

Namun, tidak semua negara mengambil langkah serupa. Malaysia, misalnya, memilih mempertahankan suku bunga acuannya di level 3%, meskipun inflasi telah terkendali di angka 1,9% pada kuartal ketiga 2024. Keputusan ini didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang solid serta antisipasi terhadap dampak potensial dari meningkatnya ketegangan geopolitik (Tabel 1.1).

Tabel 1.2 Suku Bunga Acuan di Berbagai Negara

Negara	Rate	2019	2020	2021	2022	2023	2024- May	2024- Jun	2024- Jul	2024- Aug	2024- Sep	2024- Oct	2024- Nov
Indonesia	Reverse Repo	5.00	3.75	3.50	5.50	6.00	6.25	6.25	6.25	6.25	6.00	6.00	6.00
Amerika Serikat	FFR	1.75	0.25	0.25	4.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.00	5.00	4.75
Euro Area	Main Refinancing Rate	0.00	0.00	0.00	2.50	4.50	4.50	4.25	4.25	4.25	3.65	3.40	3.40
Jepang	Short-Term Policy Interest Rate	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Brazil	Selic Interest Rate	4.50	2.00	9.25	13.75	11.75	10.50	10.50	10.50	10.50	10.75	10.75	11.25
Malaysia	Policy Rate	3.00	1.75	1.75	2.75	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Australia	Cash Rate	0.75	0.10	0.10	3.10	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
RRC	Key Policy Rate	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35

Sumber: Bank Indonesia (2024)

1.1.2 Tantangan Ekonomi Global 2025

Penurunan inflasi dan suku bunga memberikan peluang bagi ekonomi, meningkatkan daya beli, serta menurunkan biaya pinjaman. Namun, berbagai tantangan tetap membayangi prospek ini. Tantangan geopolitik menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025. Konflik Israel-Palestina semakin meluas,

memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah dan negara-negara sekitarnya seperti Lebanon, Suriah, dan Yaman. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada situasi kemanusiaan tetapi juga mengganggu perdagangan energi, yang berpotensi meningkatkan volatilitas harga minyak dan inflasi global. Eskalasi konflik tersebut mengancam stabilitas ekonomi regional dan memberikan dampak negatif pada perekonomian global.

Konflik Rusia-Ukraina juga diperkirakan terus berlangsung, terutama setelah Vladimir Putin terpilih kembali sebagai presiden Rusia dengan suara mayoritas pada pemilu Maret 2024. Dengan konstitusi yang memungkinkan Putin menjabat hingga 2036, prospek perdamaian antara kedua negara tampak suram. Konflik ini terus menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di Eropa dan meningkatkan risiko pasokan energi global, terutama gas alam yang membuat tren inflasi tinggi di Eropa akan tetap persisten.

Situasi politik di Korea Selatan menjadi tantangan baru bagi ekonomi global. Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer dengan menuduh partai oposisi sebagai pro-Korea Utara. Langkah ini memicu protes publik besar-besaran dan upaya pemakzulan. Ketidakstabilan politik domestik ini berdampak buruk pada perekonomian Korea Selatan, termasuk terjadinya aliran modal keluar (*capital outflow*) dan menurunnya kepercayaan investor asing. Sebagai salah satu negara maju, situasi di Korea Selatan turut memperburuk ketidakpastian global.

Di Asia Timur, Taiwan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas militer Tiongkok yang semakin agresif. Kehadiran kapal perang Tiongkok di sekitar perairan Taiwan, Laut Tiongkok Timur, dan Laut Tiongkok Selatan menambah risiko konflik regional. Tiongkok secara tegas mengklaim Taiwan sebagai bagian dari kedaulatannya, sementara Taiwan dan sekutu internasionalnya berupaya mempertahankan status quo. Ketegangan ini tidak hanya memengaruhi stabilitas politik kawasan tetapi juga mengganggu arus perdagangan internasional yang melewati perairan strategis tersebut.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi yang signifikan, dengan lebih dari 60 negara memiliki pemimpin baru akibat pemilihan umum yang berlangsung sepanjang tahun. Pergantian kepemimpinan ini memberikan peluang untuk perubahan kebijakan yang drastis, terutama di negara-negara yang pemerintahannya kini dipimpin oleh oposisi dari rezim sebelumnya. Perubahan kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi dan bisnis global, menambah tantangan terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik dan makroekonomi yang sudah kompleks.

Di Afrika Selatan, African National Congress (ANC) kehilangan mayoritasnya di parlemen untuk pertama kalinya sejak 1994. Cyril Ramaphosa kembali terpilih sebagai presiden melalui koalisi "pemerintahan persatuan nasional" bersama partai oposisi Democratic Alliance (DA). Namun, perbedaan kebijakan yang tajam antara kedua partai telah memicu ketegangan internal, khususnya terkait reformasi pendidikan dan

sistem kesehatan nasional. Ketegangan ini diperkirakan akan memuncak hingga pengesahan anggaran pada Februari 2025, menciptakan ketidakpastian terhadap stabilitas politik dan arah ekonomi Afrika Selatan.

Di Inggris, hasil pemilu 2024 menunjukkan kemenangan besar Partai Buruh di bawah kepemimpinan Keir Starmer, menggantikan Partai Konservatif yang telah dilanda skandal dan ketidakpuasan publik. Dengan kemenangan ini, Inggris memasuki era baru setelah perubahan besar sejak Brexit. Namun, pemerintah baru menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk utang publik yang mendekati 100% dari PDB dan defisit fiskal sebesar 4,4%. Stabilitas politik dan kemampuan pemerintah untuk mengatasi tekanan ekonomi akan menjadi perhatian utama bagi investor global.

Salah satu tantangan signifikan yang akan memengaruhi perekonomian global pada tahun-tahun mendatang adalah meningkatnya hambatan perdagangan di berbagai negara. Hambatan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari peningkatan tarif barang impor hingga penerapan hambatan non-tarif, seperti standar mutu yang lebih ketat. Tren ini mencerminkan pergeseran kebijakan perdagangan global yang semakin proteksionis. Istilah - istilah seperti *friendshoring* dan *nearshoring* semakin lumrah digunakan. Kedua konsep ini mencerminkan preferensi negara-negara untuk menjalin kemitraan ekonomi hanya dengan sekutu politik, yang sebagian besar merupakan dampak dari ketegangan perang dagang antara kekuatan ekonomi utama dunia.

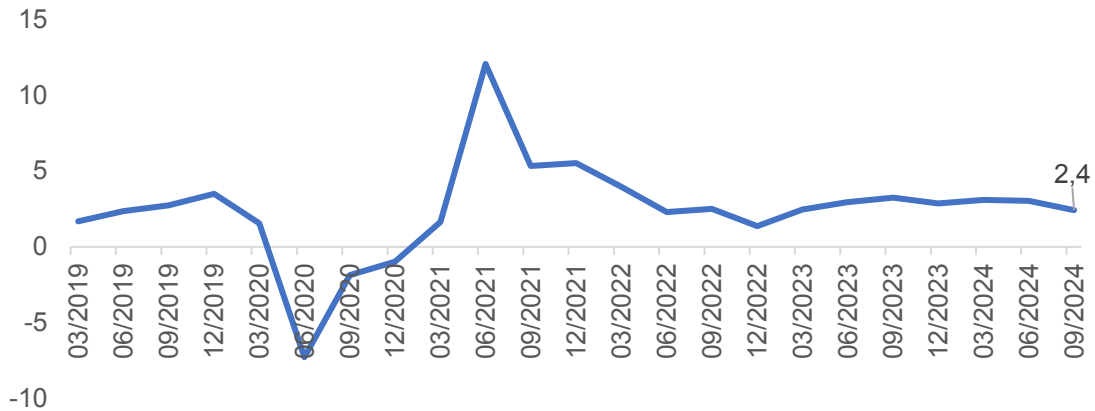
Data dari *World Bank* menunjukkan bahwa sejak awal dekade 2020-an, rata-rata hanya lima perjanjian perdagangan yang berhasil ditandatangani setiap tahunnya, angka ini kurang dari separuh rata - rata perjanjian yang terjadi pada dekade 2000-an. Di sisi lain, semakin banyak negara yang memilih untuk menerapkan pembatasan perdagangan. Ini merupakan perkembangan yang menjadi pertanda buruk bagi pertumbuhan ekonomi global.

Perlambatan dalam liberalisasi perdagangan ini memiliki dampak langsung terhadap perekonomian berbagai negara. Perdagangan internasional selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan menciptakan peluang baru. Dengan meningkatnya hambatan perdagangan, proses ini berpotensi terhambat yang dapat mengancam progres pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang yang ekonominya sangat bergantung pada perdagangan internasional.

1.1.3 Ekonomi Amerika Serikat: Pemulihan dan Tantangan Utang

Perekonomian Amerika Serikat terus menunjukkan momentum pemulihan yang kuat sepanjang tahun 2024, dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,4% (yoy) pada kuartal ketiga 2024 (Gambar 1.2). Meskipun angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,0%, pertumbuhan tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi AS sebelum pandemi Covid-19, yang berkisar sekitar 2% selama satu dekade terakhir.

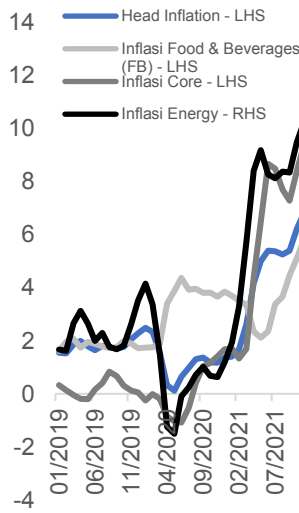
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi AS Triwulanan (% ,yoy)



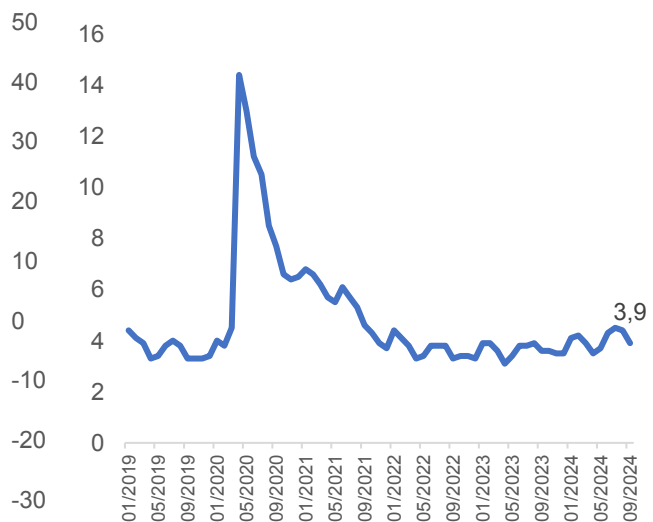
Sumber: CEIC (2024)

Pemulihan ekonomi AS didukung oleh menurunnya inflasi, yang menjadi salah satu faktor utama stabilitas ekonomi. Inflasi AS pada November tahun 2024 sebesar 2,7% (yoy), mendekati target jangka panjang Federal Reserve sebesar 2%. Penurunan inflasi ini didorong oleh deflasi pada harga energi, berkat meningkatnya produksi energi domestik melalui eksplorasi gas alam dan energi terbarukan, serta menurunnya harga minyak mentah global akibat meningkatnya pasokan dari negara-negara penghasil minyak utama.

Gambar 1.3 Inflasi AS 2019 - 2024 (%)



Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran AS 2019 - 2024 (%)



Sumber: CEIC (2024)

Pasar tenaga kerja AS juga menunjukkan penguatan yang signifikan, memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. Tingkat pengangguran pada akhir tahun 2024 tercatat pada level 3,9% yang tetap rendah (**Gambar 1.4**). Kenaikan upah yang signifikan dibandingkan kenaikan harga juga menjadi pendorong pengeluaran rumah tangga. Data dari Center for American Progress menunjukkan bahwa sejak Februari

2020 (pra-pandemi), rata-rata upah di AS telah meningkat sebesar 26,3%, sementara kenaikan harga hanya sebesar 21,4%. Peningkatan ini paling dirasakan oleh kalangan masyarakat bawah, dengan kenaikan upah mencapai 15,7% sejak pra-pandemi. Kondisi ini mendorong peningkatan daya beli rumah tangga, terutama di segmen masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memperkuat konsumsi domestik sebagai motor utama perekonomian.

Namun, di tengah momentum pemulihan ini, AS menghadapi tantangan besar dalam mengelola utang pemerintah yang terus meningkat. Pada akhir tahun 2024, utang pemerintah AS hampir mencapai USD36 triliun, telah melewati *debt ceiling* yang ditetapkan yaitu USD31.4 triliun. Kondisi ini diperburuk oleh peningkatan biaya utang akibat suku bunga yang relatif tinggi meskipun The Fed telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,0% pada September 2024.

Jika tidak ada langkah fiskal yang signifikan untuk mengurangi defisit anggaran, utang pemerintah AS dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tingginya tingkat utang ini memicu kekhawatiran pasar mengenai stabilitas fiskal AS. Pada awal 2025, pemerintah dan Kongres diperkirakan akan menghadapi negosiasi sengit terkait peningkatan *debt ceiling* untuk mencegah risiko *default* atau gagal bayar utang.

Presiden terpilih Donald Trump berencana melakukan perubahan struktural dalam kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Salah satu langkah utamanya adalah pemangkasan tingkat pajak, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi domestik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penurunan pendapatan fiskal pemerintah AS, yang dapat memperburuk defisit anggaran dan memperbesar beban utang nasional yang telah mencapai batas kritis.

Di sisi lain, Trump diperkirakan akan menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri. Salah satu langkahnya adalah peningkatan tarif impor hingga 20%, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada produk asing dan mendukung produksi domestik. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, pendekatan proteksionisme ini berisiko memicu perang dagang dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, Mexico, Kanada, dan Uni Eropa, yang dapat menghambat perdagangan global. Selain itu, peningkatan tarif impor juga dapat memicu kenaikan harga barang konsumsi di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat membebani daya beli masyarakat. Langkah kebijakan presiden terpilih Donald Trump menambahkan ketidakpastian dalam perekonomian global mendatang.

1.1.4 Ekonomi Tiongkok: Pemulihan Lambat dan Risiko Deflasi

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat sebesar 4,6% pada kuartal ketiga 2024, sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 4,7%. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir

yang mencapai sekitar 9%. Pemulihan ekonomi Tiongkok terhambat oleh lemahnya permintaan domestik, meskipun didukung oleh permintaan eksternal yang relatif kuat. Ekspor tumbuh sebesar 6% (yoy), menjadi salah satu penopang utama perekonomian di tengah tantangan domestik.

Namun, risiko deflasi menjadi kekhawatiran terbesar bagi ekonomi Tiongkok di tahun 2025. Hal ini tercermin dari inflasi yang hanya mencapai 0,5% serta rendahnya pertumbuhan penjualan ritel yang hanya mencapai 2,7% (yoy) pada kuartal ketiga 2024. Lemahnya konsumsi domestik juga berdampak pada rendahnya tingkat utilisasi kapasitas industri, yang mencerminkan belum pulihnya sektor manufaktur secara optimal.

Krisis di sektor perumahan terus membayangi perekonomian Tiongkok. Harga properti yang terus menurun telah memengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena sektor *real estate* merupakan salah satu bentuk investasi utama bagi banyak warga Tiongkok. Penurunan harga properti ini secara langsung melemahkan daya beli masyarakat dan menciptakan tekanan pada konsumsi. Upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ini melalui berbagai paket stimulus, seperti pemotongan suku bunga hipotek dan pelonggaran aturan pembelian rumah, belum membuahkan hasil yang signifikan. Investasi di sektor properti masih mengalami kontraksi, menunjukkan ketidakpercayaan pasar terhadap prospek sektor ini.

Tabel 1.3 Indikator Perekonomian Tiongkok

Indikator (yoy)	2020-23 Avg	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	2024-Q1	2024-Q2	2024-Q3
GDP	4.8%	6.3%	4.9%	5.2%	5.3%	4.7%	4.6%
Industrial production	5.0%	4.5%	4.2%	5.2%	6.1%	5.9%	5.4%
Retail sales	4.1%	10.7%	4.2%	8.3%	4.7%	2.6%	3.0%
Fixed asset investment	4.4%	3.1%	1.9%	2.7%	4.5%	3.6%	3.4%
Exports	9.0%	-4.9%	-9.9%	-1.2%	1.5%	5.8%	6.2%
Imports	6.4%	-7.0%	-8.5%	0.9%	1.6%	2.5%	4.1%
Income per capita	4.8%	8.3%	6.1%	6.7%	6.2%	4.2%	4.9%
Fiscal revenue	4.6%	31.7%	-0.9%	-1.0%	-2.3%	-3.2%	-2.5%
Fiscal expenditures	3.7%	1.0%	4.1%	9.2%	2.9%	1.1%	2.8%

Sumber: KPMG (2024)

Lemahnya perekonomian domestik juga berdampak pada penerimaan fiskal. Pada kuartal ketiga 2024, penerimaan negara mencatat kontraksi sebesar -0,8% (yoy). Penurunan ini memaksa pemerintah untuk meningkatkan penerbitan utang guna membiayai kebijakan fiskal ekspansif. Hingga kuartal ketiga 2024, penerbitan surat

utang pemerintah mencapai RMB 3,8 triliun, naik RMB 1,3 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

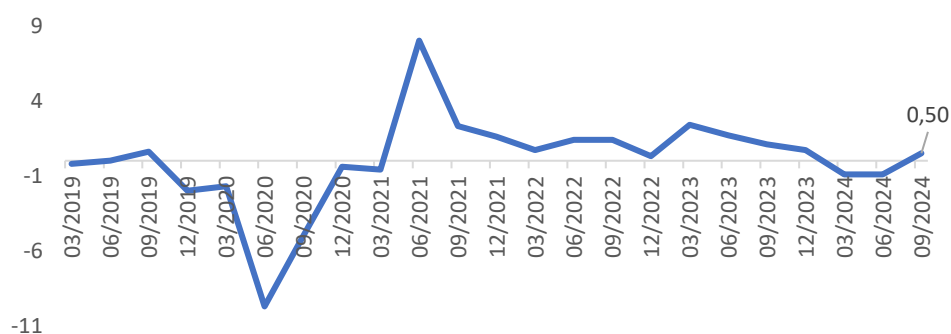
Ke depan, pemerintah Tiongkok menghadapi tantangan yang lebih besar untuk menghidupkan kembali perekonomian. Tidak hanya mempersiapkan Langkah strategis untuk memulihkan permintaan domestik dan *real estate*, tetapi juga mengamankan perdagangan internasional yang saat ini menopang perekonomian negara tersebut. Pasalnya, perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat diperkirakan akan semakin memanas dengan Trump yang Kembali menjadi presiden Amerika Serikat.

Pemulihan ekonomi negara ini menjadi penting karena banyak negara memiliki dependensi yang tinggi pada Tiongkok, terutama negara – negara berkembang. Ukuran ekonomi Tiongkok yang besar menyebabkan negara ini menjadi negara tujuan ekspor utama dari berbagai negara. Pulihnya permintaan domestik sekaligus industri manufaktur Tiongkok akan meningkatkan permintaan impor barang dan jasa dari negara lain. Namun, apabila *recovery* ekonomi Tiongkok berjalan lambat atau bahkan memburuk, ini akan memberikan dampak yang signifikan pada kondisi ekonomi global.

1.1.5 Ekonomi Jepang: Pemulihan Melambat di Tengah Tantangan Inflasi

Ekonomi Jepang mencatat pemulihan yang signifikan, namun trennya saat ini melambat. Pada kuartal ketiga tahun 2023, ekonomi Jepang tumbuh sebesar 1,1% (yoy), namun pada kuartal tiga tahun ini hanya tumbuh sebesar 0,5% (yoy). Meski begitu, pertumbuhan ini merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun 2024 karena ekonomi Jepang kontraktif pada dua kuartal awal tahun ini (Gambar 1.5).

Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Jepang Triwulan (%yoy)



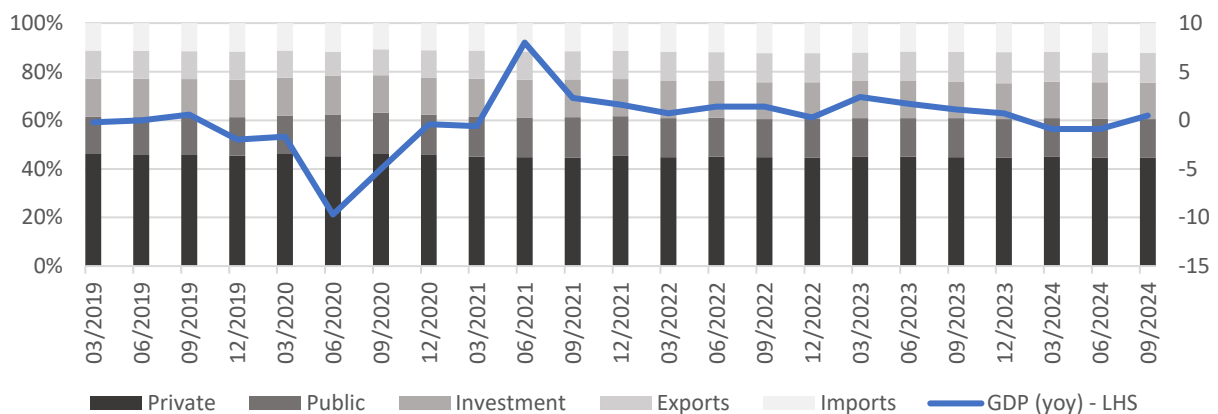
Sumber: CEIC (2024)

Pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat pada 2021–2022 sebagian besar ditopang oleh ekspansi ekspor yang signifikan, khususnya ke pasar Asia, Amerika, dan Uni Eropa. Selain itu, peningkatan investasi bisnis, yang didorong oleh optimisme dunia usaha, turut menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut. Namun demikian, perekonomian Jepang kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga daya beli

masyarakat di tengah tekanan inflasi. Selain, tantangan berikutnya yang sedang dihadapi Jepang adalah runtuhnya beberapa industri utama penopang Jepang, seperti otomotif. Salah tiga raksasa otomotif Jepang, Nissan, Honda, dan Mitsubishi terpaksa bergabung untuk menghadapi persaingan industri global yang semakin ketat, khususnya ancaman dari perusahaan Tiongkok yang semakin menguasai pasar dunia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di industri otomotif tapi secara umum juga terjadi di berbagai lintas sektor.

Pasar tenaga kerja Jepang saat ini tetap tangguh, dengan tingkat pengangguran yang rendah, tetapi inflasi yang meningkat, terutama pada kebutuhan dasar seperti air, listrik, dan gas, telah membebani daya beli. Meskipun terjadi kenaikan nominal upah, lonjakan harga kebutuhan primer telah menggerus pendapatan riil, sehingga dalam beberapa kuartal terakhir, upah riil mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini menimbulkan risiko bagi konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 40% dari total PDB Jepang, dan berpotensi menjadi penghambat laju pemulihan ekonomi ke depan.

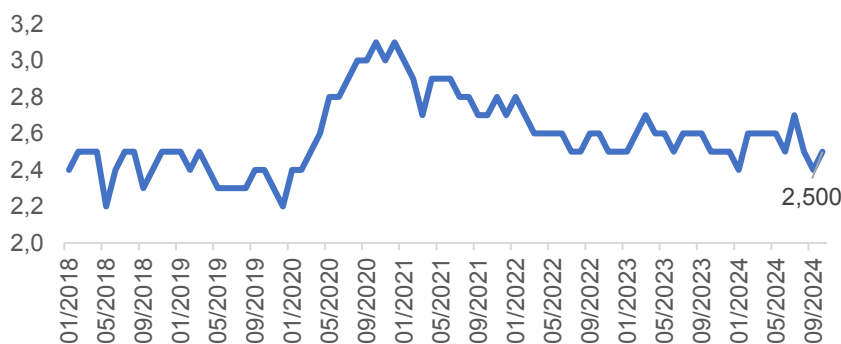
Gambar 1.6 Komponen PDB Jepang



Sumber: CEIC (2024)

Inflasi yang tinggi juga terkait dengan kenaikan harga energi global, yang berdampak langsung pada biaya hidup. Ketergantungan Jepang pada impor energi, terutama gas alam cair (LNG), memperburuk tekanan inflasi di tengah fluktuasi harga global. Selain itu, melemahnya yen pada tahun-tahun sebelumnya meningkatkan biaya impor, menambah tekanan pada daya beli masyarakat.

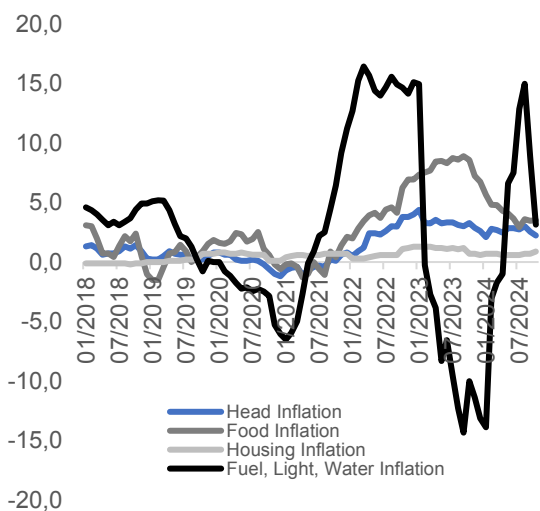
Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Jepang (%)



Sumber: CEIC (2024)

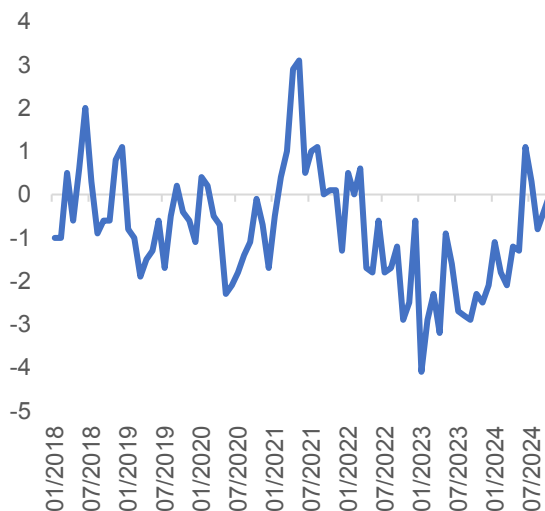
Ke depan, Jepang menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Jepang perlu meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan upah riil yang tumbuh positif. Prospek ekonomi Jepang pada 2025 masih berada di bawah tekanan pelemahan daya beli masyarakat.

Gambar 1.8 Inflasi Jepang (%)



Sumber: CEIC (2024)

Gambar 1.9 Pertumbuhan Upah Riil (%)



1.1.6 Ekonomi EU: Pulih Meski Manufaktur Kontraktif

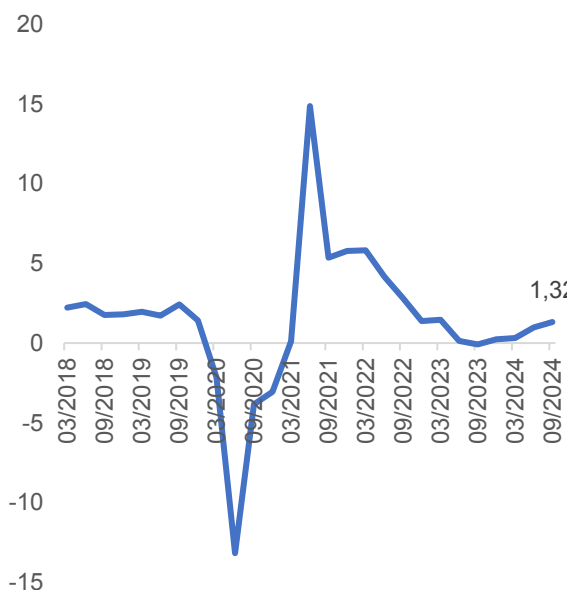
Perekonomian Uni Eropa menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2024, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 1,32% (yoy) pada kuartal ketiga. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya tumbuh 0,14% (yoy). Pemulihan ini didukung oleh penguatan pasar tenaga kerja, di mana tingkat pengangguran berhasil ditekan ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 5,8%, dibandingkan 7,2% pada tahun 2018 (Gambar 1.12). Selain itu, Uni Eropa berhasil mengendalikan inflasi yang sempat melonjak tajam akibat konflik

Rusia-Ukraina dan disrupsi rantai pasok global. Dengan tingkat pengangguran yang rendah dan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat mengalami revitalisasi, memberikan dorongan positif pada perekonomian saat ini maupun di masa depan.

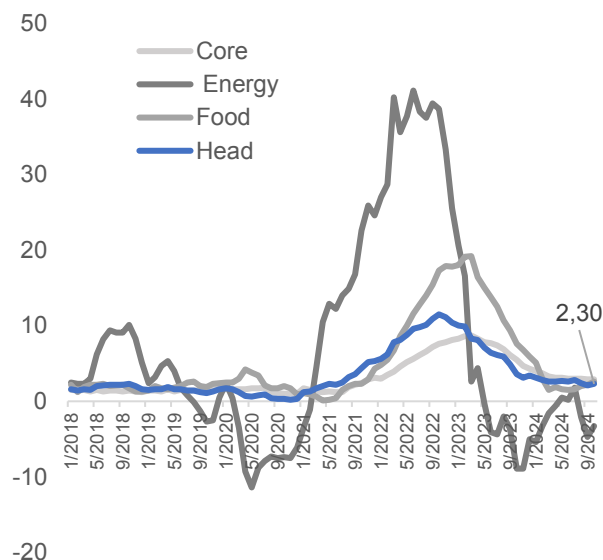
Meskipun perekonomian EU membaik, kondisi sektor manufaktur masih menghadapi tantangan signifikan. Hal ini terlihat dari *the industrial production index* menunjukkan di posisi kontraktif. Salah satu tantangan utama adalah potensi kenaikan tarif impor barang elektronik oleh Amerika Serikat, yang dapat menekan daya saing produk manufaktur Eropa di pasar global. Selain itu, meskipun harga energi di kawasan tersebut telah menurun drastis, harga gas alam masih berada di atas level sebelum 2022 dan lebih tinggi dibandingkan harga di Amerika Serikat. Kondisi ini membuat biaya produksi industri Uni Eropa, terutama industri padat energi, relatif lebih tinggi. Tingginya biaya produksi dapat membatasi pemulihan industri manufaktur wilayah ini.

Persaingan global juga menjadi tantangan yang signifikan bagi Uni Eropa, terutama dari Tiongkok, yang semakin agresif memperluas pangsa pasar manufakturnya. Persaingan ketat khususnya di sektor kendaraan listrik (EV). Tiongkok telah menawarkan produk EV yang lebih kompetitif dari segi harga dan inovasi, yang menjadi ancaman bagi posisi Uni Eropa sebagai pemimpin manufaktur teknologi tinggi. Raksasa otomotif Eropa, seperti Volkswagen mulai goyah posisinya lantaran mendapat tantangan dari perusahaan otomotif Tiongkok yang terus mendapatkan posisi di pasar dunia, termasuk Eropa.

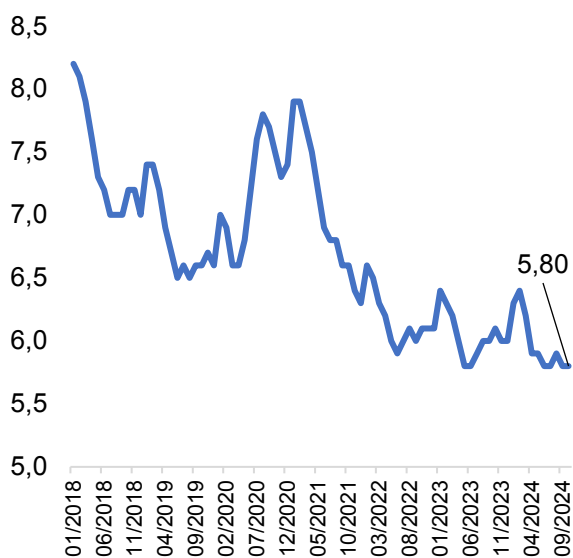
Gambar 1.10 Pertumbuhan Ekonomi EU (%)



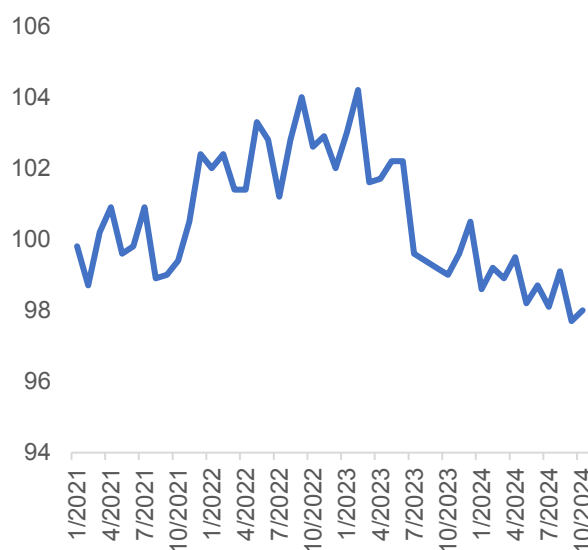
Gambar 1.11 Inflasi EU



Gambar 1.12 Tingkat Pengangguran EU (%)



Gambar 1.13 Industrial Production Index (2021 = 100)



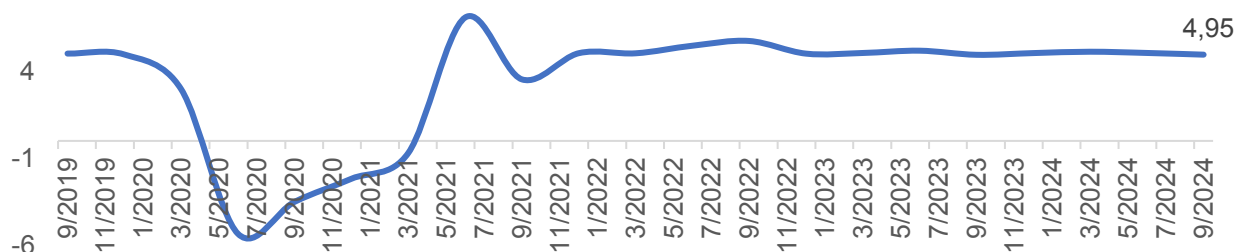
Sumber: CEIC (2024)

1.2 EKONOMI DOMESTIK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perlambatan pada kuartal ketiga tahun 2024, dengan angka hanya mencapai 4,95% secara tahunan (yoy) dan 1,50% secara triwulanan (qtq). Capaian ini lebih rendah dibandingkan kuartal kedua tahun 2024 yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,05% (yoy) dan 3,79% (qtq). Penurunan

ini mengindikasikan adanya tantangan dari sisi domestik dan global, yang jika tidak segera ditangani dapat memperburuk kinerja ekonomi di tahun mendatang.

Gambar 1.14 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (% , yoy)



Sumber: BPS (2024)

Dari sisi domestik, pelemahan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor utama yang harus diwaspadai. Sebagai komponen terbesar dalam struktur PDB dengan kontribusi sekitar 50%, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91% (yoy) pada kuartal ketiga 2024, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya (4,93%) dan kuartal yang sama tahun lalu (5,05%). Kondisi ini menandakan penurunan daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah dan bawah yang menjadi tumpuan ekonomi domestik.

Tabel 1.4 Komposisi PDB Indonesia

Komponen	Growth 2021 (% , yoy)	Growth 2022 (% , yoy)	Growth 2023 (% , yoy)	Growth Q3-24 (% , yoy)	Share 2021 (% GDP)	Share 2022 (% GDP)	Share 2023 (% GDP)	Share Q3-24 (% GDP)
GDP	3,7	5,3	5,0	4,9	100	100	100	100
Konsumsi Rumah Tangga (C)	2,0	4,9	4,8	4,9	54,4	51,9	53,1	53,1
Pengeluaran Pemerintah (G)	4,2	-4,5	2,9	4,6	9,3	7,7	7,4	7,2
Investasi (I)	3,8	3,9	4,4	5,1	30,8	29,1	29,3	29,7
Expor (X)	17,9	16,3	1,3	9,0	21,4	24,5	21,7	22,5
Impor (M)	24,9	14,75	-1,6	11,5	18,8	20,9	19,6	20,8

Sumber: BPS (2024)

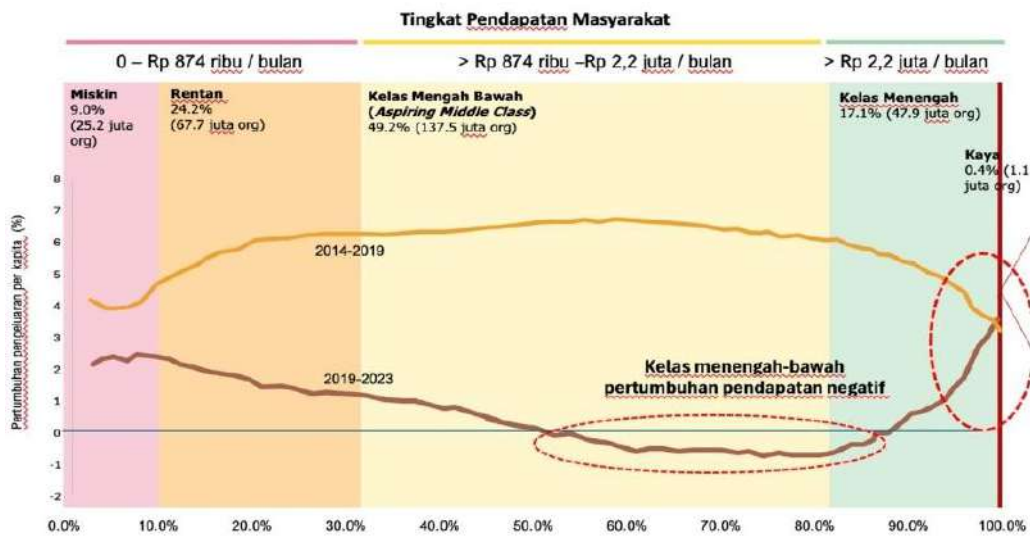
Penurunan daya beli masyarakat kelas menengah terlihat dengan adanya penurunan proporsi kelas menengah dari 23% pada 2018 menjadi 18,8% pada 2023, sementara kelas menengah meningkat dari 49,6% menjadi 53,4% pada periode yang sama. Fenomena ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Penurunan kelas

menengah ini juga tidak terlepas dari pergeseran struktur tenaga kerja, di mana proporsi pekerja informal di kelas menengah meningkat dari 38,29% pada 2019 menjadi 40,64% pada 2024. Pergeseran ini diperburuk oleh penurunan pekerja kelas menengah di sektor industri, yang beralih ke sektor pertanian sebagai bantalan krisis. Sektor pertanian, meskipun mampu menyerap tenaga kerja, umumnya menawarkan pekerjaan dengan kualitas rendah dan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan sektor industri.

Pasar tenaga kerja Indonesia pada 2024 memberikan gambaran yang campuran. Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 5,3% pada Agustus 2023 menjadi 4,9% pada Agustus 2024, terdapat tantangan lain yang muncul. Proporsi pekerja penuh waktu menurun dari 68,92% menjadi 68,06%, sementara tingkat setengah pengangguran meningkat dari 6,68% menjadi 8%. Selain itu, sektor manufaktur, khususnya tekstil, mengalami peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang turut memperburuk pendapatan masyarakat kelas menengah. Situasi ini mencerminkan perbaikan di pasar tenaga kerja yang tidak merata dan masih rentan terhadap guncangan, terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah dan bawah.

Fenomena ini juga digambarkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dartanto dimana dilakukan pengolahan data SUSENAS yang mencakup informasi sosiodemografi masyarakat Indonesia (Gambar 1.15). Hasil olah data menunjukkan, tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah selama periode 2019 – 2023 lebih rendah dari periode 2014 – 2019. Terlebih lagi, masyarakat menuju menengah, yang merupakan mayoritas populasi Indonesia, mengalami pertumbuhan pendapatan yang kontraktif. Ini mencerminkan bahwa ekonomi Indonesia belum sepenuhnya kembali ke level pra-Covid. Kondisi dimana kenaikan pendapatan rendah khususnya bagi kelas menengah dan menuju menengah merupakan kondisi yang merugikan bagi ekonomi Indonesia. Pasalnya, komposisi perekonomian Indonesia Sebagian besar dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga dan sebagian masyarakat Indonesia termasuk ke dalam kelas menuju menengah dan menengah. Oleh karenanya, pertumbuhan pendapatan yang lambat ini telah menahan konsumsi masyarakat di kelas tersebut yang pada akhirnya memengaruhi laju ekonomi Indonesia.

Gambar 1.15 Pertumbuhan Pendapatan Kelas Menengah Kebawah



Sumber: Dartanto (2024)

Dari sisi sektoral, perekonomian Indonesia masih ditopang oleh industri pengolahan, yang berkontribusi sebesar 19% terhadap PDB nasional dan tumbuh 4,7% (yoy) pada kuartal ketiga 2024. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat, khususnya pada subsektor makanan dan minuman yang mencatat pertumbuhan 5,8% (yoy). Tren ini sejalan dengan pola pengeluaran masyarakat, di mana hampir setengahnya dialokasikan untuk kebutuhan makanan dan minuman. Selain itu, industri logam dasar juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 12,4% (yoy), didukung oleh kebijakan hilirisasi pemerintah, terutama pada komoditas logam seperti nikel.

Namun, meskipun industri pengolahan masih menjadi penyumbang utama PDB, pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan beberapa sektor lain yang berkembang pesat. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan 8,64% (yoy) pada kuartal ketiga 2024, diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh 8,33% (yoy), serta sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,86% (yoy). Ketiga sektor ini telah menunjukkan dinamika yang lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan pergeseran struktur ekonomi yang mulai didominasi oleh jasa dan teknologi.

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor

Laju Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor (% , yoy)	2019	2020	2021	2022	2023	Q1-2024	Q2-2024	Q3-2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.61	1.77	1.87	2.25	1.3	-3.54	3.25	1.69
B. Pertambangan dan Penggalian	1.22	-1.95	4	4.38	6.12	9.31	3.17	3.46
C. Industri Pengolahan	3.8	-2.93	3.39	4.89	4.64	4.13	3.95	4.72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.04	-2.34	5.55	6.61	4.91	5.35	5.39	5.02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.83	4.94	4.97	3.23	4.9	4.44	0.84	0.03
F. Konstruksi	5.76	-3.26	2.81	2.01	4.91	7.59	7.29	7.48
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.6	-3.79	4.63	5.52	4.85	4.59	4.86	4.82
H. Transportasi dan Pergudangan	6.38	-15.1	3.24	19.9	13.96	8.66	9.56	8.64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.79	-10.3	3.89	12	10.01	9.39	10.17	8.33
J. Informasi dan Komunikasi	9.42	10.61	6.82	7.74	7.59	8.41	7.66	6.86
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.61	3.25	1.56	1.93	4.77	3.91	7.9	5.49
L. Real Estate	5.76	2.32	2.78	1.72	1.43	2.54	2.16	2.32
M,N. Jasa Perusahaan	10.3	-5.44	0.73	8.77	8.24	9.63	7.96	7.93
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.66	-0.03	-0.33	2.52	1.5	18.88	2.79	3.94
P. Jasa Pendidikan	6.3	2.61	0.11	0.59	1.78	7.34	2.38	2.51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.66	11.56	10.5	2.74	4.66	11.64	8.56	7.64
R,S,T,U. Jasa lainnya	10.6	-4.1	2.12	9.47	10.52	8.92	8.85	9.95

Sumber: BPS (2024)

Di sisi lain, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB menunjukkan tren penurunan dari waktu ke waktu, yang mencerminkan tantangan besar yang dihadapi sektor ini. Pada tahun 2010, kontribusi industri pengolahan tercatat sebesar 22%, menurun menjadi 20,2% di 2017 dan menjadi 18,6% pada tahun 2023. Penurunan ini salah satunya dikontribusi oleh persaingan yang semakin ketat, baik di pasar domestik maupun internasional. Produk asal Tiongkok, misalnya, berhasil menekan biaya produksi sehingga harga jual menjadi lebih murah dan lebih kompetitif. Selain itu, investasi di sektor ini juga menghadapi tantangan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

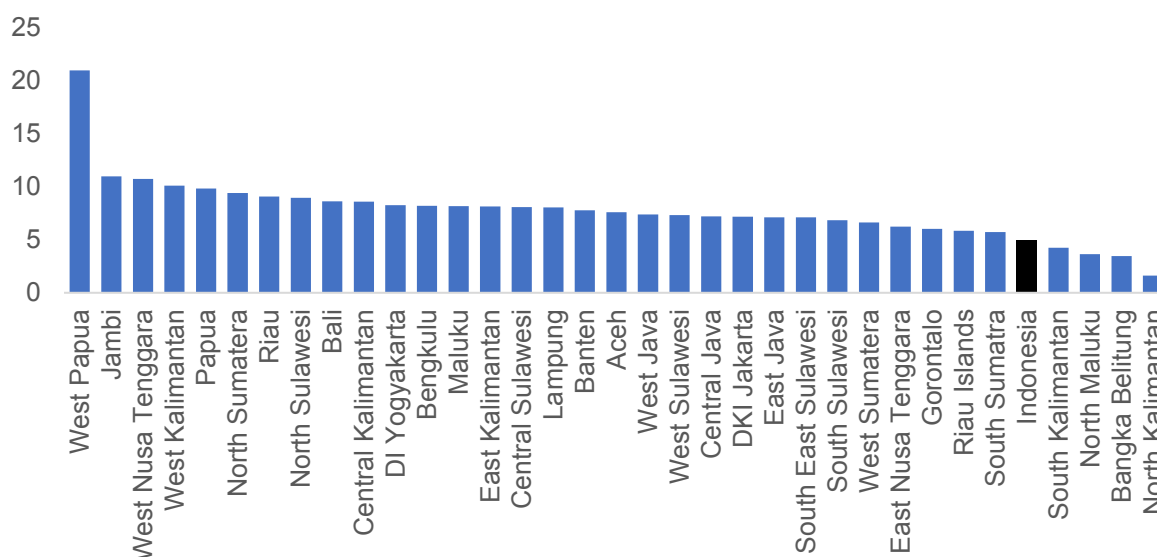
Vietnam, khususnya, telah menjadi salah satu destinasi utama investasi industri pengolahan di Asia Tenggara, berkat berbagai kebijakan pendukung seperti insentif pajak, biaya SDM yang murah, dan kemudahan regulasi. Penanaman modal asing (PMA) di Vietnam mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dengan dukungan kebijakan yang pro-bisnis, Vietnam semakin menarik bagi perusahaan multinasional yang mencari lokasi produksi alternatif.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pekerjaan dengan mendorong penciptaan lapangan kerja formal melalui insentif kepada sektor industri berorientasi ekspor dan teknologi. Di samping itu, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja harus menjadi prioritas untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja, terutama di kelas menengah. Langkah lain yang dapat diambil adalah mendorong sektor ekonomi digital sebagai peluang baru untuk menyediakan pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik.

Di samping itu, membangun iklim investasi bisnis baik dari *soft infrastructure* maupun *hard infrastructure* yang lebih inklusif sehingga dapat bersaing dengan negara – negara tetangga lainnya. Dari sisi *soft infrastructure* kemudahan birokrasi dan pelaporan menjadi kunci utama untuk menarik investasi langsung. Selain itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja diperlukan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Dari sisi *hard infrastructure*, kawasan ekonomi khusus (KEK) perlu disertai dengan akses infrastruktur yang memadai sehingga memudahkan proses distribusi logistik. Pasalnya sampai saat ini Indonesia masih dihadapkan oleh biaya logistik yang tinggi mengingat wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan.

1.2.1 Kinerja Ekonomi Regional

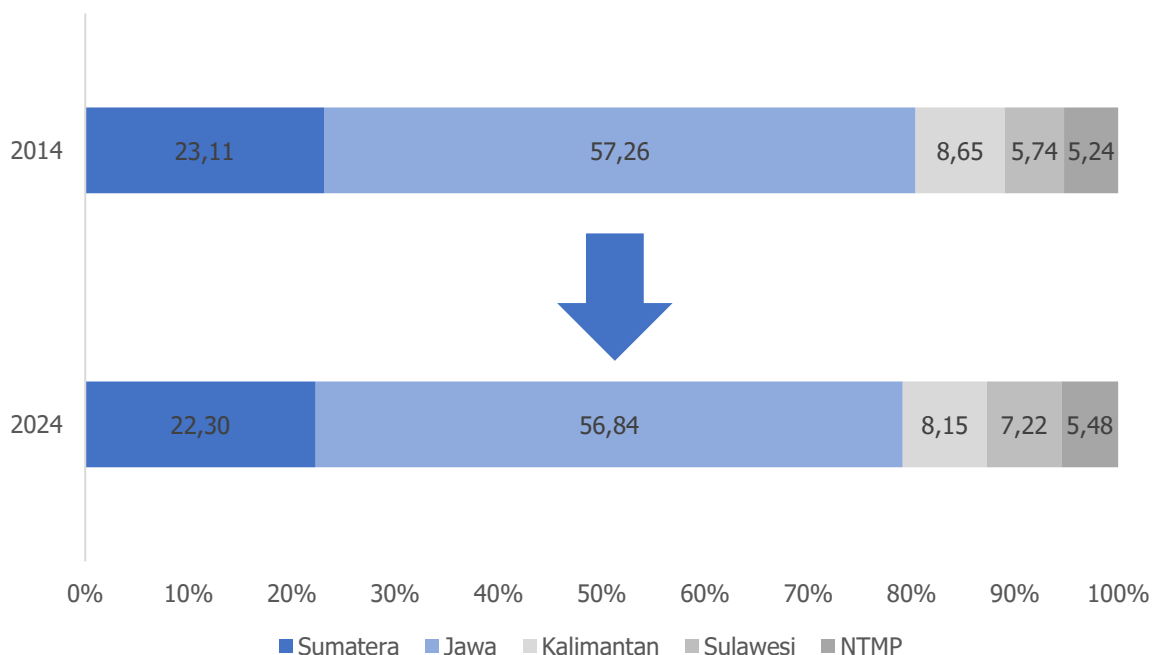
Gambar 1.16 PDRB Q3-2024



Sumber: BPS (2024)

Pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia timur menunjukkan kinerja yang luar biasa, di atas rata – rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tertinggi berada di Kawasan Papua Barat sebesar 20,93% (yoy) pada kuartal ketiga tahun 2024. Wilayah Indonesia timur lainnya yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 10,72% (yoy) dan Papua sebesar 9,81% (yoy). Tingginya pertumbuhan pada Kawasan ini didukung oleh hilirisasi tambang yang saat ini merupakan fokus pemerintah. Meskipun Kawasan Indonesia Timur mengalami pertumbuhan yang tinggi, belum ada perubahan signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia dimana masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Pada tahun 2014, kontribusi pulau Jawa terhadap PDB Indonesia sebesar 57,26%. Sepuluh tahun kemudian, kontribusi pulau Jawa masih yang terbesar meski mengalami penurunan tipis yaitu menjadi 56,84%.

Gambar 1.17 Proporsi PDRB (% GDP)

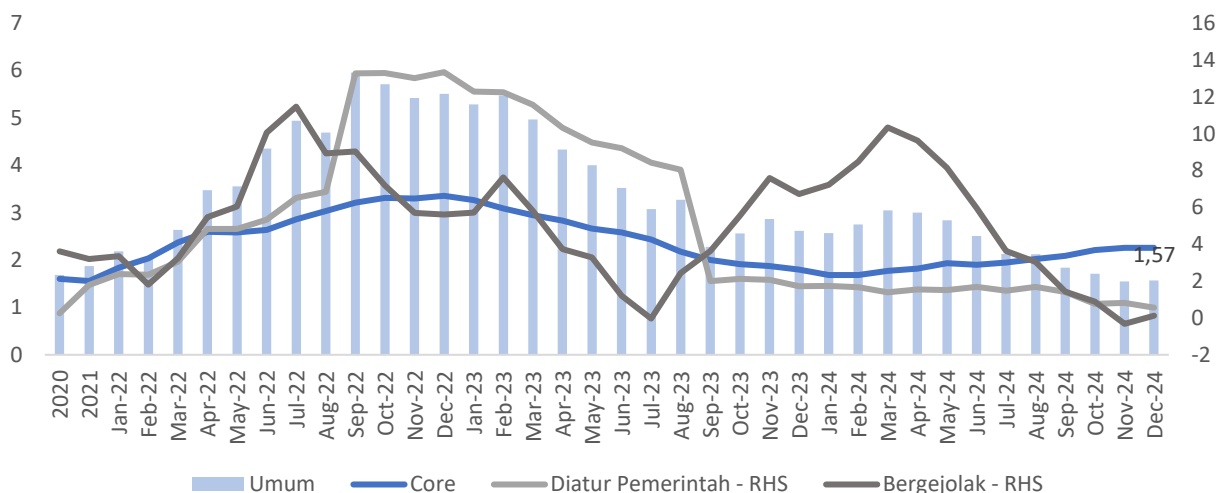


Sumber: BPS (2024)

1.2.2 Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahun 2024 mencapai titik terendah sepanjang sejarah, yaitu sebesar 1,57% (yoy). Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan masa pandemi Covid-19, ketika perekonomian mengalami pertumbuhan kontraktif. Meskipun sekilas inflasi rendah dapat dianggap sebagai keberhasilan pengendalian harga, fenomena ini justru mengindikasikan dinamika ekonomi yang lebih kompleks khususnya penurunan daya beli masyarakat.

Gambar 1.18 Inflasi Indonesia (% yoy)



Sumber: CEIC (2024)

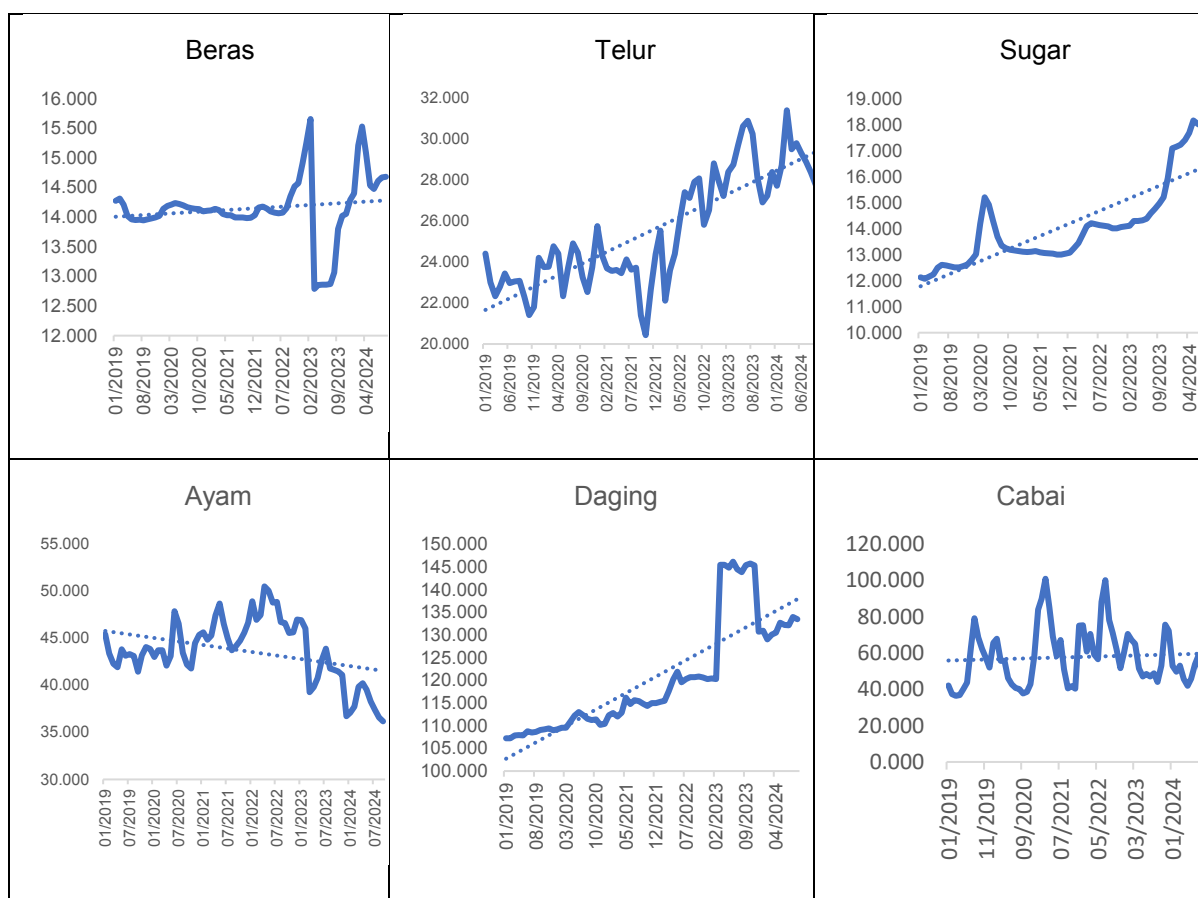
Rendahnya inflasi dapat mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat. Fenomena ini menjadi kontras dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil kembali ke angka 5%. Oleh karenanya, terdapat indikasi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum bisa memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat, khususnya menengah dan bawah, masih rentan dan berhati – hati dalam konsumsi.

Dinamika harga pangan menunjukkan tren yang beragam. Beberapa komoditas pangan sempat mencatat kenaikan harga yang signifikan akibat efek El Nino sehingga menyebabkan pergeseran waktu panen. Saat ini, sebagian besar harga pangan yang sempat meningkat telah kembali menurun, seiring dengan dimulainya musim panen. Namun, sejumlah komoditas masih menunjukkan tren peningkatan harga.

Harga daging sapi, misalnya, tetap berada pada level yang tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya permintaan pasar, yang diperparah oleh kenaikan harga sapi impor akibat meningkatnya biaya pakan. Selain itu, gula menjadi salah satu komoditas yang mengalami tekanan harga ke atas. Terbatasnya stok gula, baik di pasar domestik maupun internasional, menjadi determinan utama dalam kenaikan harga tersebut.

Perubahan iklim global dan kondisi cuaca ekstrem telah memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas produksi gula di berbagai negara. Di Brasil, yang merupakan salah satu eksportir utama gula dunia, mengalami kekeringan telah merusak ladang tebu. Sementara di India yang juga eksportir besar lainnya, menerapkan kebijakan pembatasan ekspor gula untuk mendukung transformasi tebu menjadi etanol. Kebijakan ini secara signifikan mengurangi ketersediaan gula di pasar global, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga komoditas tersebut.

Gambar 1.19 Harga Pangan



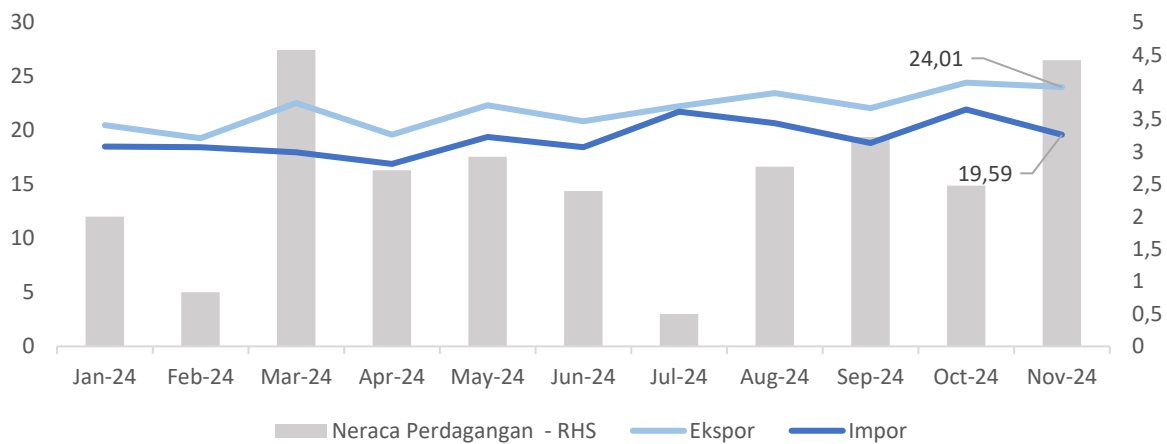
Sumber: CEIC (2024)

1.2.3 Neraca Pembayaran

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD 4,42 miliar pada November 2024, meningkat signifikan dibandingkan dengan surplus Oktober 2024 yang sebesar USD 2,48 miliar. Dengan capaian ini, Indonesia telah mencatatkan surplus perdagangan selama 55 bulan berturut-turut. Peningkatan surplus ini utamanya didorong oleh pertumbuhan ekspor yang mencapai 9,14% (yoy), sementara impor hanya mengalami kenaikan tipis sebesar 0,01% (yoy).

Meskipun Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan, terdapat tantangan kedepannya yang akan mempengaruhi kinerja ini. Pertama, normalisasi harga komoditas berbasis sumber daya alam menjadi tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia mendatang. Beberapa harga komoditas unggulan telah mengalami penurunan yang signifikan, seperti batu bara yang turun sebesar 3% (yoy), CPO sebesar 7,6% (yoy), dan nikel sebesar 7,6% (yoy). Tidak hanya itu, terdapat risiko tambahan berupa peningkatan restriksi perdagangan untuk komoditas non-energi seperti kopi melalui kebijakan EU Deforestation Regulation (EUDR) yang akan diterapkan Uni Eropa pada tahun 2025.

Gambar 1.20 Neraca Perdagangan (Miliar USD)

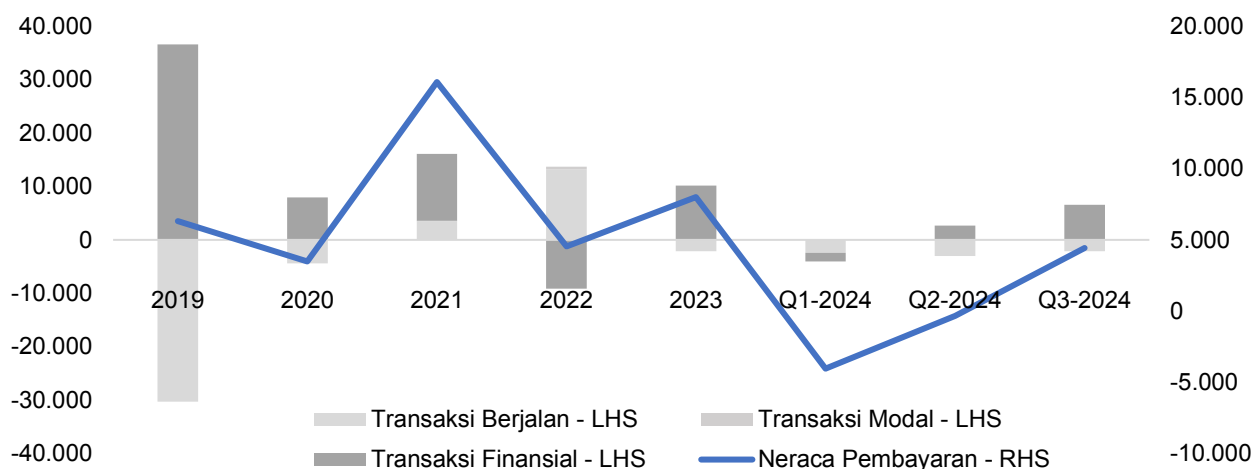


Sumber: BPS (2024)

Kinerja ekspor Indonesia turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara mitra, terutama Tiongkok. Peralnya, Tiongkok merupakan tujuan ekspor utama dan terbesar bagi Indonesia. Pelemahan ekonomi Tiongkok menjadi tantangan tersendiri, terlihat dari pertumbuhan impor negara tersebut yang masih rendah. Dengan melambatnya permintaan dari Tiongkok, ekspor Indonesia ke negara tersebut kemungkinan besar akan tertekan.

Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok terus meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa impor barang dari Tiongkok ke Indonesia tumbuh sebesar 105% dalam sepuluh tahun terakhir, sementara ekspor Indonesia ke Tiongkok melonjak lebih dari 260%. Sebaliknya, hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, mitra dagang terbesar kedua, cenderung stagnan dengan pertumbuhan impor hanya sebesar 38% dan ekspor sebesar 40%. Padahal, pada tahun 2014, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok dan Amerika Serikat hampir setara.

Hubungan erat antara Indonesia dengan Tiongkok dapat semakin mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia dengan AS. Peralnya, perang dagang antara Tiongkok dan AS semakin memanas dengan AS menetapkan kebijakan yang lebih restriktif untuk produk – produk asal Tiongkok. Kondisi ini dapat memengaruhi kinerja *indirect export* Indonesia ke AS untuk produk Tiongkok yang diproses atau dikirim dari Indonesia serta ekspor produk Tiongkok yang diproduksi di Indonesia.

Gambar 1.21 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)

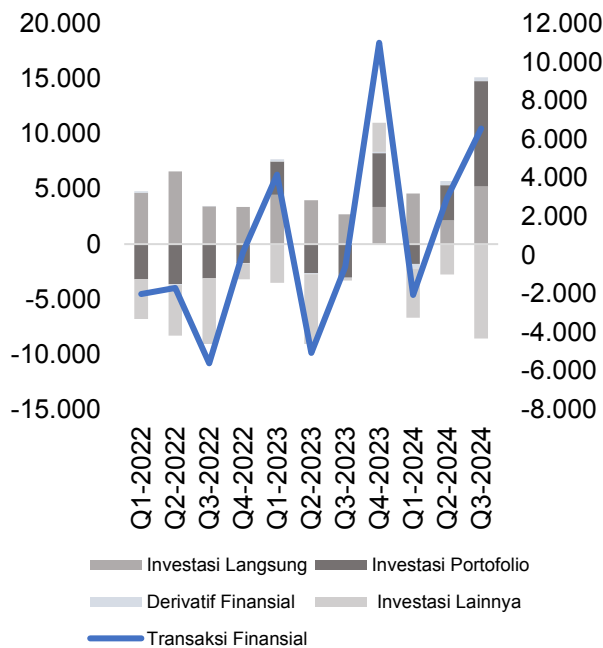
Sumber: Bank Indonesia (2024)

Meskipun menghadapi tantangan pada sisi perdagangan, neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan. NPI pada triwulan III 2024 mencatat surplus sebesar 5,9 miliar dolar AS, dari sebelumnya defisit sebesar 0,6 miliar dolar AS pada triwulan II 2024. Surplus NPI ditopang oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit neraca transaksi berjalan yang lebih rendah. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa meningkat dari sebesar 140,2 miliar dolar AS pada akhir Juni 2024 menjadi sebesar 149,9 miliar dolar AS pada akhir September 2024, atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

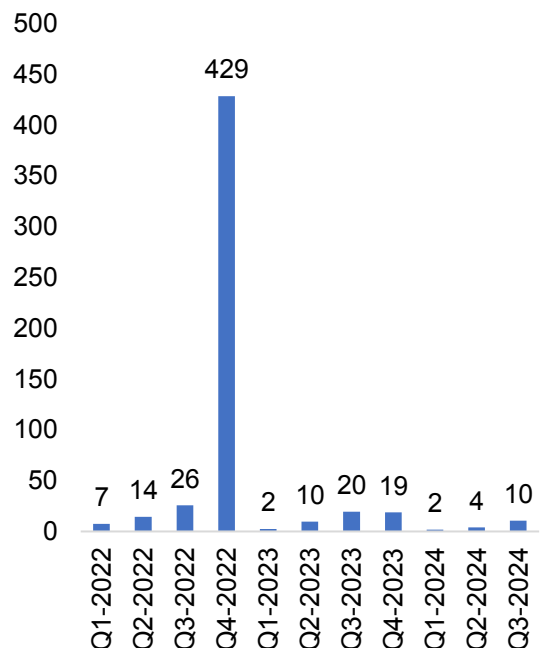
Neraca transaksi modal dan finansial surplus dalam dua kuartal belakangan. Surplus neraca transaksi modal dan finansial sebesar 6,6 miliar dolar AS pada triwulan III 2024. Angka ini lebih tinggi dari triwulan II 2024 yang surplus 3,0 miliar dolar AS. Surplus neraca transaksi modal dan finansial pada kuartal ini utamanya didorong oleh kenaikan kinerja investasi langsung dan investasi portofolio. Tercatat, surplus investasi langsung sebesar 5,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan capaian surplus pada triwulan II 2024 yang sebesar 2,1 miliar dolar AS.

Aliran investasi langsung didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Tidak hanya itu, kinerja investasi portofolio berkontribusi positif yaitu mencatatkan surplus sebesar 9,6 miliar dolar AS. Ini mengalami peningkatan yang signifikan dari capaian pada Triwulan II 2024 yang juga mengalami surplus sebesar 3,2 miliar dolar AS. Pemangkasan suku bunga The Fed dan ketahanan ekonomi domestik menjadi faktor utama dalam meningkatnya aliran investasi portofolio masuk ke Indonesia.

Gambar 1.22 Neraca Investasi Indonesia (Juta USD)



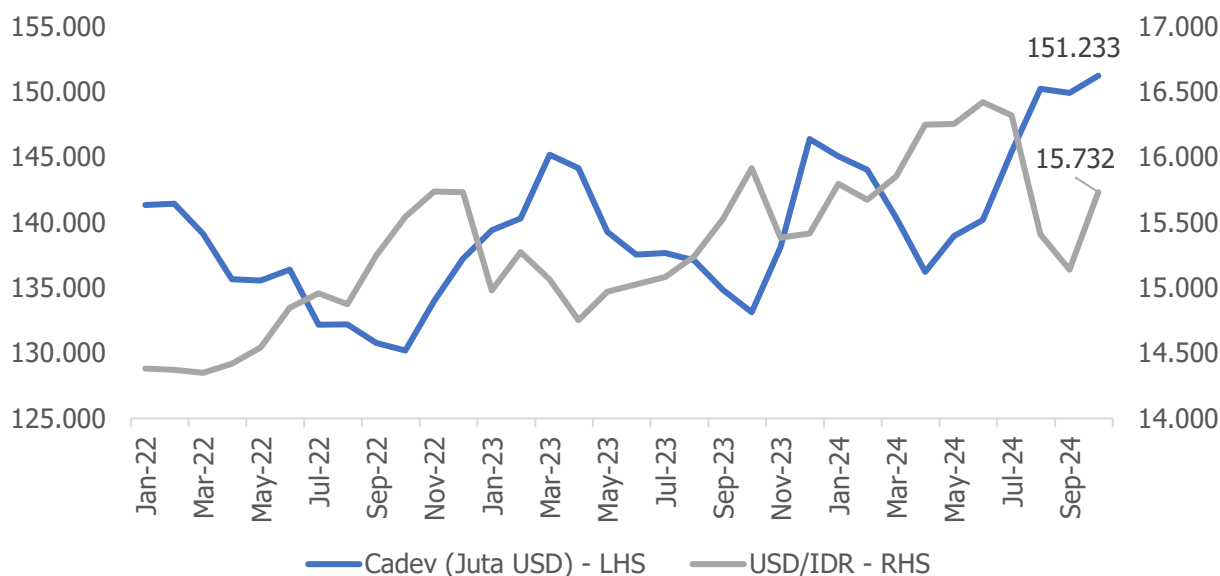
Gambar 1.23 Neraca Investasi Modal (Juta USD)



Sumber: Bank Indonesia (2024)

Surplus pada NPI memberikan dampak positif terhadap cadangan devisa Indonesia. Menguatnya cadangan devisa akan membantu stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun, fenomena yang terjadi adalah cadangan devisa Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan tetapi rupiah terus melanjutkan pelemahan. Hal ini mengindikasikan adanya sentimen pasar yang lebih signifikan, sehingga menekan nilai tukar rupiah. Utamanya disebabkan oleh sentimen pasar dimana akan terjadi pelambatan penurunan suku bunga the Fed pada tahun 2025 mendatang sehingga instrumen investasi di AS menjadi lebih menarik dan mendorong investor untuk kembali menempatkan dana di AS. Kedepannya, akan menjadi tantangan bagi Bank Sentral Indonesia dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Arah kebijakan Bank Indonesia saat ini dan kedepannya terlihat akan fokus pada stabilisasi nilai yang terlihat dari tertahannya penurunan suku bunga acuan. Surplus neraca perdagangan yang berlanjut merupakan sinyal positif bagi ketahanan eksternal Indonesia. Capaian ini turut membantu bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terlebih lagi, kondisi nilai tukar rupiah yang saat ini mendapatkan tekanan sentimen.

Gambar 1.24 Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah

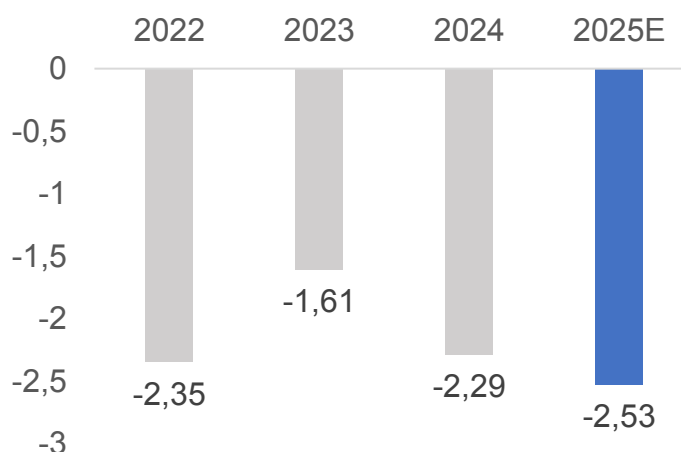


Sumber: Bank Indonesia (2024)

1.2.4 Fiskal 2025

Pemerintah Indonesia menargetkan defisit fiskal tahun 2025 sebesar 2,53%, masih di bawah ketentuan defisit 3%. Dalam rancangan APBN (RAPBN), target penerimaan negara sebesar Rp2.996,9 triliun atau naik sebesar 6,9% (yoy). Sedangkan, target belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, maka dari diproyeksikan akan terjadi defisit sebesar Rp616,2 triliun.

Gambar 1.25 Defisit Fiskal (%)



Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Target penerimaan negara dalam APBN 2025 terdiri dari penerimaan pajak dan non pajak. Penerimaan perpajakan 2025 terdiri dari Pajak (Rp2.189,3 Triliun) dan Kepabeanan & Cukai (Rp301,6 Triliun). Penerimaan terbesar pada perpajakan diperkirakan terbesar berasal dari PPh sebesar 55,2% lalu PPN & PPnBM sebesar

43,2%. Sedangkan kelompok Kepabebean dan Cukai di sumbangkan terbesar dari Penerimaan cukai, sebesar 81%, didorong oleh pengawasan dan kebijakan khusus terkait Barang Kena Cukai (BKC) dan MBDK. Sementara itu, bea masuk dan bea keluar masing-masing menyumbang 17,5% dan 1,5%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp505,4 Triliun pada tahun 2025. sumber utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia pada tahun 2025 sebagai berikut. *Pertama*, pendapatan dari sumber daya alam diperkirakan mencapai Rp121 Triliun, dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi serta optimalisasi *lifting* migas. *Kedua*, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan diestimasi sebesar Rp86 Triliun, didukung oleh pengelolaan dan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan kinerja keuangan. *Ketiga*, PNBP lainnya sebesar Rp123,5 Triliun, yang meliputi penjualan hasil tambang dan pengelolaan aset negara melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan. *Keempat*, pendapatan dari Badan Layanan Umum diperkirakan mencapai Rp77,9 Triliun, terutama dari sektor sawit dan layanan antar-BLU.

Rancangan belanja pemerintah tahun 2025 naik 6,9% (yoy) menjadi 2.996,9 triliun, berfokus pada ketahanan ekonomi domestik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari besarnya porsi anggaran belanja perlindungan sosial dan subsidi setelah belanja pendidikan yang termasuk *mandatory spending* pemerintah.

Berdasarkan RAPBN 2025, alokasi perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp504,7 T atau tumbuh 4% dari Outlook 2024. Anggaran ini akan dioptimalkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Selain itu, perlinsos diharapkan bisa mengamankan daya beli masyarakat rentan terhadap risiko guncangan ekonomi. Kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2025 diantaranya akan diarahkan untuk PKH, kartu sembako, dan subsidi lainnya untuk masyarakat. Namun, efektivitas perlinsos sebagai bantalan sosial bagi masyarakat bawah sangat bergantung dengan desain kebijakan dalam memberikan bantuan.

Pada RAPBN 2025, komponen subsidi dan kompensasi energi dan non energi meningkat secara signifikan. Tercatat, subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2025 sebesar Rp394,3 Triliun, naik 17,8% dari tahun lalu. Adapun alokasi subsidi non energi mengalami peningkatan yang paling signifikan yaitu sebesar 35,5% (yoy) menjadi Rp131,3 Triliun. Peningkatan subsidi non energi ini meningkat untuk mendukung beragam program pemerintah baru seperti program satu juta rumah. Dukungan untuk satu juta rumah melalui subsidi bunga bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Subsidi non energi ini juga dialokasikan untuk subsidi pupuk dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, kapasitas fiskal tahun 2025 berpotensi dibatasi oleh utang jatuh tempo dan pembayaran bunga di tahun tersebut. Pembayaran bunga di tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp552,9 Triliun terdiri dari Rp497,6 Triliun bunga dari utang domestik dan Rp55,2 Triliun dari bunga utang luar negeri. Angka ini meningkat 10,8% dari Outlook

2024. Selain bunga utang, pemerintah juga perlu membayar pokok utang yang jatuh tempo pada 2025 yang mencapai Rp800,3 Triliun, terdiri dari Rp705,5 Triliun dari SBN dan Rp94,8 Triliun dari pinjaman. Angka ini menaik signifikan dari tahun 2024 dimana utang jatuh tempo sebesar Rp434,3 Triliun. Oleh karenanya, kenaikan yang signifikan pada pembayaran bunga utang dan pokok utang menjadi tantangan pemerintah kedepan.

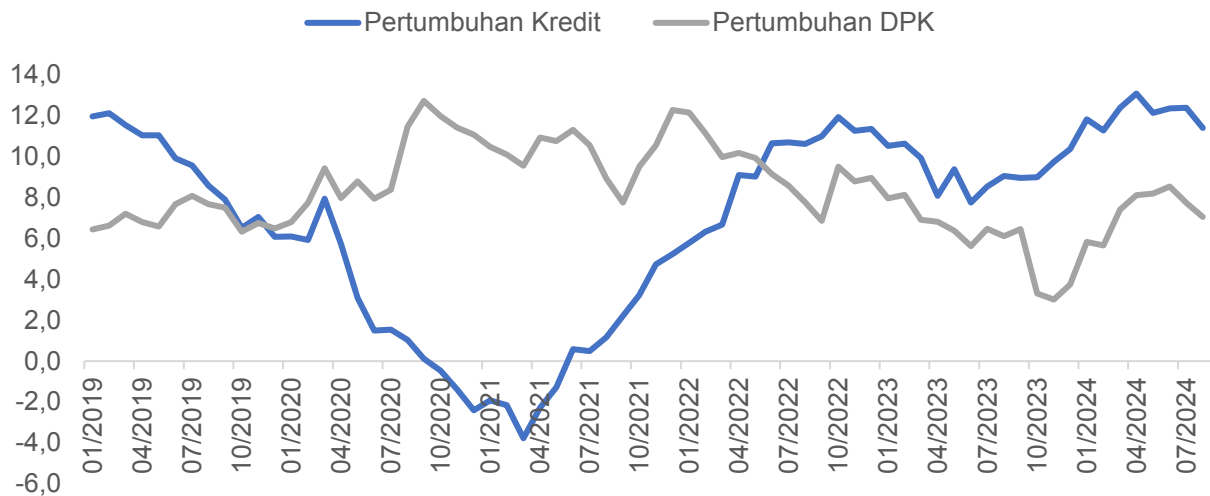
Meskipun rasio utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah 60% dan relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan yang sama, penerimaan pajak relatif terhadap PDB menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan rasio pajak ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi tidak diiringi oleh peningkatan kolektibilitas pajak, yang menyebabkan penerimaan pajak cenderung menurun. Padahal, penerimaan pajak merupakan instrumen penting untuk membayar pokok dan bunga utang pemerintah.

Jika dihitung rasio antara utang jatuh tempo dan bunga utang tahun 2025 terhadap potensi penerimaan pajak tahun 2025, didapatkan angka 54%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal akan terbatas oleh kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan utang yang *prudent* untuk memastikan bahwa utang tambahan tidak digunakan hanya untuk menutupi utang saat ini, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, peningkatan penerimaan pemerintah sangat diperlukan untuk memperluas ruang fiskal Indonesia, sehingga *multiplier effect* yang diberikan dari belanja pemerintah akan semakin besar dan berdampak.

1.3 KINERJA PERBANKAN

Sepanjang tahun 2024, sektor perbankan Indonesia mencatatkan kinerja yang solid meskipun perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga. Pertumbuhan penyaluran kredit mencapai dua digit. Memasuki tahun 2025, sektor perbankan diproyeksikan tetap tangguh, meskipun likuiditas diperkirakan masih menjadi isu utama. Hal ini terkait dengan kondisi domestik dan global. Dari sisi domestik, fenomena makan tabungan 'mantab' diperkirakan bertahan melihat kondisi kualitas pasar tenaga kerja yang menurun serta menurunnya pendapatan kelas menuju menengah. Dari sisi global, potensi melambatnya penurunan suku bunga The Fed dan fokus kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan pada stabilitas nilai tukar rupiah sehingga akan mempengaruhi ketersediaan likuiditas khususnya valas di perbankan.

Gambar 1.26 Pertumbuhan Kredit dan DPK (%)



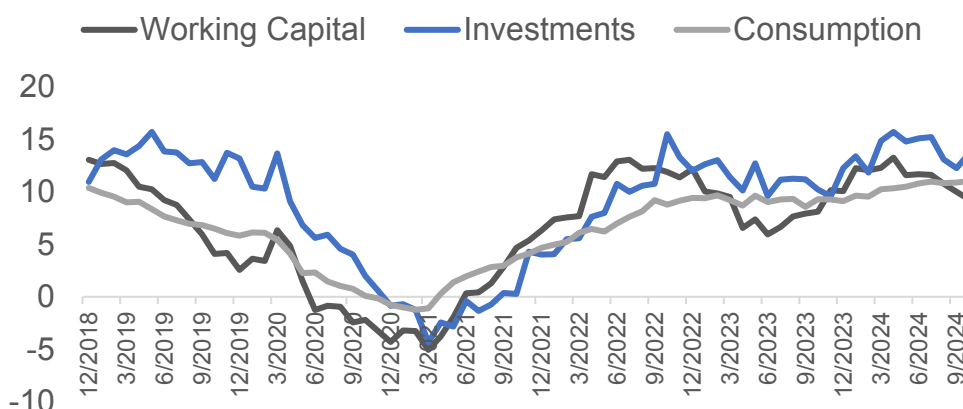
Sumber: CEIC (2024)

1.3.1 Kredit Perbankan

Penyaluran kredit perbankan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan kredit yang selalu double digit. Pada Oktober 2024, kredit tumbuh sebesar 10,9% (yoy), lebih tinggi dari capaian 9% pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini tidak lepas dari tren penurunan rasio kredit bermasalah (NPL) dari 2.3% pada awal tahun menjadi 2.2% per Oktober 2024, yang mencerminkan peningkatan kualitas kredit secara keseluruhan.

Berdasarkan jenis kredit, pertumbuhan tertinggi adalah kredit investasi yaitu sebesar 13,6% (yoy) per Oktober 2024. Kondisi ini sejalan dengan NPL pada kredit investasi yang terendah dibandingkan kredit lainnya. Tingginya pertumbuhan kredit investasi menandakan bahwa terdapatnya sentimen positif bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis.

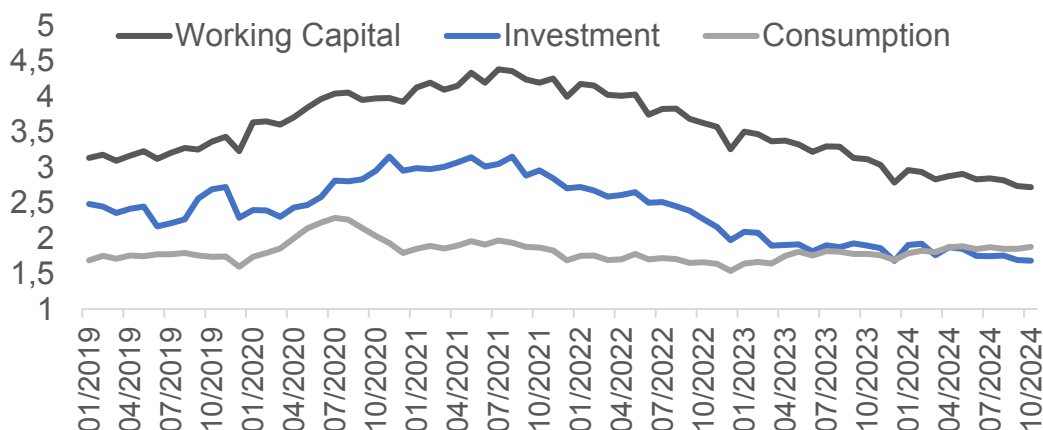
Gambar 1.27 Pertumbuhan Kredit Jenis (% , yoy)



Sumber: CEIC (2024)

Secara sektoral, pertumbuhan kredit yang paling menonjol terjadi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, dengan lonjakan sebesar 47,2% (yoy). Kenaikan ini menggarisbawahi peran pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 melalui pembangunan infrastruktur publik yang masif dan penyaluran bantuan sosial untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Gambar 1.28 NPL Jenis (%)



Sumber: CEIC (2024)

Sektor pertambangan mencatat pertumbuhan signifikan hingga 25,7% (yoy) per Oktober 2024, menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan sejalan dengan karakteristik sektor ini yang padat modal. Terdapat dua determinan utama yang mendorong permintaan kredit di sektor pertambangan, pertama kenaikan sejumlah harga SDA sehingga menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk meningkatkan aktivitas ekstraktif. Kedua, meningkatnya kebutuhan pembiayaan akibat program hilirisasi sumber daya alam yang menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun belakang.

Tidak hanya kedua sektor di atas, sektor-sektor yang mencatatkan pertumbuhan kredit tinggi lainnya juga berasal dari sektor yang bersifat padat modal. Sektor – sektor tersebut ialah intermediasi keuangan, transportasi, pergudangan, dan komunikasi, serta penyediaan listrik, gas, dan air bersih. Sektor-sektor ini menunjukkan pertumbuhan kredit yang signifikan, bahkan mencapai tingkat dua digit.

Tabel 1.6 Pertumbuhan Kredit Sektoral (%yoy)

Pertumbuhan Kredit Sektoral (% yoy)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Aug-24	Sep-24	Oct-24
Agricultures, Hunting and Forestry	29.75	24.4	19.9	20.0	11.3	11.8	11.8	4.2	4.2	7.8	10.3	8.6	7.1	7.8	7.6
Fisher	11.29	16.4	20.5	14.9	7.2	18.9	7.7	16.3	13.6	16.6	5.6	5.4	0.3	-1.6	-1.7
Mining and Quarrying	18.71	21.7	11.8	4.6	6.6	10.1	21.4	2.8	7.2	23.4	54.3	22.4	25.8	26.7	25.7
Processing Industry	29.37	29.6	14.3	15.1	2.9	5.4	9.1	3.6	4.1	6.4	12.2	4.7	8.2	7.2	7.5
Electricity, Gas and Water	28.87	34.6	2.1	22.6	36.2	7.9	16.5	16.5	14.8	5.4	1.6	13.3	31.8	16.0	23.8
Construction	27.22	21.0	26.9	17.4	24.2	20.6	22.1	14.6	3.9	1.0	4.3	0.4	0.0	0.8	-0.1
Wholesale and Retail Trade	33.21	28.9	11.3	10.6	6.2	5.2	10.2	3.1	6.3	3.4	7.1	9.1	6.9	8.6	8.3
Accomodation, Eating & Drinking	46.72	32.9	24.1	16.7	8.8	4.8	1.9	10.1	5.8	3.9	2.4	5.8	6.5	6.2	6.8
Transp, Warehousing & Communication	24.77	33.7	5.1	3.3	3.2	6.3	19.0	13.6	7.8	15.0	2.2	19.3	20.4	17.5	16.1
Financial Intermediaries	18.80	21.0	9.9	0.9	17.8	10.4	14.1	2.2	13.4	3.9	36.1	20.9	28.3	24.1	24.3
Real Estate, Business, Ownership	29.58	28.3	14.3	11.7	13.7	5.7	11.8	8.5	3.5	2.1	18.6	13.2	8.3	6.7	5.8

Sumber: CEIC (2024)

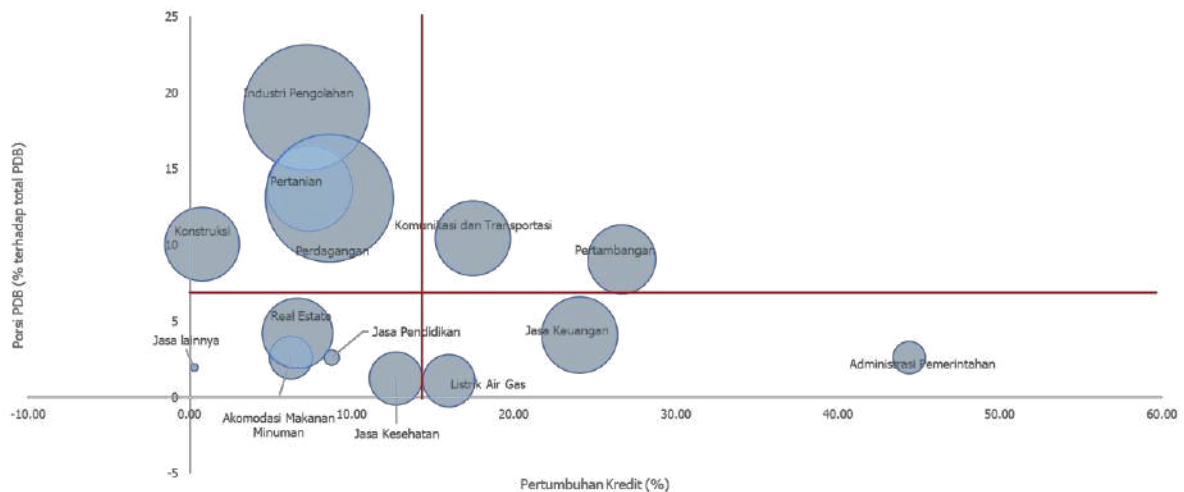
Terdapat pola yang menarik dalam perkembangan kredit di Indonesia, sektor-sektor dengan pertumbuhan kredit yang tinggi, seperti penyediaan listrik, gas, dan air bersih, administrasi pemerintahan, serta pertambangan, masih memiliki pangsa kredit yang relatif rendah dalam keseluruhan portofolio kredit perbankan. Sebaliknya, sektor-sektor yang selama ini mendominasi pangsa kredit, seperti industri pengolahan dan pertanian, justru mengalami tren pertumbuhan kredit yang melambat.

Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran struktur ekonomi dalam distribusi kredit di Indonesia. Penyaluran kredit secara bertahap mulai bergeser ke sektor-sektor yang sebelumnya memiliki pangsa kredit kecil, sehingga meningkatkan kontribusi mereka terhadap total portofolio kredit. Pergeseran ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut sedang mengalami peningkatan permintaan yang signifikan, sehingga memacu pertumbuhan kredit yang lebih tinggi.

Lebih jauh lagi, perubahan ini dapat dilihat sebagai indikasi transformasi ekonomi nasional. Sektor-sektor yang sebelumnya kurang mendapat perhatian kini menjadi lebih relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, peningkatan alokasi kredit ke sektor transportasi dan komunikasi menunjukkan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur layaknya jalan tol dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebutuhan informasi dan telekomunikasi yang semakin krusial bagi masyarakat Indonesia turut mendorong kinerja sektor ini.

Sementara itu pertumbuhan kredit di sektor listrik, gas, dan air bersih mencerminkan kebutuhan Listrik yang meningkat untuk mendukung industrialisasi dan urbanisasi.

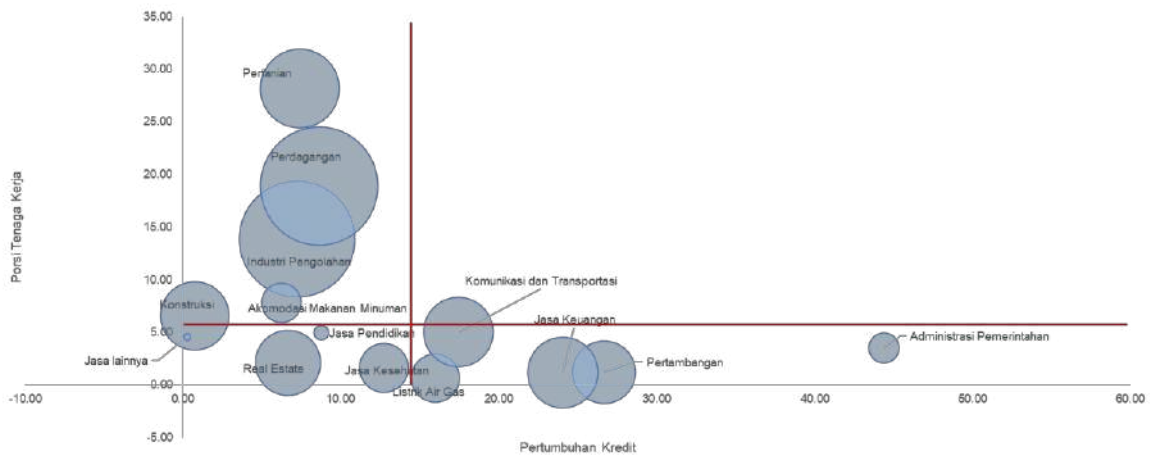
Gambar 1.29 Porsi PDB serta Porsi dan Pertumbuhan Kredit (%)



Keterangan: Ukuran bubble = porsi kredit sektor tersebut terhadap total kredit (%)
Sumber: CEIC (2024)

Di sisi lain, sektor-sektor seperti manufaktur dan pertanian, meskipun memiliki pangsa kredit yang besar, menunjukkan pertumbuhan kredit yang relatif lambat. Sebagai sektor padat karya, manufaktur dan pertanian cenderung menghadapi tantangan struktural, seperti efisiensi modal yang lebih rendah dan ketergantungan pada faktor eksternal. Di sektor pertanian, risiko musiman, ketidakpastian cuaca, dan fluktuasi harga komoditas menjadi faktor yang memengaruhi kebutuhan dan penyerapan kredit. Sementara itu, sektor manufaktur menghadapi tantangan berupa kompetisi global yang semakin ketat sehingga semakin menekan margin keuntungan. Selain itu, kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis menjadi tantangan tambahan bagi perusahaan manufaktur yang *export oriented*. Hal ini membuat sektor ini cenderung lebih konservatif dalam mengambil pinjaman untuk ekspansi.

Gambar 1.30 Porsi Tenaga Kerja Serta Porsi dan Pertumbuhan Kredit (%)



Keterangan: Ukuran bubble = porsi kredit sektor tersebut terhadap total kredit (%)

Sumber: CEIC (2024)

Pola ini mencerminkan adanya transformasi kebutuhan pembiayaan di sektor ekonomi Indonesia. Sektor-sektor yang sebelumnya memiliki pangsa kredit rendah, seperti transportasi, pergudangan, komunikasi, serta listrik, gas, dan air, kini menunjukkan pertumbuhan kredit yang signifikan. Tingginya permintaan di sektor-sektor ini menjadi indikator penting dari dinamika ekonomi yang berubah, di mana kebutuhan akan infrastruktur dan layanan modern semakin meningkat. Transformasi ini membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional, di sisi lain juga diperlukan pendekatan yang inklusif untuk mendorong perkembangan sektor – sektor padat karya layaknya pertanian dan manufaktur karena sektor ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia saat ini, khususnya penyerapan tenaga kerja.

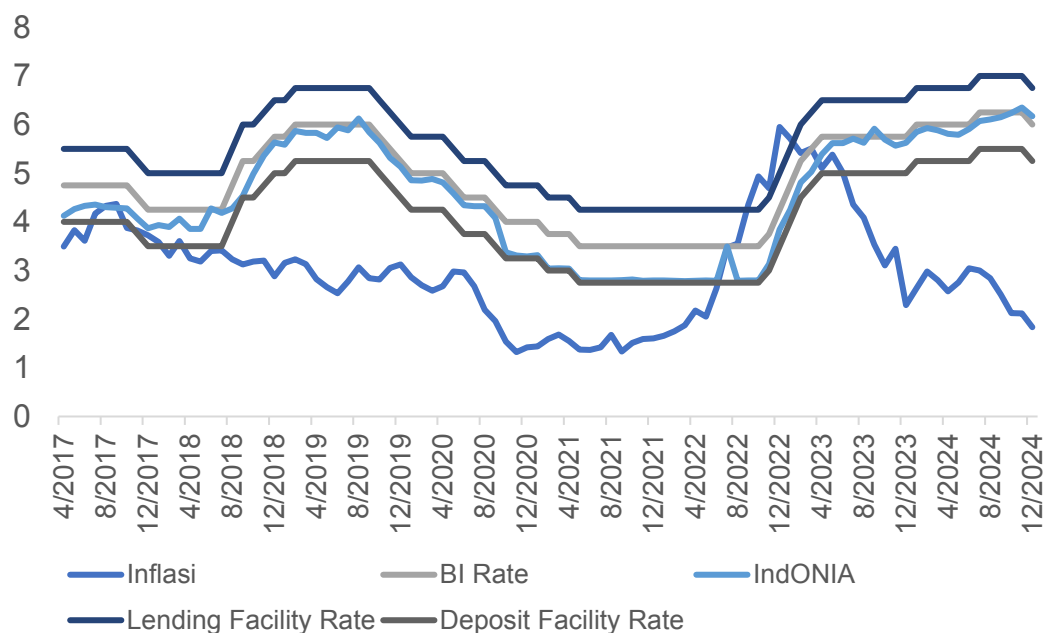
1.3.2 Perkembangan Suku Bunga

Pada Desember 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,00%, lending rate facility 6,75%, dan deposit facility 5,25%. Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan meski inflasi telah rendah mencerminkan fokus kebijakan moneter yang bertujuan memperkuat faktor non-inflasi. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pergerakan BI Rate selama 2023-2024 tidak mengikuti pola inflasi domestik. Dalam teori, suku bunga acuan biasanya disesuaikan secara otomatis untuk mengendalikan inflasi dan hal ini juga sesuai dengan mandat utama BI sebagai otoritas moneter Indonesia.

Namun, terlihat adanya deviasi yang signifikan antara BI Rate dan inflasi terutama pada dua tahun belakangan. Ketika inflasi mengalami penurunan tajam, BI Rate justru tetap berada di tingkat yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain, seperti stabilitas nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap Dolar AS (USD) dan dampak dari

kenaikan suku bunga acuan The Fed, memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan kebijakan moneter BI dibandingkan tekanan inflasi domestik.

Gambar 1.31 Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Indonesia



Sumber: CEIC (2024)

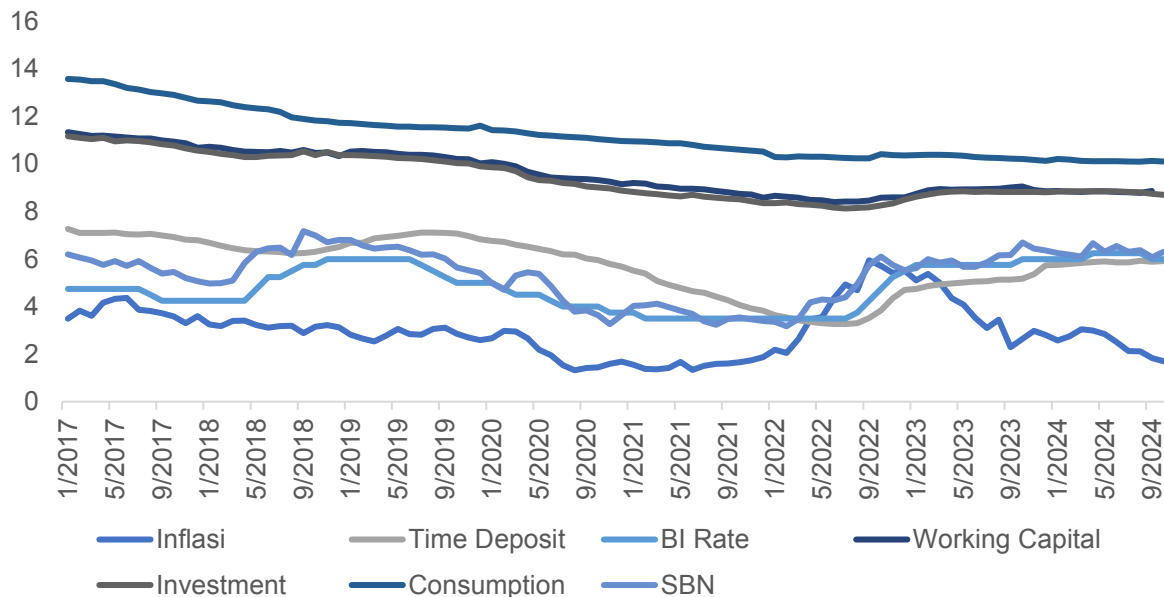
Di AS, The Federal Reserve (The Fed) menutup tahun 2024 dengan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,25–4,50%. Kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi pasar keuangan Indonesia, yang dapat membantu stabilisasi nilai tukar rupiah. Tren sebelumnya menunjukkan bahwa pemangkasan suku bunga The Fed telah meningkatkan arus masuk investasi portofolio asing ke Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, membantu memperkuat rupiah. Namun, terdapat indikasi bahwa laju pemangkasan suku bunga The Fed akan melambat pada tahun 2025. Hal ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan ketidakpastian dalam stabilitas nilai tukar rupiah kedepannya.

Kinerja pasar tenaga kerja AS yang masih solid, dengan tingkat pengangguran yang rendah, serta antisipasi terhadap kebijakan proteksionis dan pemotongan pajak oleh Trump, dapat mendorong inflasi. Kondisi ini berpotensi menghambat penurunan lebih lanjut pada suku bunga The Fed. Dalam konteks ini, selisih suku bunga acuan antara BI Rate dengan inflasi dan The Fed Rate dapat dijustifikasi agar selisih ini dapat digunakan sebagai amunisi untuk menahan arus modal keluar dari Indonesia dan menjaga stabilitas rupiah.

Fokus kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terlihat melalui peluncuran Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen ini dirancang untuk menarik aliran dana asing melalui imbal hasil yang kompetitif. SRBI menawarkan tingkat imbal hasil yang tinggi, mencapai 7%, jauh di atas suku bunga surat utang negara maupun deposito perbankan. SRBI telah sukses menarik

minat investor asing, dengan mencatat aliran masuk dana asing sebesar Rp167 Triliun di tahun 2024.

Gambar 1.32 Suku Bunga



Sumber: CEIC (2024)

Namun, keberadaan SRBI juga memunculkan dinamika baru dalam persaingan dana antara SRBI, surat utang negara, dan deposito perbankan. Tingginya imbal hasil SRBI dan surat utang negara menciptakan daya tarik lebih besar bagi investor dibandingkan deposito perbankan. Hal ini menimbulkan tantangan signifikan bagi sektor perbankan dalam mengumpulkan dana pihak ketiga, khususnya dana dalam bentuk valuta asing. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan dana pihak ketiga dalam mata uang asing tercatat melambat dari 9% (yoy) di awal tahun 2024 menjadi 7% (yoy) di November 2024, menandakan bahwa bank menghadapi kesulitan untuk bersaing dengan tingginya suku bunga instrumen pemerintah dan BI.

Kondisi ini menunjukkan adanya *trade-off* dalam kebijakan moneter-fiskal dengan biaya murah perbankan. Di satu sisi, tingginya imbal hasil SRBI mampu memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dengan menarik investasi asing. Namun di sisi lain, hal ini memberikan tekanan tambahan pada sektor perbankan dalam menghimpun dana pihak ketiga dan likuiditas perbankan, yang pada akhirnya juga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dan komunikasi kebijakan yang jelas, terkait target dan prioritas yang mau dicapai.

1.4 OUTLOOK 2025

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum stabil di kisaran 5%, meskipun terdapat variasi pandangan antara optimisme dan pesimisme. Beberapa pihak memprediksi angka sedikit lebih tinggi (>5%) yang mencerminkan keyakinan pada stabilitas ekonomi nasional, sementara yang lain memperkirakan pertumbuhan

di bawah 5%, menunjukkan pesimisme. Tekanan eksternal, terutama dari pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS, menjadi sorotan utama. Salah satu proyeksi menunjukkan kemungkinan IDR/USD melewati 16.800 pada akhir 2025, dipicu oleh kebijakan pro-dolar Amerika Serikat yang akan berdampak negatif pada rupiah. Situasi ini akan meningkatkan biaya impor, membebani perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing, dan memperbesar risiko di sektor perbankan, terutama terkait *non-performing loans* (NPL) dari debitur yang menghadapi tekanan kurs.

Perbankan nasional mesti memberikan perhatian lebih atas risiko kredit, tekanan pada likuiditas, dan potensi fluktuasi pertumbuhan deposito akibat ketidakpastian pasar. Untuk menghadapi tantangan ini, bank perlu memperkuat manajemen risiko, terutama terhadap eksposur valas, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Langkah lainnya mencakup diversifikasi portofolio pinjaman, meningkatkan cadangan risiko kredit, dan menarik lebih banyak dana murah (CASA) guna menjaga stabilitas likuiditas dan profitabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Tabel 1.7 Proyeksi Indikator Ekonomi 2025

Indikator	Perbanas	Mandiri	BCA	BRI	UOB	Permata	BI
Pertumbuhan Ekonomi	5,0% ± 0,1%	5.13	4.90%	4,89% – 5,19%	5,30%	5,11%	5,20%
Inflasi	2,0% ± 0,5%	2.38	2.50%	2,65% – 3,03%	2,80%	2,33%	2,5%±1%
Nilai Tukar (Rp/USD) (End of Period)	16.300	15.753	16.887	15.910 – 16.252	-	16.502	15.300 – 15.700
Pertumbuhan Kredit (End of Period)	10,6% ± 1,0%	-	-	10,48% - 11,42%	-	10% - 11%	11% - 13%
Pertumbuhan Deposit (End of Period)	7,70%	-	-	7,40% – 8,28%	-	9% - 10%	-

Sumber: OCE PERBANAS, Mandiri, BCA, BRI, UOB, Permata, BI (2024)

Kredit ke sektor "Pertambangan & Penggalian" diperkirakan tetap dominan dan tumbuh dua digit sebesar 33% pada 2025. Sektor "Jasa Keuangan & Asuransi", "Transportasi & Pergudangan", "Informasi dan Komunikasi", dan "Pengadaan Listrik, Gas, & Air" diproyeksikan juga akan pertumbuhan dua digit, sementara sektor-sektor diproyeksikan memiliki pertumbuhan lebih kecil, di bawah 10%, kecuali konstruksi yang diprediksi akan *struggling* pada 2025. Perbankan perlu menyesuaikan strategi alokasi kredit dengan tren ini. Bank perlu lebih aktif mendukung sektor-sektor yang sedang berkembang, sambil tetap memitigasi risiko yang ada. Diversifikasi portofolio menjadi penting untuk mengurangi eksposur terhadap sektor-sektor dengan potensi perlambatan dan bukan menjadi prioritas Pemerintah.

Tabel 1.8 Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025

Sektor	2022	2023	2024F	2025F
Pertambangan & Penggalian	51,3%	25,0%	32,2%	33,0%
Jasa Keuangan & Asuransi	35,3%	20,4%	25,1%	23,6%
Transportasi & Pergudangan	5,9%	26,0%	26,6%	23,3%
Informasi & Komunikasi	10,8%	7,6%	8,7%	10,1%
Pengadaan Listrik, Gas, & Air	1,2%	13,4%	24,3%	22,6%
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor	7,4%	9,1%	8,8%	8,9%
Industri Pengolahan	12,5%	4,7%	5,1%	5,2%
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	10,4%	8,5%	7,6%	8,2%
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,0%	5,8%	6,4%	6,7%
Konstruksi	4,3%	-0,4%	0,9%	-1,2%

Sumber: OCE PERBANAS (2024)

Kajian Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas 2024-2029

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama satu dekade tahun belakangan, jumlah angkatan kerja Indonesia terus meningkat dari 122 juta orang pada 2015 menjadi 152 juta pada 2024 atau bertambah 3,3 juta orang setiap tahunnya. Peningkatan penawaran sumber daya tenaga kerja ini diimbangi dengan persentase penduduk yang terserap di pasar tenaga kerja dengan tren yang positif dan terus meningkat. Alhasil tingkat kesempatan kerja per 2024 mampu dicapai sebesar 95,1%.

Meski secara kuantitas lapangan kerja tumbuh positif, kualitas lapangan kerja yang tersedia masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi itu ditandai dengan meningkatnya porsi penduduk bekerja tidak penuh dan dominasi pekerjaan informal. Penduduk bekerja tidak penuh mencapai 31,9% dari total tenaga kerja dan pekerjaan informal masih menyumbang 58% dari total lapangan kerja di 2024.

Penciptaan lapangan kerja formal di masa normal (ketika tidak terjadi *shock* pandemi COVID-19 di 2019-2020) sebesar 4,14% sebenarnya mampu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja informal yang hanya 1,4%. Namun pandemi COVID-19 telah membalikkan keadaan. Lapangan kerja informal bertambah 17,5 juta orang sepanjang 2015-2024 berbanding ketersediaan total lapangan kerja formal yang hanya bertambah 12,3 juta orang.

Pekerjaan formal yang didominasi buruh/pekerja/karyawan cenderung stagnan, sedangkan wirausaha mapan (berusaha dibantu buruh tetap/dibayar) menunjukkan tren yang menurun. Di sisi lain, tren masyarakat yang bekerja sebagai wirausaha mandiri atau pekerja mandiri terus meningkat. Porsi pekerja keluarga/tidak dibayar terhadap tenaga kerja agregat juga menunjukkan peningkatan.

Meski sempat terdampak pandemi, gaji/upah pekerja formal dan pendapatan bersih pekerja informal secara umum terus meningkat. Namun demikian, selisih (gap) penghasilan pekerja formal dan informal naik hampir dua kali lipat yang menunjukkan ketimpangan kesejahteraan di antara keduanya kian melebar.

Lapangan kerja formal banyak diisi oleh penduduk yang bekerja sebagai tenaga profesional dan manajerial dengan keahlian tinggi-menengah. Sebaliknya, lapangan kerja informal diisi oleh penduduk bekerja sebagai tenaga usaha penjualan dan tenaga usaha di bidang pertanian (dalam arti luas) yang umumnya tidak memerlukan tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi. Namun, porsi pekerja formal pada tenaga profesional dan manajer secara konsisten mengalami penurunan dan mendorong kenaikan porsi pada pekerja informal, khususnya pada profesi manajerial.

Ditinjau dari segi wilayah, Pulau Jawa masih menjadi motor penciptaan lapangan kerja. Namun mayoritas pekerjaan yang di ciptakan merupakan pekerjaan informal. Bahkan, Daerah Khusus Jakarta berkontribusi 150 % terhadap serapan tenaga kerja informal. Dari 34 provinsi, hanya 10 provinsi yang memiliki porsi penciptaan lapangan kerja formal lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja informal yang tercipta dan semuanya berada di luar Pulau Jawa.

Sektor yang berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja sepuluh tahun terakhir adalah akomodasi dan pengadaan makan minum (20,2%); perdagangan besar dan eceran (20,1%); industri pengolahan (15%); dan pertanian (10,1%). Sayangnya, lapangan kerja yang tersedia dari keempat sektor itu mayoritas merupakan pekerjaan informal. Bahkan, lapangan kerja industri pengolahan yang tercipta lebih banyak dikontribusikan oleh sektor manufaktur informal.

Berdasarkan analisis deskriptif sepanjang 2015-2024 terdapat sembilan sektor strategis yang perlu menjadi perhatian karena selain berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja agregat, juga berpotensi mendorong transisi pekerjaan informal ke formal antara lain: (1) penyediaan akomodasi dan makan-minum; (2) konstruksi; (3) jasa pendidikan; (4) pertambangan; (5) informasi dan komunikasi; (6) transportasi dan pergudangan; (7) perdagangan; (8) industri pengolahan dan (9) pertanian (arti luas).

Pembiayaan kredit modal kerja dan investasi memiliki peran dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Pada dasarnya, dukungan pembiayaan kredit usaha tersebut telah mengalir ke sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya) seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan konstruksi. Selain itu, penetrasi kredit ke sektor ramah lingkungan, digital, dan hilirisasi juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Hasil analisis regresi panel menunjukkan variabel investasi dalam negeri (PMDN) per kapita, produktivitas, penduduk bekerja di sektor industri manufaktur dan sektor informasi-komunikasi, angkatan kerja usia muda dan angkatan kerja dewasa, serta angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja formal. Di sisi lain, variabel upah minimum, penduduk bekerja di sektor perdagangan, angkatan kerja usia pensiun, angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah serta *dummy* COVID-19 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap lapangan kerja informal.

Khusus pada variabel kredit, secara agregat maupun per jenis kredit (investasi, modal kerja, konsumsi) menunjukkan pengaruh negatif terhadap serapan tenaga kerja formal namun positif signifikan terhadap tenaga kerja informal. Hasil ini dapat diakibatkan adanya kebijakan pemerintah terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendorong penetrasi kredit banyak mengalir ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya bagi usaha mikro yang banyak diisi pengusaha tunggal.

Upaya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas dan layak harus komprehensif dan terintegrasi baik dari sisi penawaran, permintaan, maupun institusi/kelembagaan. Pada sisi penawaran, strategi difokuskan pada pengembangan keterampilan (*skills development*) dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan. Dari sisi permintaan, ketersediaan lapangan kerja formal berkualitas padat karya sangat ditentukan oleh kondisi/iklim investasi, struktur industri, biaya tenaga kerja, stabilitas regulasi, serta ekosistem kemitraan antara usaha besar

dengan UMKM. Perlu dilakukan replikasi secara masif skema ekosistem “*closed loop*” UMKM yang disesuaikan dengan karakteristik industri atau sektor terkait.

Pada sisi kelembagaan, ketersediaan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) dan peta kebutuhan tenaga kerja jangka menengah-panjang, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, insentif dan kebijakan untuk mempermudah akses jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan K3 dan standar kerja layak. Pada aspek ini, partisipasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memegang peran vital dalam mendorong transmisi kebijakan moneter dan jasa keuangan yang ramah terhadap lapangan kerja berkualitas.

2.1 PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki masa periode bonus demografi sejak tahun 2012 dan pada periode 2020-2030 diperkirakan berada pada fase jendela peluang (*window of opportunity*) sebelum mencapai puncaknya di tahun 2035. Data rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif menunjukkan pada tahun 2035 akan mencapai 49% dan pada tahun 2040 telah menembus 51,3% yang menandai fase penduduk berusia tua (*ageing population*). Kondisi tersebut menunjukkan betapa krusialnya momen lima tahun ke depan yang harus dimanfaatkan seoptimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Peran penduduk usia produktif dalam perekonomian berbanding lurus dengan nilai tambah kegiatan ekonomi yang diciptakan. Hasil kajian BPS (2022) menunjukkan bahwa provinsi dengan komposisi penduduk usia produktif yang besar cenderung memiliki nilai PDRB per kapita yang besar pula. Meski begitu, layaknya pisau bermata dua, melimpahnya modal manusia ini justru dapat menjadi bumerang apabila tidak dibarengi dengan upaya dan tindakan yang tepat. Dampaknya, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus dihantui fenomena jebakan negara berpenghasilan sedang (*middle income trap*) atau tua sebelum kaya.

Setidaknya terdapat tiga prasyarat penting yang menjadi pilar dalam pemanfaatan bonus demografi. Pertama, modalitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni baik dari segi pendidikan, keterampilan, perilaku, dan kesehatan yang akhirnya bermuara pada produktivitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak hanya mampu menyerap penawaran angkatan kerja, namun juga memberikan lingkungan kerja dan pendapatan yang layak. Ketiga, akumulasi aset atau tabungan yang dihasilkan oleh masyarakat ketika berada di usia produktif mampu membiayai kebutuhannya ketika tidak lagi bekerja atau pensiun dan memasuki masa tua.

Di antara ketiga pilar tersebut, ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu aspek terpenting yang perlu menjadi perhatian tanpa bermaksud mengecilkan peran dari pilar SDM dan akumulasi aset. Lapangan kerja merupakan pilar penghubung atau intermediasi mengingat tanpa adanya lapangan kerja sulit rasanya menyerap berlimpahnya modal SDM untuk mampu menghasilkan tabungan yang cukup dalam jangka panjang. Oleh sebab itu penciptaan lapangan kerja harus terus

didorong baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Lapangan kerja tidak hanya mampu menyerap penawaran angkatan kerja di pasar kerja tetapi juga dapat memberikan penghidupan yang layak bagi penduduk bekerja.

Begitu pentingnya agenda tersebut, Presiden Joko Widodo dengan Nawa Cita-nya selama satu dekade pemerintahan, menempatkan penyediaan lapangan kerja sebagai salah satu program prioritas Nasional. Pemerintah bahkan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law yang ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha dan masuknya investasi. Harapannya, kesempatan dan lapangan kerja terbuka luas sehingga pengangguran dapat terus ditekan.

Sungguhpun demikian, regulasi yang baru seumur jagung ini menuai banyak gugatan khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Perkembangan terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Cipta Kerja khususnya terkait klaster ketenagakerjaan. Perubahan regulasi ini tentu dapat berimplikasi lebih lanjut terhadap perkembangan penciptaan lapangan kerja ke depan karena sangat erat kaitannya dengan ceruk pekerja formal yang identik dengan lapangan kerja berkualitas.

Pemerintahan baru Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sejatinya juga menjadikan penyediaan lapangan kerja berkualitas sebagai salah satu program strategis yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Pada Asta Cita ketiga secara jelas disebutkan bahwa penyediaan pekerjaan yang layak merupakan bagian dari kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi elemen penting dalam menunjang keberlanjutan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

Namun, target penciptaan lapangan kerja berkualitas dan layak itu belum terpampang dengan jelas, baik pada Asta Cita maupun rancangan awal RPJMN 2025-2029. Adapun indikator terkait yang relevan dapat ditemukan pada UU No 59 tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pada UU RPJPN tersebut, terdapat indikator penciptaan lapangan kerja yang baik selain diukur dengan tingkat pengangguran sebagaimana biasanya, namun juga terdapat ukuran proporsi penciptaan lapangan kerja formal yang ditarget mencapai 80% di t 2045.

Data terkini menunjukkan proporsi pekerja formal pada Agustus 2024 mencapai 42%. Artinya, diperlukan peningkatan proporsi pekerja formal setidaknya 2% per tahun secara konsisten selama 20 tahun untuk mencapai target 80% di masa Indonesia Emas 2045 sebagaimana amanat RPJPN. Jika menggunakan perhitungan sederhana tersebut, maka di akhir pemerintahan kabinet Merah Putih proporsi pekerja formal dari total pekerja diharapkan berada di kisaran 52%. Oleh sebab itu perlu kiranya untuk melihat bagaimana dinamika penciptaan lapangan kerja dalam satu dekade terakhir sebagai upaya reflektif terhadap target yang ingin dicapai apakah realistis atau hanya utopis.

2.2 KILAS BALIK SATU DEKADE PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Gambaran penciptaan lapangan kerja setidaknya dapat dilihat dari pertumbuhan atau perubahan (delta) penduduk bekerja dari tahun ke tahun. Secara umum, data BPS menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir kinerja penciptaan lapangan kerja positif sekalipun terkena guncangan pandemi COVID-19. Pada 2015, angkatan kerja mencapai 122,3 juta orang kemudian menjadi 152,1 juta orang pada 2024 atau meningkat 29,7 juta orang (24,3%). Sementara itu, jumlah tenaga kerja bertambah dari 114,8 juta (2015) menjadi 144,6 juta orang (2024) atau terjadi lonjakan sebanyak 29,8 juta orang (26%).

Total penambahan jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada angkatan kerja yang tumbuh menunjukkan adanya surplus lapangan pekerjaan. Alhasil, jumlah pengangguran (neto) turun sekitar 95 ribu orang dari 7,56 juta orang (2015) menjadi 7,47 juta orang (2024) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) melandai dari 6,2% ke 4,9% pada periode yang sama. Seiring turunnya tingkat pengangguran, tingkat kesempatan kerja pun meningkat dari 93,8% (2015) menjadi 95,1% (2024).

Tabel 2.1 Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Tingkat Pengangguran 2015-2024 (juta orang)

Tahun	Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja	Pengangguran	TKK (%)	TPT (%)
2015	122,38	114,82	7,56	93,8%	6,2%
2016	125,44	118,41	7,03	94,4%	5,6%
2017	128,06	121,02	7,04	94,5%	5,5%
2018	131,01	124,00	7,00	94,7%	5,3%
2019	133,56	126,52	7,05	94,7%	5,3%
2020	138,22	128,45	9,77	92,9%	7,1%
2021	140,15	131,05	9,10	93,5%	6,5%
2022	143,72	135,30	8,43	94,1%	5,9%
2023	147,71	139,85	7,86	94,7%	5,3%
2024	152,11	144,64	7,47	95,1%	4,9%
Perubahan 2015-2024 (growth %)	29,72 (24,3%)	29,82 (26%)	-0,095 (-1,3%)	1,3%	-1,3%

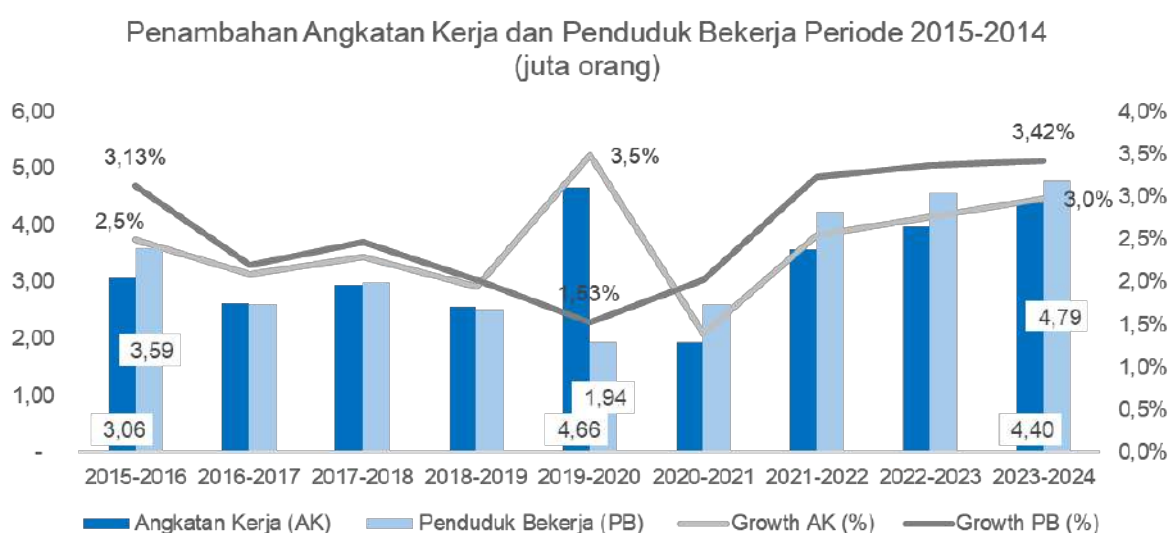
Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Jika dilihat pergerakan dinamika angkatan kerja, pertumbuhannya memang selalu berada di bawah pertumbuhan penduduk bekerja dalam satu dekade terakhir, kecuali pada saat awal pandemi COVID-19 sekitar tahun 2019-2020. Rata-rata pertumbuhan angkatan kerja sebanyak 3,3 juta orang atau tumbuh 2,45%. Di sisi lain, rata-rata tenaga kerja yang terserap di pasar kerja sedikit lebih banyak sebesar 3,31 juta orang

atau tumbuh 2,60%. Artinya penawaran sumber daya manusia di pasar kerja dapat dikompensasi dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih besar.

Gambaran tersebut, dalam perspektif politik, sekilas memang menunjukkan prestasi yang dapat dicatat era Kabinet Presiden Joko Widodo dalam mendorong penciptaan lapangan. Namun jika dilihat agak lebih rinci, akan terpampang bahwa penciptaan lapangan kerja tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kualitas yang baik. Meski secara umum lapangan kerja terus tercipta, porsi penduduk bekerja tidak penuh (mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu) masih cukup signifikan dan pertumbuhannya terus meningkat. Tren ini bahkan sudah dimulai sebelum adanya pandemi COVID-19.

Gambar 2.1 Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja



Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Pada 2015, penduduk yang bekerja tidak penuh sebesar 34,3 juta orang atau 29,9% dari total seluruh penduduk bekerja. Kemudian perlahan menanjak naik dan mencapai puncaknya ketika pandemi karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi. Seiring pemulihan ekonomi, penduduk bekerja tidak penuh ini sebenarnya semakin berkurang tetapi dalam dua tahun terakhir trennya kembali meningkat. Pada 2024, sebanyak 46,2 juta orang bekerja tidak penuh atau 31,9% dari total penduduk bekerja dengan pertumbuhan yang cukup tinggi mencapai 34,6% dalam sepuluh tahun terakhir.

Kelompok yang menjadi penyumbang terbesar pada kategori penduduk bekerja tidak penuh ini diisi oleh pekerja paruh waktu yang jumlahnya meningkat 24,6 juta orang pada 2015 menjadi 34,6 juta orang pada 2024. Dengan kata lain terjadi penambahan pekerja paruh waktu sebesar 10 juta orang atau rata-rata 1 juta orang per tahun pada

kelompok ini. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain.

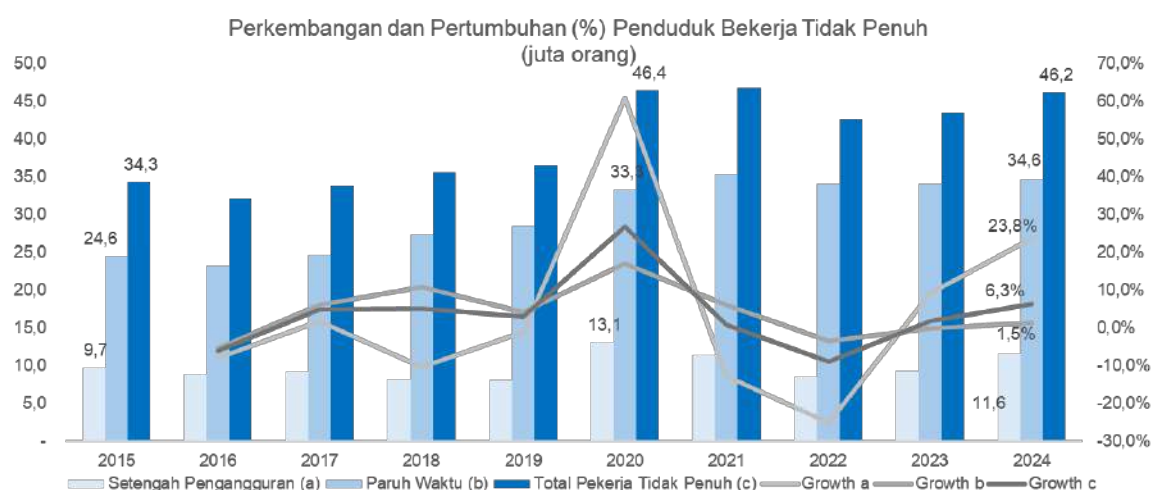
Tabel 2.2 Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Tingkat Pengangguran 2015-2024 (juta orang)

Tahun	Setengah Pengangguran (a) juta orang	Pekerja Paruh Waktu (b) juta orang	Pekerja Tidak Penuh (c=a+b) juta orang	Share (a)/Penduduk Bekerja	Share (b)/Penduduk Bekerja	Share (c)/Penduduk Bekerja
2015	9,7	24,6	34,3	8,5%	21,4%	29,9%
2019	8,1	28,5	36,6	6,4%	22,5%	29,0%
2020 (Covid-19)	13,1	33,3	46,4	10,2%	26,0%	36,1%
2024	11,6	34,6	46,2	8,0%	23,9%	31,9%
Perubahan 2015-2024	18,7%	40,9%	34,6%	-0,5%	2,5%	2,1%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Pertumbuhan yang mencapai 40,9% dari kelompok pekerja paruh waktu dalam satu dekade terakhir perlu dilihat secara hati-hati. Pada satu sisi dapat menunjukkan perubahan pola kerja yang lebih fleksibel karena pengaruh teknologi dan digitalisasi. Di sisi yang lain juga dapat menunjukkan stagnasi keterampilan sehingga dirasa tidak mungkin melakukan pekerjaan lain di luar dari keahliannya. Pekerja paruh waktu memiliki dampak positif jika pendapatan atau upah yang dihasilkan, sama atau melebihi pendapatan/upah penduduk dengan minimal jam kerja normal (< 35 jam seminggu). Oleh karena itu, fenomena ini perlu ditinjau secara lebih cermat.

Gambar 2.2 Perkembangan Penduduk Bekerja Tidak Penuh 2015-2024



Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Sementara itu, kelompok setengah pengangguran meski jumlahnya hanya sepertiga dari pekerja paruh waktu, trennya terus menunjukkan peningkatan. Setengah

pengangguran adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan. Pada 2015 terdapat 9,7 juta orang setengah pengangguran kemudian melonjak 18,7% menjadi 11,6 juta orang yang berada di kelompok ini di tahun 2024. Proporsi terhadap keseluruhan penduduk bekerja hanya turun tipis namun perlu menjadi perhatian karena dalam dua tahun terakhir pertumbuhannya mengalami lonjakan yang cukup tinggi dengan pola yang menyerupai ketika terjadi guncangan pandemi COVID-19.

2.2.1 Potret Penciptaan Lapangan Kerja: Apakah Berkualitas atau Tidak?

Kualitas lapangan kerja setidaknya dapat dilihat dari status penduduk bekerja yang didasarkan atas kegiatan formal maupun informal yang juga menjadi salah satu ukuran indikator pekerjaan layak pada SDG's. Merujuk kriteria BPS, pembagian pekerjaan formal dan informal didasarkan atas status pekerjaan utama. Seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau sebagai buruh/karyawan/pegawai dianggap sebagai pekerja formal. Sedangkan selain itu (berusaha sendiri/pekerja mandiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar) dikategorikan sebagai pekerja informal.

Berpijak pada pengelompokan tersebut, dapat terlihat bahwa kuantitas lapangan kerja yang tercipta belum sejalan dengan kualitas yang dihasilkan. Hal itu dikarenakan meski pertumbuhan pekerja formal menunjukkan geliat dalam satu dekade terakhir, 58% penduduk bekerja masih berstatus informal per Agustus 2024. Tren proporsi pekerja formal sebelum pandemi COVID-19 sebenarnya telah menunjukkan arah yang positif yaitu sebesar 44,3% pada 2019. Namun saat pandemi melanda, kondisi tersebut kembali berbalik arah yang memaksa 60,5% penduduk bekerja pada lapangan kerja informal.

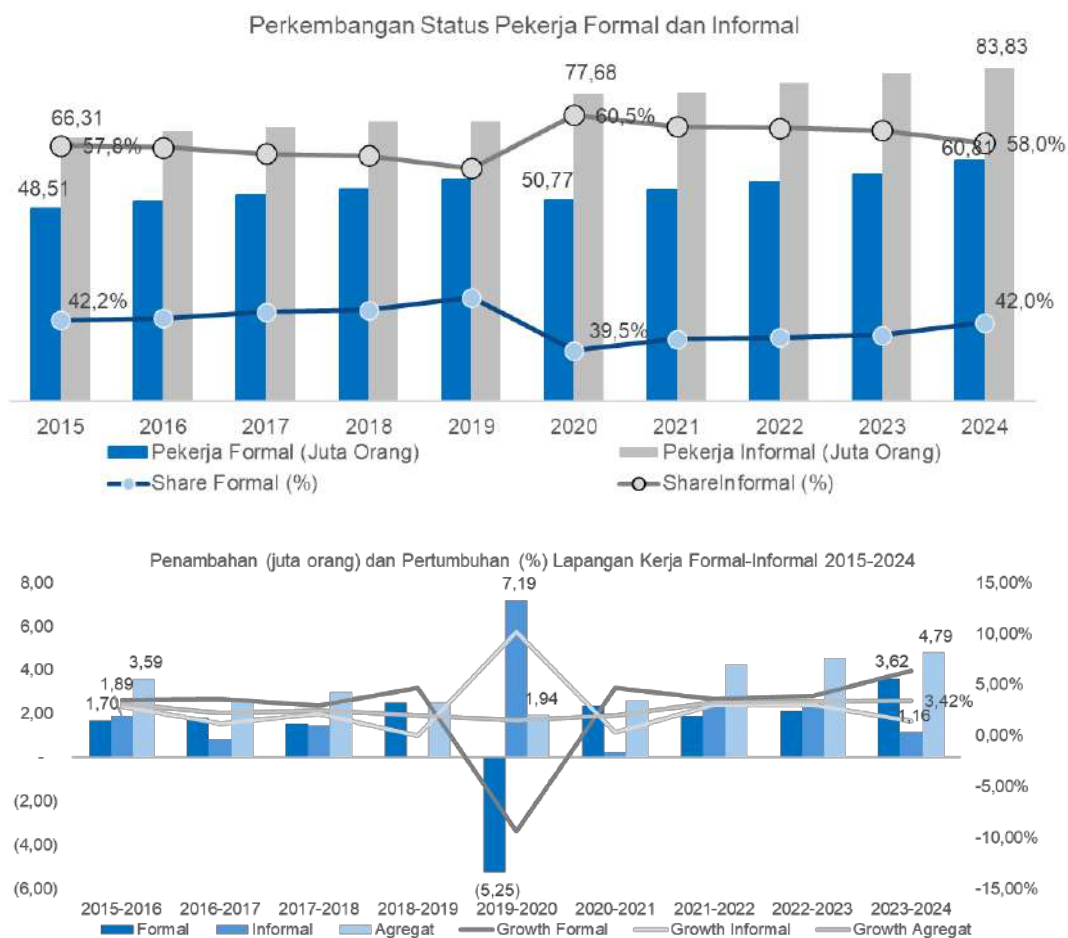
Perlahan ketika perekonomian berangsur pulih, penciptaan lapangan kerja formal kembali meningkat. Dalam keadaan normal (ketika tidak terjadi *shock* pandemi COVID-19 di 2019-2020), pertumbuhan lapangan kerja formal mampu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja informal. Rata-rata pertumbuhan lapangan kerja formal dalam satu dekade terakhir (di luar 2019-2020) mencapai 4,14% berbanding informal yang hanya 1,4%. Hanya saja, ketika guncangan COVID-19 ikut dimasukkan ke dalam penghitungan, rata-rata pertumbuhan lapangan kerja formal anjlok menjadi 2,64% berbanding rata-rata pertumbuhan serapan pekerja informal sebesar 2,68%.

Jika dihitung berdasarkan angka absolut, penciptaan lapangan kerja formal bersih (dengan mengikutsertakan efek negatif pandemi di 2019-2020) pada periode yang sama hanya mencapai 12,3 juta orang atau rata-rata 1,37 juta orang/tahun. Di sisi lain, lapangan kerja informal mampu mencapai 17,5 juta orang atau rata-rata 1,95 juta orang/tahun). Apabila dibandingkan dengan agregat lapangan kerja yang tumbuh

selama 2015-2024, porsi penciptaan lapangan kerja formal hanya mencapai 41,3% berbanding informal 58,7%.

Penetrasi penciptaan lapangan kerja formal pun akhirnya masih belum mampu mengejar dan melampaui lapangan kerja informal. Kondisi pandemi memaksa kombinasi antara tenaga kerja keluar dari pekerjaan formal dan angkatan kerja yang baru masuk di pasar kerja terdorong untuk mau tidak mau bekerja secara informal. Efek pandemi masih cukup terasa setidaknya hingga tahun 2023 dan mulai menunjukkan tren membaik pada tahun 2024.

Gambar 2.3 Perkembangan Porsi Tenaga Kerja Formal-Informal (atas) dan Pertumbuhan Lapangan Kerja Formal-Informal (bawah)



Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Lebih lanjut, perlu dilihat secara lebih detail komponen penyusun lapangan kerja berstatus formal dan informal. Lapangan kerja formal sudah barang tentu didominasi oleh kelompok buruh/karyawan/pegawai. Kelompok ini merupakan penyerap tenaga terbesar yang dalam satu dekade terakhir porsinya rata-rata mencapai 38,7% terhadap total penduduk bekerja tetapi memiliki kecenderungan tren yang terus menurun.

Di sisi lain, penduduk yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap/dibayar kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja masih minim rata-rata hanya sebesar 3,3% pada periode yang sama dan memiliki perkembangan yang stagnan. Padahal, menurut Perpres Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, kelompok ini dikategorikan sebagai wirausaha mapan yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Gambar 2.4 Perkembangan Lapangan Pekerjaan Menurut Komponen Penyusun Status Formal dan Informal



Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Lapangan kerja informal banyak diisi oleh penduduk yang berusaha sendiri/pekerja mandiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Kelompok ini dalam sepuluh tahun terakhir masing-masing berkontribusi 20% dan 15,1% terhadap total penduduk bekerja. Kedua kelompok ini dalam Perpres 2/2022 dikategorikan sebagai wirausaha pemula yang masih rentan keberlangsungan usahanya. Pada kelompok ini, batas antara berusaha untuk mencari pendapatan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup masih sangat tipis. Belum lagi, pada pekerja informal terdapat pekerja keluarga/tidak dibayar yang porsinya masih cukup tinggi rata-rata mencapai 13%.

Adapun penambahan lapangan kerja dalam jangka waktu 2015-2024 paling banyak dikontribusikan oleh penduduk berusaha sendiri/pekerja mandiri yang mencapai hampir 12 juta orang dan diikuti oleh buruh/karyawan/pegawai sebanyak 11,7 juta orang. Rata-rata pertumbuhan lapangan kerja yang tercipta bagi para pekerja formal tersebut sebesar 2,9%, sayangnya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk yang berusaha sendiri/pekerja mandiri sebesar 4,5%. Tren kenaikan wirausaha pemula yang mandiri ini tentu dapat memberikan sinyal keterbatasan lapangan kerja di sektor formal dan sulitnya menjadi wirausaha mapan sehingga mereka terpaksa berusaha sendiri atau bekerja mandiri agar lebih efisien.

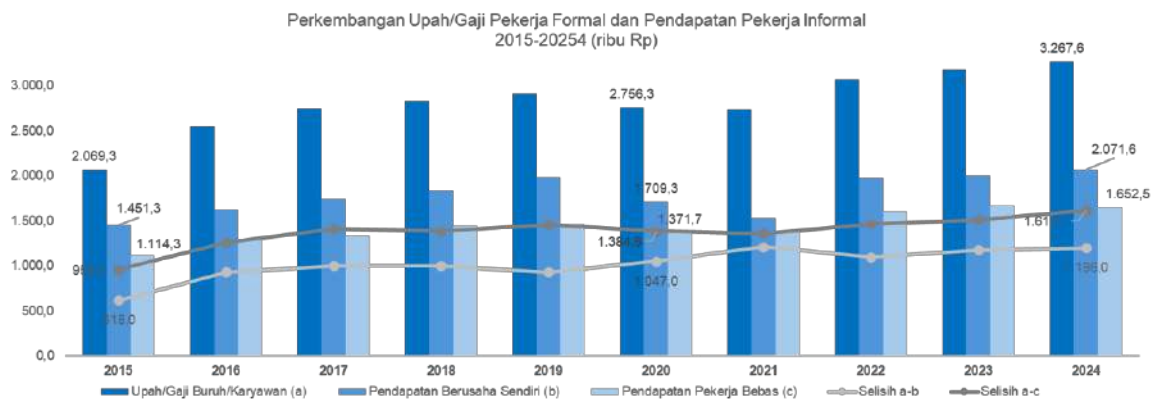
Sementara itu, pekerja keluarga/tak dibayar masih menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan mencapai 3,2 juta orang atau tiap tahunnya terdapat 320 ribu penduduk

bekerja membantu keluarganya atau tidak dibayar. Fenomena ini tentu perlu menjadi perhatian serius karena kelompok ini bekerja tetapi tidak memiliki pendapatan. Alhasil akumulasi tabungan dan produktivitas secara agregat juga akan tergerus sehingga kelompok ini mau tidak mau harus diintervensi oleh pemerintah agar statusnya naik, setidaknya menjadi pekerja bebas baik di pertanian maupun non pertanian atau berusaha sendiri/pekerja mandiri.

Lebih lanjut, studi terkait transisi atau mobilitas pekerja informal ke formal di Indonesia menunjukkan terjadinya “jebakan informalitas (*informality trap*)”. Individu yang sebelumnya bekerja di sektor informal cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk beralih ke sektor formal dan lebih mungkin untuk berpindah ke pekerjaan informal lainnya. Dengan kata lain, pekerja informal menghadapi kesulitan untuk masuk ke pekerjaan formal. Transisi itu kian lebih sulit untuk pekerja formal non pertanian (Pratomo dan Manning 2020).

Meski sempat terdampak pandemi, secara umum pendapatan pekerja formal maupun informal terus meningkat. Rata-raya upah/gaji buruh/karyawan naik sebanyak Rp1,19 juta atau 58% dalam sepuluh tahun terakhir. Di sisi lain, kenaikan pendapatan bersih berusaha sendiri dan pekerja bebas masing-masing hanya Rp620 ribu (42,7%) dan Rp538 ribu (48,3%). Dapat dilihat selisih atau gap antara upah/gaji pekerja formal dengan pekerja informal naik hampir dua kali lipat, sedangkan dengan pekerja bebas naik 69%. Kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan kesejahteraan antara pekerja formal dan informal kian melebar.

Gambar 2.5 Perkembangan Pendapatan Pekerja Formal dan Pekerja Informal



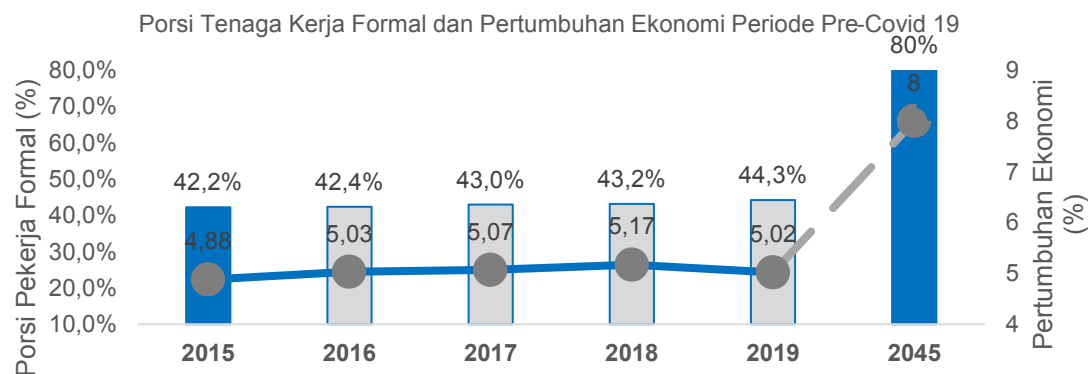
Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Box 1 Target Penciptaan Lapangan Kerja Formal Indonesia Emas 2045 Mustahil Tercapai

Berdasarkan data yang ditampilkan, pada periode normal saja (pra-COVID 19), pertumbuhan proporsi lapangan kerja formal selama lima tahun hanya 2,1 persen atau 0,4 persen per tahun, dari sebesar 42,2 persen di 2015 menjadi 44,3 persen di 2019.

Padahal untuk mencapai target proporsi pekerja formal sebesar 80 persen di 2045 sesuai RPJPN, dibutuhkan peningkatan proporsi lapangan kerja formal minimal 2 persen per tahun atau secara agregat 10 persen selama lima tahun periode pemerintahan.

Jika dilakukan simulasi perhitungan proporsionalitas sederhana menggunakan variabel pembanding pertumbuhan ekonomi, target tersebut juga mustahil untuk dicapai. Sebagai contoh, sepanjang periode 2015-2019 perekonomian tumbuh rata-rata 5,03 persen dan proporsi lapangan kerja formal hanya meningkat 2,1 persen sehingga didapatkan koefisiennya sebesar 0,42.



Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 - 5,00	4,00
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80

Dengan menggunakan asumsi target pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 (delapan) persen selama lima tahun ke depan, maka proporsi lapangan kerja formal hanya akan meningkat 3,34 persen atau 0,67 persen per tahun sepanjang 2025-2029 ($0,42 \times 8\% = 3,34\%$).

Artinya, periode dua puluh tahun ke depan apabila perekonomian tumbuh konsisten rata-rata 8 persen (*ceteris paribus*), proporsi lapangan kerja formal hanya akan bertambah 13,4 persen dari 42 persen (2024) menjadi 45,34 persen (2029) dan 55,4 persen ketika Indonesia Emas (2045).

2.2.2 Potret Lapangan Kerja Formal-Informal Menurut Jenis Pekerjaan, Provinsi dan Sektor

Potret perkembangan lapangan kerja selanjutnya dapat dilihat berdasarkan jenis atau jabatan pekerjaan apa yang tumbuh selama satu dekade terakhir. Selain itu, perlu dilihat juga gambaran lapangan kerja formal informal yang tumbuh berbasis wilayah dan sektor lapangan usaha. Ketiga aspek tersebut setidaknya dapat menjadi pelengkap informasi dinamika perubahan pasar kerja formal-informal.

2.2.2.1 Dinamika Lapangan Kerja Formal-Informal Menurut Jenis Pekerjaan Utama/Jabatan

Berdasarkan jenis pekerjaan, lapangan kerja formal mayoritas diisi oleh penduduk bekerja yang berprofesi sebagai tenaga profesional/teknisi, tenaga kepemimpinan/ketatalaksanaan (manajer), dan tenaga tata usaha. Ketiga jabatan tersebut umumnya memerlukan tingkat pendidikan spesifikasi keahlian menengah-tinggi. Namun pekerja formal yang bekerja pada jenis pekerjaan dengan keahlian menengah-rendah juga masih cukup tinggi karena porsinya mencapai 51% dari seluruh total pekerja. Mereka berada pada profesi tenaga usaha jasa dan kelompok profesi tenaga produksi/operator alat angkut dan pekerja kasar.

Tabel 2.3 Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja Formal dan Informal Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Formal	Tahun	0/1	2	3	4	5	6	7/8/9	x/00
Jumlah penduduk bekerja formal berdasarkan jabatan (juta orang)	2015	7,534	1,107	6,509	5,515	4,826	4,381	17,989	0,644
	2019	8,783	1,635	7,348	6,180	4,336	3,832	21,683	2,221
	2020	8,123	1,204	6,782	5,941	3,810	3,884	18,926	2,102
	2024	9,402	1,460	7,752	7,213	4,713	4,583	23,405	2,288
Proporsi formal terhadap total jabatan (%)	2015	92,6%	89,7%	97,9%	25,8%	68,6%	11,8%	55,0%	100,0%
	2019	91,0%	84,5%	97,3%	25,5%	54,3%	11,4%	55,2%	99,1%
	2020	90,7%	81,7%	96,2%	23,2%	46,0%	10,5%	50,1%	98,1%
	2024	88,6%	80,3%	97,9%	24,2%	49,7%	11,6%	54,3%	100,0%
Informal	Tahun	0/1	2	3	4	5	6	7/8/9	x/00
Jumlah penduduk bekerja informal berdasarkan jabatan (juta orang)	2015	0,598	0,127	0,141	15,861	2,212	32,679	14,693	0,000
	2019	0,864	0,301	0,207	18,053	3,654	29,780	17,619	0,019
	2020	0,837	0,269	0,269	19,703	4,473	33,257	18,835	0,040
	2024	1,216	0,357	0,165	22,602	4,761	35,030	19,695	0,000
Proporsi informal terhadap total jabatan (%)	2015	7,4%	10,3%	2,1%	74,2%	31,4%	88,2%	45,0%	0,0%
	2019	9,0%	15,5%	2,7%	74,5%	45,7%	88,6%	44,8%	0,9%
	2020	9,3%	18,3%	3,8%	76,8%	54,0%	89,5%	49,9%	1,9%
	2024	11,4%	19,7%	2,1%	75,8%	50,3%	88,4%	45,7%	0,0%

Keterangan: 0/1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis, 2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan, 3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis, 4. Tenaga Usaha Penjualan, 5. Tenaga Usaha Jasa, 6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, 7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkut dan Pekerja Kasar, X/00. Lainnya/Others

Sumber: BPS (2024)

Sebaliknya, lapangan kerja informal diisi oleh penduduk yang bekerja sebagai tenaga usaha penjualan (*sa/es*) dan tenaga usaha di bidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Jenis pekerjaan tersebut umumnya tidak memerlukan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan menengah rendah, dan tanpa kualifikasi

atau kompetensi khusus. Lapangan kerja informal juga banyak diisi oleh pekerja kasar.

Lebih lanjut, secara jumlah pekerja formal pada jenis pekerjaan menengah-tinggi (tenaga profesional, manajer, dan tenaga tata usaha) memang masih lebih besar dibandingkan pekerja informal pada jenis pekerjaan yang sama. Namun yang menarik adalah porsi pekerja formal pada profesi tenaga profesional dan manajer secara konsisten mengalami penurunan dan mendorong kenaikan porsi pada pekerja informal. Terutama yang menunjukkan perubahan hingga dua kali lipat pada pekerjaan informal adalah jabatan tenaga kepemimpinan/ketatalaksanaan.

Artinya, terjadi transisi jenis pekerjaan dengan keahlian menengah tinggi dari pekerja formal menjadi pekerja informal. Kondisi tersebut mensyaratkan adanya anomali mengingat apabila dikaitkan dengan pekerjaan masa depan, seharusnya pemberi kerja (perusahaan) lebih gencar mencari pekerja dengan kompetensi menengah-tinggi yang tentu berada di ranah formal. Namun kondisi ini juga dapat memberi sinyal bahwa telah terjadi perubahan perilaku bekerja para profesional, teknisi, dan yang memiliki kemampuan manajerial untuk bekerja secara mandiri dan fleksibel tanpa terikat oleh pemberi kerja. Meski begitu, dibutuhkan kajian lebih mendalam terhadap fenomena ini.

2.2.2.2 Dinamika Lapangan Kerja Formal-Informal Berbasis Wilayah (Provinsi)

Jika ditinjau dari segi wilayah, Pulau Jawa masih menjadi primadona penciptaan lapangan kerja secara keseluruhan. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berkontribusi menyerap 14 juta orang tenaga kerja atau 47,1% dari total lapangan kerja yang tercipta sepanjang 2015-2024. Sayangnya, ketiga provinsi tersebut juga menyumbang penambahan penduduk bekerja informal paling besar yang mencapai 8,2 juta orang. Porsi penambahan pekerja informal di Jawa Barat sebesar 67,8%; Jawa Tengah 51,9%; dan Jawa Timur 53,3%. Selain ketiga Provinsi di Pulau Jawa tersebut, lapangan kerja di Provinsi DKI Jakarta dan Banten juga paling banyak menyerap tenaga kerja informal.

Porsi penciptaan lapangan kerja informal di DKI Jakarta bahkan mencapai 150,4% sedangkan di Banten sebesar 84,3%. Kedua provinsi tersebut merupakan peringkat pertama dan kedua terbesar dalam penciptaan lapangan kerja informal selain Provinsi Papua (78,7%). Peningkatan lapangan kerja informal di DKI Jakarta dan kontribusi negatif penciptaan lapangan kerja formal sebesar 50,4% menunjukkan alarm yang harus diwaspadai. Hal itu mengingat statusnya saat ini telah berubah menjadi Daerah Khusus yang menjadi pusat perekonomian Nasional tetapi tren dalam menyerap tenaga kerja formal malah memburuk.

Tabel 2.4 Porsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal-Informal Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja Agregat Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Penciptaan Lapangan Kerja Agregat	Share Agregat (%)	Provinsi	Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Share Formal/Agregat (%)	Provinsi	Penciptaan Lapangan Kerja Informal	Share Informal/Agregat (%)
Jawa Barat	5.625.628	18,9%	Kalimantan Selatan	205.144	85,6%	DKI Jakarta	577.199	150,4%
Jawa Tengah	4.426.251	14,8%	Kalimantan Tengah	157.059	83,7%	Banten	819.866	84,3%
Jawa Timur	3.993.333	13,4%	Kalimantan Barat	489.273	78,0%	Papua	864.160	78,7%
Sumatera Utara	1.761.060	5,9%	Bali	217.300	63,8%	Jawa Barat	3.811.621	67,8%
Sulawesi Selatan	1.195.436	4,0%	Bangka Belitung	88.090	62,0%	Kalimantan Utara	75.417	67,7%
Lampung	1.152.331	3,9%	Sulawesi Tenggara	217.158	61,0%	Sumatera Selatan	526.641	67,2%
Papua	1.097.657	3,7%	Sulawesi Utara	176.949	57,9%	Sulawesi Barat	106.955	66,2%
Nusa Tenggara Barat	978.046	3,3%	Kepulauan Riau	116.516	54,9%	D.I. Yogyakarta	190.895	65,5%
Banten	972.463	3,3%	Sumatera Utara	917.311	52,1%	Nusa Tenggara Barat	632.356	64,7%
Nusa Tenggara Timur	805.171	2,7%	Kalimantan Timur	280.787	50,8%	Lampung	735.401	63,8%
Sumatera Selatan	784.234	2,6%	Jawa Tengah	2.127.799	48,1%	Sulawesi Tengah	161.567	59,6%
Sumatera Barat	740.154	2,5%	Sulawesi Selatan	561.108	46,9%	Aceh	319.798	59,0%
Kalimantan Barat	627.634	2,1%	Papua Barat	(42.273)	46,9%	Nusa Tenggara Timur	473.135	58,8%
Riau	605.071	2,0%	Bengkulu	92.267	46,9%	Maluku	144.742	57,3%
Kalimantan Timur	552.490	1,9%	Jawa Timur	1.866.399	46,7%	Sumatera Barat	422.264	57,1%
Aceh	542.336	1,8%	Maluku Utara	81.605	45,6%	Jambi	160.467	56,7%
DKI Jakarta	383.746	1,3%	Riau	265.679	43,9%	Gorontalo	78.105	56,4%
Sulawesi Tenggara	355.973	1,2%	Gorontalo	60.392	43,6%	Riau	339.392	56,1%
Bali	340.616	1,1%	Jambi	122.397	43,3%	Maluku Utara	97.340	54,4%
Sulawesi Utara	305.802	1,0%	Sumatera Barat	317.890	42,9%	Jawa Timur	2.126.934	53,3%
D.I. Yogyakarta	291.551	1,0%	Maluku	107.908	42,7%	Bengkulu	104.650	53,1%
Jambi	282.864	0,9%	Nusa Tenggara Timur	332.036	41,2%	Papua Barat	(47.876)	53,1%
Sulawesi Tengah	271.238	0,9%	Aceh	222.538	41,0%	Sulawesi Selatan	634.328	53,1%
Maluku	252.650	0,8%	Sulawesi Tengah	109.651	40,4%	Jawa Tengah	2.298.452	51,9%
Kalimantan Selatan	239.774	0,8%	Lampung	416.930	36,2%	Kalimantan Timur	271.703	49,2%
Kepulauan Riau	212.417	0,7%	Nusa Tenggara Barat	345.690	35,3%	Sumatera Utara	843.749	47,9%
Bengkulu	196.917	0,7%	D.I. Yogyakarta	100.656	34,5%	Kepulauan Riau	95.901	45,1%
Kalimantan Tengah	187.594	0,6%	Sulawesi Barat	54.647	33,8%	Sulawesi Utara	128.853	42,1%
Maluku Utara	178.945	0,6%	Sumatera Selatan	257.593	32,8%	Sulawesi Tenggara	138.815	39,0%
Sulawesi Barat	161.602	0,5%	Kalimantan Utara	35.921	32,3%	Bangka Belitung	54.045	38,0%
Bangka Belitung	142.135	0,5%	Jawa Barat	1.814.007	32,2%	Bali	123.316	36,2%
Gorontalo	138.497	0,5%	Papua	233.497	21,3%	Kalimantan Barat	138.361	22,0%
Kalimantan Utara	111.338	0,4%	Banten	152.597	15,7%	Kalimantan Tengah	30.535	16,3%
Papua Barat	(90.149)	-0,3%	DKI Jakarta	(193.453)	-50,4%	Kalimantan Selatan	34.630	14,4%
Jumlah/Total	29.822.805	100,0%	Jumlah/Total	12.309.068	41,3%	Jumlah/Total	17.513.737	58,7%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Di luar Pulau Jawa, terdapat beberapa provinsi yang berkontribusi mendorong penciptaan lapangan kerja agregat. Dari wilayah Sumatera, Provinsi Sumatera Utara dan Lampung masing-masing berperan sebesar 5,9% dan 3,9%. Wilayah Kalimantan diwakili oleh Provinsi Kalimantan Barat (2,1%) dan Kalimantan Timur (1,9%). Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing berkontribusi 3,3% dan 2,7%. Wilayah Sulawesi diwakili Sulawesi Selatan (4%) dan Sulawesi Tenggara (1,2%). Sedangkan untuk Wilayah Maluku dan Papua (Mapua), hanya Provinsi Papua saja yang menonjol (3,7%). Provinsi-provinsi di luar Jawa itu berkontribusi sebesar 28,6% dari total penciptaan lapangan kerja selama sepuluh tahun terakhir.

Lebih lanjut, dari 34 provinsi hanya 10 provinsi yang memiliki porsi penciptaan lapangan kerja formal lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja informal yang tercipta. Adapun sepuluh provinsi tersebut antara lain: 1) Kalimantan Selatan (85,6%); 2) Kalimantan Tengah (83,7%); 3) Kalimantan Barat (78%); 4) Bali (63,8%); 5) Bangka

Belitung (62%); 6) Sulawesi Tenggara (61%); 7) Sulawesi Utara (57,9%); 8) Kep. Riau (54,9%); 9) Sumatera Utara (52,1%); dan 10) Kalimantan Timur (50,8%). Hanya saja provinsi-provinsi tidak banyak menyerap tenaga kerja, apabila diakumulasi serapan tenaga kerjanya 15,8%.

Sementara itu, jika dilihat dari performa pertumbuhan lapangan kerja formal, wilayah luar Pulau Jawa menunjukkan tren yang positif. Rata-rata pertumbuhan serapan tenaga kerja formal di Provinsi Papua sebesar 7,76% paling tinggi dari provinsi yang lain. Diikuti oleh Nusa Tenggara Timur (6,79%), Sulawesi Tenggara (5,92%), Kalimantan Barat (5,76%), Nusa Tenggara Barat (5,74%) dan Maluku Utara (5,33%). Meski porsi penciptaan lapangan kerja formalnya relatif rendah dibandingkan provinsi yang lain, setidaknya menimbulkan optimisme pemerataan pembukaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas.

Tabel 2.5 Porsi dan Rata-Rata Pertumbuhan Lapangan Kerja Formal-Informal Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Share Penciptaan Lapangan Kerja Formal/Total Formal (%)	Average Growth Lapangan Kerja Formal (%)	Share Penciptaan Lapangan Kerja Informal/Total Informal (%)	Average Growth Lapangan Kerja Informal (%)
Aceh	1,8%	3,00%	1,8%	2,81%
Sumatera Utara	7,5%	3,82%	4,8%	2,44%
Sumatera Barat	2,6%	4,09%	2,4%	3,02%
Riau	2,2%	2,22%	1,9%	3,00%
Jambi	1,0%	2,22%	0,9%	1,98%
Sumatera Selatan	2,1%	2,01%	3,0%	2,42%
Bengkulu	0,7%	3,50%	0,6%	1,86%
Lampung	3,4%	3,91%	4,2%	2,92%
Bangka Belitung	0,7%	3,32%	0,3%	2,02%
Kepulauan Riau	0,9%	2,14%	0,5%	4,68%
DKI Jakarta	-1,6%	-0,49%	3,3%	4,71%
Jawa Barat	14,7%	2,15%	21,8%	3,93%
Jawa Tengah	17,3%	3,48%	13,1%	2,37%
D.I. Yogyakarta	0,8%	1,39%	1,1%	2,22%
Jawa Timur	15,2%	2,71%	12,1%	1,84%
Banten	1,2%	0,79%	4,7%	4,41%
Bali	1,8%	2,33%	0,7%	1,24%
Nusa Tenggara Barat	2,8%	5,74%	3,6%	4,05%
Nusa Tenggara Timur	2,7%	6,29%	2,7%	2,90%
Kalimantan Barat	4,0%	5,76%	0,8%	1,12%
Kalimantan Tengah	1,3%	3,12%	0,2%	0,71%
Kalimantan Selatan	1,7%	2,78%	0,2%	0,50%
Kalimantan Timur	2,3%	3,36%	1,6%	4,95%
Kalimantan Utara	0,3%	2,61%	0,4%	5,85%
Sulawesi Utara	1,4%	4,36%	0,7%	2,52%
Sulawesi Tengah	0,9%	2,75%	0,9%	2,07%
Sulawesi Selatan	4,6%	4,21%	3,6%	3,00%
Sulawesi Tenggara	1,8%	5,92%	0,8%	2,11%
Gorontalo	0,5%	3,49%	0,4%	2,66%
Sulawesi Barat	0,4%	4,05%	0,6%	2,66%
Maluku	0,9%	4,95%	0,8%	3,45%
Maluku Utara	0,7%	5,33%	0,6%	3,18%
Papua Barat	-0,3%	-0,61%	-0,3%	-0,70%
Papua	1,9%	7,76%	4,9%	5,97%
Jumlah/Total	100,0%	2,64%	100,0%	2,68%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

2.2.2.3 Dinamika Lapangan Kerja Formal-Informal Menurut Sektor Usaha

Apabila ditinjau berdasarkan sektornya, terdapat 4 (empat) sektor yang berkontribusi lebih dari dua digit terhadap total keseluruhan penciptaan lapangan kerja sepanjang satu dekade terakhir. Keempat sektor tersebut adalah akomodasi dan pengadaan makan minum (20,2%); perdagangan besar dan eceran (20,1%); industri pengolahan (15%); dan pertanian (10,1%) yang jika ditotal sumbangannya terhadap serapan tenaga kerja mencapai 65,4%.

Namun sayangnya, lapangan kerja yang tersedia dari keempat sektor itu mayoritas merupakan pekerjaan informal. Sektor pertanian masih paling besar dalam menyerap penduduk bekerja informal (89,7%), diikuti akomodasi dan pengadaan makan minum (75,3%), serta perdagangan besar dan eceran (67,7%). Bahkan, industri pengolahan yang notabene banyak diisi oleh pekerja formal (buruh/karyawan/pegawai), pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dalam sepuluh tahun terakhir lebih banyak dikontribusikan oleh sektor manufaktur informal (65,1%).

Di sisi lain, lapangan kerja formal yang tercipta tidak mampu menyerap tenaga kerja secara masif karena terbatas pada sektor jasa pendidikan (5,2%), konstruksi (4,2%), jasa perusahaan dan administrasi pemerintahan (masing-masing 3%), dan jasa kesehatan (3,1%). Kelima sektor tersebut jika dijumlah sumbangannya terhadap penciptaan lapangan kerja agregat pun hanya sebesar 19,7%. Adapun sektor konstruksi mampu berperan 106,9% penciptaan lapangan kerja formal terhadap agregat lapangan kerja menunjukkan adanya transisi dari pekerjaan informal ke formal pada sektor tersebut.

Tabel 2.6 Porsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal-Informal Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja Agregat Berdasarkan Sektor

Sektor	Penciptaan Lapangan Kerja Agregat	Share Agregat (%)	Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Share Formal/Agregat (%)	Penciptaan Lapangan Kerja Informal	Share Informal/Agregat (%)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.032.659	20,2%	1.492.080	24,7%	4.540.579	75,3%
Perdagangan Besar dan Eceran	5.981.835	20,1%	1.932.609	32,3%	4.049.226	67,7%
Industri Pengolahan	4.472.910	15,0%	1.561.823	34,9%	2.911.087	65,1%
Pertanian (arti luas)	3.006.834	10,1%	308.475	10,3%	2.698.359	89,7%
Transportasi dan Pergudangan	1.578.425	5,3%	722.206	45,8%	856.219	54,2%
Jasa Pendidikan	1.552.249	5,2%	1.311.078	84,5%	241.171	15,5%
Konstruksi	1.262.677	4,2%	1.350.098	106,9%	(87.421)	-6,9%
Jasa Lainnya	1.221.580	4,1%	188.470	15,4%	1.033.110	84,6%
Jasa Perusahaan	1.079.760	3,6%	832.987	77,1%	246.773	22,9%
Administrasi Pemerintahan	1.063.429	3,6%	1.063.429	100,0%	-	0,0%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	915.253	3,1%	769.981	84,1%	145.272	15,9%
Informasi dan Komunikasi	485.169	1,6%	225.877	46,6%	259.292	53,4%
Pertambangan	416.195	1,4%	272.954	65,6%	143.241	34,4%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	289.264	1,0%	83.068	28,7%	206.196	71,3%
Real Estate	269.381	0,9%	88.644	32,9%	180.737	67,1%
Listrik dan Gas	154.035	0,5%	97.157	63,1%	56.878	36,9%
Jasa Keuangan dan Asuransi	41.150	0,1%	8.132	19,8%	33.018	80,2%
Total	29.822.805	100%	12.309.068	41,3%	17.513.737	58,7%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Selanjutnya, jika dilihat kontribusi setiap sektor terhadap masing-masing lapangan kerja formal dan informal, maka terdapat 5 (lima) sektor pada lapangan kerja formal dan 4 (empat) sektor pada lapangan kerja informal yang berperan menyerap tenaga kerja secara dominan (lebih dari dua digit) dibandingkan sektor lainnya. Pada lapangan kerja formal, kelima sektor kontributor tersebut yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (15,7%); industri pengolahan (12,7%); penyediaan akomodasi dan pengadaan makan minum (12,1%); konstruksi (11%); dan jasa pendidikan (10,7%). Secara total, kelima sektor tersebut berkontribusi menyerap 62,1% pekerja formal sepanjang 2015-2024.

Adapun sektor lapangan usaha kontributor lapangan kerja informal para periode yang sama antara lain penyediaan akomodasi dan pengadaan makan minum (25,9%); perdagangan besar dan eceran (23,1%); industri pengolahan (16,6%); dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (15,4%). Jika ditotal keempat sektor tersebut menjadi lahan penghasil bagi 81,1% penduduk bekerja informal. Konsentrasi yang besar pada empat sektor itu seharusnya memudahkan pemerintah untuk mengintervensi transisi tenaga kerja informal tersebut untuk masuk ke status formal.

Tabel 2.7 Porsi dan Rata-Rata Pertumbuhan Lapangan Kerja Formal-Informal Berdasarkan Sektor

Sektor	Share Penciptaan Lapangan Kerja Formal/Total Formal (%)	Average Growth Lapangan Kerja Formal (%)	Share Penciptaan Lapangan Kerja Informal/Total Informal (%)	Average Growth Lapangan Kerja Informal (%)
Pertanian, Peternakan, Perikanan	2,5%	0,9%	15,4%	1,0%
Pertambangan	2,2%	3,7%	0,8%	3,2%
Industri Pengolahan	12,7%	1,8%	16,6%	5,4%
Listrik dan Gas	0,8%	5,5%	0,3%	21,9%
Pengadaan Air	0,7%	5,8%	1,2%	19,4%
Konstruksi	11,0%	4,5%	-0,5%	0,1%
Perdagangan Besar dan Eceran	15,7%	2,8%	23,1%	2,9%

Transportasi dan Pergudangan	5,9%	3,5%	4,9%	3,5%
Akomodasi Makan Minum	12,1%	7,3%	25,9%	10,1%
Informasi dan Komunikasi	1,8%	4,8%	1,5%	20,6%
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,1%	0,2%	0,2%	8,0%
Jasa Persewaan Bangunan	0,7%	5,8%	1,0%	17,6%
Jasa Perusahaan	6,8%	7,0%	1,4%	7,3%
Administrasi Pemerintahan	8,6%	3,0%	0,0%	0,0%
Jasa Pendidikan	10,7%	2,5%	1,4%	18,1%
Jasa Kesehatan	6,3%	5,5%	0,8%	11,3%
Jasa Lainnya	1,5%	0,9%	5,9%	5,8%
Total	100,0%	2,6%	100,0%	2,7%

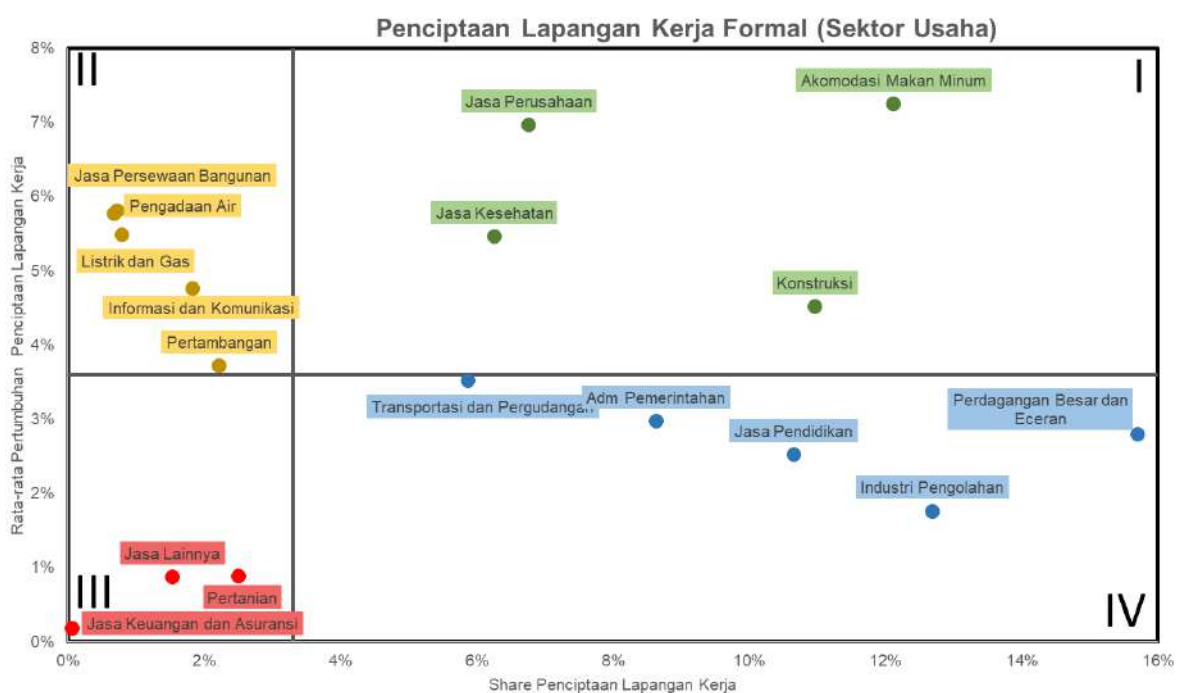
Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Untuk memudahkan identifikasi sektor mana yang memiliki potensi atau prospek penyediaan lapangan kerja berkualitas dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori/kuadran. Basis perhitungan kategorisasi kuadran ini didasarkan pada *share* dan rata-rata pertumbuhan lapangan kerja baik formal maupun informal terhadap median (nilai tengah) *share* dan rata-rata pertumbuhan lapangan kerja agregat. Nilai median untuk *share* dan rata-rata pertumbuhan lapangan kerja agregat masing-masing 3,6% dan 3,3%.

Kategori hijau/kuadran I adalah sektor dengan porsi penciptaan lapangan kerja dan rata-rata pertumbuhan lapangan kerja yang lebih tinggi dari median *share* dan pertumbuhan lapangan kerja agregat selama periode 2015-2024. Pada kategori ini terdapat empat sektor lapangan kerja formal (akomodasi dan makan minum; konstruksi; jasa perusahaan dan jasa kesehatan) dan hanya dua sektor lapangan kerja informal (industri pengolahan dan jasa lainnya).

Kategori kuning/kuadran II adalah sektor yang memiliki rata-rata porsi penciptaan lapangan kerja lebih rendah dari median *share* lapangan kerja agregat, namun rata-rata pertumbuhan lapangan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan kerja agregat. Pada kategori ini terdapat lima sektor pekerjaan formal (pertambangan; informasi dan komunikasi; listrik dan gas; pengadaan air; dan jasa persewaan bangunan). Sementara itu, untuk pekerjaan informal terdapat lebih banyak yakni delapan sektor (listrik dan gas; informasi dan komunikasi; pengadaan air; jasa pendidikan; jasa persewaan bangunan; jasa kesehatan, jasa keuangan dan asuransi; dan jasa perusahaan).

Gambar 2.6 Kuadran Penciptaan Lapangan Kerja Formal Menurut Sektor Lapangan Usaha



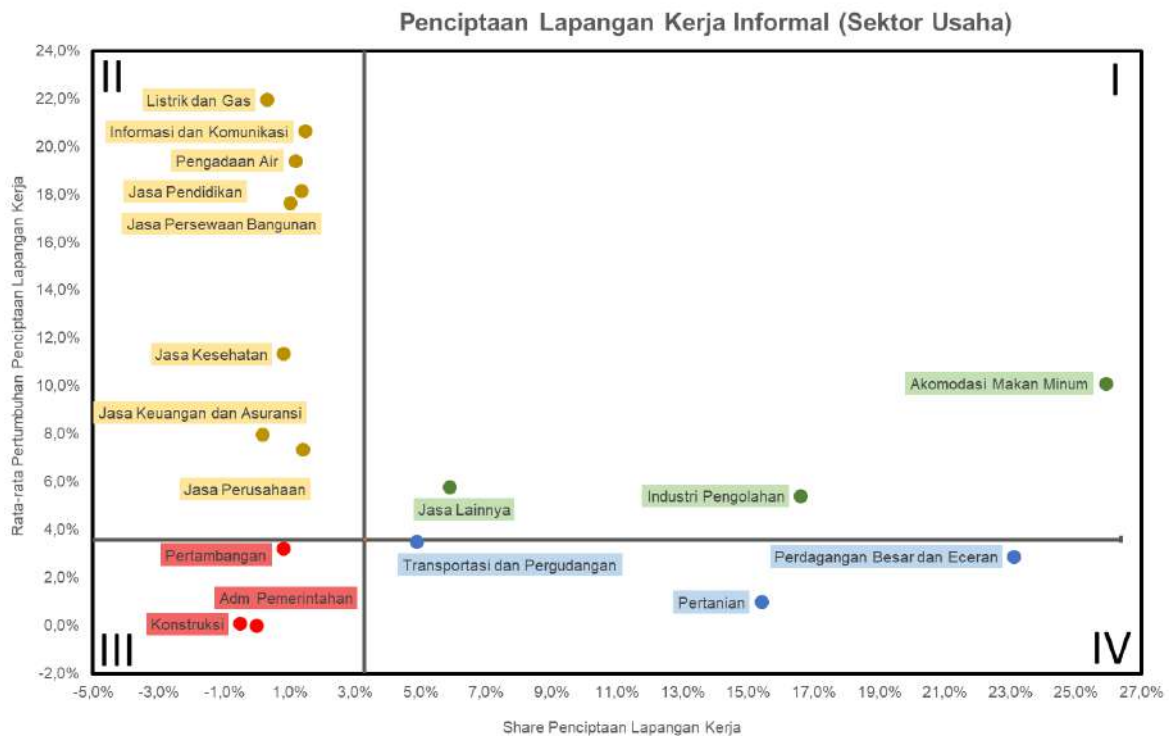
Sumber: BPS, 2015 - 2023 (diolah)

Kategori merah/kuadran III adalah sektor dengan rata-rata porsi penciptaan lapangan kerja dan rata-rata pertumbuhan lapangan kerja lebih rendah dari median *share* dan pertumbuhan lapangan kerja agregat. Pada kategori ini, terdapat masing-masing tiga sektor baik untuk pekerjaan formal maupun informal. Lapangan kerja formal (jasa keuangan dan asuransi; pertanian; dan jasa lainnya), sedangkan lapangan kerja informal (konstruksi; administrasi pemerintahan; dan pertambangan). Sektor konstruksi bahkan menunjukkan perubahan porsi penciptaan lapangan kerja yang minus, artinya sektor tersebut tidak lagi menyerap tenaga kerja informal). Di sisi lain, sektor administrasi pemerintah tidak sama sekali menyerap tenaga kerja informal karena seluruh pekerja berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kategori biru/kuadran IV merupakan sektor yang memiliki rata-rata porsi penciptaan lapangan kerja lebih tinggi dari median *share* lapangan kerja agregat, namun rata-rata

pertumbuhan lapangan kerja lebih rendah dari pertumbuhan lapangan kerja agregat. Pada kategori ini terdapat lima sektor pekerjaan formal (transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintahan; perdagangan besar dan eceran; jasa pendidikan; dan industri pengolahan). Sementara itu pada pekerja formal terdapat tiga sektor (transportasi dan pergudangan; perdagangan besar dan eceran; dan pertanian).

Gambar 2.7 Kuadran Penciptaan Lapangan Kerja Informal Menurut Sektor Lapangan Usaha



Sumber: BPS, 2015 - 2023 (diolah)

Berdasarkan identifikasi deskriptif di atas dapat dilakukan skoring untuk melihat sektor prioritas penciptaan lapangan kerja berkualitas (formal). Metode skoring didasarkan atas penilaian *share* dan pertumbuhan rata-rata lapangan kerja formal terhadap median *share* dan pertumbuhan rata-rata agregat. Hasilnya, seluruh sektor yang berada di kuadran I formal, yaitu sektor akomodasi makan dan minum; konstruksi; jasa perusahaan dan jasa kesehatan berperan dan memiliki tren positif dalam mendukung penyerapan tenaga kerja formal.

Sektor yang berada di kuadran I merupakan lapangan usaha yang dalam satu dekade terakhir ini memiliki kinerja optimal dalam mendorong penciptaan lapangan kerja formal. Lebih lanjut prioritas selanjutnya adalah sektor yang berada pada kuadran II (pertambangan serta informasi dan komunikasi) dan kuadran IV (transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran; serta industri pengolahan). Sembilan sektor tersebut perlu mendapatkan perhatian dan intervensi khusus pemerintah agar

selain mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, namun juga didorong untuk menjadi motor transisi pekerjaan layak yang berkelanjutan.

2.2.3 Potret Lapangan Usaha Strategis

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan dinamika penciptaan lapangan kerja dari 17 (tujuh belas) sektor. Selanjutnya, pada bagian berikut dijabarkan kondisi sektor-sektor yang dianggap strategis. Kriteria strategis di sini didasarkan dari empat komponen. Pertama, sektor padat karya yang ditandai dengan kontribusi mencapai dua digit dalam menyerap tenaga kerja sepanjang satu dekade terakhir yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian.

Kedua, sektor yang menyerap banyak tenaga kerja selain keempat sektor di komponen pertama dan berperan *double digit* terhadap penciptaan lapangan kerja formal yaitu sektor konstruksi dan sektor jasa pendidikan. Ketiga, sektor yang menyerap tenaga kerja selain keenam sektor sebelumnya dan menjadi median dari penciptaan lapangan kerja formal yaitu sektor transportasi dan pergudangan. Keempat, sektor yang tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja namun memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja formal lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja agregat, yaitu sektor pertambangan serta sektor informasi dan komunikasi.

Potret masing-masing sektor tersebut ditinjau terbatas dari tiga aspek yaitu (1) perkembangan tenaga kerja dan komposisi tenaga kerja formal-informal pada sektor tersebut; (2) penduduk bekerja berdasarkan status formal-informal yang lebih rinci; dan (3) tingkat kesejahteraan penduduk bekerja yang diukur dari perubahan rata-rata gaji/upah/pendapatan bersih pekerja di sektor terkait. Tinjauan singkat dari ketiga aspek tersebut sebagai berikut:

2.2.3.1 Perkembangan dan Komposisi Formal-Informal Penduduk Bekerja Sektor Strategis

Penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh 8% dari 37,7 juta orang (2015) menjadi 40,7 juta orang (2024). Tren positif sebenarnya telah terjadi sebelum pandemi di mana pada 2019 jumlah tenaga kerja di sektor ini turun yang mengindikasikan berjalannya transformasi struktural. Namun ketika terjadi pembatasan aktivitas sosial-ekonomi akibat pandemi, sektor ini menjadi jaring pengaman sementara bagi pekerja di sektor lain yang tidak dapat beroperasi.

Sektor pertanian (dalam arti luas) didominasi oleh pekerja informal yang dalam sepuluh tahun terakhir porsinya tidak berubah di kisaran 87%.










Penduduk bekerja di sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 31,6% dari 1,3 juta orang (2015) menjadi 1,7 juta orang (2024). Meski bersifat padat modal dan tidak begitu masif menyerap tenaga kerja, sektor ini kebanyakan diisi oleh pekerja formal. Porsi tenaga kerja formal naik tipis dari 59% (2015) ke 61% (2024). Kebijakan hilirisasi yang digaungkan pemerintah dapat mendorong kuantitas dan kualitas penciptaan lapangan kerja formal dari sektor ini.

Penduduk bekerja di sektor industri pengolahan tumbuh 28,8% dari 15,5 juta orang (2015) menjadi 20 juta orang (2024). Industri pengolahan merupakan motor penggerak transformasi struktural yang memiliki peran vital bagi kesinambungan pembangunan. Sebagian besar tenaga kerja formal yang terserap dari keseluruhan total tenaga kerja, berasal dari sektor ini. Hanya saja, porsi tenaga kerja formal industri pengolahan mengalami penurunan dari 68,7% (2015) menjadi 61,1% (2024). Penduduk bekerja informal di sektor ini mengalami peningkatan sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Penduduk bekerja di sektor konstruksi tumbuh 15,4% dari 8,2 juta orang (2015) menjadi 9,4 juta orang (2024). Sektor ini menunjukkan performa positif karena mampu menciptakan lapangan kerja formal neto dalam sepuluh tahun terakhir. Sebelum pandemi sektor ini juga sudah terlihat mampu menjadi magnet pekerja formal. Porsi tenaga kerja formal meningkat dari 42,9% (2015) menjadi 51,4% (2024). Tidak dapat dipungkiri penciptaan lapangan kerja formal di sektor ini imbas dari gencarnya program pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

Selanjutnya, penduduk bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor tumbuh 28% dari 21,3 juta orang (2015) menjadi 27,3 juta orang (2024). Sektor ini merupakan lahan pencari nafkah terbesar kedua setelah sektor pertanian bagi para angkatan kerja. Sayangnya, porsi pekerja informal mendominasi dan tren menunjukkan tidak ada perubahan berarti dari 66,2% (2015) menjadi 65,5% (2024). Bahkan ketika terjadi pandemi, lebih dari 70% penduduk bekerja informal di sektor ini.

Tabel 2.8 Jumlah Tenaga Kerja dan Komposisi Formal-Informal Sektor Strategis

Sektor	2015	2019	2020	2024	Growth (%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ribu orang)	37.750	34.578	38.224	40.757	8,0%
% Formal	12,88%	12,50%	11,43%	12,69%	
% Informal	87,12%	87,50%	88,57%	87,31%	
Pertambangan dan Penggalian (ribu orang)	1.317	1.422	1.352	1.734	31,6%
% Formal	59%	64%	58%	61%	
% Informal	41%	36%	42%	39%	
Industri Pengolahan (ribu orang)	15.538	18.928	17.483	20.011	28,8%
% Formal	68,73%	65,18%	61,19%	61,17%	
% Informal	31,27%	34,82%	38,81%	38,83%	
Konstruksi (ribu orang)	8.208	8.506	8.066	9.471	15,4%
% Formal	42,92%	51,34%	42,62%	51,45%	
% Informal	57,08%	48,66%	57,38%	48,55%	
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor (ribu orang)	21.347	23.802	24.703	27.329	28,0%
% Formal	33,77%	34,28%	29,90%	33,45%	
% Informal	66,23%	65,72%	70,10%	66,55%	
Transportasi dan Pergudangan (ribu orang)	4.621	5.564	5.592	6.200	34,2%
% Formal	44,96%	40,74%	42,92%	45,16%	
% Informal	55,04%	59,26%	57,08%	54,84%	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ribu orang)	5.238	8.456	8.544	11.271	115,2%
% Formal	35,62%	32,20%	26,13%	29,79%	
% Informal	64,38%	67,80%	73,87%	70,21%	
Informasi dan Komunikasi (ribu orang)	541	913	933	1.027	89,6%
% Formal	84,16%	69,97%	68,70%	66,39%	
% Informal	15,84%	30,03%	31,30%	33,61%	
Jasa Pendidikan (ribu orang)	5.606	6.313	6.029	7.158	27,7%
% Formal	97,81%	96,72%	94,89%	94,92%	
% Informal	2,19%	3,28%	5,11%	5,08%	

Keterangan: Panah atas/hijau= formal meningkat, Panah bawah/merah= sebaliknya

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Penduduk bekerja di sektor transportasi dan pergudangan naik 34,2% dari 4,6 juta orang (2015) menjadi 6,2 juta orang (2024). Sektor ini sebenarnya mengalami tren negatif sebelum pandemi. Namun, berbeda dengan mayoritas sektor lain yang ketika

pandemi justru banyak pekerja informal, sektor transportasi dan perdagangan menemukan momentum dalam menyerap tenaga kerja formal. Alhasil, porsi pekerja formal sektor ini meningkat dari 40,7% (2019) menjadi 45,16% (2024).

Penduduk bekerja di sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum tumbuh 115% dari 5,2 juta orang (2015) menjadi 11,2 juta orang (2024). Sektor ini menjadi satu-satunya yang tumbuh lebih dari dua kali lipat dibandingkan sektor strategis lainnya. Namun demikian, perkembangan porsi tenaga kerja sektor penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan makin banyak diisi oleh penduduk bekerja informal yaitu dari 64,38% (2015) menjadi 70,2% (2024). Pandemi mendorong kenaikan pekerja informal yang cukup signifikan di sektor ini.

Penduduk bekerja di sektor informasi dan komunikasi tumbuh cukup tinggi mencapai 89,6% dari 541 ribu orang (2015) menjadi 1,02 juta orang (2024). Meski kuantitas penduduk yang bekerja di sektor ini paling rendah dari sektor strategis lain, diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan formal karena padat teknologi. Hanya saja porsi pekerja formal menunjukkan penurunan dari 84,16% (2015) menjadi 66,39% (2024). Penurunan bahkan terjadi sebelum adanya pandemi dan ketika kondisi mulai pulih belum terlihat adanya peningkatan kembali pekerja formal.

Terakhir, penduduk bekerja jasa pendidikan meningkat 27,7% dari 5,6 juta orang (2015) menjadi 7,15 juta orang (2024). Sektor ini didominasi oleh pekerja formal, meski demikian porsi penduduk bekerja informal pada bidang pendidikan ini terlihat menunjukkan kenaikan dari 2,19% (2015) menjadi 5,08% (2024). Peningkatan tersebut konsisten terjadi sejak sebelum pandemi, yang menunjukkan jasa pendidikan non formal penunjang kegiatan akademik formal kian bertambah. Bentuk jasa ini contohnya seperti jasa pendidikan keagamaan, olahraga dan rekreasi dan kebudayaan.

2.2.3.2 Potret Penduduk Bekerja di Sektor Strategis Berdasarkan Status Rinci Formal-Informal

Pertama, menurut status berusaha sendiri dibantu buruh tetap/dibayar yang merupakan komponen penyusun pekerjaan formal. Penduduk bekerja berstatus berusaha dibantu buruh/karyawan tetap dan dibayar ini dikategorikan sebagai wirausaha mapan jika merujuk definisi pada Perpres 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan.

Kenaikan jumlah penduduk bekerja pada kategori ini paling diharapkan karena menunjukkan sinyal positif munculnya banyak wirausaha yang menciptakan lapangan kerja secara berkualitas dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika kelompok ini kian menyusut, menunjukkan rendahnya ekosistem wirausaha yang naik kelas dan tentu patut diwaspadai mengingat mereka adalah penggerak perekonomian.

Apabila ditinjau pada tingkat sektoral, perkembangan penduduk bekerja pada kategori ini menunjukkan dinamika yang berbeda. Sektor informasi dan komunikasi mencatatkan pertumbuhan paling pesat (151%). Fenomena ini selaras dengan tren

digitalisasi dan tingginya kebutuhan akan layanan teknologi. Diikuti oleh jasa pendidikan (149%), dan penyediaan akomodasi serta makan minum (77,6%). Ketiga sektor ini mengindikasikan meningkatnya kesempatan untuk menjadi wirausaha mapan di bidang digital, edukasi, serta pariwisata/ekonomi kreatif.

Di sisi lain, sektor perdagangan (16,2%), pertambangan (37,1%), serta industri pengolahan (32,4%) masih menunjukkan tren pertumbuhan positif yang moderat. Peningkatan tersebut menggambarkan proses pemulihan ekonomi serta permintaan pasar yang stabil, meski diselingi beberapa penurunan di tahun-tahun tertentu (misalnya di 2020 saat terjadi pandemi).

Sementara itu, wirausaha mapan di sektor pertanian (arti luas) masih tumbuh negatif (-1,7%), kondisinya belum lebih baik dari tahun 2015. Sektor konstruksi juga mengalami kontraksi (-2,6%), terlebih lagi, transportasi dan pergudangan paling tertekan dengan (-33,3%). Hal ini bisa mencerminkan dampak perubahan perilaku masyarakat atau tantangan terkait infrastruktur, biaya logistik, hingga kebijakan mobilitas yang memengaruhi sektor tersebut.

Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar (Formal)

Sektor	Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar (Formal) dalam ribu orang				Growth (%)
	2015	2019	2020	2024	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.283,0	913,8	966,7	1.260,9	-1,7%
Pertambangan dan Penggalian	40,8	50,2	57,4	56,0	37,1%
Industri Pengolahan	590,6	825,6	765,5	782,1	32,4%
Konstruksi	323,1	384,6	301,2	314,6	-2,6%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1.064,0	1.219,8	1.109,4	1.236,6	16,2%
Transportasi dan Pergudangan	132,5	104,8	104,0	88,4	-33,3%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	254,5	397,9	330,0	452,0	77,6%
Informasi dan Komunikasi	20,4	26,8	33,5	51,1	151,0%
Jasa Pendidikan	19,9	52,6	40,0	49,5	149,0%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Kedua, menurut status buruh/karyawan/pegawai yang sudah barang tentu merupakan komponen penyumbang terbesar pekerja formal. Kelompok ini berkontribusi kurang lebih 40% dari total tenaga kerja dan mayoritas diisi oleh masyarakat berpendapatan menengah. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai secara umum menikmati fasilitas perlindungan ketenagakerjaan yang lebih terjamin dibandingkan kategori lain. Kebijakan upah minimum, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial ketenagakerjaan hingga saat ini sejatinya hanya berkutat pada kategori ini.

Apabila ditinjau pada tingkat sektoral, perkembangan buruh/karyawan/pegawai menunjukkan dinamika yang juga berbeda. Meski tidak ada sektor yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif secara kumulatif, laju pertumbuhannya bervariasi. Sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum (80,3%) menjadi yang tertinggi, diikuti pertumbuhan konsisten informasi dan komunikasi (44,8%) dan sektor konstruksi yang pulih setelah pandemi (42,5%). Sektor transportasi dan pergudangan juga terus menanjak (39,4%), dipicu oleh maraknya aktivitas logistik dan *e-commerce*.

Sementara itu, sektor perdagangan (28,6%) dan jasa pendidikan (23,5%) sama-sama tumbuh moderat. Industri pengolahan yang sempat terkoreksi cukup tajam di 2020 karena pandemi, menunjukkan *rebound* yang positif dan masih mampu tumbuh (13,6%). Sektor ini memiliki basis tenaga kerja buruh/karyawan/pegawai paling besar sehingga pertumbuhannya terlihat lebih moderat ketimbang sektor lain yang basis lebih kecil. Meski pertumbuhannya paling kecil, sektor pertanian mampu mencatatkan pertumbuhan positif (9,2%).

Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Buruh/Karyawan/Pegawai (Formal)

Sektor	Buruh/Karyawan/Pegawai (Formal) dalam ribu orang				Growth (%)
	2015	2019	2020	2024	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.580	3.409	3.401	3.910	9,2%
Pertambangan dan Penggalian	736	865	732	993	35,0%
Industri Pengolahan	10.089	11.511	9.933	11.459	13,6%
Konstruksi	3.200	3.982	3.137	4.558	42,5%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	6.144	6.940	6.278	7.904	28,6%
Transportasi dan Pergudangan	1.945	2.162	2.296	2.711	39,4%

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.612	2.325	1.902	2.906	80,3%
Informasi dan Komunikasi	435	612	608	630	44,8%
Jasa Pendidikan	5.463	6.053	5.680	6.745	23,5%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Ketiga, menurut status berusaha sendiri yang menunjukkan tren kenaikan menjadi komponen penyusun dominan pekerjaan informal. Menurut Perpres 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan, kelompok ini dikategorikan sebagai wirausaha pemula bersama-sama dengan kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, tren kenaikan berusaha sendiri ini telah muncul bahkan sebelum pandemi.

Kenaikan penduduk bekerja pada kelompok ini pada dasarnya dapat menjadi indikasi positif maupun negatif. Positif jika peningkatan penduduk bekerja berusaha sendiri diikuti dengan peningkatan pendapatan dan mencerminkan fleksibilitas pasar kerja di sektor terkait. Negatif apabila banyaknya penduduk berusaha sendiri tidak diimbangi dengan pendapatan yang lebih baik atau minimal sama dengan wirausaha atau pekerja formal serta mencerminkan restriksi pasar kerja untuk masuk menjadi pekerja formal.

Banyaknya penduduk berusaha sendiri atau pekerja mandiri juga menimbulkan implikasi minimnya perlindungan karena tidak terikat kontrak dan jauh dari jaminan sosial. Potensi pendapatan yang fluktuatif karena juga menambah risiko pada stabilitas perekonomian mereka dalam jangka panjang. Pelaku usaha mandiri juga sering kali sulit mengakses pinjaman usaha maupun investasi karena ketiadaan kolateral atau laporan keuangan yang baik sehingga menahan skala pertumbuhan usaha mereka.

Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Berusaha Sendiri (Informal)

Sektor	Berusaha Sendiri (Informal) dalam ribu orang				Growth (%)
	2015	2019	2020	2024	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.017,4	6.084,6	6.261,1	8.601,1	71,4%
Pertambangan dan Penggalian	172,6	195,2	247,5	350,3	102,9%
Industri Pengolahan	1.675,4	2.785,1	2.780,9	3.480,2	107,7%
Konstruksi	200,1	247,0	459,5	509,8	154,8%

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	7.192,2	8.154,8	8.257,9	8.691,0	20,8%
Transportasi dan Pergudangan	1.963,3	2.810,0	2.689,8	2.866,8	46,0%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.451,5	2.614,7	2.584,8	3.438,0	136,9%
Informasi dan Komunikasi	47,0	205,8	184,5	237,1	404,9%
Jasa Pendidikan	78,1	138,6	187,8	274,2	251,0%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Perkembangan penduduk berusaha sendiri/pekerja mandiri di seluruh sektor strategis juga menunjukkan tren positif, tidak ada yang mengalami pertumbuhan negatif. Sektor informasi dan komunikasi melonjak pesat (404,9%) seiring kemudahan akses internet, platform digital dan tren pekerja lepas bidang teknologi atau media (*gig workers*). Jasa pendidikan juga meningkat signifikan (251%) yang dapat diakibatkan banyaknya permintaan tutor privat, bimbingan belajar, dan pembelajaran secara daring.

Banyaknya penduduk berusaha sendiri di sektor konstruksi (154,8%) dan penyediaan akomodasi makan-minum (136,9%) menandakan peluang usaha kecil seperti renovasi bangunan, *homestay*, kafe dan bisnis kuliner lain kian menjamur. Tumbuhnya penduduk berusaha sendiri atau pekerja mandiri di sektor pertambangan (102,9%) menunjukkan kian banyaknya pengelolaan tambang skala kecil yang beroperasi tidak terikat dengan perusahaan besar.

Sementara itu, pertumbuhan wirausaha mandiri yang tinggi di industri pengolahan (107,7%) menunjukkan geliat industri mikro dan kecil. Salah satu subsektor industri yang paling mudah dimasuki oleh pelaku wirausaha mandiri adalah industri makanan dan minuman rumahan (*FnB home industry*) karena modal awal yang relatif terjangkau. Industri kreatif dan produk kerajinan (*craft*), *fashion* skala kecil, serta furnitur yang menggabungkan kreativitas dan keterampilan manual juga dapat mendorong banyaknya pekerja mandiri di industri.

Harga mesin produksi ringan seperti mesin *packaging* dan *3D printer* yang kian terjangkau memudahkan pelaku usaha memproduksi barang dalam skala terbatas. Apalagi dengan adanya platform *e-commerce* dan media sosial (terutama tiktok) memberi jangkauan akses pemasaran yang sangat luas hingga dapat menembus pasar ekspor. Adanya dukungan pembiayaan mikro dan kredit usaha rakyat (KUR) menyebabkan biaya masuk (*entry barrier*) juga mulai turun. Meski demikian, kondisi itu juga mengindikasikan di saat perusahaan besar melakukan efisien dan beralih ke padat modal, banyak pekerja beralih menjadi wirausaha industri kecil dengan memanfaatkan pengalaman serta keterampilan mereka.

Lebih lanjut pertumbuhan yang cukup tinggi, meski tidak sampai 100% juga terjadi di sektor pertanian (71,4%), transportasi dan pergudangan (46%) dan perdagangan (20,8%). Secara khusus, tumbuhnya pekerja mandiri di sektor transportasi dan pergudangan karena tren transportasi *online* dan *e-commerce* yang mendorong bisnis pergudangan skala kecil, utilisasi aset rumah sebagai gudang distribusi paket.

Maraknya penduduk berusaha sendiri di berbagai sektor strategis sebetulnya dapat dipandang secara positif apabila diikuti dengan kenaikan skala usaha dalam jangka waktu terukur. Dengan demikian diharapkan para wirausaha mandiri tersebut naik kelas dan menjelma menjadi wirausaha mapan yang formal. Begitu juga pekerja mandiri diharapkan dapat menjadi pekerja formal, meski tidak harus mengikuti kriteria BPS sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi mereka terjamin perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaannya. Karena jika tidak, akan terjadi stagnasi produktivitas dan menciptakan lingkaran setan lapangan kerja informal.

Keempat, penduduk bekerja menurut status berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yang juga dapat dikategorikan sebagai wirausaha pemula. Kategori ini menitikberatkan pada pemilik usaha yang menjalankan bisnis dengan bantuan pekerja musiman, sukarela atau berbasis relasi keluarga/tetangga tanpa bayaran formal yang pasti. Kelompok ini bersama-sama dengan berusaha sendiri merupakan penyumbang terbesar lapangan kerja informal.

Data menunjukkan sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang sangat menonjol (191,3%) dibandingkan sektor lainnya. Meski jumlahnya tidak begitu fantastis, tren peningkatan kelompok ini pada sektor IT cukup menarik. Kemungkinan yang terjadi adalah maraknya *content creator* media sosial, youtube atau podcast yang membutuhkan bantuan rekannya, seperti mengedit video, mengurus media sosial, atau bahkan setting studio “rumahan” tanpa perjanjian kontrak upah/gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan. Kerja sama bisa terjadi dengan sistem bagi hasil (*monetisation*) atau sekedar membagikan honor (tip) sesekali.

Bekerja dengan dibantu buruh tidak dibayar juga mirip dengan fenomena usaha rintisan (startup) di bidang IT ketika semua anggota tim bekerja sukarela atau dibayar minim pada tahap awal pengembangan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha digital pemula belum mampu membayar karyawan tetap, sehingga sering kali skema bantuan pertemanan digunakan dari kerabat, saudara atau teman dekat. Selain itu, sifat pekerjaan digital yang cepat berubah juga mendorong penggunaan skema kolaborasi “ringan” *based on project* saja sehingga tidak ada kewajiban membayar gaji rutin (efisien).

Lebih lanjut, penyediaan akomodasi dan makan-minum juga tumbuh tinggi (116,4%) yang didorong oleh maraknya usaha kuliner dan sewa penginapan bagi wirausaha kecil dibantu oleh kerabat keluarganya atau penggunaan jasa pekerja lepas sehingga tidak ada bayaran secara tetap. Sektor konstruksi tumbuh tinggi (81,1%) yang menegaskan kondisi banyaknya tukang/pekerja bangunan lepas yang dibayar per proyek/harian. Meningkatnya penduduk berusaha dibantu buruh tidak tetap pada jasa

pendidikan (89,8%) mengindikasikan maraknya lembaga kursus atau tutor informal (daring dan luring) serta guru privat yang tidak perlu merekrut tenaga kerja secara permanen.

Sementara itu, sektor yang tumbuh moderat pada kelompok ini adalah industri pengolahan (40,3%), dan perdagangan (28,5%) yang masing-masing menunjukkan banyaknya usaha IKM rumahan yang mempekerjakan kerabat dan menegaskan warung/toko kecil sering mengandalkan bantuan anggota keluar (termasuk *merchant* yang berjualan pada platform *online*). Peningkatan positif kelompok ini pada sektor pertambangan, meski cakupannya kecil, menunjukkan adanya lapangan usaha skala rumah tangga yang memanfaatkan peluang tambang/penggalian dengan merekrut pekerja lepas.

Di sisi lain, sektor pertanian dengan penduduk bekerja paling banyak pada kelompok ini mengalami kontraksi (-10,4%). Kondisi ini dapat menandakan indikasi migrasi ke sektor lain, atau berpindah status menjadi berusaha sendiri serta penurunan minat pada sektor pertanian tradisional khususnya bagi generasi muda. Terakhir, penduduk berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar pada sektor transportasi dan pergudangan meski menunjukkan adanya tren peningkatan setahun terakhir, sepanjang periode sepuluh tahun terakhir masih mengalami penurunan (-6,1%).

Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar (Informal)

Sektor	Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar (Informal)				Growth (%)
	2015	2019	2020	2024	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.890	10.350	11.286	10.652	-10,4%
Pertambangan dan Penggalian	57	50	55	79	38,0%
Industri Pengolahan	1.155	1.556	1.606	1.621	40,3%
Konstruksi	78	113	90	142	81,1%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3.641	4.201	4.720	4.680	28,5%
Transportasi dan Pergudangan	66	54	46	62	-6,1%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.030	1.720	1.866	2.229	116,4%

Informasi dan Komunikasi	18	42	59	52	191,3%
Jasa Pendidikan	17	34	32	33	89,8%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Kelima, status pekerja bebas, baik di pertanian maupun non pertanian menunjukkan tren yang dinamis antar sektor. Sektor informasi dan komunikasi lagi-lagi mencatatkan pertumbuhan tertinggi (156,6%) yang kembali menegaskan pesatnya digitalisasi dan permintaan jasa teknologi. Pekerja bebas di sektor ini banyak berupa *content creator*, *creative writer*, admin media sosial, maupun pengembang aplikasi paruh waktu yang dapat bekerja dengan lebih dari satu majikan. Tren pola kerja dengan tempat dan waktu fleksibel, misalnya sebagai *digital nomad*, juga mendorong angkatan kerja untuk berprofesi sebagai pekerja bebas digital, terutama angkatan kerja muda. Penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh cukup tinggi (84,8%) karena dapat menyerap tenaga kerja fleksibel terlebih pada *high season* seperti musim liburan atau hari raya.

Selanjutnya sektor perdagangan (25%) dan jasa pendidikan (17,9%) tumbuh moderat. Pertanian (15,9%) menunjukkan tenaga lepas musiman masih cukup signifikan. Pekerja bebas di industri pengolahan mengalami peningkatan kecil yang menandakan ruang pekerja bebas di sektor ini tetap ada. Sementara itu, tiga sektor mengalami kontraksi yaitu pertambangan (-30%), konstruksi (-11,7%), dan transportasi (-10,8%). Pertumbuhan negatif pekerja bebas di ketiga sektor tersebut dapat dipengaruhi perubahan model kerja ke arah lebih formal dan aturan kerja yang lebih ketat.

Tabel 2.13 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Pekerja Bebas Pertanian dan Non Pertanian (Informal)

Sektor	Pekerja Bebas Pertanian + Non Pertanian (Informal)				Growth (%)
	2015	2019	2020	2024	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.086	5.171	5.920	5.894	15,9%
Pertambangan dan Penggalian	265	213	213	185	-30,0%
Industri Pengolahan	853	875	738	883	3,5%
Konstruksi	4.380	3.716	3.979	3.867	-11,7%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	451	396	425	564	25,0%
Transportasi dan Pergudangan	486	401	416	433	-10,8%

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64	122	111	118	84,8%
Informasi dan Komunikasi	6	3	13	16	156,5%
Jasa Pendidikan	18	1	50	21	17,9%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

Terakhir, penduduk bekerja dengan berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar. Kelompok ini merupakan pekerja paling rentan karena memiliki ketidakpastian paling tinggi dalam konteks peningkatan kesejahteraan. Bahkan, dapat dikatakan penduduk bekerja pada kelompok ini merupakan pengangguran terselubung. Sebelum pandemi, porsi kelompok ini sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun setelah pandemi, kembali naik dan belum menunjukkan penurunan berarti. Dalam konteks penciptaan lapangan kerja layak dan berkualitas, kelompok ini tentu harus menjadi prioritas utama yang diintervensi pemerintah.

Potret sektoral pekerja keluarga/tidak dibayar menunjukkan kondisi yang dramatis. Di satu sisi, sektor pertanian yang paling banyak pekerja keluarga/tidak dibayar ini menunjukkan tren penurunan (-4,2%). Namun sektor strategis lainnya, meski secara jumlah tidak sebanyak di pertanian, menunjukkan tren peningkatan. Tidak dapat dipungkiri, tren kenaikan tersebut diakibatkan pandemi yang memaksa angkatan kerja mau bagaimanapun dapat tetap beraktivitas dibandingkan masuk dalam status pengangguran.

Sektor jasa pendidikan menunjukkan pertumbuhan paling tinggi (276,9%) yang menggambarkan peningkatan jumlah anggota keluarga yang turut andil di lembaga bimbingan belajar, kursus, atau kegiatan edukasi non-formal tanpa menerima upah. Pertumbuhan tertinggi kedua ada di sektor konstruksi (195,3%), menandakan banyaknya proyek bangunan skala kecil atau sekedar renovasi yang hanya melibatkan kerabat atau tetangga terdekat. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi (171,7%) dan penyediaan akomodasi makan-minum (157,4%) juga sama-sama tumbuh tinggi dalam menyerap pekerja keluarga/tidak dibayar.

Lebih lanjut, pertumbuhan di sektor industri pengolahan (52%) dan perdagangan (49%) juga cukup tinggi dan mengkhawatirkan mengingat jumlah absolut pekerja keluarga/tidak dibayar di kedua sektor tersebut masih jutaan orang. Pekerja keluarga/tidak dibayar juga masih meningkat pada sektor pertambangan dan penggalian, padahal sektor ini memiliki risiko kerja yang sangat besar. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan juga masih terdapat penambahan pekerja keluarga/tidak dibayar meski tidak sebesar sektor strategis lain. Bisa jadi karena adanya pergeseran platform daring yang memberikan penghasilan bagi pengemudi/kurir sebagai mitra.

Tabel 2.14 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas Menurut Status Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar (Informal)

Sektor	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar (Informal)				Growth (%)
	2015	2019	2020	2024	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.894,1	8.649,3	10.389,3	10.439,1	-4,2%
Pertambangan dan Penggalian	45,8	49,3	48,1	69,1	50,9%
Industri Pengolahan	1.174,6	1.374,6	1.660,3	1.785,5	52,0%
Konstruksi	26,6	63,0	100,1	78,7	195,3%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	2.854,7	2.891,1	3.912,4	4.252,9	49,0%
Transportasi dan Pergudangan	28,4	32,6	39,3	37,8	33,0%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	826,4	1.276,6	1.749,5	2.127,0	157,4%
Informasi dan Komunikasi	14,6	23,0	35,4	39,8	171,7%
Jasa Pendidikan	9,5	33,1	39,0	35,9	276,9%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

2.2.3.3 Gaji/Upah/Pendapatan Bersih Penduduk Bekerja Sektor Strategis

Secara umum, penghasilan penduduk bekerja sembilan sektor strategis menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Meski sempat terkoreksi di tahun pandemi (2020), perkembangan menunjukkan penghasilan penduduk bekerja berangsur pulih. Data menunjukkan, penghasilan sektor yang paling rendah terdampak pandemi (dilihat dari berkurangnya penghasilan tahun 2019 ke tahun 2020) adalah sektor pendidikan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Di sisi lain, penghasilan sektor yang paling besar terdampak pandemi antara lain sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta informasi dan komunikasi.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata gaji/upah/pendapatan bersih seluruh sektor (59,4%) selama 2015-2024, terdapat lima sektor strategis yang memiliki pertumbuhan lebih besar yaitu sektor pertanian (72,2%), industri pengolahan (74,5%), konstruksi (71,7%), perdagangan (70,8%), serta transportasi dan pergudangan (82,5%). Sementara itu, penghasilan empat sektor sisanya tumbuh lebih

kecil yaitu pertambangan (50,7%), penyediaan akomodasi dan makan-minum (45,1%), informasi dan komunikasi (49,5%), dan jasa pendidikan (24,6%).

Meski begitu, tidak semua sektor strategis memiliki penghasilan di atas rata-rata penghasilan seluruh sektor. Hanya ada empat sektor yang konsisten memiliki selisih (gap) positif di atas penghasilan seluruh sektor yaitu pertambangan, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Penghasilan sektor konstruksi dan perdagangan hingga 2024 masih lebih rendah dibandingkan penghasilan seluruh sektor, namun tren selisih (gap) kedua sektor tersebut positif atau kian menyempit. Di sisi lain, selisih (gap) penghasilan di sektor pertanian, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta jasa pendidikan justru makin melebar.

Tabel 2.15 Perkembangan Rata-rata Gaji/Upah/Pendapatan Bersih Pekerja Sektor Strategis

Sektor	2015	2019	2020	2024	Growth (%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.018.148	1.490.991	1.363.026	1.753.129	72,2%
Selisih terhadap seluruh sektor	(841.022)	(1.143.534)	(1.089.792)	(1.210.297)	-43,9%
Pertambangan dan Penggalian	3.127.196	4.123.559	3.820.712	4.712.328	50,7%
Selisih terhadap seluruh sektor	1.268.026	1.489.034	1.367.894	1.748.902	37,9%
Industri Pengolahan	1.778.160	2.719.092	2.535.984	3.102.995	74,5%
Selisih terhadap seluruh sektor	(81.010)	84.567	83.166	139.569	272,3%
Konstruksi	1.680.557	2.400.683	2.304.412	2.885.517	71,7%
Selisih terhadap seluruh sektor	(178.613)	(233.842)	(148.406)	(77.909)	56,4%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1.609.687	2.404.405	2.294.624	2.748.579	70,8%
Selisih terhadap seluruh sektor	(249.483)	(230.120)	(158.194)	(214.847)	13,9%
Transportasi dan Pergudangan	2.030.038	3.314.993	2.900.204	3.705.665	82,5%
Selisih terhadap seluruh sektor	170.868	680.468	447.386	742.239	334,4%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.647.132	2.278.111	1.889.227	2.390.444	45,1%
Selisih terhadap seluruh sektor	(212.038)	(356.414)	(563.591)	(572.982)	-170,2%
Informasi dan Komunikasi	3.272.083	4.269.133	3.887.390	4.891.045	49,5%
Selisih terhadap seluruh sektor	1.412.913	1.634.608	1.434.572	1.927.619	36,4%
Jasa Pendidikan	2.291.262	2.725.463	2.656.536	2.853.996	24,6%
Selisih terhadap seluruh sektor	432.092	90.938	203.718	(109.430)	-125,3%
Rata-rata Gaji/Upah/Pendapatan Bersih Seluruh Sektor	1.859.170	2.634.525	2.452.818	2.963.426	59,4%

Sumber: BPS, 2015 - 2024 (diolah)

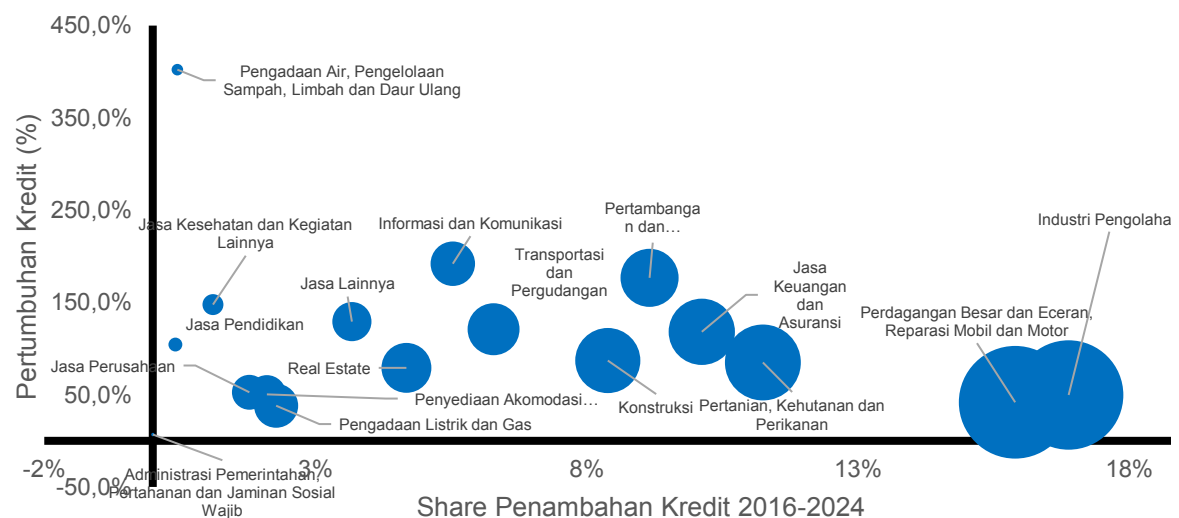
Box 2 Kredit Sektoral: Dukungan Terhadap Padat Karya, Hilirisasi, Digitalisasi, dan Tren Ramah Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri, pembiayaan kredit usaha (modal kerja dan investasi) memiliki peran vital bagi denyut nadi perekonomian. Kredit modal kerja (KMK) berfokus pada kebutuhan operasional jangka pendek seperti pengadaan bahan baku, gaji karyawan dan/atau biaya operasional rutin. Di sisi lain, kredit investasi (KI) ditujukan untuk ekspansi usaha dalam jangka menengah-panjang seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik/unit produksi baru, dan/atau pendirian cabang usaha. Kombinasi dari data KMK dan KI tersebut dapat memberikan gambaran lebih utuh seberapa besar dukungan fasilitas pinjaman perbankan yang mengalir ke setiap sektor untuk menopang operasional harian maupun ekspansi jangka menengah-panjang.

Grafik *scatter plot* berikut memberikan gambaran dinamika distribusi kredit agregat (KMK + KI) di 17 sektor lapangan usaha selama kurun waktu 2016-Oktober 2024. Sumbu x menandakan *share* penambahan kredit agregat tiap sektor terhadap total penambahan kredit agregat dalam kurun waktu tersebut, sedangkan sumbu y merepresentasikan pertumbuhan kredit agregat sektoral. Sementara itu, besaran lingkaran menunjukkan *outsanding* kredit agregat pada Oktober 2024.

Secara umum, grafik tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pembiayaan kredit telah mengalir ke sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya) yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Sektor konstruksi juga tercatat menunjukkan porsi pinjaman cukup besar yang mengindikasikan pembangunan infrastruktur—mulai dari jalan, jembatan, hingga proyek perumahan—apabila terus dijalankan secara intensif, memberikan efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja formal.

Grafik *Scatter Plot* Pertumbuhan, Porsi Penambahan, dan Nilai *Oustanding* Kredit Agregat (Kredit Modal Kerja + Kredit Investasi)



Sumber: Bank Indonesia (2024)

Di sisi lain, penetrasi pembiayaan bagi sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minum (yang paling banyak membuka lapangan kerja) masih tertinggal dibandingkan tiga sektor padat karya yang sebelumnya disebutkan. Padahal, sektor pariwisata dan kuliner ini memiliki potensi untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peluang usaha baru dan juga berpotensi mendorong transisi pekerjaan informal ke formal.

Sementara itu, dari segi pertumbuhan kredit, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah serta daur ulang, terlihat sangat mencolok karena tumbuh mencapai 400 persen. Meski porsi penambahannya relative masih kecil ketimbang sektor lain, lonjakan pertumbuhan kredit ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan akan pembiayaan usaha yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*green economy*). Sektor informasi dan komunikasi (infokom) juga menunjukkan pertumbuhan kredit yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi unit usaha digitalisasi, transformasi teknologi dan cepatnya adopsi layanan infokom di masyarakat.

Terakhir, aliran kredit di sektor pertambangan juga menunjukkan peningkatan, baik dilihat dari outstanding, share penambahan kredit maupun pertumbuhannya. Hal itu tidak lain disebabkan karena adanya dukungan kebijakan hilirisasi yang digaungkan pemerintah. Proses hilirisasi membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit tetapi mampu mendorong industri turunan yang bernilai tambah tinggi dan rantai pasok yang dapat membuka lapangan kerja. Prospek bisnis jangka panjang tersebut yang menjanjikan bagi perbankan, asalkan kebijakan ini dijalankan dengan konsisten dan didukung kelembagaan yang kuat.

2.3 DETERMINAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Pada bagian sebelumnya telah disampaikan perkembangan penduduk bekerja dan penciptaan lapangan kerja berdasarkan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui potret yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Selanjutnya, bagian ini akan menyajikan analisis statistik inferensial sebagai upaya untuk memahami determinan atau faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja, baik secara agregat maupun dalam karakteristik formal dan informal.

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui determinan yang dimaksud adalah melalui regresi data panel. Regresi data panel digunakan karena kemampuannya dalam memanfaatkan variasi lintas unit (*cross section*) serta variasi sepanjang waktu (*time series*). Metode ini menawarkan keunggulan dalam mengatasi berbagai kelemahan yang sering ditemui saat menggunakan data *cross-section* atau *time-series* secara terpisah.

Baltagi (2021) menunjukkan setidaknya terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan data panel antara lain: (1) kontrol heterogenitas individu sehingga mengurangi risiko bias yang muncul akibat faktor-faktor tak terukur yang sifatnya spesifik pada unit tertentu tetapi konstan dari waktu ke waktu; (2) data yang tersaji

lebih informatif dan beragam, kolinieritas yang lebih rendah antar variabel, lebih banyak *degree of freedom* dan lebih efisien; (3) data panel lebih baik untuk digunakan pada penelitian *dynamics of adjustment*; dan (4) data panel memungkinkan untuk melakukan konstruksi dan pengujian perilaku model yang lebih kompleks dibandingkan data *cross-section* atau *time series* saja.

Data *cross-section* yang digunakan adalah berbasis wilayah yaitu 34 Provinsi, sedangkan untuk *time-series* selama sembilan periode dari 2015-2023 sehingga terdapat 306 observasi. Variabel dependen yang digunakan adalah jumlah penduduk bekerja sebagai proxy penyerapan tenaga kerja akibat adanya penciptaan lapangan kerja dan dibagi menjadi tiga kriteria yaitu secara agregat, status formal dan status informal. Selanjutnya digunakan 37 variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Model ini menggunakan *fixed effect model* dengan seluruh variabel ditransformasi dalam bentuk log. Pengambilan variabel independen ini dilakukan melalui studi literatur beberapa penelitian yang relevan (dapat dilihat pada lampiran), pendapat ahli (*expert judgement*) dari *focus group discussion* (FGD) maupun dugaan dari peneliti sendiri. Adapun studi literatur terkait dan definisi operasional variabel secara lebih detail dapat dilihat pada lampiran.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat tiga variabel dependen yaitu lapangan kerja total/agregat (model 1), lapangan kerja formal (model 2), dan lapangan kerja informal (model 3). Hasil regresi data panel menunjukkan ketiga model memiliki nilai R^2 yang tinggi sehingga dapat berarti secara statistik variabel independen pada model mampu menjelaskan variasi variabel dependen dengan cukup baik. Nilai F statistik yang signifikan pada derajat keyakinan 0,01 juga menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketiga model variabel dependen.

Tabel 2.16 Hasil Regresi Data Panel Pekerja Agregat (Model I), Pekerja Formal (Model II), Pekerja Informal (Model III)

	Variabel Dependen		
	Model I (Penduduk Bekerja)	Model II (Penduduk Bekerja Formal)	Model III (Penduduk Bekerja Informal)
Log Produk Domestik Regional Bruto	0,062* (0,033)	0,003 (0,059)	-0,019 (0,078)
Log Kredit	-0,001*** (0,0002)	-0,008*** (0,003)	0,008*** (0,002)
Log Kredit Modal Kerja	0,023** (0,011)	0,056 (0,042)	-0,015 (0,035)
Log Kredit Investasi	-0,003 (0,005)	-0,023 (0,026)	0,035** (0,015)
Log Kredit Konsumsi	-0,005	-0,012* (0,006)	0,012* (0,007)
Log Penanaman Modal Asing Perkapita	-0,0004 (0,001)	0,002 (0,004)	-0,001 (0,003)
Log Penanaman Modal Dalam Negeri Perkapita	0,0002 (0,001)	0,013*** (0,003)	-0,009** (0,004)
Produktivitas	-0,187* (0,110)	0,177* (0,106)	-0,278*** (0,030)
Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi	0,00002	-0,001*** (0,0002)	0,001*** (0,0001)
Log Penduduk Bekerja Sektor Pertanian	0,020 (0,014)	0,048 (0,031)	-0,032 (0,028)
Log Penduduk Bekerja Sektor Pertambangan	0,005** (0,003)	0,006 (0,014)	0,006 (0,007)
Log Penduduk Bekerja Sektor Industri	-0,016** (0,007)	0,042** (0,019)	-0,056*** (0,019)
Log Penduduk Bekerja Sektor Konstruksi	0,016 (0,013)	0,017 (0,043)	-0,026 (0,024)
Log Penduduk Bekerja Sektor Perdagangan	0,008 (0,013)	-0,100** (0,044)	0,081*** (0,020)
Log Penduduk Bekerja Sektor Transportasi	0,004 (0,011)	-0,022 (0,038)	0,005 (0,017)
Log Penduduk Bekerja Sektor Akomodasi Makan Minum	0,005 (0,008)	0,018 (0,022)	-0,008 (0,023)
Log Penduduk Bekerja Sektor Informasi dan Komunikasi	-0,003 (0,004)	0,022** (0,010)	-0,020*** (0,008)
Log Penduduk Bekerja Sektor Jasa Pendidikan	0,011 (0,007)	-0,023 (0,033)	0,020 (0,024)
Log Pekerja Usia Muda	0,171*** (0,008)	0,205*** (0,042)	0,240*** (0,034)
Log Pekerja Usia Dewasa	0,460*** (0,054)	0,751*** (0,084)	0,349*** (0,059)
Log Usia Pensiun	0,167*** (0,018)	0,029 (0,035)	0,353*** (0,052)
Log Penduduk Lulusan SMP ke bawah	0,008 (0,023)	-0,081 (0,065)	0,148* (0,077)
Log Penduduk Lulusan SMA	0,035* (0,019)	-0,080 (0,060)	0,014 (0,012)
Log Penduduk Lulusan SMK	0,003 (0,003)	0,005 (0,012)	0,004 (0,007)
Log Penduduk Lulusan Diploma dan Sarjana	0,009 (0,012)	0,136** (0,056)	-0,038 (0,038)
Dumi Tahun 2020	-0,009*** (0,002)	-0,051*** (0,010)	0,021*** (0,004)
Dumi Tahun 2021	-0,004 (0,003)	-0,042*** (0,010)	0,031*** (0,005)
Observasi	306	306	306
R2	0,96	0,81	0,88
F statistic	233,381***	1,198,450**	66,703***

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

Lebih lanjut, interpretasi pengaruh dan signifikansi dari masing-masing model dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Variabel pertama yang dijelaskan adalah pertumbuhan ekonomi. Pada model (1), koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0.062* menandakan bahwa kenaikan PDB sebesar satu persen berpotensi meningkatkan lapangan kerja agregat sekitar 0,062%, meskipun signifikansi hanya pada level 10%. Namun, variabel pertumbuhan ekonomi ini tidak memiliki pengaruh statistik yang signifikan, baik terhadap peningkatan lapangan kerja formal atau lapangan kerja informal secara terpisah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir belum mampu secara otomatis mendorong peralihan peningkatan kualitas dan formalisasi pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat diikuti oleh penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tetapi dapat menjadi lebih inklusif bila bersifat padat karya sehingga lebih banyak pekerja dapat merasakan peningkatan produktivitas dengan berpindah ke pekerjaan yang lebih baik (Merotto, Weber, dan Aterido, 2018). Pekerjaan lebih baik tersebut seringkali berada pada pekerjaan formal karena peluang yang lebih tinggi untuk dipenuhi aspek norma ketenagakerjaan dan pekerjaan layaknya sehingga produktivitas dapat lebih meningkat yang pada akhirnya mendorong kembali pertumbuhan ekonomi.

Laporan Bank Dunia (2021) menekankan pentingnya sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dari sektor manufaktur atau sektor yang padat karya dengan nilai tambah tinggi cenderung lebih mampu mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas. Namun, apabila pertumbuhan terjadi pada sektor yang kurang padat karya atau sektor berbasis komoditas yang tidak terlalu meningkatkan keterampilan pekerja, maka efeknya terhadap pekerjaan formal dan berkualitas menjadi terbatas.

2.3.2 Kredit

Variabel kredit, selain untuk melihat pengaruh kredit secara total/agregat, juga dilakukan pemecahan kredit berdasarkan jenis yaitu kredit modal kerja (MK), kredit investasi (I), dan kredit konsumsi (K). Tujuannya adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan karakteristik pengaruh dari masing-masing jenis kredit tersebut terhadap penciptaan lapangan kerja.

Hasil analisis variabel total kredit pada model (1) menunjukkan koefisien negatif signifikan (-0.001***), yang berarti peningkatan kredit agregat justru berasosiasi dengan penurunan jumlah lapangan kerja. Hasil ini dapat disebabkan karena pengaruh koefisien negatif signifikan (-0.008***) pada model (2), yang menunjukkan peningkatan kredit total cenderung terkait dengan berkurangnya pekerja formal. Di sisi lain, model (3) memiliki koefisien positif signifikan (0.008***), mengindikasikan bahwa bertambahnya kredit total justru mendorong peningkatan pekerja informal.

Temuan di atas dapat dimaknai bahwa peningkatan penyaluran kredit agregat apabila tanpa disertai dengan arah atau sasaran yang inklusif dalam penciptaan lapangan kerja justru akan memiliki efek yang negatif terhadap formalisasi pekerjaan. Alih-alih

menciptakan pekerjaan formal yang lebih stabil, peningkatan akses kredit secara umum dapat memberikan dorongan pada usaha-usaha mikro dan kecil yang lebih cenderung informal.

Misalnya, usaha perseorangan (atau mengikuti klasifikasi BPS, berusaha sendiri) yang mendapatkan kredit tanpa pengawasan/monitoring berkala terkait standar kerja formal dan/atau peningkatan serapan tenaga kerja (naik kelas menjadi wirausaha mapan) maka yang terjadi adalah terjebak dalam lingkaran setan lapangan kerja informal.

Selanjutnya, variabel kredit modal kerja menunjukkan koefisien positif signifikan (0.023^{**}) pada model 1, menandakan peningkatan kredit modal kerja berkorelasi dengan bertambahnya jumlah total pekerja karena bertambahnya lapangan kerja. Namun, kredit modal kerja ini tidak signifikan secara statistik mempengaruhi lapangan kerja formal maupun informal. Kondisi tersebut dapat dimaknai peningkatan kredit modal kerja dapat meningkatkan kapasitas usaha memperluas operasi bisnis atau sekedar mempertahankan operasional.

Dengan begitu, mampu menyerap lebih banyak atau mempertahankan kuantitas pekerja secara keseluruhan. Namun demikian, efek ini belum jelas arahnya ke sektor formal atau informal. Kredit modal kerja mungkin dimanfaatkan oleh berbagai jenis usaha, baik yang relatif mapan dan terdaftar maupun yang baru dan informal, sehingga pengaruhnya tidak tercermin dalam pergeseran struktur ketenagakerjaan antara formal dan informal secara signifikan.

Hasil analisis terhadap variabel kredit investasi menunjukkan tidak adanya signifikansi terhadap lapangan kerja total maupun formal tetapi signifikan terhadap peningkatan pekerja informal. Koefisien variabel ini positif signifikan (0.035^{**}), menunjukkan bahwa peningkatan kredit investasi berkaitan dengan bertambahnya pekerja informal. Kredit investasi sejatinya diharapkan untuk digunakan ekspansi jangka panjang, pembelian aset produktif, atau peningkatan kapasitas produksi.

Namun dalam konteks ini, hasilnya justru terkait dengan penambahan pekerja informal. Potret ini bisa menunjukkan bahwa investasi tersebut belum cukup terarah pada sektor-sektor yang dapat menciptakan pekerjaan formal yang stabil. Besar kemungkinan investasi tersebut dilakukan di sektor atau wilayah yang belum memiliki regulasi kuat atau kapasitas kelembagaan yang mampu mendorong formalisasi tenaga kerja. Akibatnya, peningkatan investasi malah memperbanyak usaha skala kecil atau proyek bisnis yang bersifat sementara dan cenderung tidak menggunakan kontrak kerja formal.

Terakhir pada bagian kredit, yaitu variabel kredit konsumsi menunjukkan pada model (1) tidak signifikan dengan koefisien yang negatif. Namun kredit konsumsi ini memiliki pengaruh negatif signifikan dengan koefisien (-0.012^*) yang berarti peningkatan kredit konsumsi berhubungan dengan berkurangnya pekerja formal. Di sisi lain, menunjukkan koefisien positif signifikan (0.012^*) sehingga peningkatan kredit konsumsi disinyalir mendorong kenaikan pekerja informal.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena kredit konsumsi digunakan rumah tangga untuk keperluan konsumsi, bukan produktif. Jika kredit konsumsi meningkat, hal itu mungkin mendorong kegiatan ekonomi yang lebih bersifat subsisten atau usaha kecil skala rumah tangga yang umumnya tidak teregistrasi. Dengan kata lain, kredit konsumsi tidak memperkuat sektor produksi formal yang dapat menciptakan pekerjaan formal, melainkan memperluas sektor informal melalui usaha mikro rumahan atau kegiatan dagang kecil yang tidak terdaftar secara resmi.

Fenomena tersebut terkonfirmasi dari data yang disajikan oleh Kemenko Perekonomian pada FGD. Data yang diambil dari Bekraf dan OSS-BKPM itu menyatakan bahwa mayoritas UMKM masih informal karena baru sekitar 9,27 juta atau 14% UMKM dari 64,5 juta UMKM yang memiliki legalitas usaha ditandai dengan adanya nomor induk berusaha (NIB). Selain itu 96,1 persen UMKM yang teridentifikasi/terdaftar tidak memilih badan hukum dan dari 4,3 juta usaha, 96 persen tidak memiliki sertifikat.

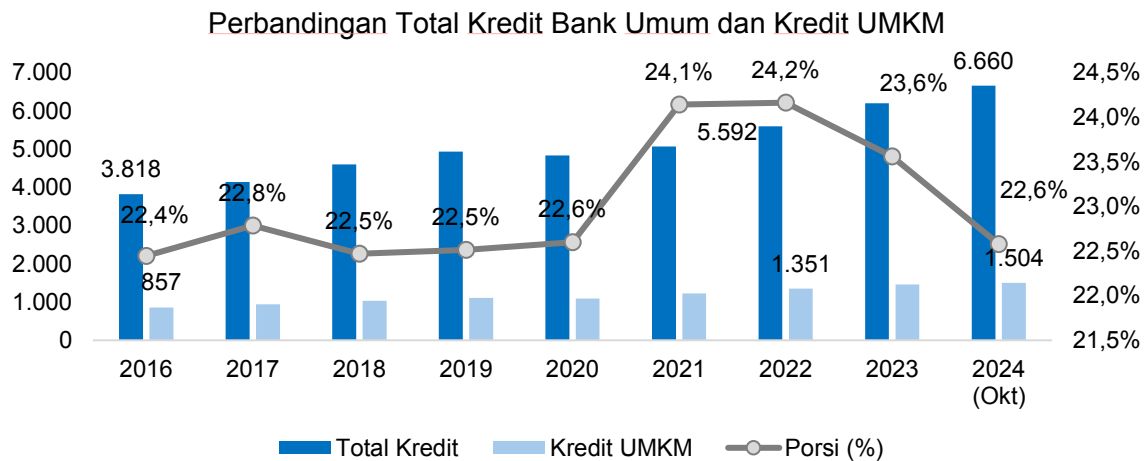
Box 3 Urgensi Kuantitas dan Kualitas Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Data Kementerian Koperasi dan UMKM (saat ini dengan nomenklatur baru, fungsi koperasi dan UMKM terpisah) menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi 99,9 persen terhadap penyediaan lapangan kerja, menyerap 96,9 persen total tenaga kerja, dan menyumbang 60,5 persen PDB Nasional. UMKM juga menunjukkan resiliensi ketika terjadi guncangan sektor keuangan seperti di era 1998-1999 dan 2008. Hanya saja, saat pandemi COVID-19, UMKM terpukul keras akibat pembatasan aktivitas sosial-ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat.

Semenjak UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (sebagaimana saat ini telah diubah sebagian melalui UU 11 Tahun 2020) beragam upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk otoritas moneter untuk mendorong perkembangan UMKM agar menjadi unit usaha yang mandiri, tangguh, dan menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program dukungan pembiayaan/pendanaan bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR mengalami perubahan skema dari imbal jasa penjaminan (IJP) selama kurun waktu 2007-2014 menjadi skema subsidi bunga/margin sejak 2015 hingga saat ini. Keseriusan pemerintah berlanjut dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 14 Tahun 2015 yang menandai terbentuknya Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Presiden Jokowi bahkan menargetkan penyaluran kredit UMKM mampu mencapai 30 persen dari total kredit pada 2024.

Namun apa daya, target tersebut tidak mampu dicapai. Kinerja kredit UMKM sebenarnya menunjukkan tren yang positif. Rata-rata pertumbuhan kredit UMKM sepanjang 2015-2023 sebesar 9 persen lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kredit agregat. Namun, porsi kredit UMKM terhadap total kredit tidak beranjak begitu jauh dari 21,1 persen (2015) menjadi 23,6 persen (2023). Porsi ini sebetulnya pernah berada di titik tertingginya pada 2022 sebesar 24,2 persen. Namun setelah itu menunjukkan tren penurunan hingga pada data outstanding Oktober 2024 sebesar 22,6 persen. BRI Research Institute (2022) memperkirakan porsi kredit UMKM mampu mencapai 30 persen pada 2035-2036.

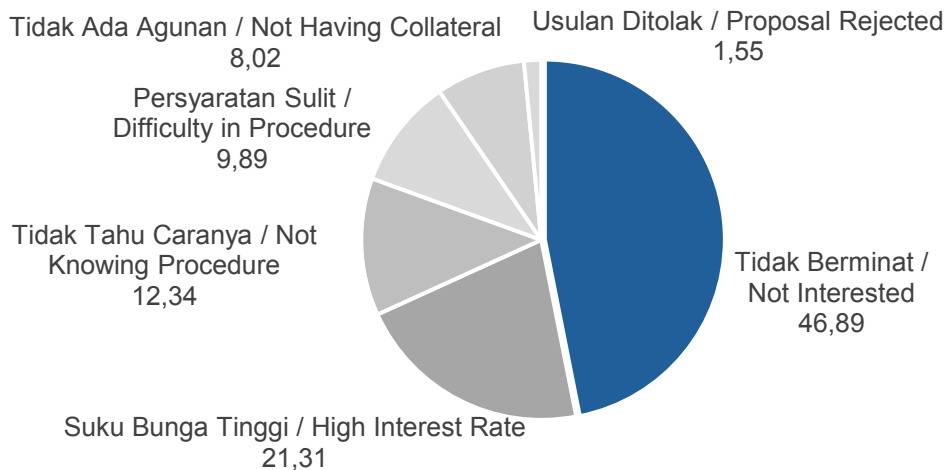


Sumber: Bank Indonesia, 2024

Keterbatasan rasio kredit UMKM tersebut dapat disebabkan karena masih sulitnya UMKM untuk mendapatkan akses. Rokhim (2021) menyebutkan beberapa sebab antara lain: Pertama, *information opacity*, yang utamanya karena UMKM secara umum tidak diaudit, usia usaha yang relatif muda, aset yang tidak dijamin, dan rendahnya penerapan teknologi. Kedua, *information opacity* tersebut menyebabkan terjadinya *information asymmetry* yang berujung pada *credit rationing* sehingga menurut logika bank, *higher return* (suku bunga tinggi) digunakan untuk mengkompensasi tingginya kemungkinan *default* dari UMKM. Ketiga, *granularity*, yaitu keadaan dimana pembiayaan UMKM memiliki karakteristik "kecil-kecil tapi banyak", sehingga meningkatkan *monitoring cost* bagi perbankan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi perbankan.

Publikasi BPS (2024) terkait profil industri mikro dan kecil (IMK) 2023 juga mengungkap bahwasanya hanya 15,84 persen dari usaha IMK yang memanfaatkan pinjaman dari bank untuk modal usaha, sedangkan sisanya tidak memanfaatkan pinjaman dari bank. Alasan dominan IMK tidak meminjam dari bank karena tidak berminat (46,84 persen). Sisanya karena merasa suku bunga masih tinggi (21,31 persen), tidak tahu cara meminjam di bank (12,34 persen), persyaratan sulit (9,89 persen), tidak ada agunan (8,02 persen) dan proposal ditolak (1,55 persen).

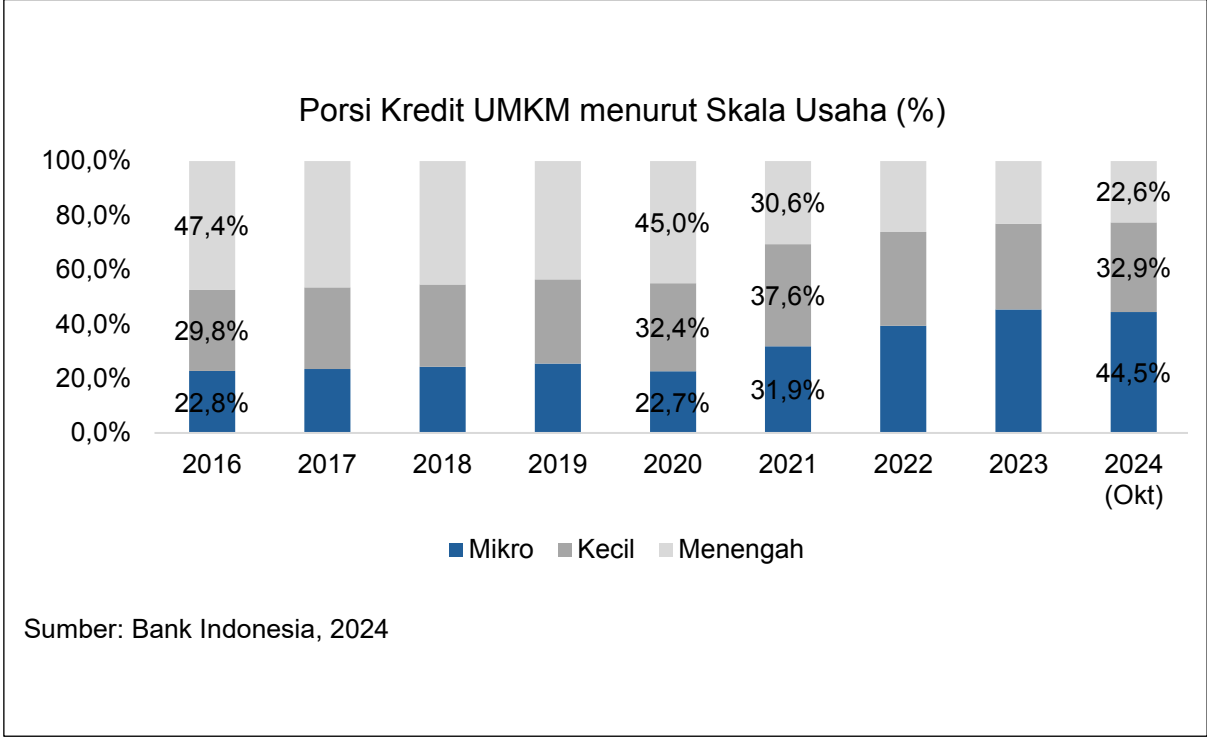
Alasan Utama Usaha IMK Tidak Meminjam di Bank, 2023



Lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan skala usahanya, tren kredit UMKM menunjukkan tren terbalik dengan jargon pemerintah yang menginginkan UMKM “naik kelas”. Porsi kredit usaha mikro menunjukkan peningkatan dua kali lipat dari 22,3 persen (2015) menjadi 44,5 persen (Oktober 2024). Rata-rata pertumbuhan kredit mikro periode 2015-Oktober 2024 mencapai 18,35 persen. Momentum tumbuhnya kredit mikro ini terjadi di 2021 (saat pemulihan ekonomi pasca pandemi), di mana kredit mikro tumbuh 57,74 persen.

Di sisi lain, porsi kredit usaha menengah turun lebih dari setengahnya 48,5 persen (2015) menjadi hanya 22,6 persen (Oktober 2024). Rata-rata pertumbuhan kredit usaha menengah ini pada periode yang sama tumbuh negatif -0,05 persen. Sementara itu, porsi kredit usaha kecil bertambah dari 29,2 persen (2015) menjadi 32,9 persen (Oktober 2024) dengan rata-rata pertumbuhan kredit menyentuh angka 10 persen.

Kondisi tersebut setidaknya dapat diakibatkan dua sebab. Pertama, dampak pandemi yang mengakibatkan operasional usaha menengah turun kasta menjadi usaha kecil atau bahkan mikro untuk bertahan hidup. Kedua, obral skema insentif KUR melalui tambahan subsidi bunga di masa pandemi untuk usaha mikro, sedangkan suku bunga usaha menengah mengikuti besaran suku bunga perbankan pada umumnya.



2.3.3 Investasi

Pengaruh dari investasi terhadap penciptaan lapangan kerja dilihat berdasarkan asalnya yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Variabel ini kemudian dimodifikasi menjadi investasi per kapita untuk masing-masing PMA dan PMDN. Investasi per kapita adalah konsep yang merujuk pada besarnya nilai investasi yang dibagi dengan jumlah penduduk atau populasi di suatu wilayah. Jika hanya total investasi dapat “terdistorsi” oleh ukuran populasi (misalnya, provinsi berpenduduk besar umumnya memiliki total investasi yang lebih besar meski belum tentu efektif atau berkualitas), maka investasi per kapita dapat memberikan indikasi seberapa besar potensi pengaruh investasi terhadap individu atau penduduk secara rata-rata.

Dalam konteks analisis pasar tenaga kerja dan kualitas pekerjaan, investasi per kapita membantu menilai sejauh mana modal yang masuk, baik dari sumber asing (PMA) maupun domestik (PMDN), dapat menciptakan peluang kerja yang lebih baik dan berpotensi mengangkat kualitas pekerjaan. Jika investasi per kapita tinggi dan efektif terarah ke sektor-sektor yang mendorong produktivitas, peningkatan keterampilan, dan formalitas tenaga kerja, maka seharusnya tercermin pada peningkatan indikator kualitas kerja. Sebaliknya, jika investasi per kapita besar namun tidak terhubung dengan penciptaan pekerjaan berkualitas atau formalisasi, maka hal itu menunjukkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan modal terhadap pembangunan sosial-ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PMA per kapita (\log_PMA_POP), sama sekali tidak menunjukkan signifikansi pengaruh secara statistik terhadap ketiga model. Hasil ini mengindikasikan bahwa setidaknya dalam konteks sampel dan periode data yang dianalisis, aliran investasi asing belum terhubung erat dengan peningkatan pekerja formal atau pengurangan pekerja informal. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain: *Pertama*, PMA cenderung mengalir ke sektor-sektor padat modal atau ekstraktif yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tidak mempengaruhi jumlah maupun kualitas pekerjaan secara signifikan.

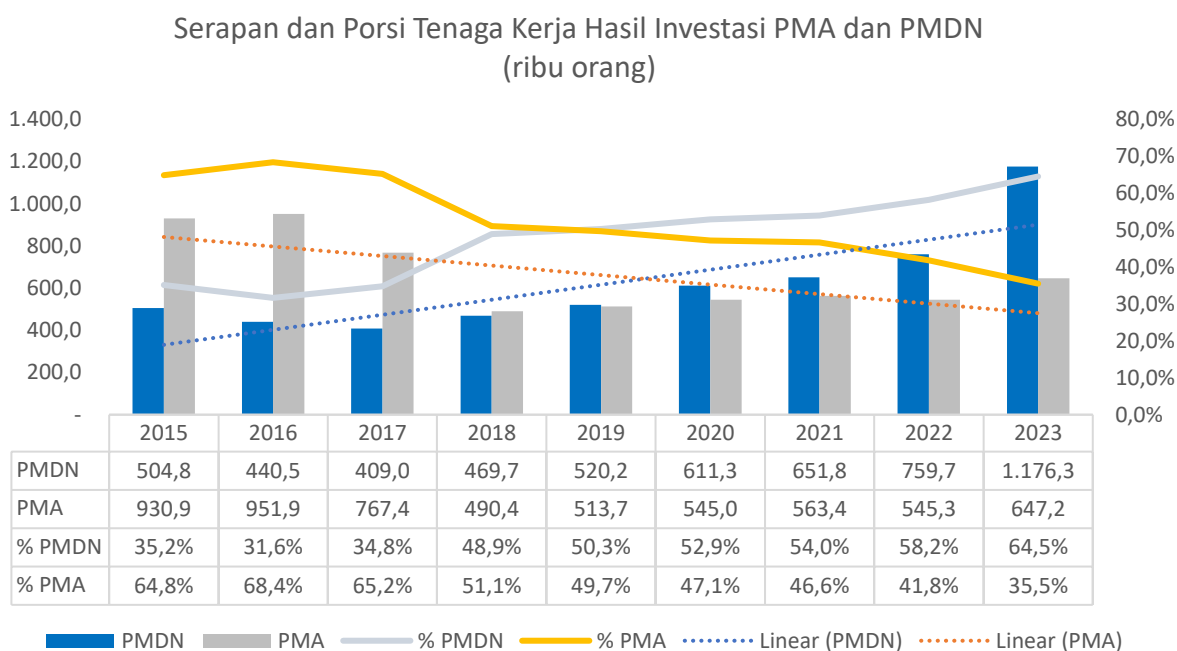
Kedua, PMA mungkin menciptakan lapangan kerja yang menuntut keterampilan tinggi dan spesifik yang tidak tersedia secara luas, sehingga tidak terlihat efek agregatnya pada struktur tenaga kerja. *Ketiga*, dampak PMA terhadap lapangan kerja sangat bergantung pada sektor, kualitas regulasi, dan sejauh mana investasi asing terintegrasi dengan ekonomi lokal. Investasi asing yang minim integrasi ke dalam rantai nilai domestik, mungkin kurang mampu mendorong pertumbuhan usaha lokal yang berpotensi menciptakan pekerjaan formal lebih banyak. Terakhir, jika PMA tidak terarah ke sektor padat karya dan tidak disertai strategi *link and match* dengan industri domestik, dapat meminimalkan efek terhadap kualitas dan struktur tenaga kerja.

Data BKPM menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja dari PMA memang menunjukkan tren yang terus menurun dalam kurun waktu hampir satu dekade terakhir. Pada 2015, PMA masih menyerap 930 ribu orang tenaga kerja, setara 64,8%

dari total serapan tenaga kerja hasil investasi. Setelah tahun 2016, kinerja PMA dalam memberikan banyak lapangan kerja terus menurun. Akhirnya pada 2019 terjadi pergeseran peran penyerap tenaga kerja yang dimotori oleh PMDN. Kontribusi PMDN dalam mendorong penciptaan lapangan kerja pun terus meningkat hingga mencapai lebih dari 1,1 juta orang pada 2023 dengan kontribusi yang hampir menyamai PMA di tahun 2015 yaitu sebesar 64,5%.

Data tersebut juga memperkuat hasil estimasi yang menunjukkan adanya perbedaan pengaruh PMA terhadap penciptaan lapangan kerja. Variabel PMDN per kapita memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan untuk model (2) dan model (3). Pada model (2), koefisien positif signifikan (0.013^{***}) yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi domestik per kapita memiliki kaitan yang erat dengan bertambahnya jumlah pekerja formal secara signifikan. Sebaliknya, pada model (3) koefisien negatif signifikan (-0.009^{**}), menandakan bahwa peningkatan PMDN per kapita mengurangi jumlah pekerja informal.

Gambar 2.8 Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Hasil Investasi PMA dan PMDN



Sumber: BPS, 2015 - 2023 (diolah)

Semakin tinggi investasi domestik per kapita, semakin terbuka lebar lapangan kerja sektor formal, dan semakin sedikit pekerja berada di sektor informal. Kondisi ini dapat dilihat setidaknya dari dua sebab: *Pertama*, kedekatan dengan struktur ekonomi lokal. Investasi domestik cenderung lebih familiar dengan kondisi pasar lokal, regulasi, serta preferensi tenaga kerja. Hal ini memudahkan pengembangan usaha yang membutuhkan tenaga kerja formal dengan standar ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang jelas sehingga dapat mendorong transisi pekerja dari informal ke formal.

Kedua, aspek penguatan rantai pasok domestik. PMDN disinyalir lebih terlibat dalam rantai nilai domestik yang mendorong tumbuhnya industri pendukung dan pemasok lokal. Dengan demikian, efek lanjutannya dapat menciptakan ekosistem usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih permanen (padat karya).

PMDN per kapita memiliki dampak yang lebih jelas dan positif terhadap potensi penciptaan lapangan kerja dan struktur ketenagakerjaan yang lebih berkualitas dibandingkan PMA. Informasi yang didapatkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada FGD mengkonfirmasi bahwa PMDN cenderung padat karya sedangkan PMA lebih ke padat modal dan investasi pada teknologi. Investasi asing memilih menggunakan sedikit input tenaga kerja namun menghasilkan output yang lebih banyak ketimbang merekrut tenaga kerja karena faktor sulitnya mencari sumber daya manusia (SDM) dengan keterampilan/keahlian yang sesuai.

2.3.4 Produktivitas

Variabel selanjutnya adalah produktivitas yang seringkali menjadi indikator kunci dalam menilai efisiensi dan daya saing perekonomian. Peningkatan produktivitas juga biasanya dikaitkan dengan perubahan struktural ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk pergeseran antar sektor formal dan informal. Pada FGD yang telah dilaksanakan, produktivitas menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan penciptaan lapangan kerja berkualitas, termasuk transisi dari informal ke formal.

Hasil regresi menunjukkan variabel produktivitas memiliki signifikansi pada setiap model meski memiliki signifikansi dan arah pengaruh yang berbeda. Pada model (1), produktivitas bernilai negatif (-0.187*) dan signifikan pada tingkat 10%. Peningkatan satu persen produktivitas berasosiasi dengan menurunnya penduduk bekerja secara agregat sekitar 0,187%. Sementara itu, koefisien produktivitas terhadap model (2) bernilai positif (0.177*) dan signifikan pada tingkat 10 persen. Produktivitas yang meningkat satu persen dapat mendorong penciptaan lapangan kerja formal 0,177%. Di sisi lain, dengan signifikansi paling tinggi, terdapat pengaruh produktivitas terhadap lapangan kerja informal dengan nilai koefisien (-0.278***). Peningkatan produktivitas sebesar satu persen berkaitan erat dengan penurunan serapan tenaga kerja informal sekitar 0,278%.

Produktivitas memiliki pengaruh negatif terhadap total penyerapan tenaga kerja. Pendapat umum terhadap hasil ini adalah ketika terjadi peningkatan produktivitas, unit usaha atau sektor ekonomi dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Adopsi teknologi, otomatisasi, atau perbaikan manajerial berimplikasi pada efisiensi. Dengan kata lain, peningkatan produktivitas seringkali bersifat "*labor-saving*", terutama untuk pekerjaan yang bersifat rutin atau berulang, sehingga total kebutuhan tenaga kerja dapat menurun.

Selain itu, pengaruh negatif produktivitas terhadap total serapan tenaga kerja ini juga dapat dikontribusikan karena lapangan kerja dalam satu dekade terakhir mayoritas masih diisi oleh banyaknya pekerja informal. Penurunan signifikan pada jumlah pekerja informal seiring meningkatnya produktivitas mengindikasikan bahwa

perbaikan efisiensi dan teknologi cenderung menggantikan pekerjaan yang kurang terampil dan tidak terstandar, yang umumnya menjadi ciri lapangan kerja informal (La Porta dan Shleifer 2014).

Pekerjaan informal seringkali tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga dapat dengan mudah digantikan oleh mesin atau perangkat elektronik. Ketika produktivitas meningkat, unit usaha melakukan substitusi kepada pekerja informal dengan teknologi, smartphone misalnya, yang lebih efisien. Kondisi ini juga yang mungkin dapat menjelaskan bahwa penduduk yang memiliki usaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar mengalami penyusutan dan berpindah menjadi berusaha sendiri/pekerja mandiri. Setelah usaha berkembang, bukan tidak mungkin untuk dilakukan ekspansi yang membutuhkan kembali tenaga kerja sehingga beralih menciptakan lapangan kerja formal.

Penjelasan tersebut berhubungan dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas berkorelasi positif dengan bertambahnya pekerja formal. Produktivitas yang terus meningkat dapat memungkinkan unit usaha untuk memperluas skala usaha, membuka peluang kerja yang lebih berkualitas, dan pada akhirnya menyebabkan konversi beberapa pekerjaan yang sebelumnya informal menjadi formal. Dengan begitu, proporsi pekerja formal yang semakin bertambah seiring peningkatan produktivitas menunjukkan perbaikan kualitas pekerjaan. Namun demikian, transisi tersebut perlu diiringi dengan intervensi pendidikan, pelatihan vokasi, serta sertifikasi untuk menjadi bekal kompetensi para pekerja khususnya pada bidang teknologi dan digitalisasi.

Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan Autor dan Salomons (2017) bahwa tantangan utama bukanlah hilangnya jumlah pekerjaan secara total akibat peningkatan produktivitas, tetapi perubahan komposisi pekerjaan itu sendiri. Pertumbuhan produktivitas mendorong pergeseran tenaga kerja dari sektor-sektor dengan produktivitas tinggi namun padat modal ke sektor jasa yang lebih berorientasi pada keterampilan. Pergeseran semacam itu dapat memperlebar kesenjangan keterampilan dan upah (*skill premium*), sehingga menekankan pentingnya kebijakan pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk memastikan bahwa peningkatan produktivitas dapat dinikmati secara lebih merata.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa peningkatan produktivitas erat kaitannya dengan penggunaan teknologi sehingga mengancam penciptaan lapangan kerja. Studi yang dilakukan Hötte, Somers, dan Theodorakopoulos (2022) dengan menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) mencoba untuk melihat apakah teknologi dan inovasi akan mengurangi lapangan kerja atau sebaliknya. Hasilnya, pada hampir semua indikator teknologi (robot, ICT, TFP, dan indikator proksi teknologi lainnya) yang digunakan pada berbagai literatur terkait menunjukkan bahwa adanya jumlah studi yang sama antara efek pengurangan lapangan kerja maupun efek penciptaan lapangan kerja akibat induksi teknologi.

Hanya saja pada indikator inovasi, bukti empiris menunjukkan bahwa inovasi produk sebagian besar bersifat menciptakan lapangan kerja, sedangkan bukti terkait inovasi proses belum menunjukkan adanya konklusi yang kuat. Inovasi produk cenderung menciptakan lapangan kerja (*labor-creating*) karena meningkatkan keragaman dan volume output, sementara inovasi proses sering kali bersifat menghemat tenaga kerja (*labor-saving*). Jika dikaitkan dengan hasil regresi di atas, peningkatan produktivitas yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir bisa jadi menggambarkan inovasi proses ini karena mengakibatkan pengurangan total pekerja.

2.3.5 Upah Minimum

Variabel upah minimum yang digunakan pada kajian ini adalah pertumbuhan upah minimum 34 provinsi dari sepanjang 2015-2023. Pertumbuhan upah minimum digunakan karena dapat memberikan informasi yang lebih fundamental dan dinamis dibandingkan dengan nominal upah minimum provinsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan upah minimum tidak memiliki signifikansi pengaruh terhadap total serapan tenaga kerja. Efek saling meniadakan antara hasil yang negatif signifikan pada lapangan kerja formal dan positif signifikan pada lapangan kerja informal juga dapat menjelaskan sebab pertumbuhan upah minimum yang tidak signifikan secara statistik pada lapangan kerja agregat.

Koefisien negatif dan signifikan (-0.001^{***}) menunjukkan peningkatan pertumbuhan upah minimum diasosiasikan dengan penurunan proporsi tenaga kerja formal. Meskipun efek ini tampak kecil, sinyal yang diberikan cukup jelas yaitu kenaikan beban upah minimum dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi perekrutan buruh/karyawan/pegawai secara permanen karena adanya kenaikan biaya produksi. Efek jangka pendek-menengah yang dapat terjadi adalah perusahaan merespons dengan menahan ekspansi tenaga kerja, berhentinya perpanjangan kontrak hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja yang paling terdampak yaitu mereka yang memiliki keterampilan rendah.

Dampak dari pengaruh negatif di sektor formal tersebut diiringi dengan koefisien yang positif dan signifikan pada serapan tenaga kerja informal. Sektor informal seakan menjadi “buffer” atau jaring pengaman para pekerja yang terdorong keluar dari pekerjaan formal akibat meningkatnya biaya tenaga kerja. Fenomena tersebut biasa terjadi pada pasar tenaga kerja negara berkembang yang memiliki dualitas di mana sektor formal diatur oleh hukum ketenagakerjaan yang ketat, termasuk upah minimum, sementara sektor informal relatif lebih longgar sehingga kenaikan upah minimum dapat memicu efek substitusi.

Sejalan dengan itu, studi Ariani dkk. (2024) pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017-2021 juga menunjukkan hasil yang sama dengan estimasi pada model kajian ini. Studi tersebut menjelaskan upah minimum secara signifikan memengaruhi tingkat pekerjaan di sektor formal dan informal. Upah minimum memiliki efek positif yang signifikan terhadap sektor informal, sedangkan terhadap sektor formal, dampaknya negatif secara signifikan. Dengan demikian, peningkatan upah minimum

dapat menyebabkan penurunan pekerjaan di sektor formal dan peningkatan pekerjaan di sektor informal dengan asumsi bahwa penurunan pekerjaan di sektor formal akan diserap oleh sektor informal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam peluang kerja yang disebabkan oleh peningkatan atau penurunan upah minimum.

Neumark (2018) menyatakan bahwa upah minimum yang lebih tinggi mendorong pemberi kerja untuk mengurangi penggunaan pekerja berupah rendah (atau hanya sebesar upah minimum) dan memiliki keterampilan yang rendah. Padahal mereka adalah target sebenarnya dari kebijakan upah minimum. Studi yang dilakukan Bossavie, Erdoğan, dan Makovec (2019) menunjukkan kenaikan upah minimum yang drastis dapat menghancurkan lapangan kerja formal, khususnya pada perusahaan dengan tingkat produktivitas rendah, peningkatan pengangguran, dan kegagalan sektor informal untuk menyerap tenaga kerja tersebut.

2.3.6 Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor/Lapangan Usaha

Variabel struktur tenaga kerja menurut sektor digunakan untuk melihat sektor mana yang mampu berperan signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas sekaligus untuk mengkonfirmasi analisis deskriptif yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada kajian ini digunakan 9 (sembilan sektor) yang banyak menyerap tenaga kerja antara lain: Pertanian (dalam arti luas), pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan. Hasil analisis menunjukkan, hanya 4 (empat) sektor yang memiliki signifikansi dengan pengaruh yang berbeda yaitu sektor pertambangan, industri, perdagangan, dan informasi komunikasi (ICT).

Pertama, sektor pertambangan dengan koefisien sebesar 0,005** menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada tingkat 5%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertambangan berasosiasi dengan peningkatan jumlah pekerja secara keseluruhan tetapi tidak memberikan kejelasan pengaruhnya terhadap lapangan kerja formal maupun informal. Sektor pertambangan sering diasosiasikan dengan sektor yang padat modal, namun dalam beberapa konteks regional, ekspansi pertambangan dapat menciptakan *multiplier effect* pada ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja tambahan di sektor lain (*backward and forward linkages*).

Laporan (McMahon dan Moreira, 2014) menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja sangat tinggi di negara-negara yang memiliki keterkaitan kuat antara sektor pertambangan dengan sektor lain apabila juga didukung oleh infrastruktur yang mumpuni. Laporan tersebut menyertakan 5 (lima) negara sebagai sampel yaitu Chili, Ghana, Indonesia, Peru, dan Afrika Selatan. Di negara-negara dengan sejarah pertambangan yang panjang, terutama di mana reformasi pada sektor ini dimulai lebih awal, dampak terhadap lapangan kerja cukup signifikan.

Hal itu menunjukkan bahwa pengalaman dan kerangka kerja yang matang dalam pengelolaan sektor pertambangan, termasuk reformasi kebijakan yang mendukung,

dapat berkontribusi secara substansial terhadap penciptaan lapangan kerja. Pada laporan tersebut ditampilkan bahwa pengaruh langsung sektor yang diciptakan oleh sektor pertambangan di Indonesia terhadap penyerapan tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan pengaruh tidak langsungnya.

Kedua, sektor industri dengan koefisien $-0,016^{**}$ (signifikan 5%) mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri justru terkait dengan penurunan jumlah total pekerja secara agregat. Meski terdengar kontra intuitif, penjelasan ini bisa terkait dengan proses industrialisasi yang meningkatkan produktivitas dan mendorong penggunaan teknologi, sehingga kebutuhan akan jumlah total tenaga kerja relatif lebih sedikit.

Di sisi lain, pengaruh terhadap lapangan kerja formal menunjukkan koefisien $0,042^{**}$ (signifikan 5%) yang menandakan peningkatan tenaga kerja di sektor industri meningkatkan jumlah pekerja formal. Sektor industri umumnya lebih terstruktur dan cenderung mematuhi regulasi ketenagakerjaan, sehingga memperbanyak proporsi pekerjaan formal. Data BPS juga menunjukkan selama kurun waktu 2015-2023, rata-rata proporsi pekerja formal industri manufaktur mencapai 63,8% dibandingkan pekerja informal pada sektor tersebut sebesar 36,2%.

Dalam kerangka transformasi struktural, peralihan dari sektor pertanian yang cenderung informal ke sektor industri yang formal merupakan ciri dari pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil analisis terhadap pengaruh tenaga kerja informal. Koefisien $-0,056^{***}$ (signifikan 1%) menandakan bahwa peningkatan proporsi pekerja di sektor industri berbanding terbalik dengan jumlah pekerja informal. Hal ini mendukung argumen bahwa industrialisasi menggeser tenaga kerja keluar dari sektor informal menuju sektor formal, atau mengurangi kebutuhan untuk bekerja di sektor informal.

Lebih lanjut, sektor industri sering dianggap sebagai motor utama pembangunan ekonomi dan transformasi struktural. Peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian atau sektor berproduktivitas rendah menuju sektor industri umumnya meningkatkan produktivitas agregat serta meningkatkan kualitas dan formalitas pekerjaan. Oleh sebab itu, sektor industri juga mampu melibatkan peningkatan kualitas institusi, pendidikan, dan inovasi.

Hal itulah yang membedakan industri dari sektor lain yang lebih rentan terhadap dinamika informalitas. Industri yang sukses mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan standar keterampilan akan meningkatkan permintaan terhadap pekerja formal terampil, sementara pekerja informal berkurang seiring modernisasi proses produksi.

Namun demikian, patut diwaspadai dengan apa yang disebut Rodrik (2015) sebagai deindustrialisasi dini. Fenomena di mana negara-negara berkembang cenderung mencapai puncak kontribusi sektor industri terhadap PDB pada tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan negara maju. Hal ini dapat membatasi daya serap tenaga kerja formal jangka panjang. Pada konteks Indonesia kondisi tersebut relevan

karena selain adanya stagnasi pertumbuhan industri manufaktur, porsi pekerja formal pada sektor ini juga menunjukkan tren yang menurun dari 68,7% di 2015 menjadi 60% di 2023.

Ketiga, hasil analisis variabel penduduk bekerja pada sektor perdagangan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap agregat lapangan kerja namun signifikan pada pekerja formal dan informal. Pada hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja formal, koefisien sebesar $-0,100^{**}$ (signifikan 5%) mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk bekerja di sektor perdagangan terkait dengan penurunan jumlah pekerja formal. Sektor perdagangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, kerap ditandai dengan segmentasi di mana sebagian besar aktivitasnya bercirikan informalitas yang tinggi (toko kelontong, pedagang kaki lima, usaha mikro).

Sedangkan, terhadap pekerja informal, koefisien $0,081^{***}$ (signifikan 1%) menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pekerja informal. Hal ini dapat dijelaskan oleh kenyataan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor yang menjadi pintu masuk bagi para angkatan kerja yang kesulitan memasuki sektor formal, karena rendahnya hambatan masuk, minimnya persyaratan keterampilan formal, serta fleksibilitas yang tinggi. Hal itu didukung oleh data selama periode 2015-2023, di mana rata-rata proporsi pekerja informal sektor perdagangan mencapai 67,5% berbanding pekerja formal yang hanya 32,5%.

Sektor perdagangan, khususnya grosir dan ritel skala kecil, ditandai oleh hambatan masuk yang rendah, modal minimal, serta mudahnya seseorang memulai usaha informal. Dalam konteks negara berkembang, sektor perdagangan menjadi "*buffer*" atau penyangga bagi tenaga kerja yang tidak terserap dalam sektor formal. Pada satu dekade terakhir, disrupsi teknologi dan digitalisasi melalui platform *e-commerce* mungkin telah menggeser pola perdagangan dan membuka peluang bagi usaha mikro untuk masuk dalam pasar internasional.

Oleh sebab itu, sektor perdagangan menghadapi dualisme: sebagian usaha berkembang menuju formalitas, misalnya toko *online* yang terdaftar dan membayar pajak. Sementara itu, banyak lainnya tetap berada di ranah informal karena kurangnya regulasi yang efektif, akses pembiayaan, serta keterampilan digital yang terbatas. Kondisi ini juga yang dapat menjelaskan mengapa peningkatan tenaga kerja di sektor perdagangan dapat berkorelasi negatif dengan pekerja formal, namun positif dengan pekerja informal.

Keempat, sektor informasi dan komunikasi (ICT) menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap lapangan kerja agregat. Namun memiliki signifikansi pengaruh positif untuk lapangan kerja formal dan negatif terhadap pekerja informal. Koefisien $0,022^{**}$ (signifikan 5%) mengindikasikan bahwa sektor informasi dan komunikasi dikaitkan dengan peningkatan jumlah pekerja formal. Sektor ini biasanya menuntut keterampilan lebih tinggi, inovasi, serta kepatuhan regulasi ketat, yang mendorong

terbentuknya pekerjaan dengan kontrak formal, upah yang lebih baik, dan jaminan sosial lebih kuat.

Di sisi lain, dengan koefisien $-0,020^{***}$ (signifikan 1%) dapat diartikan bahwa peningkatan dalam sektor ini menurunkan jumlah pekerja informal. Hal ini dapat dipahami dari sudut pandang bahwa sektor ICT menerapkan teknologi dan praktik bisnis modern, yang cenderung menurunkan insentif untuk mempekerjakan pekerja informal. Semakin berkembangnya sektor ICT mendorong terciptanya pekerjaan yang lebih terstandarisasi dan terdokumentasi sehingga dapat mengurangi skala sektor informal.

Sektor ICT dipandang sebagai sektor yang mendorong inovasi dan produktivitas (World Economic Forum, 2020). Peningkatan akses internet, penetrasi smartphone, serta adopsi teknologi digital di seluruh segmen ekonomi mengarah pada penciptaan pekerjaan baru di bidang pengembangan perangkat lunak, layanan data, keamanan siber, serta platform digital. Sektor ini umumnya lebih padat keterampilan (*skill-intensive*) dan menuntut standar pendidikan dan kompetensi yang lebih tinggi. Dengan begitu, sektor ICT cenderung memiliki struktur pengupahan yang lebih baik, keterikatan kontrak kerja yang jelas, dan regulasi yang mengikuti standar internasional, menghasilkan tingkat formalitas yang lebih tinggi (ILO, 2021).

Meskipun sektor ICT dapat menjadi katalisator penciptaan pekerjaan formal, ada potensi kesenjangan keterampilan. Pekerja dengan pendidikan dan kompetensi yang kurang memadai akan terpinggirkan, sehingga sektor ini mungkin tidak langsung mengurangi jumlah pekerja informal secara keseluruhan jika tidak disertai kebijakan pendidikan dan pelatihan digital yang komprehensif.

Namun, apabila pemerintah dan pelaku usaha dapat memberikan program pelatihan keterampilan digital, sertifikasi profesi, serta insentif bagi startup teknologi untuk berkembang, sektor ICT mampu menarik tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif menuju pekerjaan formal yang berkualitas. Bukti empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa ekonomi digital mendorong pembentukan ekosistem kerja yang lebih transparan, mudah dilacak, dan *manageable*, sehingga mampu mendorong transisi dari informal ke arah yang formal (McKinsey, 2019).

2.3.7 Demografi Usia Angkatan Kerja

Aspek demografi menurut usia angkatan kerja diikutsertakan pada model untuk mengetahui bagaimana pengaruh penawaran tenaga kerja dari segi usia terhadap dinamika pasar tenaga kerja dalam kurun waktu observasi. Sebagaimana diketahui, angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas dan rentang usia produktif berkisar 15-64 tahun. Pada model yang disajikan, digunakan tiga variabel restriksi yang dianggap dapat mewakili kelompok usia angkatan kerja produktif tersebut yaitu angkatan kerja muda (15-24 tahun), angkatan kerja dewasa (35-44 tahun) dan angkatan kerja usia pensiun (55-60 tahun).

Ketiga variabel yang mewakili kelompok demografi usia angkatan kerja itu menurut hasil regresi menunjukkan pengaruh signifikan untuk semua level pekerjaan (agregat, formal dan informal). Hanya saja kelompok usia pensiun tidak menunjukkan signifikansi terhadap pekerjaan formal. Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa distribusi usia dalam angkatan kerja dapat mempengaruhi struktur dan kualitas pekerjaan yang muncul di pasar tenaga kerja. Adapun penjelasan dari masing-masing kelompok usia tersebut sebagai berikut:

Pertama, peningkatan angkatan kerja usia muda (15-24 tahun) berhubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja secara agregat, formal, maupun informal. Kelompok *fresh graduates* ini biasanya memasuki pasar kerja dengan keterampilan dan pengalaman yang masih terbatas. Tak ayal, mereka mengisi sebagian besar pengangguran dengan kategori mencari pekerjaan (*friksional*). Fleksibilitas tinggi dan lebih mudah untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis akan pekerjaan yang tidak terlalu menetapkan syarat pengalaman atau kualifikasi keahlian yang tinggi menjadi salah satu keunggulan kelompok ini.

Pada satu sisi, mereka mampu mengisi posisi lapangan kerja formal jika memiliki tingkat pendidikan, keahlian mumpuni, dan kapasitas yang dibutuhkan pemberi kerja. Sebaliknya, apabila kualitas SDM angkatan kerja muda ini tidak mampu memenuhi ekspektasi permintaan pasar, maka mereka akan cenderung untuk masuk pada pekerjaan informal. Koefisien pengaruh terhadap pekerjaan informal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan formal pada hasil regresi setidaknya menyiratkan hal tersebut.

Sungguh pun begitu, Laporan ILO (2017) menyatakan bahwa pemuda menghadapi banyak tantangan di pasar kerja. Meski penyediaan lapangan kerja bagi mereka merupakan perhatian utama, tetapi kualitas pekerjaan yang tersedia tidak kalah penting. Banyak pemuda yang telah memperoleh pekerjaan tetap tidak mampu mengangkat diri mereka dan keluarganya dari kemiskinan.

Seringkali, pekerjaan mereka bersifat informal sehingga memiliki keterbatasan perlindungan dan akses jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, banyak pemuda saat ini tidak bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, atau tidak mengikuti pelatihan (NEET), sehingga mereka menjadi sumber daya yang tidak termanfaatkan. Kondisi tersebut tentu dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap prospek karier dan secara struktural mempengaruhi produktivitas.

Kedua, angkatan kerja usia dewasa (35-44 tahun) juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil estimasi pada angkatan kerja muda. Hanya saja koefisien pengaruh pada pekerjaan formal menunjukkan angka yang lebih tinggi (0,751^{***}) dibandingkan pengaruhnya terhadap pekerjaan agregat maupun informal. Kelompok angkatan kerja pada rentang usia ini biasanya memiliki tingkat keterampilan, pengalaman, serta stabilitas karier pada pekerjaannya. Mereka cenderung memiliki kombinasi keahlian dan pengalaman kerja yang lebih baik, didukung jejaring sosial profesional dan kemampuan adaptasi dunia kerja yang telah terbentuk.

Keunggulan tersebut mempermudah mereka untuk mengakses atau bahkan menciptakan pekerjaan yang lebih layak, dengan horizon stabilitas pekerjaan lebih lama dan jaminan/asuransi ketenagakerjaan yang lebih baik. Namun, dalam konteks negara berkembang yang memiliki struktur *dual system* seperti di Indonesia, kelompok usia ini juga dapat terserap pada pekerjaan informal sebagai jalan keluar sementara ketika menghadapi pemutusan kontrak atau hubungan kerja, maupun sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan.

Ketiga, hasil estimasi pada kelompok usia tua atau usia pensiun (55-60 tahun) menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan dengan total lapangan kerja dan pekerjaan informal namun tidak signifikan dengan pekerjaan formal. Dengan kata lain, ketika pasokan penduduk usia tua meningkat, masih dapat mendorong penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan namun cenderung terkonsentrasi pada pekerjaan informal. Kondisi ini setidaknya memberikan sinyal bahwa penduduk usia tua sejatinya masih produktif untuk bekerja namun karena adanya restriksi (batasan usia kerja misalnya), mereka harus terlempar dari pekerjaan formal.

Meningkatnya penduduk kerja usia tua yang bekerja secara informal juga mengindikasikan bahwa penghasilan mereka untuk dinikmati ketika pensiun belum mencukupi sehingga harus tetap menambah dan/atau mempertahankan pendapatan dengan bekerja informal. Alhasil, pekerjaan informal akhirnya kembali menjadi katup pengaman bagi para angkatan kerja pensiun atau mendekati pensiun. Pada umumnya mereka menjadi pekerja mandiri karena jenis pekerjaan dan waktu kerja yang lebih fleksibel.

Lebih lanjut, tren kenaikan dan besarnya populasi penduduk bekerja yang berprofesi sebagai pekerja mandiri seperti disebutkan pada bagian sebelumnya juga perlu diwaspadai. Hal itu dikarenakan, di negara maju saja seperti Eropa dan Inggris Raya, pekerja mandiri memiliki tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) yang lebih tinggi, risiko kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang lebih besar ketika memasuki masa pensiun. Akumulasi aset keuangan yang relatif lebih besar terhadap pendapatan juga dilakukan pekerja mandiri dibandingkan pekerja formal. Pola tersebut menunjukkan cakupan jaminan pensiun publik yang lebih rendah bagi pekerja informal dan kebutuhan mereka untuk ikut serta dalam jaminan/asuransi hari tua secara mandiri (Börsch-Supan dkk. 2019).

Oleh sebab itu, seiring peningkatan usia harapan hidup dan tren penuaan populasi, dibutuhkan strategi untuk memanfaatkan keterampilan dan pengalaman pekerja usia senior. Misalnya, pengembangan pola kerja paruh waktu formal, pelatihan ulang (*reskilling*), dan aturan pekerjaan yang lebih fleksibel di sektor formal. Oleh sebab itu, dalam konteks Indonesia, desain kebijakan perlu diarahkan menyentuh aspek tersebut selain agenda utama untuk perbaikan sistem jaminan/asuransi pensiun yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3.8 Tingkat Pendidikan

Aspek tingkat pendidikan pada model menunjukkan pengaruh yang berbeda dari masing-masing latar belakang pendidikan angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja baik di formal maupun informal. *Pertama*, peningkatan angkatan kerja lulusan SMP ke bawah berasosiasi positif dengan peningkatan jumlah pekerja informal, sementara dampaknya tidak signifikan terhadap serapan tenaga kerja agregat dan formal. Pendidikan lebih rendah mengurangi akses pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis dan kognitif yang biasanya dibutuhkan untuk memasuki pasar kerja formal. Pekerja dengan pendidikan rendah cenderung bertahan di sektor informal karena hambatan masuk yang rendah, kurangnya persyaratan administratif, dan fleksibilitas kerja. Namun, pekerjaan informal kurang stabil, tidak memiliki perlindungan sosial memadai, dan berupah rendah.

Kedua, angkatan kerja lulusan SMA memiliki efek positif signifikan terhadap jumlah pekerja agregat, namun tidak signifikan terhadap pekerja formal maupun informal. Hal ini dapat diakibatkan meski lulusan SMA lebih terdidik dari lulusan SMP ke bawah tetapi belum tentu memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan lapangan kerja formal.

Peningkatan lulusan SMA dapat meningkatkan jumlah total pekerja yang tersedia, namun tidak secara langsung menggeser komposisi formal-informal. Hal ini mungkin terjadi karena lulusan SMA dapat memasuki pasar kerja baik di sektor formal maupun informal tergantung kondisi pasar, kebutuhan keterampilan spesifik, dan peluang pekerjaan yang ada.

Ketiga, tidak adanya pengaruh signifikan dari angkatan kerja lulusan SMK terhadap serapan tenaga kerja agregat, formal dan informal. Hasil ini cukup mengkhawatirkan mengingat lulusan SMK sejatinya dibekali dengan keterampilan vokasional yang lebih spesifik dan siap kerja. Agaknya hasil tersebut juga mencerminkan eksistensi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara keterampilan yang diajarkan pada SMK dengan kebutuhan industri.

Hasil ini juga didukung oleh perwakilan dari APINDO pada FGD yang menyatakan kurikulum SMK didasarkan atas jurusan favorit bukan disesuaikan dengan permintaan industri. Apabila kurikulum SMK tidak relevan dengan permintaan pasar atau kualitasnya dipertanyakan, lulusan SMK tidak secara otomatis terserap sektor formal ataupun meningkatkan formalitas pasar kerja.

Terakhir, peningkatan jumlah angkatan kerja lulusan diploma dan sarjana signifikan mendorong peningkatan jumlah pekerja formal dan tidak signifikan berpengaruh terhadap pekerja informal. Hasil estimasi ini juga mendukung temuan (Pratomo dan Manning 2020) bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi di Indonesia berhubungan dengan akses yang lebih mudah ke pekerjaan formal. Individu dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk berpindah ke sektor formal dibandingkan dengan mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih rendah.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya terkait dengan keterampilan kognitif, teknis, dan sosial yang lebih baik, serta kapasitas untuk menyerap teknologi baru dan beradaptasi dengan standar operasional di sektor formal. Pekerja dengan profil lulusan pendidikan tinggi umumnya lebih menarik bagi perusahaan formal yang menawarkan pekerjaan terstruktur, stabil, dan bergaji lebih baik.

Mereka juga lebih mungkin memiliki akses ke jalur karier yang lebih jelas dan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih kuat, serta memperoleh penghasilan lebih tinggi. Dalam konteks pasar kerja kekinian yang bergerak menuju padat pengetahuan dan digitalisasi, permintaan akan tenaga kerja berpendidikan tinggi makin besar, terutama di sektor industri manufaktur yang berbasis teknologi, sektor jasa modern, dan sektor ICT.

2.3.9 Kondisi Eksternal (dummy COVID-19)

Variabel tahun 2020 dan 2021 sebagai dummy COVID-19 digunakan untuk melihat dampak dari kondisi eksternal yakni pandemi COVID-19 terhadap serapan tenaga kerja secara keseluruhan, formal dan informal. Pengaruh negatif signifikan terhadap lapangan kerja agregat dan pekerjaan formal, serta pengaruh positif signifikan terhadap pekerjaan informal menunjukkan hasil yang konsisten dengan kondisi riil dan data statistik deskriptif yang telah disajikan di awal. Jika terjadi *shock*, sudah barang tentu pekerjaan informal menjadi penyangga bertahan hidup sebagian besar angkatan kerja baik karena beralih profesi, sementara dirumahkan atau karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

2.4 UPAYA MENDORONG PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BERKUALITAS

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dan temuan dalam Focus Group Discussion (FGD), strategi atau upaya untuk mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas ke depan dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu dari sisi penawaran (*supply*), sisi permintaan (*demand*), dan aspek institusional/kelembagaan. Pada sisi kelembagaan ini, diharapkan tidak hanya menjadi ranah dari pemerintah namun juga terdapat dukungan dari otoritas moneter. Adapun penjelasan dari masing-masing aspek tersebut sebagai berikut:

2.4.1 Sisi Supply (Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kerja)

Pada aspek *supply*, tantangan utama adalah memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan produktif. Tingginya proporsi tenaga kerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah >50%) menjadi faktor penghambat penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas. Kondisi ini membuat pasar tenaga kerja rentan terhadap informalitas, sekaligus mengurangi daya saing tenaga kerja lokal ketika berhadapan dengan kemajuan teknologi, otomatisasi, hingga penerapan ekonomi hijau dan digital. Oleh sebab itu, strategi pada sisi *supply* perlu difokuskan pada pengembangan keterampilan (*skills development*) dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan.

Pertama, *link and match* antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan industri menjadi suatu keniscayaan. Kurikulum vokasi harus disusun bersama dengan pihak industri, tidak hanya mengandalkan *supply side* dari lembaga pendidikan. Pendekatan “*demand-driven*” dalam pelatihan dan vokasi akan memastikan lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan di lapangan kerja formal.

Kedua, optimalisasi program pemerintah seperti Kartu Prakerja, pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), serta inisiatif lain harus diarahkan tidak semata pada pemberian keterampilan dasar, namun fokus pada *reskilling* dan *upskilling*. Program ini harus menjadi jembatan agar tenaga kerja yang menganggur, terkena PHK, atau lulusan baru dapat memasuki lapangan kerja formal yang berkualitas.

Pendekatan komprehensif itu juga dapat melibatkan insentif bagi perusahaan yang bersedia membuka pusat pelatihan atau *training center*, sehingga biaya pelatihan dapat dipangkas dan ketepatan sasaran meningkat. Program pendampingan bagi UMKM juga dapat diarahkan pada pengembangan keterampilan manajemen bisnis, digitalisasi, dan standarisasi kualitas sehingga dapat naik kelas dan menjadi lebih formal.

Ketiga, diperlukan perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh, yang berorientasi pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) baik formal maupun non-formal, untuk memperkuat literasi, numerasi, keterampilan teknologi digital, serta keterampilan khusus di sektor prioritas seperti manufaktur yang bernilai tambah tinggi, industri hijau, ekonomi digital, dan jasa premium.

Terakhir, pemanfaatan peluang penempatan pekerja migran (PMI) terampil ke luar negeri dapat menjadi solusi jangka pendek-menengah untuk peningkatan daya saing, sekaligus mendorong peningkatan keterampilan yang lebih cepat.

2.4.2 Sisi *Demand* (Kebutuhan Industri dan Sektor Penciptaan Lapangan Kerja)

Pada sisi *demand*, lapangan kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat investasi, struktur ekonomi, produktivitas, teknologi, preferensi pemberi kerja, hingga regulasi. Dari sudut pandang permintaan, ketersediaan lapangan kerja formal berkualitas yang padat karya sangat ditentukan oleh kondisi investasi, struktur industri, biaya tenaga kerja serta kepastian regulasi. Isu yang mengemuka adalah kepastian hukum, stabilitas regulasi ketenagakerjaan, serta kemudahan perizinan menjadi prasyarat peningkatan investasi padat karya. Strategi sisi *demand* perlu dimulai dengan menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif.

Pertama, strategi sisi *demand* perlu dimulai dengan menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif. Kepastian hukum ketenagakerjaan, stabilitas regulasi upah, serta penyederhanaan birokrasi perizinan melalui OSS menjadi fondasi penting. Kondisi tersebut mendorong arus investasi jangka panjang yang pada gilirannya membuka lebih banyak lapangan kerja formal.

Kedua, insentif fiskal (*tax holiday, tax allowance, super tax deduction* untuk vokasi) harus diarahkan kepada industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, terutama di sektor-sektor yang katalis pertumbuhan, seperti manufaktur dengan tingkat teknologi yang masih dapat menyerap tenaga kerja dengan ketrampilan menengah seperti pada industri hijau, pertanian dan perikanan terintegrasi (agromaritim), serta sektor jasa yang berkembang (pariwisata, ekonomi kreatif, logistik).

Ketiga, sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi pertambangan, energi terbarukan, dan semikonduktor dapat terus didorong. Meski cenderung *capital-intensive*, sektor ini, dengan perencanaan yang tepat, dapat menciptakan *multiplier effect* bagi sektor jasa penunjang yang padat karya.

Keempat, peningkatan produktivitas secara sistemik dapat mereduksi hambatan biaya tenaga kerja sehingga upah yang meningkat dapat diimbangi dengan kenaikan output dan efisiensi. Regulasi upah minimum yang lebih stabil dan berbasis produktivitas serta dukungan perbaikan infrastruktur akan mendorong investor untuk masuk dan berkembang.

Terakhir, secara bersamaan, perlu kebijakan untuk mendorong UMKM bertransformasi menjadi formal, baik melalui insentif pembiayaan (akses KUR), legalitas mudah (NIB di OSS), atau kemitraan dengan perusahaan besar dalam skema rantai pasok yang terintegrasi dan mekanisme kolaboratif *closed-loop system*. Dengan demikian, UMKM akan terdorong untuk meningkatkan skala usaha, meningkatkan produktivitas, dan akhirnya menciptakan lebih banyak pekerjaan formal.

Sebagai contoh, dengan adanya NIB yang terintegrasi, perbankan dapat menilai profil risiko UMKM secara lebih akurat. Klasterisasi usaha (misalnya klaster agrowisata, klaster kuliner, klaster herbal) akan memudahkan pengelolaan risiko dan pengembangan skema penjaminan kredit. Bank BUMN seperti BRI dapat lebih aktif menjadi katalisator, bukan hanya menyediakan kredit tapi juga pendampingan manajemen keuangan, literasi digital, serta akses ke pasar. Semakin UMKM mampu mengelola bisnisnya dengan profesional, semakin besar peluang mereka untuk tumbuh dan bertransformasi untuk menciptakan lapangan kerja formal.

Box 4

Mendorong Masifikasi dan Replikasi Ekosistem “*Closed Loop*” bagi UMKM

Istilah “*closed loop system*” dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme kolaborasi di mana seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhubung dalam sebuah lingkaran interaksi yang saling memberikan manfaat. Pada lingkaran tersebut, informasi, sumber daya, dan dukungan tidak hanya mengalir satu arah, tetapi terus berputar dan membentuk umpan balik (*feedback*) yang memperkuat ekosistem. Pada tataran praktis, pendekatan “*closed loop*” relevan untuk diterapkan pada UMKM karena sering kali menghadapi tantangan klasik: keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, dan kapasitas manajemen yang terbatas.

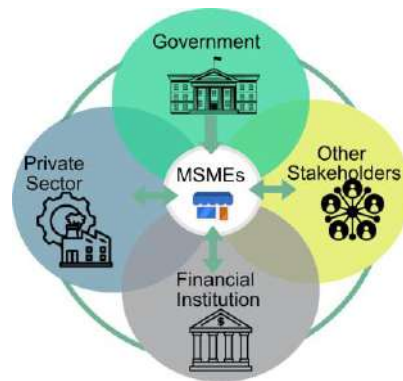
Secara teoritis pendekatan ini dapat memberikan beberapa implikasi positif bagi UMKM:

Pertama, sistem ini memungkinkan peningkatan efisiensi melalui proses pembelajaran yang terus-menerus. UMKM yang awalnya hanya memproduksi barang secara sederhana, misalnya, bisa mendapatkan masukan dari pasar melalui mitra korporasi atau melalui pemerintah, lalu memperbaiki produk dan metode produksi mereka.

Kedua, konsep ini menawarkan kerangka kolaboratif, di mana UMKM tidak berdiri sendiri, melainkan berada di tengah jaringan dukungan. Dukungan itu bisa berupa pelatihan (*training*), penjaminan mutu (*quality assurance*), akses pendanaan, bahkan pemanfaatan teknologi digital.

Ketiga, menjamin keberlanjutan hubungan antarpemangku kepentingan karena setiap aktor memiliki kepentingan yang selaras untuk menjaga aliran “loop” tetap berjalan. Sebagai contoh, lembaga keuangan akan mendapat manfaat dari kepastian pengembalian pinjaman karena UMKM yang dibiayai telah dibina oleh pemerintah dan sektor swasta, sehingga risikonya lebih terkelola. Hal ini juga menguntungkan pemerintah, karena tercipta lapangan kerja baru serta peningkatan pendapatan pajak. Sementara sektor swasta pun diuntungkan karena memperoleh suplai bahan baku atau produk antara dengan kualitas terukur dari UMKM.

Ekosistem *closed loop* UMKM harus menempatkan UMKM di posisi tengah, dikelilingi oleh empat besar pemangku kepentingan. Pemerintah memegang peran penting dalam menyiapkan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur pendukung. Sementara itu, sektor swasta berperan membuka akses pasar, *buyer/offtaker*, meningkatkan standar mutu, serta menyalurkan teknologi dan inovasi. Lembaga keuangan mengambil posisi strategis untuk menyediakan berbagai skema pembiayaan yang terjangkau, inovatif, dan mudah diakses UMKM. Terakhir, pemangku kepentingan lain (Universitas, NGO, dan asosiasi) melengkapi lingkaran ini melalui dukungan teknis, penelitian, pelatihan, maupun advokasi kebijakan.



Sumber: diadaptasi dari Rachmat, Arif et all (2022) "Inclusive Closed Loop: The Private Sector's Role In Enabling MSME". BCG x PT Triputra Agro Persada Tbk

Penerapan ekosistem *closed loop* bagi UMKM menghadirkan beberapa keuntungan:

- 1) UMKM memiliki *one-stop solution* untuk menyelesaikan permasalahan terkait pendanaan, inovasi, peningkatan mutu, hingga pemasaran. Dengan adanya peran terintegrasi antar berbagai pihak, UMKM tidak lagi kebingungan mencari sumber daya di tempat-tempat yang terpisah.
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan. Bantuan dari sektor swasta akan diperkuat oleh kebijakan pemerintah, sementara mekanisme pinjaman lembaga keuangan menjadi lebih terarah karena sudah ada standar tertentu yang dikenakan kepada UMKM.
- 3) Model ini mendorong transparansi dan akuntabilitas. Karena semua pihak terhubung secara langsung, setiap inisiatif dapat dipantau dan dievaluasi dengan cepat, sekaligus dapat diperbaiki bila ditemukan kekurangan. Keempat, peningkatan kapasitas UMKM terjadi secara holistik, meliputi aspek manajemen, teknologi, keuangan, hingga pemasaran.

Salah satu contoh penerapan ekosistem *closed loop* (di luar dari sektor agribisnis) adalah sektor otomotif. Yayasan Dharma Bhakti Astra dan PT Astra Honda Motor (AHM) bersama Kemenperin RI dan KADIN Indonesia berkolaborasi menjalankan program pengembangan rantai pasok yang melibatkan IKM dan tier 1 PT AHM. Sejak November 2022 tercatat sebanyak 39 IKM terlibat dalam kolaborasi rantai pasok. Nilai transaksi yang dihasilkan mencapai Rp 110 Miliar tembus 105% dari target yang ditetapkan. Tidak hanya berdampak positif dari segi transaksi, tetapi juga peningkatan kompetensi IKM. IKM mendapatkan berbagai program pembinaan, seperti Pelatihan dan Pendampingan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R) & Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), Alat Ukur & *Abnormality Proses*, *Cost Calculation*, *Human Resources Development* (HRD), Fasilitasi Pasar, Manajemen Mutu ISO 9001, dan Manajemen Keuangan. IKM juga berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas akses pembiayaan dari Astra, yaitu PT Surya Arta Nusantara Finance dan PT Astra Mitra Ventur. (<https://ydba.astra.co.id/astra-bersama-kementerian-perindustrian-ri-kadin-indonesia-terus-perkuat-rantai-pasok-industri-manufaktur>).

2.4.3 Aspek Institusi/Kelembagaan

Aspek kelembagaan berperan sebagai perekat yang memastikan *supply* dan *demand* tenaga kerja dapat terhubung dengan baik. Kelembagaan yang efektif, baik pada level pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kolaborasi dengan sektor swasta, sangat penting untuk memastikan strategi penciptaan lapangan kerja berkualitas dapat diimplementasikan secara berkesinambungan. Pada tataran ini juga, partisipasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memegang peran vital dalam mendorong transmisi kebijakan moneter dan jasa keuangan yang ramah terhadap lapangan kerja berkualitas.

Pertama, pembangunan Sistem Informasi Pasar Kerja/SIPK (*Labor Market Information System/LMIS*) yang andal, terintegrasi, dan mudah diakses merupakan langkah kunci. Adanya LMIS akan memudahkan *stakeholder* terkait, pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan tenaga kerja untuk melihat kebutuhan kompetensi, tren permintaan sektor tertentu, serta peluang karir secara *real time*. Data dari BPS, BKPM, Kemnaker, PMO Kartu PraKerja, Pemerintah Daerah dan termasuk Perbankan (misalnya BRI yang memiliki jutaan nasabah UMKM) dapat disinergikan untuk memetakan kebutuhan keterampilan, *outcome* dari program pelatihan, serta efektivitas insentif investasi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, seperti dinas ketenagakerjaan atau dinas perindustrian di daerah, juga diperlukan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan peta sektor unggulan daerah, mendorong spesialisasi seperti “*one village one product*” sehingga mampu menciptakan sentra ekonomi yang lebih terfokus dan berdaya saing.

Ketiga, lembaga pendukung seperti koperasi dan asosiasi industri dapat diberdayakan untuk menjadi jembatan antara UMKM dan perusahaan besar, sekaligus menjadi fasilitator pendampingan untuk akselerasi transformasi usaha. Skema *off-taker* oleh perusahaan besar dapat memberikan kepastian permintaan atas produk UMKM. Pendampingan ini dapat meliputi pelatihan peningkatan kualitas produk, standarisasi, sertifikasi halal, dan peningkatan kapasitas manajemen. Dengan masuk ke rantai pasok resmi, UMKM akan terdorong merekrut pekerja dengan perjanjian kerja yang lebih formal.

Keempat, perlu kebijakan dan insentif yang memastikan kemudahan akses Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsos TK), perlindungan K3, dan standar kerja yang layak. Hal ini akan meningkatkan minat tenaga kerja untuk masuk ke sektor formal, sekaligus mendorong perusahaan untuk memberikan kondisi kerja yang aman dan terjamin. Subsidi iuran awal Jamsos T.K atau pengurangan biaya administrasi dapat menjadi salah satu opsi pemerintah untuk mendorong penduduk yang bekerja informal beralih ke status formal.

Kelima, perlunya kepastian hukum dan stabilitas aturan ketenagakerjaan. Penyederhanaan perizinan, penguatan sanksi bagi pelanggar, serta penghapusan tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah akan meningkatkan kepercayaan

investor. Konteks itu juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan agar substansi ketenagakerjaan dicabut dan ditarik dari UU Cipta Kerja sehingga jika tidak dilakukan proses pembuatan regulasi baru akan menjadi disinsentif bagi pemberi kerja/investor. Berkaitan dengan upah minimum (UM), seharusnya disesuaikan dengan produktivitas bukan pertimbangan politis jangka pendek. Adanya kepastian mekanisme kenaikan upah, industri dapat merencanakan struktur biaya dan perekrutan tenaga kerja lebih baik khususnya pada industri manufaktur padat karya.

Keenam, urgensi peran bank sentral dalam kebijakan moneter yang lebih responsif terhadap tenaga kerja. Bank Indonesia selama ini fokus pada tujuan pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Namun, seiring perkembangan paradigma kebijakan ekonomi yang mengarah pada pembangunan inklusif, bank sentral dapat mempertimbangkan untuk menambah indikator terkait ketenagakerjaan dalam pengambilan keputusan kebijakan moneternya.

Meski mandat utama bank sentral tetap stabilitas harga dan nilai tukar, komunikasi kebijakan dapat lebih menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dalam rapat dewan gubernur atau laporan kebijakan moneter, bank sentral dapat menyertakan analisis terkait tren ketenagakerjaan formal, produktivitas tenaga kerja, dan distribusi sektor yang menyerap tenaga kerja formal.

BI juga dapat memanfaatkan data pasar tenaga kerja, termasuk porsi tenaga kerja formal, pertumbuhan upah riil, dan tren penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya, sebagai *leading indicator* untuk mengevaluasi kesehatan ekonomi. Bila terjadi perlambatan penyerapan tenaga kerja formal yang signifikan, bank sentral dapat mempertimbangkan pelonggaran moneter guna mendorong investasi dan konsumsi yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesempatan kerja formal.

Ketujuh, peran OJK untuk mendorong inklusi keuangan yang mendukung pekerjaan formal. OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank, dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keuangan yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja formal. Indikator tenaga kerja perlu diintegrasikan dalam System pengawasan industri jasa keuangan.

Otoritas dapat mendorong industri jasa keuangan untuk mempertimbangkan profil ketenagakerjaan (termasuk status formalitas bisnis dan pekerjanya) dalam penilaian risiko kredit. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki rantai pasok formal dengan standar kepatuhan tenaga kerja yang baik bisa mendapatkan pertimbangan tertentu dalam profil risikonya.

OJK juga dapat mendorong inovasi produk keuangan yang mendukung UMKM naik kelas melalui pemberian insentif bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan produk pembiayaan yang dirancang secara khusus bagi UMKM yang berkomitmen meningkatkan formalitas dan kualitas pekerjaan. Misalnya, paket kredit dengan tingkat bunga kompetitif bagi UMKM yang mengubah status pekerja menjadi formal dan mendaftarkan mereka ke jaminan sosial ketenagakerjaan.

Terakhir aktivitas peran BI dan OJK tersebut perlu didukung indikator yang jelas, terukur dan terintegrasi dengan target makroekonomi pemerintah. Salah satunya laporan stabilitas keuangan dapat menyertakan indikator proporsi pekerja formal sebagai indikator keseimbangan pertumbuhan. Jika porsi pekerja formal meningkat, ini menandakan iklim usaha dan sistem keuangan mendukung penyerapan tenaga kerja berkualitas. BI dan OJK juga perlu secara periodik, melakukan pertemuan rutin bersama Kementerian/Lembaga, asosiasi industri, dan serikat pekerja/buruh dalam forum Lembaga Tripartit Nasional. Hasil dari pertemuan tersebut dapat menjadi *insight* bagi penyesuaian kebijakan moneter, makroprudensial maupun kebijakan sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Devanto Shasta Pratomo, Marlina Ekawaty, dan David Kaluge. 2024. "Absorption of Formal and Informal Sector Workers through the Minimum Wage: Studies in Indonesia." *Economic Studies Journal*, no. 3, 128–43.
- Autor, David, dan Anna Salomons. 2017. "Does Productivity Growth Threaten Employment?"
- Baltagi, Badi H. 2021. *Econometric Analysis of Panel Data*. Springer Texts in Business and Economics. Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>.
- Badan Pusat Statistik. 2022. "Analisis Profil Penduduk Indonesia." 2022. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc557c5f/analisis-profil-penduduk-indonesia.html>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Profil Industri Mikro dan Kecil 2023. BPS. Indonesia
- Bank Dunia. 2021. "Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia." *World Bank Publications - Reports*, World Bank Publications - Reports, , Juni. <https://ideas.repec.org/p/wbk/wboper/35848.html>.
- Börsch-Supan, Axel H., Courtney Coile, Jonathan Cribb, Carl Emmerson, dan Yuri Pettinicchi. 2019. "The Changing Nature of Work and Public Pension Coverage: Evidence from the US and Europe." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3714598>.
- Bossavie, Laurent, Ayşenur Acar Erdoğan, dan Mattia Makovec. 2019. "The Impact of the Minimum Wage on Firm Destruction, Employment and Informality."
- Hötte, Kerstin, Melline Somers, dan Angelos Theodorakopoulos. 2022. "Technology and jobs: A systematic literature review." arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.01296>.
- ILO. 2017. "Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to a Better Working Future | International Labour Organization." 2017. <https://www.ilo.org/publications/major-publications/global-employment-trends-youth-2017-paths-better-working-future>.
- La Porta, Rafael, dan Andrei Shleifer. 2014. "Informality and Development." *Journal of Economic Perspectives* 28 (3): 109–26. <https://doi.org/10.1257/jep.28.3.109>.
- McKinsey. 2019. "Digital Identification: A Key to Inclusive Growth." <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/digital%20identification%20a%20key%20to%20inclusive%20growth/mgi-digital-identification-report.pdf>
- McMahon, Gary, dan Susana Moreira. 2014. "Extractive Industries for Development Series #30 April 2014."
- Merotto, Dino, Michael Weber, dan Reyes Aterido. 2018. *Pathways to Better Jobs in IDA Countries*. World Bank, Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/30594>.
- Neumark, David. 2018. "Employment Effects of Minimum Wages." *IZA World of Labor*. <https://doi.org/10.15185/izawol.6.v2>.

- Pratomo, Devanto Shasta, dan Chris Manning. 2020. "Structural Change and Formal Sector Employment Growth in Indonesia." *Departmental Working Papers*, Departmental Working Papers, . <https://ideas.repec.org//p/pas/papers/2020-15.html>.
- Rachmat, Arif et all. 2022. "Inclusive Closed Loop: The Private Sector's Role In Enabling MSME. BCG x PT Triputra Agro Persada Tbk. <https://web-assets.bcg.com/7d/1e/9cd6bb6b402e8fe472ea052266f5/bcg-x-triputra-inclusive-closed-loop-the-private-sectors-role-in-enabling-msmes-nov-2022-1.pdf>
- Rokhim, Rofikoh. 2021. "Perbankan dan Keuangan Sosial: Aspek Berkelanjutan untuk Kesejahteraan". Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, 13 Maret 2021. <https://id.scribd.com/document/591055698/Buku-Orasi-Ilmiah-Rofikoh-Rokhim>
- Rodrik, Dani. 2015. "Premature Deindustrialization." *NBER Working Papers*, NBER Working Papers, Februari. <https://ideas.repec.org//p/nbr/nberwo/20935.html>.

LAMPIRAN

Lampiran I. Identifikasi Studi Literatur Basis Analisis Regresi Data Panel

No	Judul Artikel	Penulis	Faktor yang Diteliti	Metode	Hasil Utama
1	Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2016-2020	Uswatun Hasanah	PDRB, Inflasi, Upah Minimum, Investasi, Pendidikan	Panel Data Regression	Upah minimum dan investasi signifikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. PDRB dan pendidikan tidak signifikan.
2	Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022	Fahri Azis Sibagariang et al.	Kemiskinan, Pendidikan, Upah	OLS Regression	Kemiskinan meningkatkan pekerja informal; pendidikan dan upah menurunkan pekerja informal.
3	Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia	Tasmilah	Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi	2SLS	Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi positif terhadap tenaga kerja formal.
4	Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2015	Dyan Prihatini et al.	Upah Minimum, Investasi, Pendidikan	Panel Data Regression	Upah minimum, investasi, dan pendidikan signifikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
5	Dampak Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal: Analisis Spasial	Muh. Nurhadi, Diah Widyawati	Upah Minimum, Sektor Formal, Sektor Informal	Spatial Panel Regression	Kenaikan upah minimum menurunkan tenaga kerja sektor formal dibandingkan informal.
6	Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja di 34 Provinsi di Indonesia: Pendekatan Fixed Effect Model	Birgitta Dian Saraswati et al.	Upah Minimum, Pendidikan, PDRB, Belanja Pemerintah	Fixed Effect Model (FEM)	PDRB dan pendidikan signifikan positif; upah minimum dan belanja pemerintah sektor pendidikan tidak signifikan.

7	Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022	Fahri Azis Sibagariang, Louna Mariska Mauboy, Rissa Erviana, Fitri Kartiasih	Upah, Pendidikan, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Gender	Analisis Deskriptif, Regresi Linier Berganda (OLS)	Tingkat pendidikan dasar dan upah menurunkan pekerja informal; kemiskinan meningkatkan pekerja informal.
8	Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di 34 Provinsi di Indonesia	Birgitta Dian Saraswati, Yunika Damai Krisnawati, Dhian Adhitya	Upah Minimum Provinsi, PDRB, Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Pendidikan	Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)	Rata-rata lama pendidikan dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan; Upah minimum dan pengeluaran pemerintah di pendidikan tidak berpengaruh.
9	Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia	Tasmilah	Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal	Analisis Persamaan Simultan (2SLS)	Belanja pemerintah pariwisata dan PMDN berpengaruh positif; belanja infrastruktur dan PMA negatif terhadap tenaga kerja formal.
10	Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2015	Dyan Prihatini, Sunlip Wibisono, Regina Niken Wilantari	Upah Minimum Provinsi, Investasi, Pendidikan	Regresi Data Panel (Pooled Least Squares)	Upah Minimum Provinsi, investasi, dan pendidikan berpengaruh signifikan positif.
11	Dampak Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal	Muh. Nurhadi, Diah Widyawati	Upah Minimum, Sektor Formal, Sektor Informal	Panel Spatial Auto-Regressive Model	Kenaikan upah minimum menurunkan tenaga kerja sektor formal dan meningkatkan tenaga kerja sektor informal.
12	Dampak Investasi, Kinerja Ekspor, dan Inflasi dalam Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia	Siti Komariyah, Halimatus Putriya, R. Alamsyah Sutantio	FDI, Ekspor, Inflasi	Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)	FDI dan ekspor berpengaruh positif signifikan; inflasi negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
13	Determinan Dampak COVID-19 terhadap Kondisi Tenaga Kerja di Indonesia	Arina Nawasikhana Putri, Rifki Khoirudin	Pengangguran, UMP, PDRB, COVID-19	Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)	PDRB dan COVID-19 positif signifikan; UMP negatif signifikan; pengangguran tidak signifikan.

14	Peran Perbankan Syariah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Riil	Nabila Nur Khairina, Mochamad Edman Syarief, Setiawan	Pembiayaan Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing	Analisis Jalur (Path Analysis)	Pembiayaan bagi hasil dan Non-Performing Financing berpengaruh positif; Dana pihak ketiga tidak signifikan.
----	--	---	--	--------------------------------	---

Lampiran II. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Skala dan Pengukuran	Sumber Data
Produk Domestik Regional Bruto	Produk Domestik Regional Bruto 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan harga tetap	Miliar Rupiah (dalam Log)	BPS
Kredit	Kredit total untuk 34 provinsi di Indonesia	Miliar Rupiah (dalam Log)	OJK
Kredit Modal Kerja	Kredit Modal Kerja untuk 34 provinsi di Indonesia	Miliar Rupiah (dalam Log)	OJK
Kredit Investasi	Kredit Investasi untuk 34 provinsi di Indonesia	Miliar Rupiah (dalam Log)	OJK
Kredit Konsumsi	Kredit Konsumsi untuk 34 provinsi di Indonesia	Miliar Rupiah (dalam Log)	OJK
Penanaman Modal Asing Per kapita	Diukur dengan membagi nilai PMA dengan jumlah penduduk di provinsi tersebut	PMA Per kapita = PMA / Jumlah Penduduk	BPS
Penanaman Modal Dalam Negeri Per kapita	Diukur dengan membagi nilai PMDN dengan jumlah penduduk di provinsi tersebut	PMDN Per kapita = PMDN / Jumlah Penduduk	BPS
Produktivitas	Diukur dengan membagi nilai PDRB dengan Jumlah pekerja di provinsi tersebut	Produktivitas = PDRB / Pekerja	BPS
Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi	Diukur dengan nilai pertumbuhan UMP dalam persen	Pertumbuhan UMP = $((UMP(t) - UMP(t-1)) / UMP(t-1)) (\%)$	BPS
Penduduk Bekerja Sektor Pertanian	Jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Bekerja Sektor Pertambangan	Jumlah penduduk bekerja pada sektor pertambangan	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Bekerja Sektor Industri	Jumlah penduduk bekerja pada sektor industri	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Bekerja Sektor Konstruksi	Jumlah penduduk bekerja pada sektor konstruksi	Ribu Orang (dalam Log)	BPS

Penduduk Bekerja Sektor Perdagangan	Jumlah penduduk bekerja pada sektor perdagangan	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Bekerja Sektor Transportasi	Jumlah penduduk bekerja pada sektor transportasi	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Bekerja Sektor Akomodasi Makan Minum	Jumlah penduduk bekerja pada sektor akomodasi makan minum	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Bekerja Sektor Informasi dan Komunikasi	Jumlah penduduk bekerja pada sektor informasi dan komunikasi	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Bekerja Sektor Jasa Pendidikan	Jumlah penduduk bekerja pada sektor jasa pendidikan	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Pekerja Awal Karir	Diukur dengan jumlah penduduk bekerja usia 15-24 tahun	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Pekerja Tingkat Menengah	Diukur dengan jumlah penduduk bekerja usia 35-44 tahun	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Pensiunan	Diukur dengan jumlah penduduk bekerja usia 55-60 tahun	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Lulusan SMP ke bawah	Diukur dengan jumlah penduduk dengan pendidikan akhir SMP ke bawah	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Lulusan SMA	Diukur dengan jumlah penduduk dengan pendidikan akhir SMA	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Lulusan SMK	Diukur dengan jumlah penduduk dengan pendidikan akhir SMK	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Penduduk Lulusan Diploma dan Sarjana	Diukur dengan jumlah penduduk dengan pendidikan akhir Diploma dan Sarjana	Ribu Orang (dalam Log)	BPS
Dummy Tahun 2020	Dumi Tahun 2020 karena Periode Pandemi	Nilai 1 jika data pada tahun 2020 dan 0 pada tahun lainnya	-

Dummy Tahun 2021	Dumi Tahun 2020 karena Periode Pandemi	Nilai 1 jika data pada tahun 2021 dan 0 pada tahun lainnya	-
------------------	--	--	---

**Strategi Penyaluran Kredit
Sektor Pertanian dalam
Rangka Mewujudkan
Ketahanan Pangan 2024–2029**

RINGKASAN EKSEKUTIF

LATAR BELAKANG KAJIAN:

Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen membangun ketahanan pangan yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi tetapi juga mendorong industrialisasi sektor pertanian dan pengembangan ekonomi pedesaan yang tercermin dalam misi Asta Cita kedua. Sektor pertanian nasional dalam arti luas (termasuk maritim, peternakan, kehutanan, dan perkebunan) memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai motor ekonomi. Hanya saja, prioritas perlu ditentukan agar sumber daya yang terbatas (khususnya APBN dan pembiayaan perbankan) dapat dioptimalkan untuk memajukan komoditas yang berperan paling penting bagi hajat hidup orang banyak dan memiliki nilai bisnis yang menjanjikan.

METODE & TEMUAN KAJIAN:

Penelitian ini memetakan komoditas strategis pangan dan pertanian nasional yang mesti diprioritaskan berdasarkan 6 kriteria utama, yaitu: (1) seberapa besar potensi produksinya, (2) seberapa banyak dikonsumsi oleh masyarakat, (3) seberapa menarik di mata investor, (4) bagaimana efeknya bagi APBN, dan (5&6) nilai ekspor-impornya. Berdasarkan kriteria ini, penelitian ini menyimpulkan **delapan (8) komoditas pertanian strategis, yaitu** padi, jagung, ikan (tongkol, tuna dan cakalang), daging (ayam dan sapi), sawit, kelapa, kopi dan tebu (gula) serta dua komoditas input pertanian yaitu pupuk (Urea dan NPK) dan benih. Delapan komoditas ini dengan berbagai produk hilirisasinya memiliki nilai bisnis setidaknya US\$23,15 Miliar atau Rp370 Triliun setahun (*underestimate*).

Terbentuk persepsi risiko yang cukup besar di sektor pertanian di mata perbankan sehingga kredit ke sektor ini menjadi kurang optimal atau berbiaya mahal (*high interest rate*). Salah satunya disebabkan oleh keterbatasan data dan trauma/stigma negatif sektor pertanian. Padahal risikonya (tercermin dari NPL) sektor pertanian tercatat relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Dibutuhkan kapasitas/keahlian khusus untuk menyalurkan kredit pertanian yang memiliki siklus serta *nature* bisnis yang unik dibanding sektor-sektor lainnya sehingga kredit pertanian tidak hanya terkonsentrasi di beberapa bank. Terdapat aturan-aturan yang cukup ketat dalam penyaluran kredit (pertanian) yang berdampak pada akses pembiayaan bagi petani/pengusaha kecil.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

1. Memprioritaskan 8 komoditas strategis ini serta ketersediaan benih & pupuk guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam lima tahun ke depan (2024-2029) agar fokus sehingga sumber daya yang dialokasikan dapat optimal, termasuk insentif pemerintah dan aliran kredit perbankan ke sektor pertanian dapat menopang

- kedelapan komoditas ini dan berbagai bisnis penunjang dan produk hilirisasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan insentif untuk kredit sektor pertanian.
2. Menjadikan 8 komoditas strategis pertanian serta usaha benih & pupuk sebagai prioritas pemberian kredit pada sektor pertanian. Pemberian kredit dapat menysar pelaku usaha pertanian terkait komoditas-komoditas ini, baik ditingkat usaha tani (*on farm/upstream*), industri barang setengah jadi (*midstream*) dan industri barang jadi (*dowsnstream*) dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan menopang target pertumbuhan 8%. Hal ini perlu ditopang dengan peningkatan kapasitas bank dalam memahami siklus bisnis sektor pertanian dan menilai kredit pertanian.
 3. Menggenjot hilirisasi dan investasi pada pengembangan produk turunan dari 8 komoditas strategis, khususnya dengan memberikan insentif untuk mendorong pelaku usaha untuk membangun pabrik pengolahan di sentra-sentra pertanian.
 4. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap data pertanian. Membangun sistem data nasional yang terintegrasi untuk sektor pertanian guna memberikan informasi akurat kepada lembaga perbankan, pelaku usaha, dan investor mengenai data produksi, konsumsi, investasi, ekspor, impor, dan risiko kredit untuk seluruh komoditas strategis serta berbagai produk hilirisasinya. Hal ini dilakukan untuk menekan persepsi risiko dan bunga tinggi.
 5. Mengintegrasikan konsep kemitraan Plasma Inti untuk komoditas perkebunan (di mana perusahaan besar menjamin petani kecil sehingga risiko kredit dapat diminimalkan) serta konsep kemitraan “*Close Loop*” untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura (di mana pemerintah memfasilitasi *offtaker* bagi petani). Konsep kemitraan *close-loop* dapat menjadi salah satu syarat pemberian kredit bagi petani tanaman pangan hortikultura dari perbankan.
 6. Memperkuat skema asuransi pertanian yang melindungi petani dan lembaga keuangan dari risiko usaha pertanian, seperti gagal panen atau fluktuasi harga.

3.1 PENDAHULUAN

3.1.1 Latar Belakang

Thomas Robert Malthus (1798), melalui teori populasi Malthusian “An Essay on the Principle of Population”, menekankan urgensi bahwa pertumbuhan populasi cenderung meningkat secara eksponensial, sementara pertumbuhan sumber daya pangan hanya meningkat secara linier. Ketidakseimbangan ini menciptakan potensi krisis kelangkaan pangan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ketahanan pangan sebuah bangsa, pemikiran Malthus relevan karena mengingatkan bahwa peningkatan populasi yang tidak diimbangi dengan produksi pangan, efisiensi distribusi, dan pengelolaan sumber daya alam dapat mengancam ketahanan suatu negara. Oleh karena itu, strategi seperti diversifikasi pangan, adopsi teknologi pertanian modern, dan penguatan infrastruktur pangan menjadi krusial untuk memastikan sebuah bangsa dapat memenuhi kebutuhan seluruh warganya dan mencegah kerawanan pangan di masa depan.

Senada dengan itu, Presiden Soekarno saat peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor tahun 1952, yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia. Dalam pidatonya yang berjudul "Soal Hidup atau Mati", beliau menyatakan bahwa "urusan pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa" (Soekarno, 1952). Terlebih bagi Indonesia yang memiliki penduduk empat terbesar di dunia.

FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “keadaan ketika semua orang, kapan saja, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat.” Terdapat perbedaan dimensi antara definisi ketahanan pangan FAO dan Pemerintah Indonesia di mana menurut FAO ketahanan pangan memiliki empat dimensi, yakni ketersediaan yang cukup (*availability*), akses terhadap pangan (*access*), pemanfaatan pangan yang tepat (*utilisation*), serta stabilitas stok dan harga pangan (*stability*) (FAO, 2018). Sedangkan di Indonesia, ketahanan pangan menggunakan tiga dimensi, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, serta pemanfaatan pangan.

Ketahanan pangan dan gizi merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, dan rivalitas antara negara. Perubahan iklim, seperti kekeringan dan hujan ekstrem, secara signifikan menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, dan menaikkan harga pangan. Negara harus dapat memastikan kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi.

Dalam kampanyenya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen membangun

ketahanan pangan yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga berlandaskan industrialisasi dan pengembangan ekonomi perdesaan. Hal ini tercermin dalam misi Asta Cita kedua, yaitu mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan (Prabowo & Gibran, 2023).

Adapun delapan program kerja utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan, memastikan ketersediaan dan kepemilikan lahan, mengendalikan impor pangan, memperkuat fungsi badan pangan, menyempurnakan *food estate*, memodernisasi model bisnis pertanian, menjamin pembiayaan petani dan pemanfaatan teknologi informasi.

Delapan program kerja utama ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi target pemerintahan Prabowo-Gibran. Peran lembaga keuangan, khususnya dukungan dari Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) sangat dibutuhkan untuk menyukseskan misi Presiden Prabowo Gibran di mana strategi pembiayaan pangan dari hulu ke hilir sangat krusial dalam mewujudkan Asta Cita kedua. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan usulan dan rekomendasi kebijakan dari PERBANAS guna mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan sektor pertanian nasional lima tahun ke depan.

3.1.2 Perumusan Masalah

Selain memastikan ketahanan pangan dan gizi penduduk Indonesia, sektor pertanian berperan strategis dalam pembangunan negara, yaitu menyerap tenaga kerja, kontributor terhadap produk domestik bruto, sumber devisa, sumber bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta penghela sektor-sektor ekonomi riil lainnya. Walaupun demikian, sektor pertanian di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan, salah satunya adalah kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak perbankan memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian.

Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan pihak perbankan meluncurkan beberapa program kredit sebagai bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian melalui beberapa bentuk skim seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun kredit komersial. Seiring dengan terbatasnya kemampuan finansial pemerintah dalam mendanai kredit pertanian, perlu dilakukan upaya optimalisasi kebijakan kredit program agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan pertanian. Selain menggunakan kredit bank menutupi kekurangan modal usaha tani, petani umumnya mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan non bank di sekitar tempat tinggal mereka, baik formal maupun informal.

Seiring berkembangnya zaman kebutuhan masyarakat terus meningkat dan diperhadapkan dengan sumber pendapatan tidak mencukupi sehingga kredit menjadi salah satu alternatif yang paling dinikmati masyarakat dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan setiap hari (Irianto, 2012). Kredit menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat termasuk di sektor

pertanian, alasannya karena pendapatan tidak mencukupi, sehingga tren penyaluran kredit cenderung naik khususnya pada lembaga keuangan bank.

Penyaluran kredit diberikan kepada nasabah secara selektif, karena lembaga keuangan ini juga tidak dapat mengalami kerugian jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan. Pembiayaan usaha disektor pertanian melalui penyaluran kredit saat ini, hampir semua berbasis perhitungan bunga di mana secara umum, kredit untuk sektor pertanian menetapkan tingkat suku bunga lebih rendah dibandingkan sektor non-pertanian.

Sejumlah program pemerintah terkait dengan usaha memberdayakan ekonomi rakyat dan sektor pertanian telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan tujuan yang sama, namun dengan sasaran yang berbeda. Keseluruhan kebijakan pembiayaan ini dimaksudkan untuk mempercepat gerakan ekonomi rakyat dan mendorong proses produksi pertanian.

Pemberian program kredit dengan perantara pihak bank bertujuan untuk menambahkan modal para petani agar dapat memperbanyak produksi dan memperluas usaha mereka. Namun hingga saat ini kontribusi kredit perbankan terhadap sektor pertanian masih belum maksimal. Tingginya persepsi risiko menjadi penyebab rendahnya kredit pada sektor pertanian. Kondisi minimnya pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) pengalaman dan trauma beberapa bank menghadapi kredit bermasalah sewaktu mengucurkan kredit pertanian; (2) aturan Bank Indonesia yang cukup ketat agar bank *prudent* (kehati-hatian) dalam penyaluran dana, serta (3) banyak bank khususnya bank besar tidak memiliki pengalaman menyalurkan kredit pertanian (Ashari, 2009).

Untuk mengetahui efektivitas penyaluran bank selama ini perlu dipetakan sejauh mana dukungan kredit pertanian terhadap komoditas pertanian yang berpengaruh terhadap variabel-variabel yang mendukung nilai PDB sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3.1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Memetakan komoditas-komoditas pertanian strategis yang mesti dijadikan prioritas lima tahun ke depan 2024-2029.
- Mengevaluasi dan menganalisis peran lembaga keuangan dalam memfasilitasi pembiayaan program-program Pemerintah terkait ketahanan pangan dan sektor pertanian.
- Merumuskan strategi pembiayaan yang efektif untuk mendukung ketahanan pangan dan sektor pertanian di Indonesia pada periode 2024-2029.
- Menyusun rekomendasi kebijakan pembiayaan yang mendukung program-program Pemerintah terkait ketahanan pangan dan sektor pertanian periode 2024-2029.

3.1.4 Manfaat Penelitian

- Memberikan rekomendasi terkait pembiayaan pertanian yang dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan *stakeholder* terkait untuk mencapai target ketahanan pangan.
- Menjadi panduan bagi lembaga keuangan dalam mengalokasikan sumber daya ke komoditas-komoditas pertanian strategis.
- Memperkuat kerangka kebijakan pembiayaan pertanian yang mendukung ketahanan ekonomi nasional.

3.1.5 Ruang Lingkup Dan Sistematika Pembahasan

Kajian ini mencakup analisis mendalam terhadap peran lembaga keuangan dan strategi pembiayaan dalam mendukung pencapaian agenda ketahanan pangan dan sektor pertanian, sesuai dengan Visi-Misi dan berbagai Program Kerja Prabowo-Gibran 2024-2029 yang didasari pertumbuhan ekonomi 8%. Ruang lingkup kajian mengetahui variabel-variabel dalam sektor pertanian yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi/produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya setelah mengetahui variabel-variabel tersebut dilihat sejauh mana sektor perbankan sudah mendukungnya.

PDB (Keynes, 1936) dengan pendekatan pengeluaran adalah

$$PDB = C + I + G + (X - M)$$

Di mana:

C = Konsumsi pribadi (pengeluaran rumah tangga)

I = Investasi (pengeluaran korporasi)

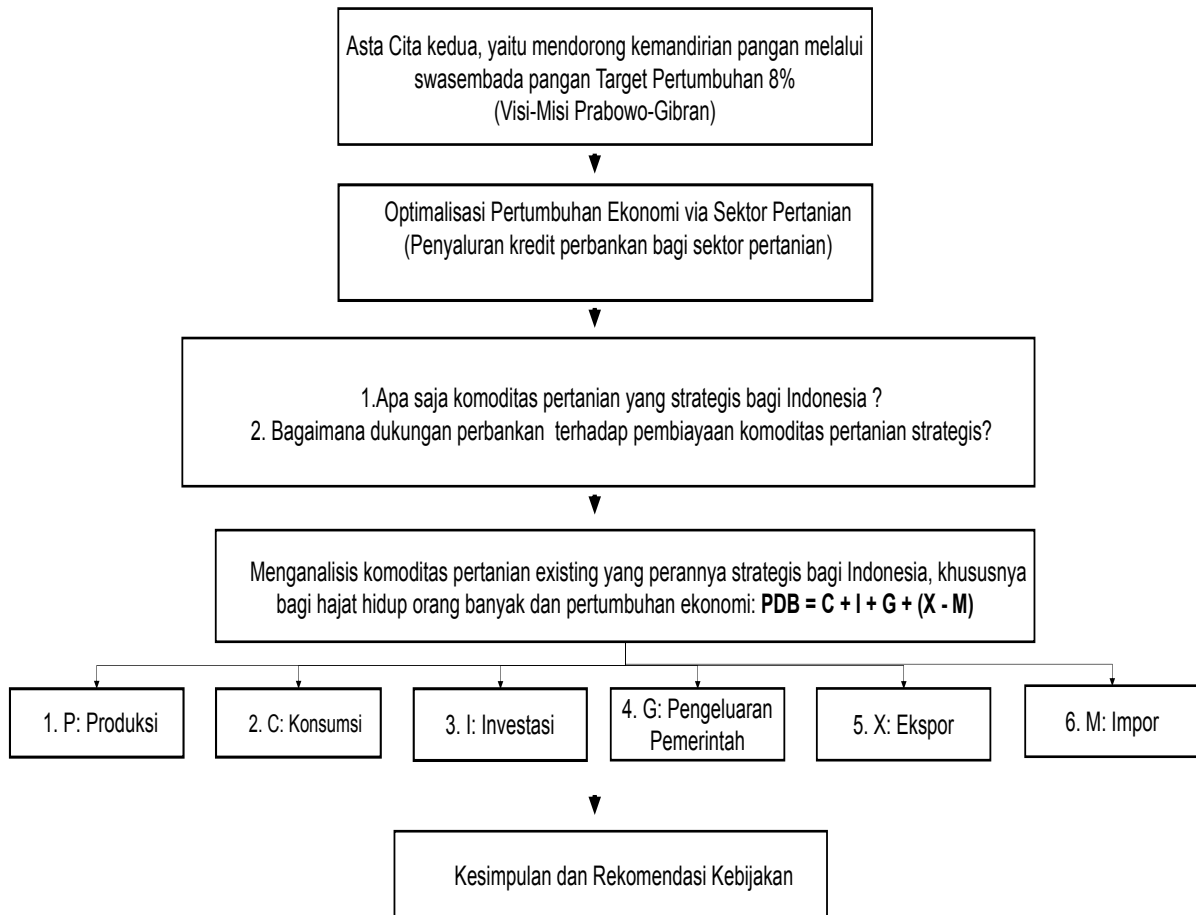
G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Selain pendekatan kuantitatif, riset ini juga melibatkan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk menggali perspektif mendalam dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang diangkat. Dalam FGD ini, sejumlah pihak strategis diundang untuk berkontribusi, termasuk perwakilan dari kalangan perbankan, Pemerintah, serta otoritas terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Partisipasi beragam pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif, mendukung analisis data kuantitatif dengan pandangan empiris yang relevan, serta memperkaya temuan riset dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Gambar 3.1 Diagram Alur Kajian



3.2 PEMBAHASAN

3.2.1 Analisis Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia

Sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2023, sektor pertanian (*on farm*) menyumbang 12,53% terhadap total PDB nasional, meningkat 0,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika ditambahkan dengan sektor-sektor lainnya yang berbasis pertanian (*off farm*), porsi ini meningkat menjadi 26,36%¹. Kontribusi ini menunjukkan peran penting sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama dalam ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan mendukung ekspor.

Tabel 3.1 Sumbangan Kategori Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2019–2023 (%)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,71	13,70	13,28	12,40	12,53
a. Pertanian, Peternakan, Pemburuan, dan Jasa Pertanian	9,40	10,20	9,85	9,22	9,25
• Tanaman Pangan (3)	2,82	3,07	2,60	2,32	2,26
• Tanaman Hortikultura (5)	1,51	1,62	1,55	1,44	1,37
• Tanaman Perkebunan (1)	3,27	3,63	3,94	3,76	3,88
• Peternakan (4)	1,62	1,69	1,58	1,52	1,56
• Jasa Pertanian dan Perburuan (7)	0,19	0,20	0,19	0,18	0,18
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu (6)	0,66	0,70	0,66	0,60	0,62
c. Perikanan (2)	2,65	2,79	2,77	2,58	2,66

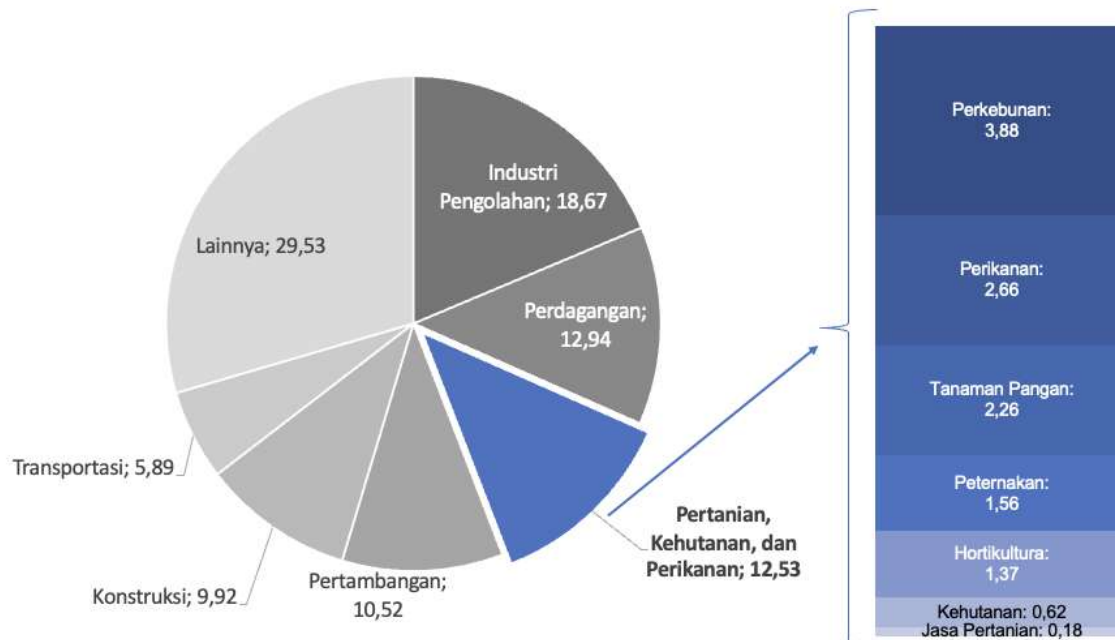
Sumber: BPS

Sub sektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB dalam lima tahun belakangan (2019-2023). Hal ini menunjukkan pentingnya komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan karet dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi untuk menumbuhkan ekonomi melalui intervensi teknologi mekanisasi, penyediaan benih unggul, pupuk, dan sarana prasarana lainnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menunjukkan pentingnya pengelolaan yang

¹ Berbagai sub-sektor industri pengolahan dan penyediaan makan dan minum.

berkelanjutan dan efisien di setiap sub sektor untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing sektor pertanian di Indonesia.

Gambar 3.2 Distribusi PDB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2023 (%)



Sumber: BPS, 2024

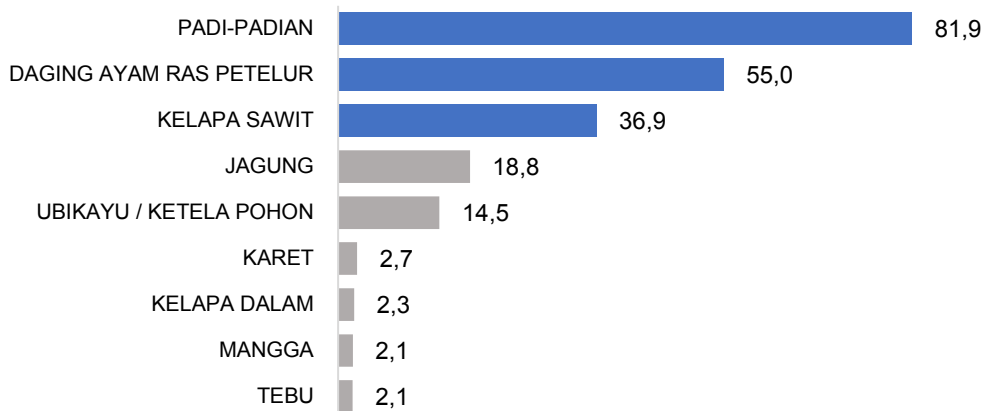
Data BPS hingga triwulan ketiga 2024 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB ada di urutan ketiga dengan kontribusinya sebesar 12,72%, sub tanaman perkebunan berkontribusi 3,97% dan tanaman pangan 2,48%. Pertumbuhan sektor pertanian tumbuh cukup rendah sebesar 0,19% dari tahun 2023 ke tahun 2024 penyebabnya karena masalah iklim seperti el nino dan kekeringan (risiko pemberian kredit). Berdasarkan data statistik di atas diketahui bahwa tanaman padi merupakan komoditas dengan produktivitas paling tinggi, disusul oleh kelapa sawit (CPO), jagung dan ubi jalar. Tiga besar sub sektor pertanian yang bersumbangsih pada PDB 2023 adalah Subsektor **tanaman perkebunan, perikanan, dan tanaman pangan**.

3.2.2 Analisis Komoditas Pangan Dan Pertanian Yang Berperan Penting Bagi Perekonomian Nasional

3.2.2.1 Aspek Produksi

Lima komoditas dengan produksi tertinggi di Indonesia adalah padi, daging ayam ras dan ayam petelur, kelapa sawit, padi sawah dan jagung. Komoditas "Padi-Padian" memiliki produksi tertinggi sebesar 81.9 juta ton, diikuti oleh "Daging Ayam Ras Petelur" sebesar 55.0 juta ton dan "Kelapa Sawit" sebesar 36.9 juta ton. Komoditas seperti "Jagung" dan "Ubi kayu/Ketela Pohon" masing-masing menyumbang 18.8 juta ton dan 14.5 juta ton, sementara komoditas lain seperti "Karet", "Kelapa Dalam", "Mangga", dan "Tebu" memiliki kontribusi kecil di bawah 3 juta ton. Hal ini menunjukkan peran dominan komoditas pertanian tertentu bagi Indonesia.

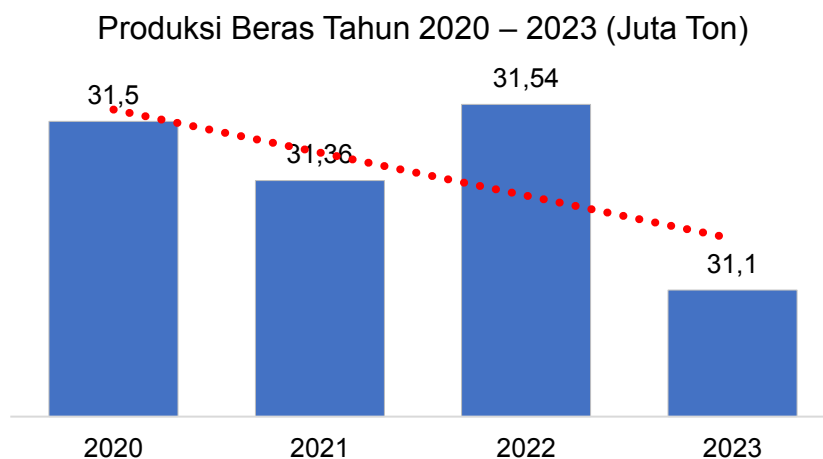
Gambar 3.3 Rata-rata Produksi Komoditas Pertanian dalam 10 Tahun Terakhir (juta ton)



Sumber: BPS, 2024

Gambar di bawah ini menunjukkan produksi beras di Indonesia selama periode 2020–2023. Pada tahun 2020, produksi mencapai 31,5 juta ton, sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 31,36 juta ton, namun mengalami kenaikan kecil pada tahun 2022 menjadi 31,54 juta ton. Akan tetapi, pada tahun 2023, produksi beras turun signifikan menjadi 31,1 juta ton, menunjukkan tren keseluruhan yang cenderung menurun selama empat tahun terakhir. Penurunan ini bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam produktivitas sektor pertanian yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Di sisi lain, menurut perhitungan Kementan kebutuhan beras nasional untuk tahun 2023 sekitar 31,2 juta ton (2,6 juta ton x 12 bulan). Dengan produksi yang lebih rendah dari kebutuhan dan cenderung menurun, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup serius dalam memenuhi kebutuhan beras nasional.

Gambar 3.4 Produksi Beras Tahun 2020 - 2024 (juta ton)



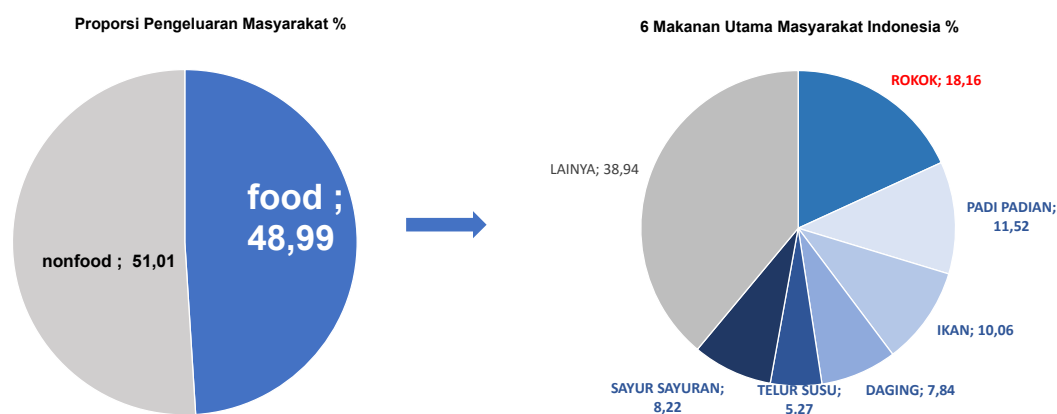
Sumber: BPS, 2024

3.2.2.2 Aspek Konsumsi

Analisis komoditas pertanian dari aspek konsumsi rumah tangga menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Survei ini memiliki jumlah observasi yang sangat besar yaitu lebih dari 300.000 Rumah Tangga untuk merepresentasikan kondisi masyarakat dari level kabupaten/kota hingga nasional. Data SUSENAS berfokus pada kondisi kesejahteraan rumah tangga termasuk pola konsumsi rumah tangga. Oleh karenanya, data ini dapat merepresentasikan komoditas pertanian utama yang dikonsumsi oleh rumah tangga di Indonesia.

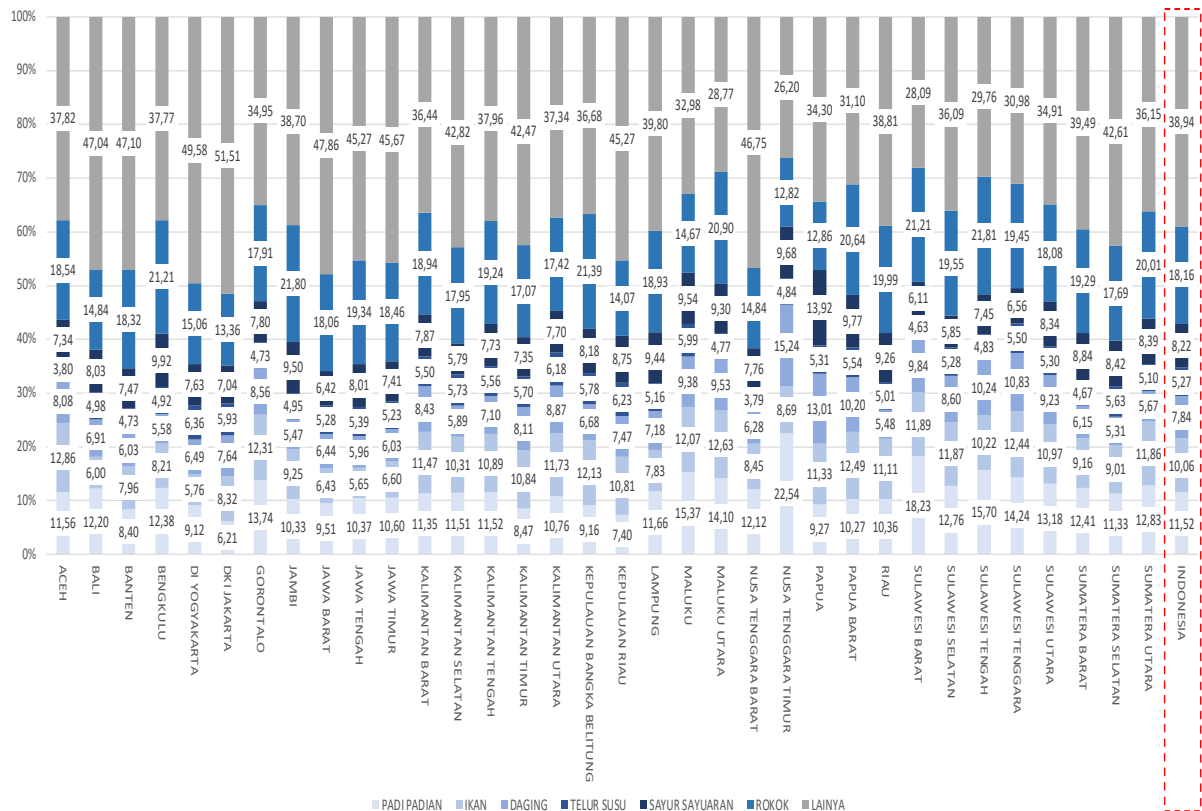
Pengeluaran masyarakat Indonesia digunakan untuk makanan sebanyak 48.99%, dengan mayoritas untuk pembelian padi-padian, rokok dan asupan protein. Dibutuhkan *social engineering policy* agar masyarakat mengurangi konsumsinya dan menciptakan pola hidup lebih sehat. Di sisi lain, ekspor perlu didorong sebagai solusi jika terjadi kelebihan produksi di dalam negeri.

Gambar 3.5 Proporsi Pengeluaran Masyarakat Berdasarkan Komoditas



Masyarakat mengalokasikan hampir separuh anggaran belanjanya untuk makanan, yaitu sebesar 48.99%. Pada kategori makanan ini, konsumsi terbesar berasal dari "Rokok" sebesar 18.16%, diikuti oleh "Padi-Padian" sebesar 11.52%, dan "Ikan" sebesar 10.05%. Konsumsi sayuran mencapai 8.22%, sedangkan konsumsi "Telur/Susu" dan "Daging" masing-masing sebesar 5.27% dan 7.84%. Analisis ini menyoroiti bahwa makanan mendominasi konsumsi masyarakat relatif dengan pos-pos pengeluaran lainnya, menunjukkan betapa pentingnya makanan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan makanan mesti menjadi prioritas bagi Pemerintah. Adapun komoditas pertanian yang paling banyak di konsumsi oleh masyarakat Indonesia pada 2023 berdasarkan data Susenas adalah padi-padian (Beras, Jagung, dan Tepung Terigu), tembakau, ikan (Tongkol, Tuna, Cakalang) dan daging (Ayam dan Sapi).

Gambar 3.6 Konsumsi Komoditas Indonesia 2023



Sumber: Susenas, 2023 (diolah)

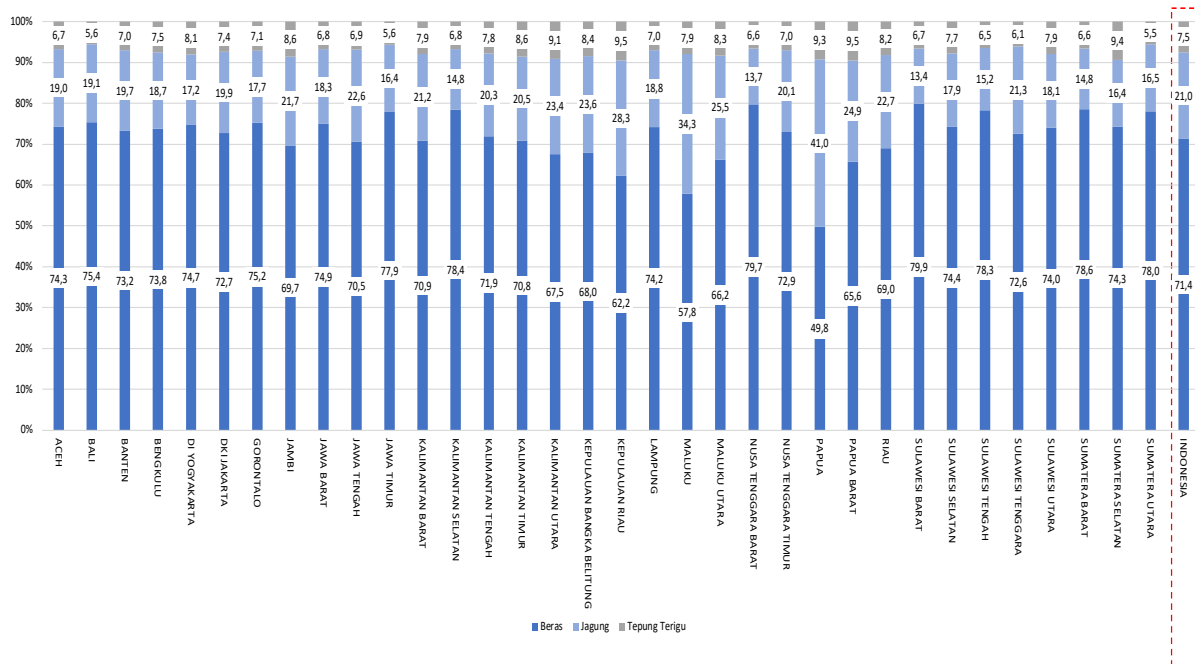
Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan ketergantungan tinggi pada beras sebagai sumber karbohidrat utama, serta kurangnya diversifikasi pangan lokal. Kebutuhan beras nasional Indonesia per bulan mencapai 2,6 juta ton beras atau setara dengan 5,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) (Kementerian Pertanian, 2023). Dengan demikian, kebutuhan beras nasional untuk tahun 2023 sekitar 31,2 juta ton (2,6 juta ton x 12 bulan). Sementara itu, pada 2023, luas panen padi mencapai sekitar 10,21 juta hektare dengan produksi padi sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2023 mencapai 31,10 juta ton. Penurunan produksi ini disebabkan oleh kekeringan ekstrem akibat El Nino.

Dengan produksi yang lebih rendah dari kebutuhan, Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan beras nasional. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti mengimpor beras, mengoptimalkan upaya peningkatan produksi beras dalam negeri dan melakukan diversifikasi pangan sumber karbohidrat. Diversifikasi pangan mungkin dilakukan mengingat Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam, termasuk 100 jenis karbohidrat, 200 jenis kacang-kacangan, 450 buah dan 250 jenis sayuran dan jamur.

Menurut data Susenas, di beberapa provinsi seperti Papua, Kepulauan Riau, Maluku konsumsi jagung cukup besar. Selain itu data Susenas memperlihatkan rokok

(tembakau) memiliki nilai konsumsi tertinggi kedua. Kerugian ekonomi negara akibat rokok Rp 27,7 triliun per tahun, sedangkan pendapatan negara Rp 7,4 triliun per tahun (CISDI, 2021). Sedangkan kerugian ekonomi akibat diabetes melitus mencapai Rp800 triliun selama periode 2006-2015, atau sekitar Rp80 triliun per tahun (CHEPS UI, 2016). Dibutuhkan *social engineering policy* untuk mengontrol konsumsi rokok dan gula (diabetes) di Indonesia. Sebagai tawaran solusi, Pemerintah dapat mengarahkan kelebihan produksi dan kapasitas kedua komoditas ini sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.

Gambar 3.7 Konsumsi Komoditas Sub-sektor Tanaman Pangan Indonesia 2023



Sumber: Susenas, 2023 (diolah)

Selanjutnya produk hasil komoditas perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan budidaya. Hasil Komoditas perikanan tangkap yang banyak dikonsumsi adalah ikan tongkol, ikan tuna dan ikan cakalang sedangkan perikanan budidayanya adalah ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan patin, dan ikan gurame. Ikan berperan sebagai sumber protein utama, paling populer, dan terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, dari sisi suplai, Indonesia sebagai negara maritim memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan, baik untuk kebutuhan gizi masyarakat Indonesia atau bahkan komoditas unggulan ekspor.

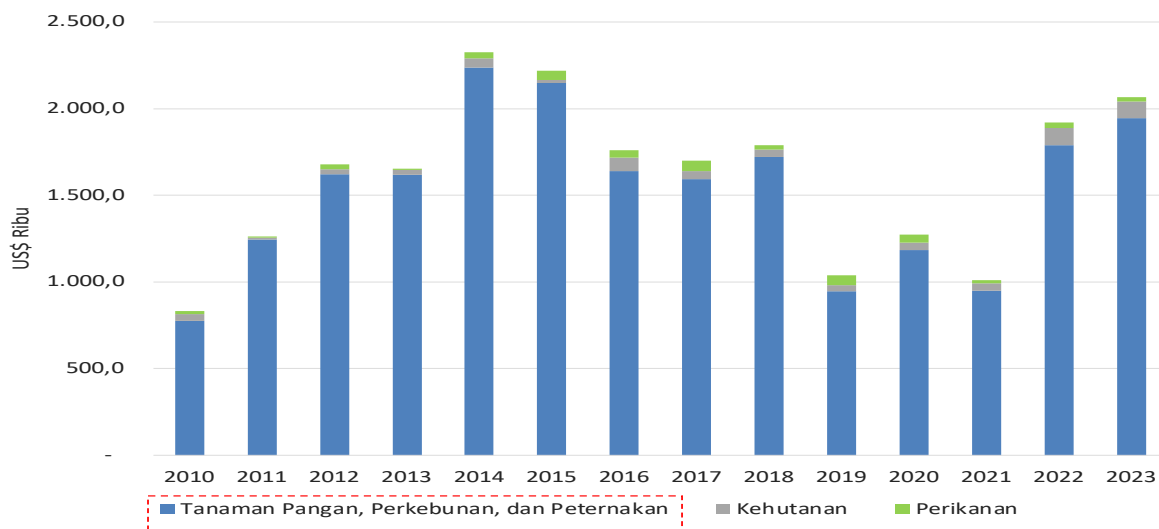
Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022), kelompok ikan tuna, tongkol, dan cakalang paling banyak dikonsumsi dengan porsi 16,45%. Kemudian disusul dengan kelompok ikan dan makanan jadi (KIMJ) seperti bakso, sosis, nugget, dan lainnya sebesar 9,02%. Lalu, berturut-turut disusul oleh kelompok ikan lele, patin, dan gabus 7,92%, kembung 6,65%, bandeng 5,43%, mujair/nila 5,26%, udang dan cumi 3,87%, teri 3,36%, ikan asin 2%, dan kembung asin 1,36%. Produksi ikan tuna di Indonesia secara rata-rata mencapai 1,49 juta ton per tahun (KKP, 2024).

Berdasarkan data konsumsi (permintaan) komoditas pertanian terdapat peluang untuk perbankan mendanai usaha tani padi, jagung, usaha perikanan tangkap (Ikan Tuna, Tongkol, Cakalang) dan peternakan (ayam serta sapi), beserta seluruh produk turunannya.

3.2.2.3 Aspek Investasi dan Ekspor

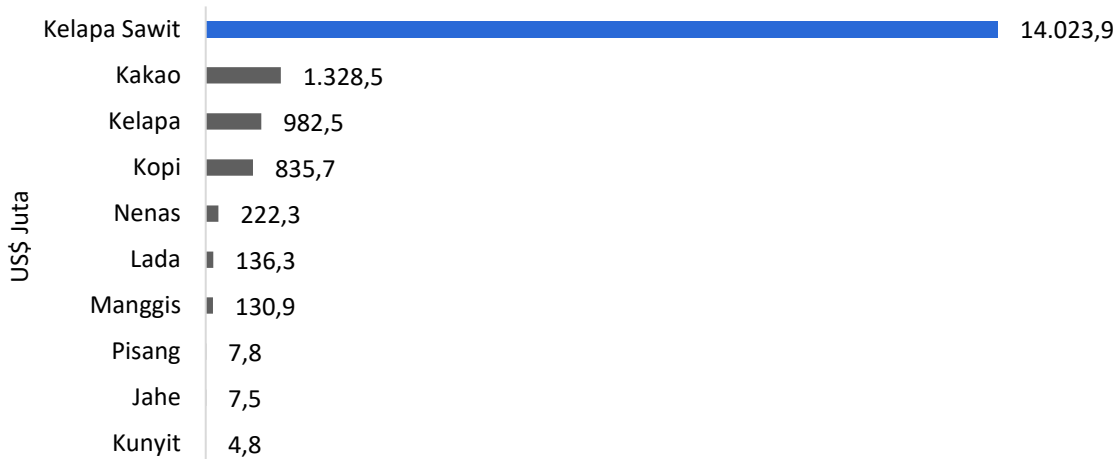
Gambar di bawah ini menunjukkan tren investasi dalam sektor pertanian berdasarkan sub-sektornya dari tahun 2010 hingga 2023. Sektor "Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan" mendominasi investasi sepanjang periode, dengan puncak investasi terjadi pada tahun 2014 dan kembali mendekati nilai tertinggi tersebut pada tahun 2023 setelah mengalami fluktuasi. Sektor kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi kecil tetapi stabil dibandingkan sektor utama. Tren keseluruhan mencerminkan pemulihan investasi sejak penurunan pada tahun 2015 hingga 2020.

Gambar 3.8 Realisasi Investasi berdasarkan Sektor, 2010 - Q3 2024 (US\$ Ribu)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2024

Pada FGD diketahui dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bahwa Investasi komoditas yang paling diharapkan tumbuh adalah kelapa sawit, kelapa, udang, rajungan, ikan Tongkol Tuna Cakalang, tilapia, rumput laut, garam, kakao dan pala, sedangkan Bappenas memiliki komoditas prioritas bagi investasi yaitu kelapa sawit, kelapa, udang, ikan TCT, rumput laut, garam, tilapia. Terlihat bahwa terdapat keselarasan parsial antara prioritas investasi yang diharapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Bappenas. Komoditas seperti kelapa sawit, kelapa, udang, ikan Tongkol Tuna Cakalang (TCT), rumput laut, garam, dan tilapia masuk dalam daftar prioritas kedua lembaga ini, menunjukkan urgensi pengembangan komoditas strategis tersebut. Perbankan bisa memprioritaskan pembiayaan untuk komoditas-komoditas yang disebut oleh dua kementerian ini.

Gambar 3.9 Ekspor Komoditas Pangan, 2024

Sumber: BPS, 2024

Tabel 3.2 Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian, 2022 - September 2024

No.	Komoditas	2022		2023		Sep 2024	
		Volume (Kilo Ton)	Nilai (Juta USD)	Volume (Kilo Ton)	Nilai (Juta USD)	Volume (Kilo Ton)	Nilai (Juta USD)
1	Manggis	30,25	75,58	42,83	111,95	52,03	130,87
2	Pisang	21,56	8,59	24,83	9,57	19,46	7,78
3	Nanas	256,58	331,70	228,66	277,95	173,02	222,25
4	Jahe	6,45	5,45	36,86	28,40	7,91	7,51
5	Kunyit	10,13	9,25	9,33	8,47	4,45	4,81
6	Kelapa	2.032,21	1.715,65	2.174,71	1.314,43	1.446,19	982,46
7	Kopi	437,56	1.148,38	279,94	929,01	163,31	835,70
8	Kelapa Sawit	36.495,26	31.459,73	38.233,67	25.611,07	21.060,19	14.023,89
9	Kakao	385,42	1.259,65	339,99	1.197,70	226,25	1.328,45
10	Lada	29,55	146,66	23,82	114,54	27,07	136,31

Sumber: BPS, 2024

Beberapa komoditas pertanian dan pangan utama yang memengaruhi ekspor Indonesia adalah:

- Kelapa Sawit: Menjadi komoditas ekspor andalan utama Indonesia selama bertahun-tahun. Ekspor minyak kelapa sawit terus meningkat dan menghasilkan pendapatan ratusan triliun rupiah.
- Kopi: Salah satu primadona ekspor pertanian Indonesia. Indonesia adalah produsen kopi terbesar ketiga di dunia, dengan produksi mencapai sekitar 630 ribu ton per tahun.
- Rempah-rempah: Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Komoditas rempah yang banyak diekspor termasuk lada, biji pala, vanili, dan cengkeh.

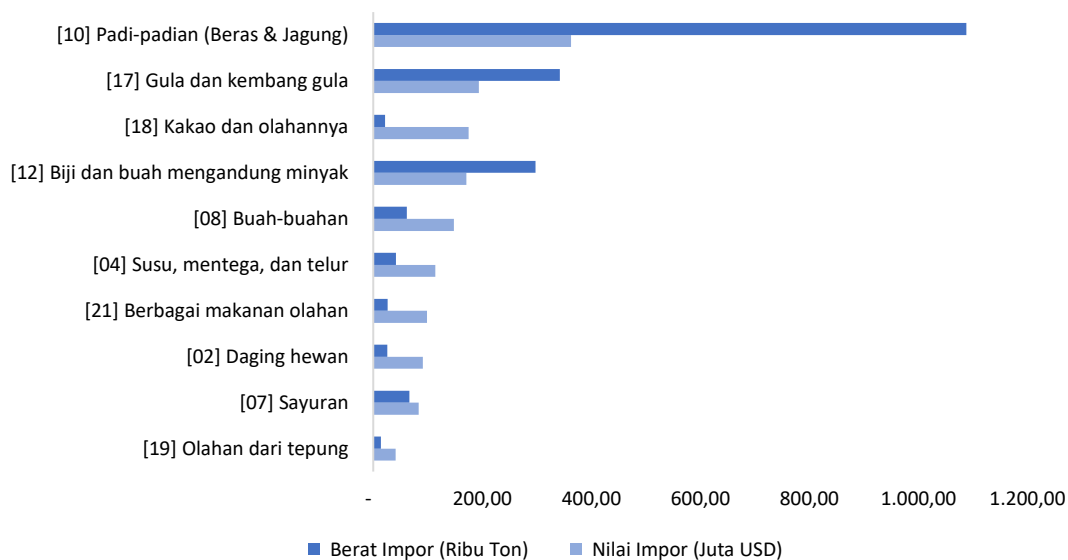
- Kakao: Ekspor kakao dan produk turunannya terus meningkat. Pada periode Januari-Juni 2020, ekspor produk olahan kakao mencapai 549 juta USD.
- Karet: Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir karet alam terbesar di dunia. Ekspor karet alam Indonesia terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan data di atas diketahui kelapa sawit, kelapa, kakao, dan kopi merupakan keempat komoditas pertanian dengan volume dan nilai ekspor terbesar (2022-2024).

3.2.2.4 Aspek Impor

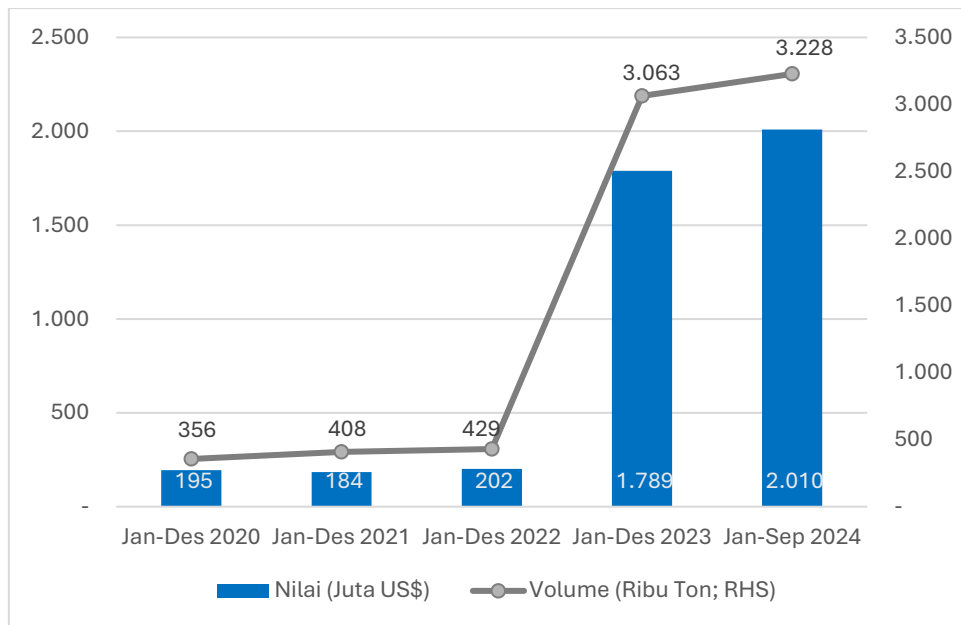
Beberapa komoditas pertanian dan pangan yang secara signifikan memengaruhi impor Indonesia adalah: padi-padian berupa beras dan jagung, serta gula.

Gambar 3.10 Impor Kelompok Pangan Indonesia, September 2024



Sumber : BPS, 2024

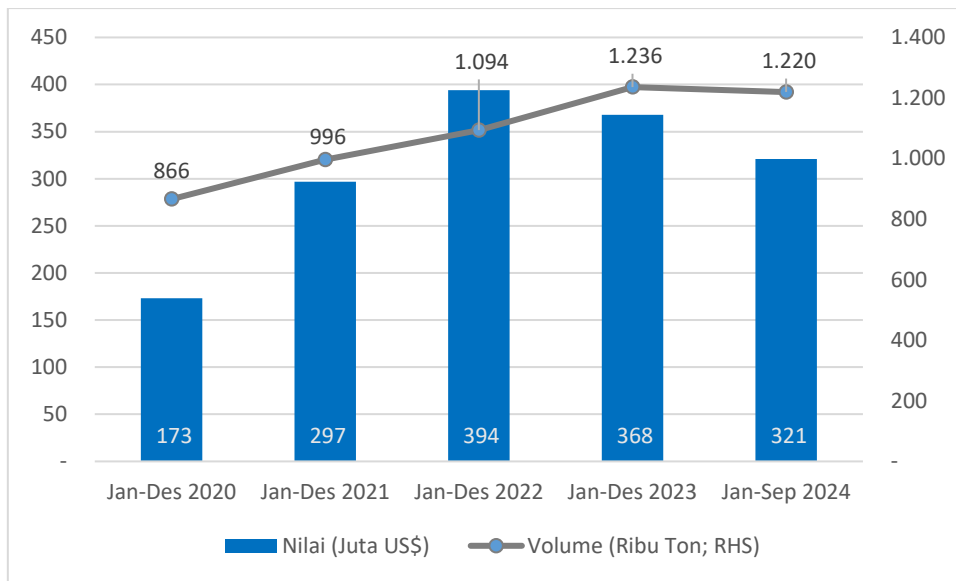
Gambar di bawah ini menunjukkan tren peningkatan nilai dan volume impor (dalam ribu ton) selama periode 2020 hingga September 2024. Nilai impor mengalami peningkatan moderat dari US\$195 juta pada 2020 menjadi US\$429 juta pada 2022, sebelum melonjak drastis ke US\$1.789 juta pada 2023 dan mencapai US\$2.010 juta pada September 2024. Volume impor juga menunjukkan lonjakan signifikan, dari 356 ribu ton pada 2020 menjadi 3.228 ribu ton pada September 2024. Peningkatan yang signifikan pada 2023 mengindikasikan adanya ekspansi besar-besaran, baik dari sisi volume maupun nilai.

Gambar 3.11 Perkembangan Impor Beras Januari 2020 - September 2024

Sumber : BPS, 2024

Gambar di bawah ini menunjukkan tren impor jagung Indonesia dalam nilai dan volume dari tahun 2020 hingga September 2024. Nilai impor meningkat dari US\$173 juta pada 2020 menjadi US\$394 juta pada 2022, sebelum sedikit menurun menjadi US\$368 juta pada 2023 dan mencapai US\$321 juta hingga September 2024. Volume impor jagung juga menunjukkan tren kenaikan dari 866 ribu ton pada 2020 hingga puncaknya 1.236 ribu ton pada 2023, tetapi sedikit menurun menjadi 1.220 ribu ton hingga September 2024. Penurunan nilai impor pada 2023-2024 meskipun volume tetap tinggi dapat mencerminkan penurunan harga jagung di pasar internasional atau efisiensi dalam rantai pasok impor.

Gambar 3.12 Perkembangan Impor Jagung Januari 2020 - September 2024



Sumber : BPS, 2024

Komoditas-komoditas ini memiliki pengaruh signifikan terhadap impor pangan Indonesia karena produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan domestik secara penuh. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian canggih, perubahan iklim, dan keterbatasan infrastruktur berkontribusi pada importasi komoditas pangan dan pertanian ini.

3.2.2.5 Aspek Belanja Negara

Pemerintah Indonesia memberikan subsidi benih dan pupuk untuk mendukung sektor pertanian. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp54 triliun untuk 9,55 juta ton pupuk. Jenis pupuk bersubsidi yang diberikan adalah: Urea, NPK, NPK Formula Khusus dan Pupuk organik. Subsidi pupuk diberikan kepada petani yang melakukan usaha tani pada Sub sektor tanaman pangan: (padi, jagung, dan kedelai), Hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan Perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi). Syarat penerima subsidi pupuk: Luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar, Tergabung dalam Kelompok Tani dan Terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Tabel 3.3 Subsidi Pupuk dan Subsidi Non-energi terhadap Total Belanja Pemerintah, 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Subsidi Pupuk (dalam triliun Rupiah)	34,2	29,0	29,7	42,0	44,1
Kontribusi Pupuk terhadap Total (%)	1,7	1,5	1,3	1,8	1,3
Subsidi Non-energi (dalam triliun Rp)	96,4	64,8	74,7	86,5	96,8
Kontribusi Subsidi non-energi (%)	4,8	3,3	3,2	3,8	2,9
Total Belanja Pemerintah (dalam triliun Rp)	1.975,2	1.954,5	2.301,6	2.246,4	3.325,1

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019 – 2023

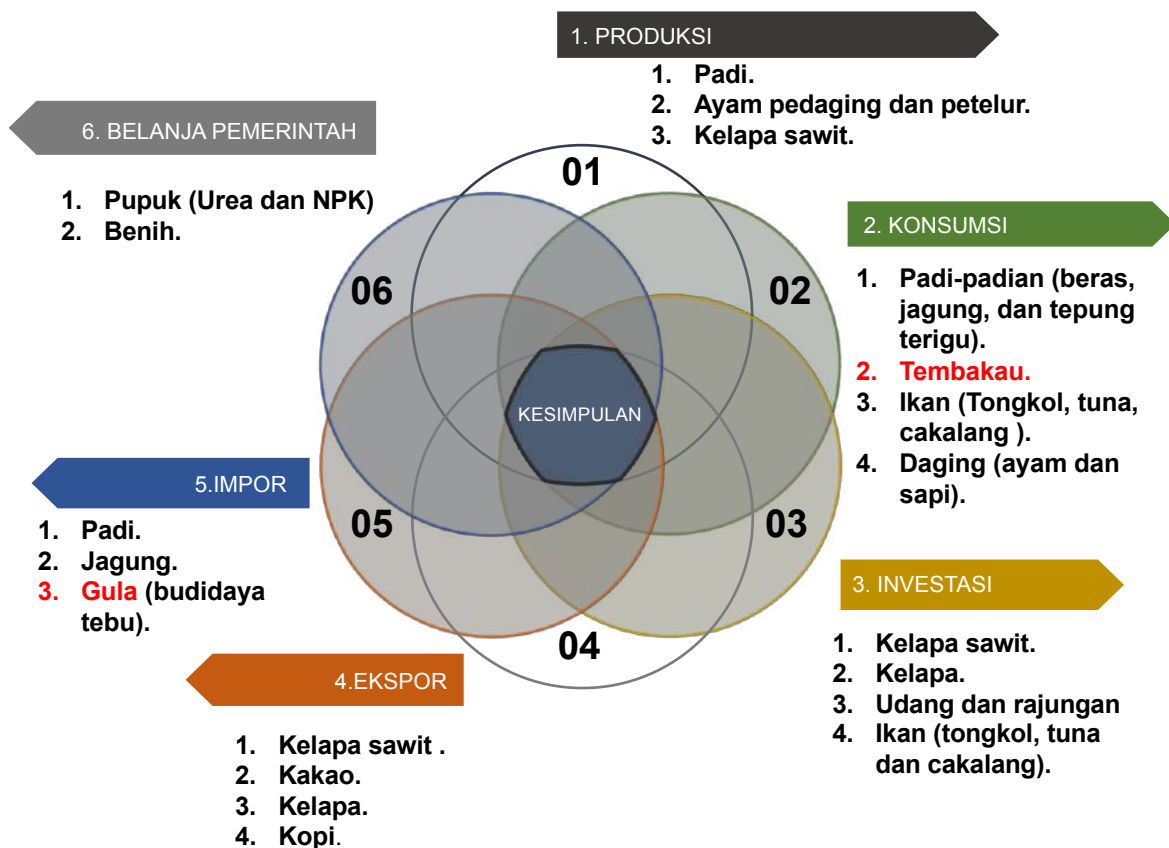
Pemerintah menyediakan benih varietas unggul bersertifikat kepada petani. Jenis benih bersubsidi meliputi **benih padi inbrida, padi hibrida dan benih kedelai**. Meskipun ada upaya subsidi, masih terdapat tantangan dalam distribusi pupuk bersubsidi, seperti ketidakmerataan distribusi dan ketidaktepatan waktu yang dapat menyebabkan gagal panen di beberapa daerah.

Pada FGD diketahui dari Pusdatin Kementerian Pertanian bahwa Realisasi pupuk PT Pupuk Indonesia (persero) per September 2024 sebesar 97,41 ton dari alokasi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton. Komoditas input pertanian yang mempengaruhi *government expenditure* adalah pupuk urea, NPK serta benih padi dan kedelai.

3.2.2.6 Delapan Komoditas Pertanian Strategis

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan terdapat 8 komoditas strategis nasional yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Komoditas tersebut berupa padi, kelapa sawit, ikan (tongkol, tuna dan cakalang), daging (ayam dan sapi), jagung, kelapa, kopi, tebu/gula.

Gambar 3.13 Delapan Komoditas Pertanian Strategis Nasional



Rincian komoditas dari masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

1. Komoditas pertanian dan pangan yang mempengaruhi produksi adalah padi, ayam pedaging dan petelur, dan kelapa sawit.
2. Komoditas pertanian dan pangan yang mempengaruhi konsumsi adalah padi-padian (Beras, Jagung, dan Tepung Terigu), tembakau, ikan (tongkol, tuna, cakalang) dan daging (Ayam dan Sapi).
3. Komoditas pertanian dan pangan yang mempengaruhi investasi adalah kelapa sawit, kelapa, udang, rajungan, ikan (Tongkol, Tuna dan Cakalang).
4. Komoditas pertanian dan pangan yang mempengaruhi ekspor adalah kelapa sawit, kelapa dan kopi.
5. Komoditas pertanian dan pangan yang mempengaruhi impor adalah padi, jagung dan gula (budidaya tebu).
6. Komoditas pertanian dan pangan yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah adalah Pupuk Urea, NPK dan Benih.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah tingginya impor komoditas gula dan konsumsi komoditas tembakau. Gula menurut CHEPS UI menimbulkan kerugian ekonomi akibat diabetes melitus mencapai Rp800 triliun selama periode 2006-2015, atau sekitar Rp80 triliun per tahun (CHEPS UI, 2016). Sehingga dibutuhkan *social engineering policy* agar masyarakat mengurangi konsumsinya sehingga dapat mendorong pola hidup lebih sehat. Sebagai solusi, khususnya dalam konteks

tembakau/rokok dan gula, ekspor dapat didorong ketika terjadi kelebihan produksi di dalam negeri.

3.2.3 Nilai Ekonomi Minimum Delapan Komoditas Strategis

Setelah mengetahui komoditas pertanian dan input pertanian yang menopang PDB Indonesia, perlu dilakukan analisis rantai nilai pada delapan komoditas pertanian yaitu padi, jagung, ikan (Tongkol, Tuna dan Cakalang), daging (ayam dan sapi), Kelapa sawit, Kelapa, Kopi dan Tebu serta dua komoditas input pertanian yaitu pupuk (Urea dan NPK), Benih (Padi dan Kedelai). Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada bank terkait peluang pembiayaan pada sektor usaha tani (*on farm/upstream*), industri barang setengah jadi (*midstream*) dan industri barang jadi (*upstream*) delapan komoditas dan dua komoditas input pertanian dalam 5 tahun ke depan.

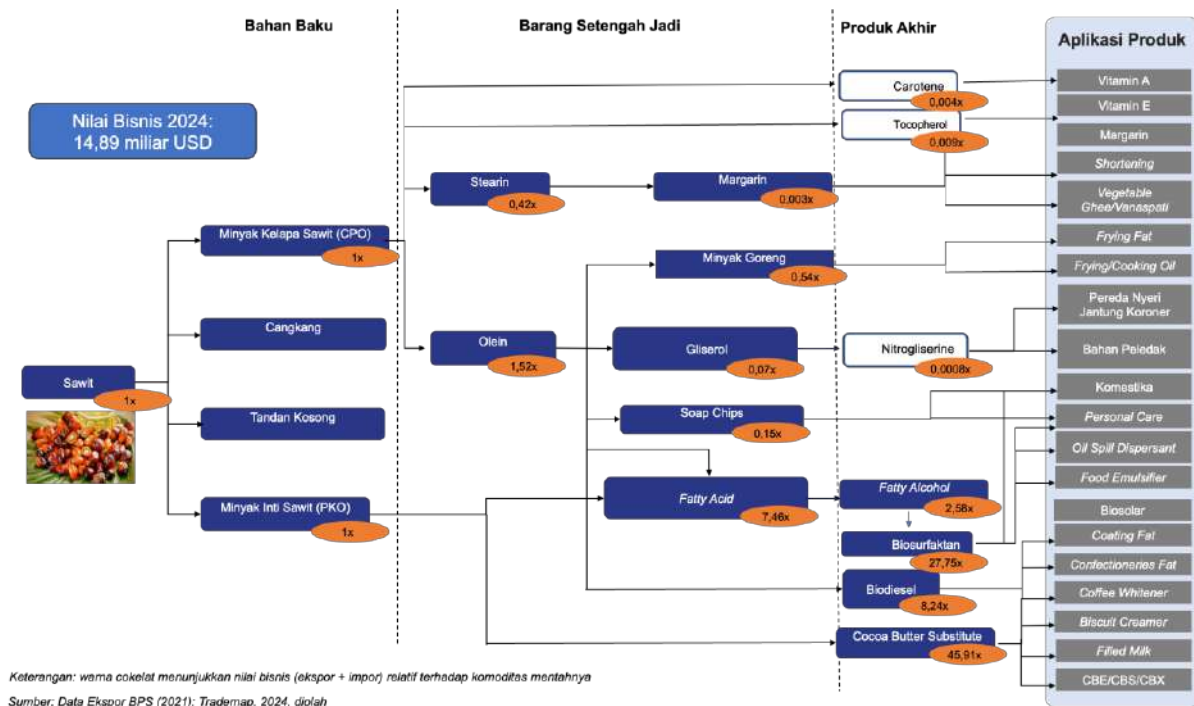
Perhitungan nilai ekonomi minimum di subbab ini dilakukan dengan mengalkulasi nilai impor dan ekspor barang mentah masing-masing delapan komoditas strategis. Kemudian angka ini dijadikan acuan untuk menghitung relatif nilai (rasio) berbagai produk turunannya. Angka ini cenderung *underestimate* terhadap nilai ekonomi keseluruhan, mengingat belum memasukkan nilai produksi dan konsumsi dalam negeri karena keterbatasan data. Adapun rincian potensi bisnis dari rantai pasok masing-masing delapan komoditas strategis nasional sebagai berikut:

A. Kelapa sawit dan potensi bisnisnya

Industri Kelapa sawit memiliki potensi bisnis yang sangat besar di Indonesia dan secara global. Industri kelapa sawit terdiri dari on-farm yang memproduksi tandan buah segar (TBS) dan industri pengolahan. Industri pengolahan dapat dibagi menjadi dua divisi utama, yaitu pabrik yang mengolah TBS menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan pabrik yang mengolah CPO menjadi berbagai produk minyak sawit olahan. Terdapat tiga pelaku dalam bisnis pengolahan kelapa sawit di Indonesia, yaitu swasta, pemerintah (BUMN), dan petani kecil (Gandhi & Takanashi, 2023).

Kelapa sawit digunakan dalam berbagai industri termasuk makanan, kosmetik, farmasi, dan energi. Kelapa sawit lebih efisien dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Bisnis komoditas berbasis kelapa sawit memiliki nilai bisnis mencapai US\$14,89 miliar. Dengan potensi terbesar berada di produk *cocoa butter substitute*. Dengan potensi yang besar ini, industri kelapa sawit terus menarik minat investor dan pengusaha, serta membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi melalui inovasi teknologi dan praktik berkelanjutan.

Gambar 3.14 Potensi Bisnis Kelapa Sawit



Sumber: Kemenperin, 2021; Trademap, 2024 (diolah)

B. Kelapa dan potensi bisnisnya

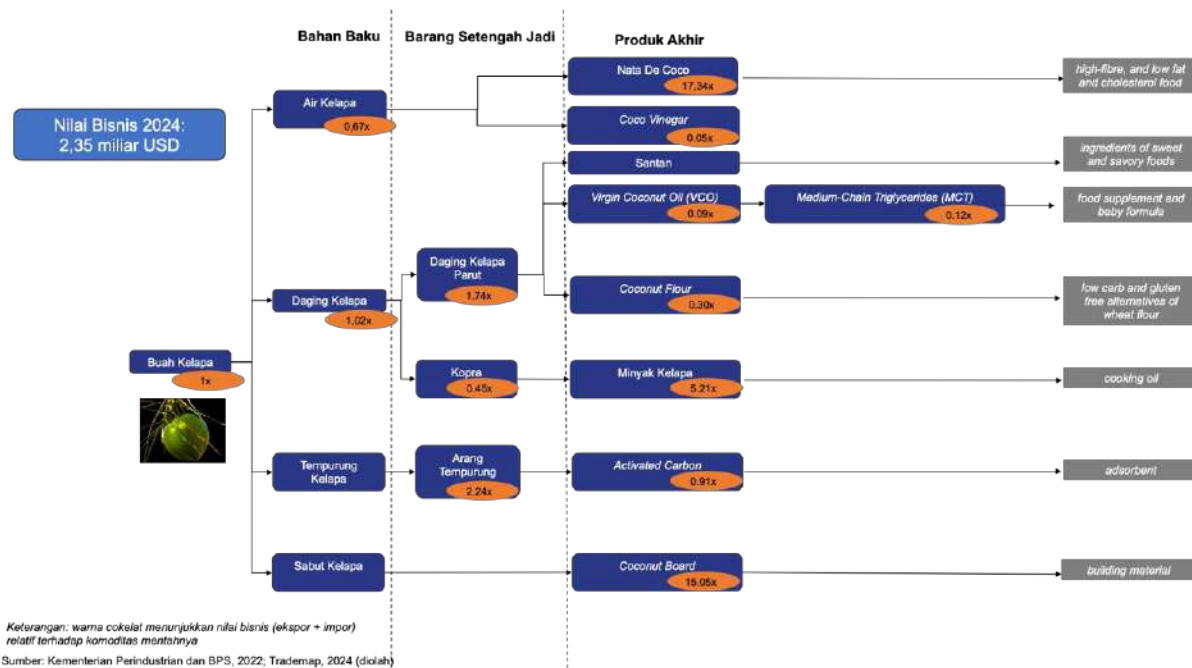
Kelapa memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan, dengan hampir semua bagian pohon dapat dimanfaatkan untuk berbagai industri. Bisnis komoditas berbasis kelapa memiliki nilai bisnis mencapai US\$2,35 miliar. Dengan potensi terbesar berada di produk nata de coco.

Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam industri kelapa, yang dapat meningkatkan perekonomian bangsa jika dimanfaatkan secara maksimal. Hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, menciptakan beragam peluang bisnis. Air kelapa dapat dijual langsung atau diolah menjadi nata de coco. Daging buah dapat digunakan untuk santan, minyak kelapa, dan produk turunan seperti sabun dan kosmetik. Batang pohon dapat diolah sebagai bahan membuat furniture dan kerajinan tangan bernilai tinggi. Daun kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk anyaman dan dekorasi. Sabut kelapa dapat digunakan sebagai media tanam organik dan bahan baku jok mobil. Tempurung kelapa dapat diolah menjadi arang, charcoal, dan kerajinan tangan.

Meskipun ekspor kelapa bulat masih tinggi, ada dorongan untuk meningkatkan ekspor produk olahan kelapa untuk memaksimalkan nilai tambah. Dengan adopsi teknologi dan inovasi industri, Indonesia berpotensi menjadi produsen kelapa terbesar di dunia, memanfaatkan keunggulan iklim dan kontur tanah yang cocok untuk pertumbuhan kelapa. Bisnis kelapa di Indonesia tidak hanya menjanjikan dari segi ekonomi, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi

berkelanjutan. Dengan inovasi dalam pengolahan dan pemasaran, industri kelapa Indonesia memiliki prospek cerah untuk pertumbuhan di masa depan.

Gambar 3.15 Potensi Bisnis Kelapa



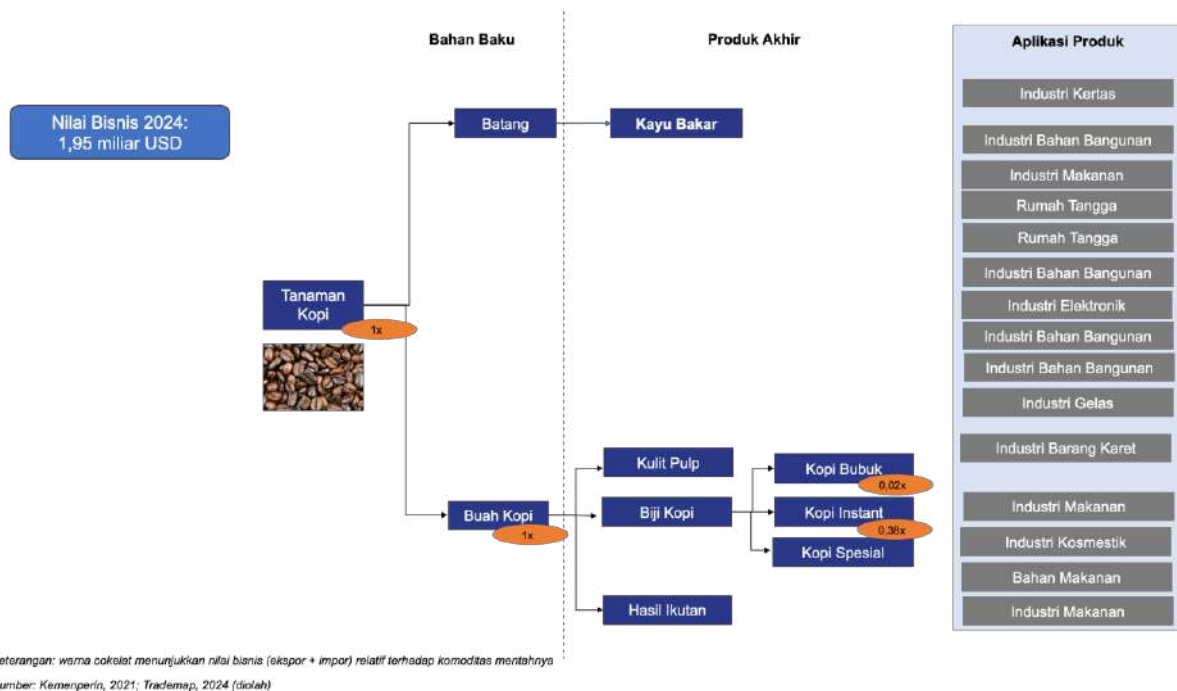
Sumber: Kemenperin, 2021; Trademap, 2024 (diolah)

Kopi dan potensinya

Kopi telah menjadi salah satu sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Antara tahun 2000 dan 2020, produksi kopi global mengalami tren peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,5% per tahun. Sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat dengan pangsa pasar 6,9%, Indonesia memegang posisi penting dalam rantai nilai kopi global dengan total produksi 753,9 ribu ton pada tahun 2020 (Fauzi dkk, 2023). Bisnis komoditas berbasis kopi memiliki nilai bisnis mencapai US\$1,95 miliar. Dengan potensi terbesar berada di produk buah kopi.

Tanaman kopi menghasilkan beberapa komponen utama, yaitu batang yang dapat digunakan sebagai kayu bakar untuk berbagai aplikasi seperti industri kertas, bahan bangunan, rumah tangga, hingga elektronik, dan buah kopi yang diolah menjadi kulit pulp dan biji kopi. Biji kopi memiliki aplikasi spesifik, seperti produk kopi bubuk, kopi instan, dan kopi spesial, yang digunakan untuk industri makanan, kosmetik, serta bahan makanan. Rantai ini juga mencakup hasil turunan yang mendukung industri lain.

Gambar 3.16 Potensi Bisnis Kopi

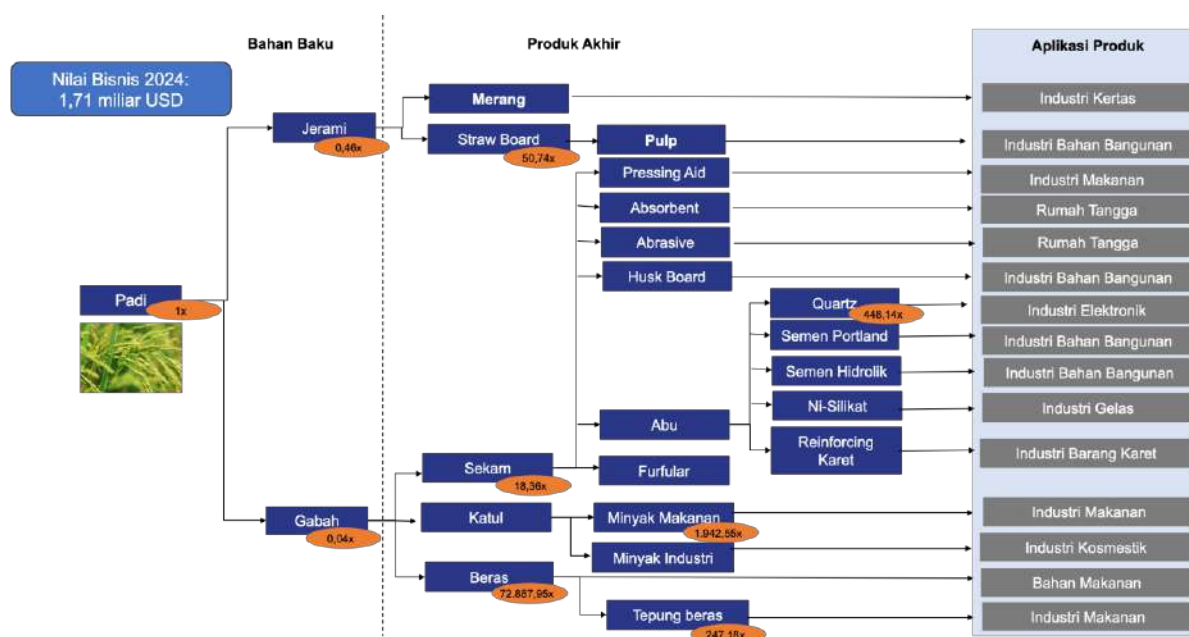


Sumber: Kemenperin, 2021; Trademap, 2024 (diolah)

Padi dan potensi bisnisnya

Bisnis komoditas berbasis padi-padian memiliki nilai bisnis mencapai US\$1,71 miliar. Dengan potensi terbesar berada di produk beras. Padi menghasilkan berbagai hasil olahan utama seperti beras (72,88% dari nilai mentahnya) untuk industri makanan, tepung beras (2,47%), serta hasil ikutan seperti sekam (18,36%) yang digunakan untuk minyak makanan, kosmetik, dan industri bahan bangunan. Jerami (0,46%) dimanfaatkan untuk bahan seperti straw board, pulp, dan produk abrasif, sedangkan merang menyumbang 50,74% dari nilai sebagai bahan pressing aid atau bahan bangunan. Selain itu, abu sekam digunakan untuk aplikasi teknologi seperti quartz, semen, dan reinforcing karet. Rantai nilai ini mencerminkan proses hilirisasi padi sebagai sumber utama pangan dan bahan baku industri dengan kontribusi luas di berbagai sektor.

Gambar 3.17 Potensi Bisnis Padi



Keterangan: wama cokelat menunjukkan nilai bisnis (ekspor + impor) relatif terhadap komoditas mentahnya
 Sumber: Kemenperin, 2021; Trademap, 2024, diolah

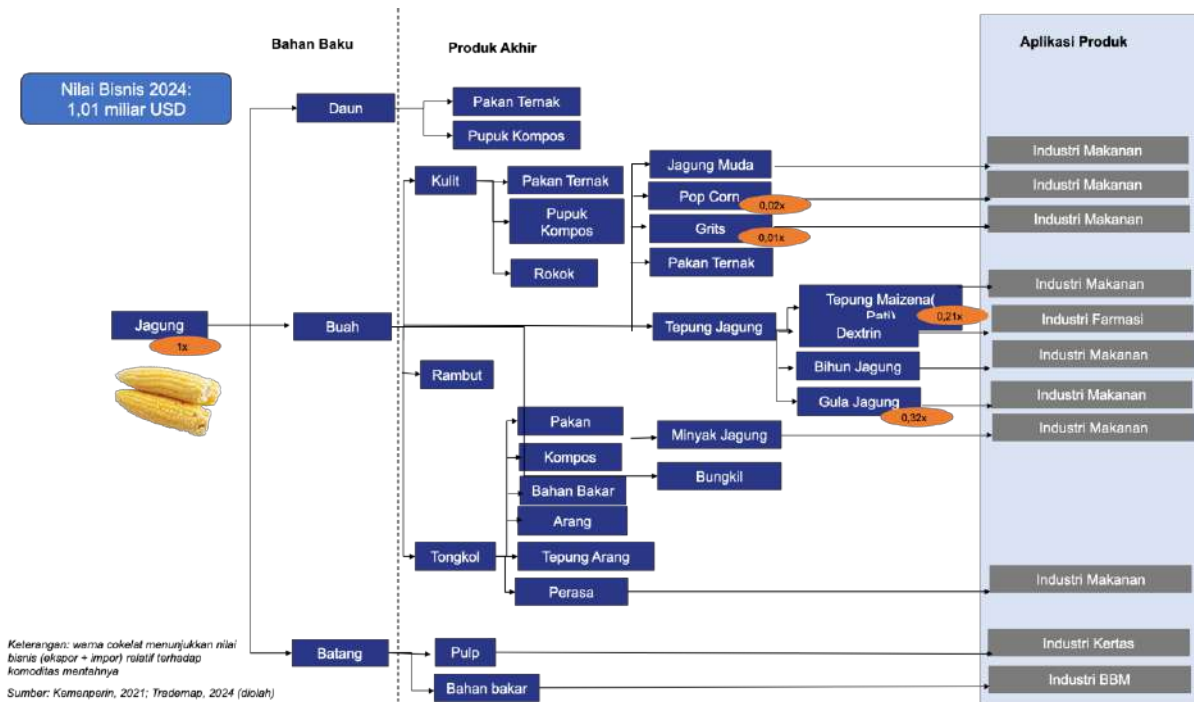
Sumber: Kemenperin, 2021; Trademap, 2024 (diolah)

C. Jagung dan potensi bisnisnya

Jagung merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan banyak industri karena merupakan sumber karbohidrat. Selain berfungsi sebagai bahan baku pakan ternak, jagung juga memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan menjadi penyumbang PDB (Haryono, 2012).

Bisnis komoditas berbasis jagung memiliki nilai bisnis mencapai US\$1,01 miliar. Dengan potensi terbesar berada di produk Jagung. Jagung menghasilkan berbagai produk utama, seperti tepung maizena (0,21% dari nilai mentahnya), popcorn (0,2%), grits (0,15%), minyak jagung, dan gula jagung (0,42%), yang banyak dimanfaatkan di industri makanan dan farmasi. Bagian lain seperti kulit dan daun digunakan untuk pakan ternak dan pupuk kompos, sementara rambut jagung dimanfaatkan untuk kompos, bahan bakar, atau arang. Batang dan tongkol jagung diolah menjadi bahan bakar, pulp, dan tepung arang. Rantai nilai ini menunjukkan bahwa seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk beragam aplikasi di sektor makanan, bahan bakar, dan industri lainnya.

Gambar 3.18 Potensi Bisnis Jagung



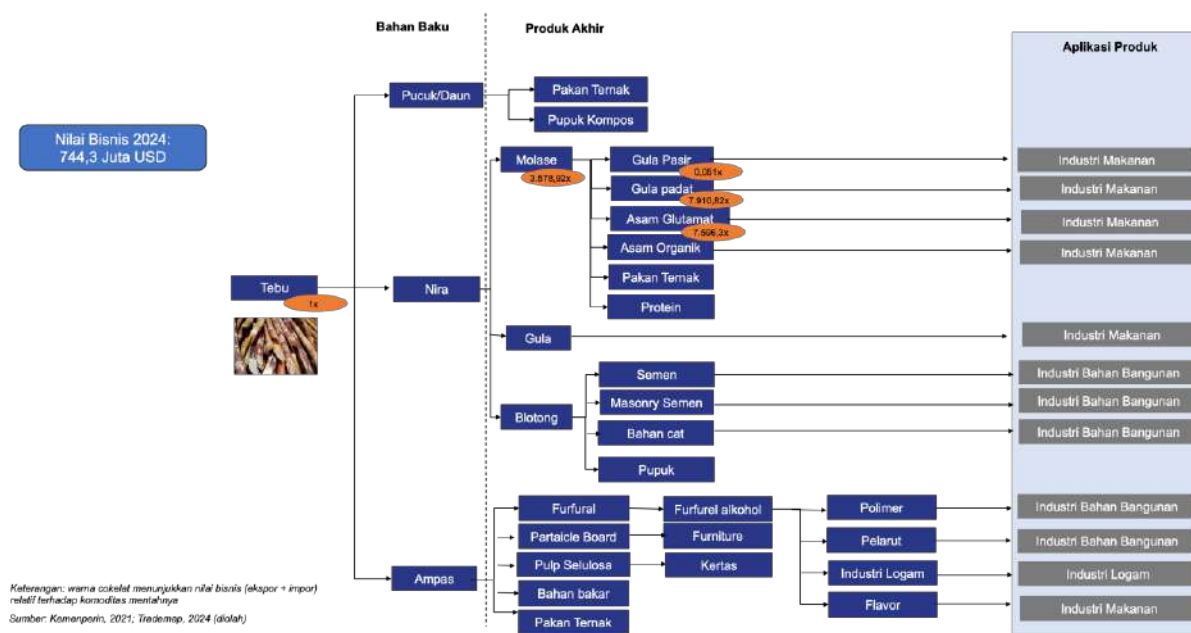
Sumber: Kemenperin, 2021; Trademap, 2024 (diolah)

D. Tebu dan potensi bisnisnya

Tebu merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia, terutama sebagai bahan baku utama industri gula. Setelah mengalami masa kejayaan pada tahun 1930-an dengan produksi mencapai 3,1 juta ton dan ekspor sebesar 2,4 juta ton, industri gula Indonesia mengalami pasang surut (Perwitasari dkk, 2021).

Bisnis komoditas berbasis tebu memiliki nilai bisnis mencapai US\$744,3 juta. Dengan potensi terbesar berada di produk gula padat. Tebu menghasilkan beberapa produk utama, seperti molase (3,57% dari nilai mentahnya) yang digunakan untuk pembuatan gula pasir (0,05%), gula padat (74,10%), asam glutamat, asam organik, dan pakan ternak. Nira dari tebu diolah menjadi gula serta produk turunan lain, seperti blotong, yang digunakan dalam pembuatan semen, pupuk, dan bahan konstruksi. Ampas tebu dimanfaatkan untuk pembuatan furfural alkohol, particle board, pulp selulosa, dan bahan bakar, yang berkontribusi pada industri bahan bangunan, logam, dan makanan. Pemanfaatan pucuk atau daun tebu juga diarahkan untuk pakan ternak dan pupuk kompos, menampilkan proses hilirisasi dalam memanfaatkan seluruh bagian tanaman tebu untuk beragam aplikasi di sektor makanan, bahan bangunan, dan energi.

Gambar 3.19 Potensi Bisnis Tebu

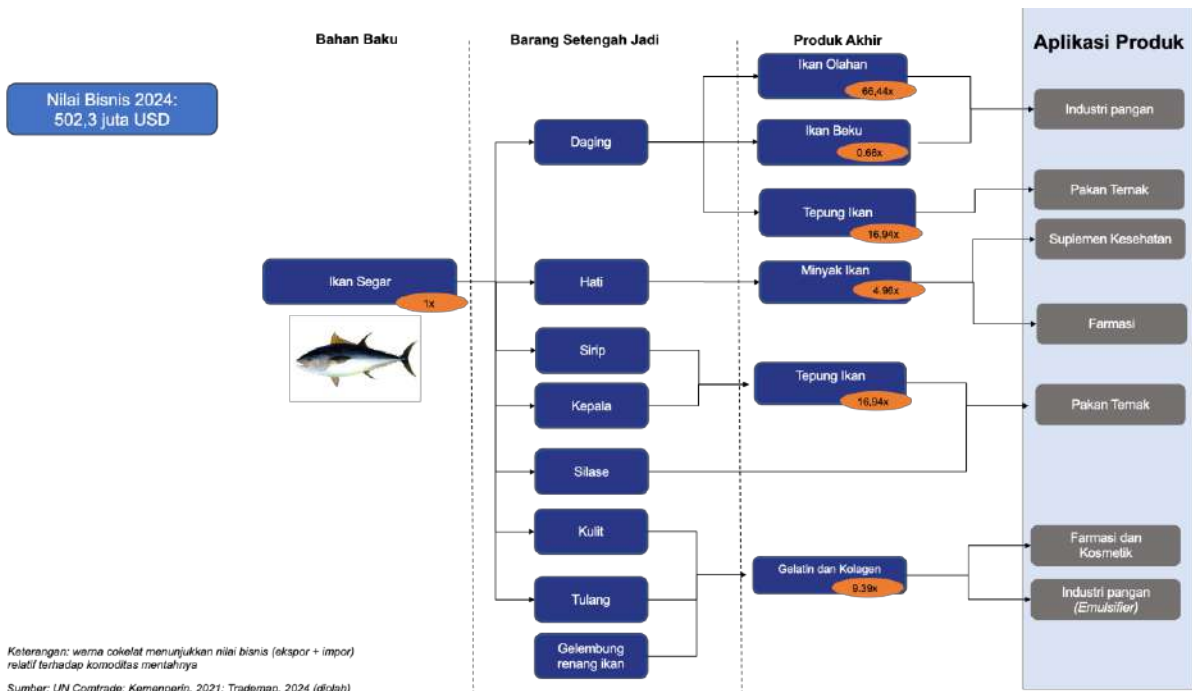


Sumber: Kemenperin, 2021; Trademap, 2024 (diolah)

E. Ikan (Tongkol, Tuna dan Cakalang) dan potensi bisnisnya

Bisnis komoditas berbasis ikan TCT memiliki nilai bisnis mencapai US\$502,3 juta. Dengan potensi terbesar berada di produk ikan olahan. Produk utama dari ikan segar mencakup ikan olahan (85,44% dari nilai mentahnya), ikan beku (0,6%), tepung ikan (16,34%), dan minyak ikan (4,3%), yang banyak digunakan dalam industri pangan, pakan ternak, suplemen kesehatan, dan farmasi. Bagian lain dari ikan, seperti hati, sirip, kepala, kulit, dan tulang, dimanfaatkan untuk silase, farmasi, kosmetik, serta industri pangan. Gelembung renang ikan menghasilkan gelatin dan kolagen (3,3%) untuk aplikasi di industri farmasi, kosmetik, dan pangan (emulsifier). Pemanfaatan seluruh bagian ikan mencerminkan proses hilirisasi dalam mendukung berbagai sektor, terutama pangan, kesehatan, dan kosmetik.

Gambar 3.20 Potensi Bisnis Ikan (Tongkol, Tuna, dan Cakalang)



Sumber: Kemenperin, 2021; Trademap, 2024 (diolah)

Daging (ayam dan sapi) dan potensinya

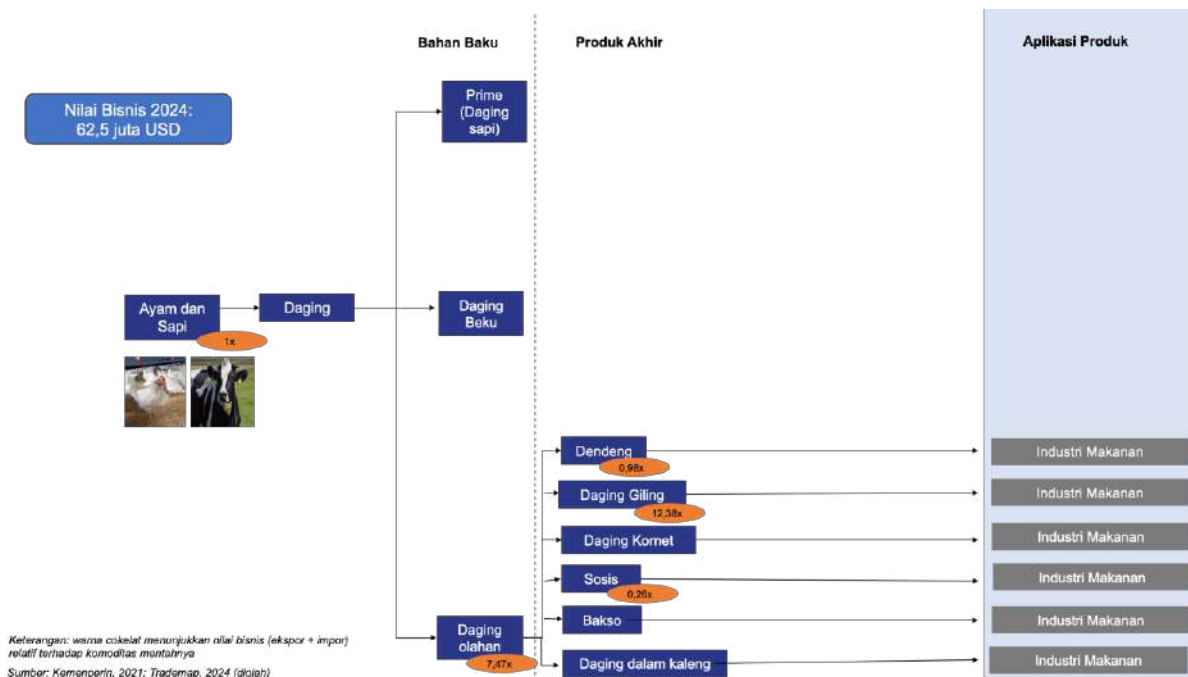
Pertambahan jumlah penduduk, tingkat pendapatan, kesadaran gizi dan perbaikan kualitas hidup masyarakat menyebabkan kebutuhan pangan hewani di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Pangan hewani dibutuhkan manusia untuk mendapatkan protein hewani. Daging merupakan pangan hewani sumber protein yang bermutu tinggi, berguna untuk pertumbuhan sel-sel organ tubuh dengan asam amino penyusun daging lengkap dan seimbang, serta kaya akan vitamin juga mineral yang diperlukan tubuh (Gandhi & Purwana, 2023).

Daging ayam dan sapi merupakan salah satu sumber protein hewani asal ternak yang banyak digemari namun mudah rusak karena tingginya kandungan air dan zat gizi seperti protein. Dalam rangka menghindari kerusakan dan menambah masa simpan daging sapi, manusia melakukan usaha atau bisnis pengolahan daging.

Bisnis komoditas berbasis daging memiliki nilai bisnis mencapai US\$62,5 juta. Dengan potensi terbesar berada di produk daging olahan. Daging ayam dan sapi diolah menjadi beberapa kategori utama, seperti daging beku, daging olahan (7,4% dari nilai mentahnya), dan produk spesifik seperti dendeng (0,98%), daging giling (12,3%), daging kornet, sosis (0,26%), serta bakso. Selain itu, produk seperti daging dalam kaleng menunjukkan penggunaan daging dalam bentuk praktis untuk memenuhi kebutuhan industri makanan. Keseluruhan produk ini diarahkan ke berbagai aplikasi di sektor pangan, mencerminkan pentingnya daging sebagai bahan

utama dalam industri makanan dengan diversifikasi produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasar.

Gambar 3.21 Potensi Bisnis Daging (Ayam dan Sapi)

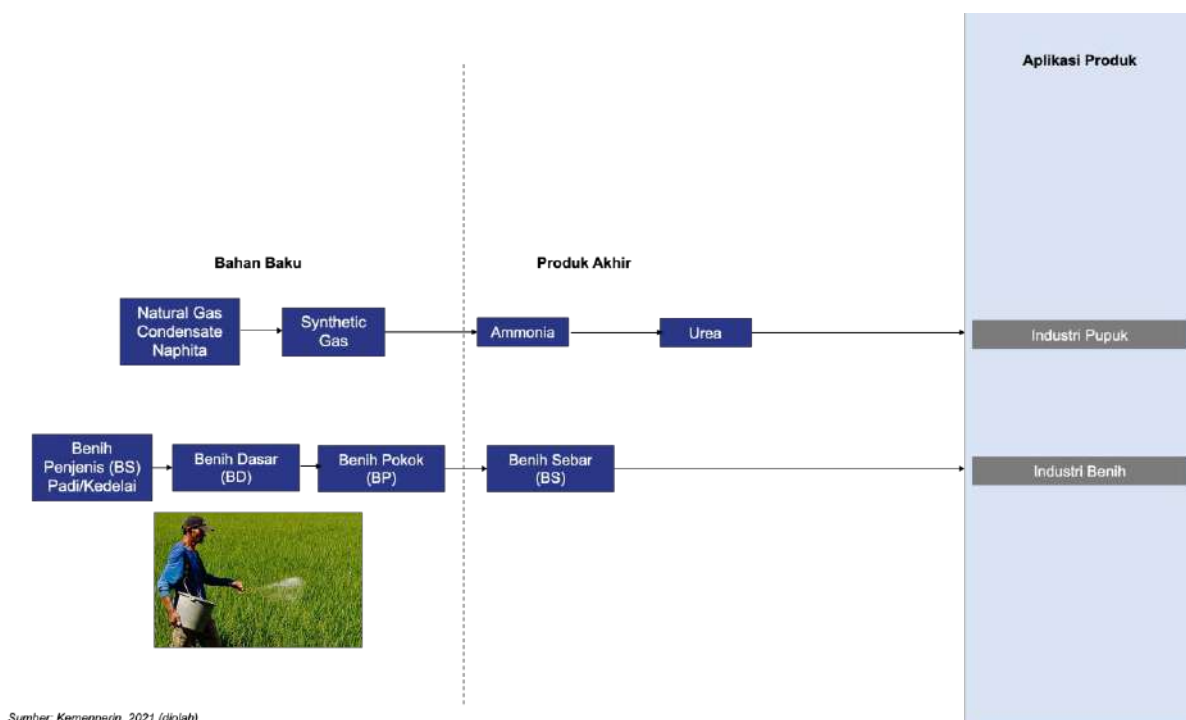


Sumber: Kemenperin, 2021; Trademap, 2024 (diolah)

Rantai pasok pupuk dan benih

Gambar di bawah ini menggambarkan rantai produksi yang menghubungkan industri pupuk dan benih. Bahan utama seperti natural gas, condensate, dan naphtha diolah menjadi synthetic gas, yang kemudian diubah menjadi ammonia dan akhirnya menghasilkan urea untuk digunakan dalam industri pupuk. Pupuk ini mendukung pengembangan sektor pertanian, termasuk produksi benih, yang melalui proses dari benih penjenis (BS), benih dasar (BD), benih pokok (BP), hingga benih sebar (BS) untuk digunakan langsung oleh petani. Keseluruhan rantai ini menunjukkan keterkaitan erat antara sektor energi, industri pupuk, dan industri benih dalam mendukung produktivitas pertanian.

Gambar 3.22 Rantai Pasok Pupuk dan Benih

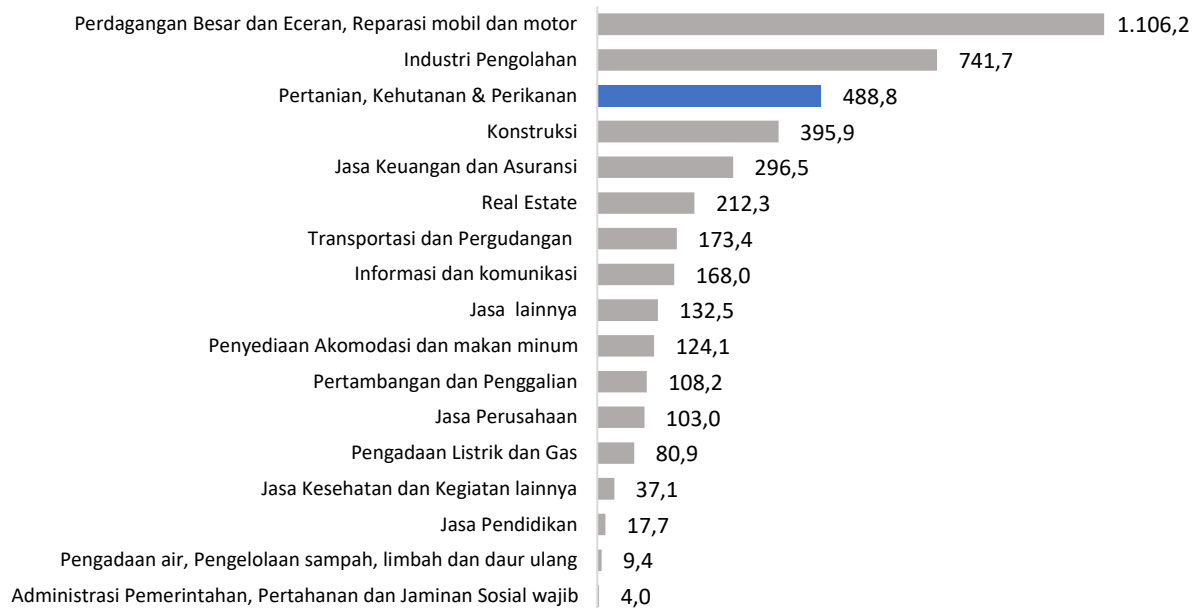


Sumber: Kemenperin, 2021 (diolah)

Sumber: Kemenperin, 2021(diolah)

3.2.4 Analisis Kesesuaian Pemberian Kredit Dengan Komoditas Pangan Dan Pertanian Prioritas Bagi Pertumbuhan Ekonomi.

Gambar di bawah ini menunjukkan distribusi pinjaman/kredit rupiah menurut lapangan usaha pada tahun 2023 dalam triliun rupiah, dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berada di peringkat ketiga dengan alokasi sebesar 488,8 triliun rupiah. Posisi ini menempatkan sektor tersebut di bawah Perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor (Rp1.106,2 triliun) dan Industri pengolahan (Rp741,7 triliun). Meskipun sektor ini berada di urutan ketiga, alokasi yang signifikan menunjukkan perannya sebagai sektor primer dalam mendukung ketahanan pangan, bahan baku industri, ekspor, dan perekonomian nasional.

Gambar 3.23 Pinjaman/Kredit Rupiah Menurut Lapangan Usaha, 2023 (triliun Rp)

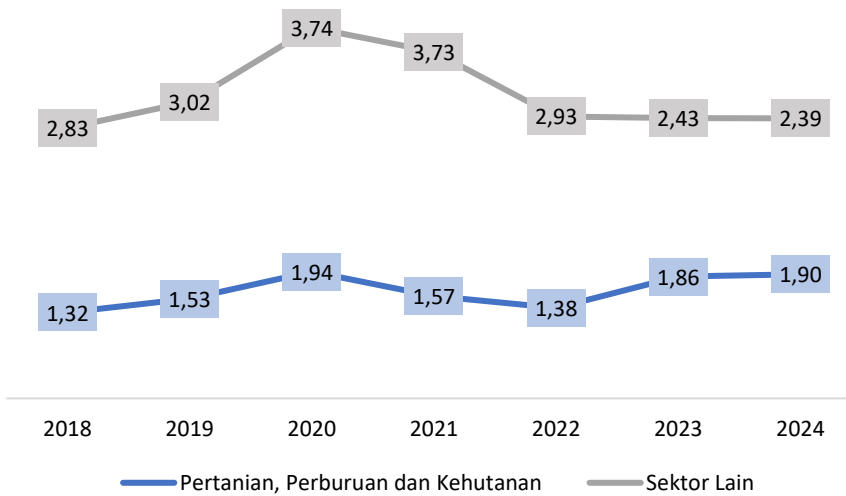
Sumber: Bank Indonesia, 2024

Dibandingkan dengan sektor-sektor lain seperti Konstruksi (Rp395,9 triliun) dan Jasa Keuangan serta Asuransi (Rp296,5 triliun), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menerima pembiayaan yang lebih besar. Sektor ini juga mengungguli sektor Informasi dan Komunikasi (Rp168,0 triliun) yang lebih berorientasi pada jasa dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor primer seperti pertanian sering dianggap tradisional, kontribusinya dalam ekonomi masih sangat relevan dan tetap memerlukan dukungan kredit yang besar.

Namun, terdapat sektor-sektor seperti Jasa Pendidikan (Rp17,7 triliun) dan Pengadaan Air serta Pengelolaan Limbah (Rp9,4 triliun) yang menerima alokasi jauh lebih kecil dibandingkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Perbandingan ini menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas dalam alokasi pembiayaan perbankan. Hal ini menunjukkan perlunya kesinambungan kebijakan pembiayaan untuk mendukung sektor ini agar terus memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terlebih sektor pertanian sangat penting bagi penyerapan tenaga kerja.

Tidak seperti anggapan pada umumnya, NPL/NPF sektor pertanian justru lebih rendah relatif terhadap sektor-sektor lainnya. Menggambarkan bahwa sektor pertanian memiliki risiko (gagal bayar) yang lebih kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pada tahun 2020, sektor pertanian mencapai puncak NPL sebesar 1,94%, sebelum menurun pada 2021 dan 2022 menjadi 1,57% dan 1,38%. Namun, ada sedikit kenaikan pada tahun 2023 (1,86%) dan proyeksi stabilisasi di 1,90% pada 2024.

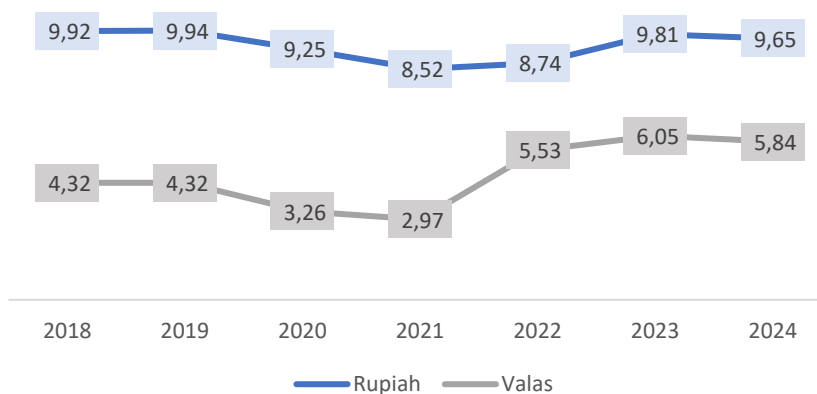
Gambar 3.24 NPL/NPF berdasarkan Lapangan Usaha (%)



Sumber: OJK, 2024

Sebaliknya, sektor lain menunjukkan rasio NPL yang lebih tinggi sepanjang periode, dengan puncak di tahun 2019-2020 sebesar 3,74% dan 3,73%, sebelum menurun signifikan menjadi 2,39% pada 2024. Perbandingan ini menegaskan bahwa sektor pertanian, meskipun menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan pada cuaca, memiliki performa kredit macet yang lebih minim dibandingkan sektor lain.

Gambar 3.25 Suku Bunga Rata-rata Kredit Bank Umum Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (%)

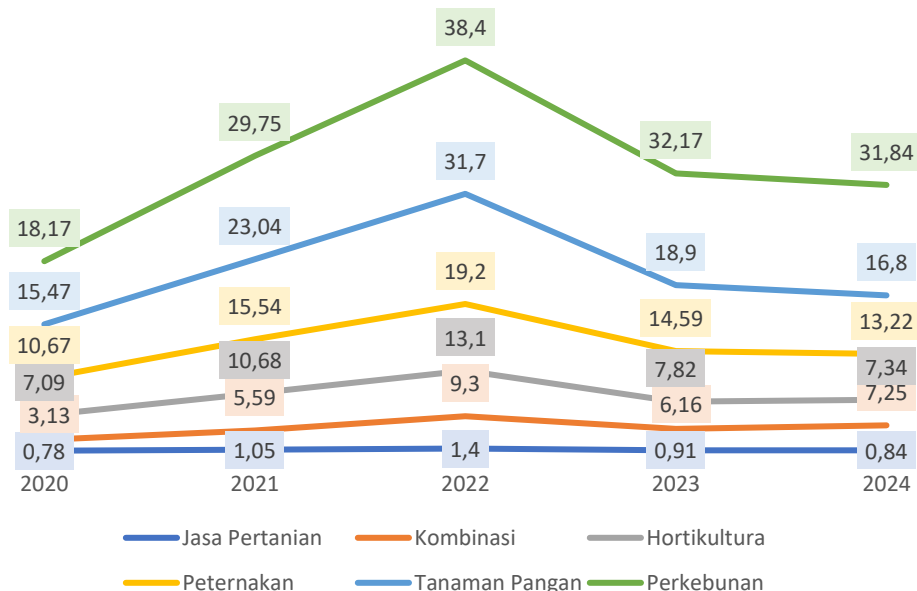


Sumber: OJK, 2024

Dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR), gambar di bawah ini menunjukkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam triliun rupiah berdasarkan subsektor pertanian dari tahun 2020 hingga 2024. Perkebunan mencatatkan realisasi KUR tertinggi di sepanjang periode, dengan puncaknya sebesar Rp38,4 triliun pada 2022, namun mengalami penurunan menjadi Rp32,17 triliun pada 2023 dan stabil di Rp31,84 triliun pada 2024. Subsektor lainnya, seperti peternakan dan hortikultura,

memiliki kontribusi moderat, dengan peternakan mencapai puncak sebesar Rp19,2 triliun pada 2022, sebelum menurun menjadi Rp13,22 triliun pada 2024, sedangkan hortikultura menurun dari Rp9,3 triliun pada 2022 menjadi Rp7,25 triliun pada 2024. Data ini mencerminkan fokus alokasi KUR pada subsektor perkebunan, baru diikuti oleh tanaman pangan.

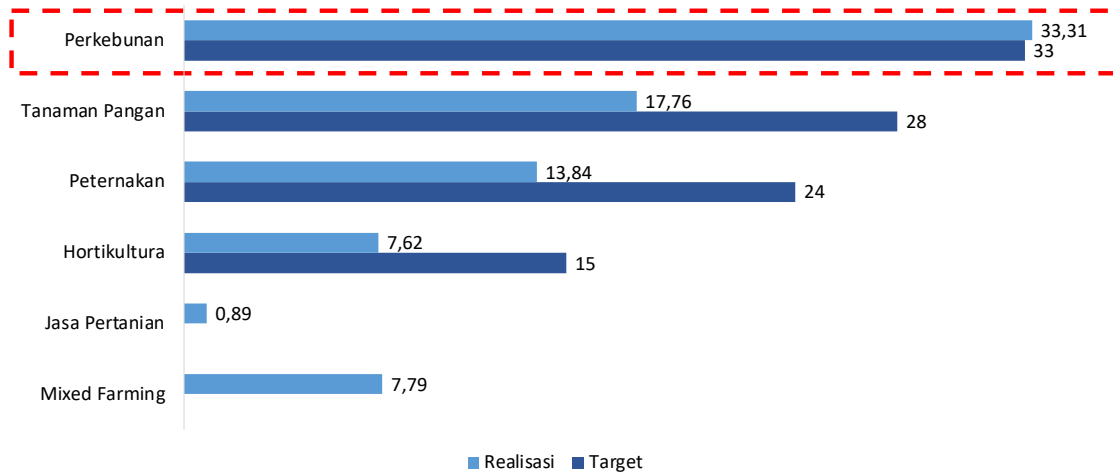
Gambar 3.26 Realisasi KUR (Rp Triliun) Per Sub Sektor



Sumber: Kementerian Pertanian, 2024

Gambar ini menunjukkan target dan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian hingga 19 November 2024 dalam triliun rupiah. Subsektor perkebunan mencatat target dan realisasi tertinggi, dengan realisasi hampir menyamai target, mengindikasikan tingginya permintaan kredit di subsektor ini. Subsektor tanaman pangan dan peternakan juga memiliki kontribusi signifikan, meskipun realisasi masing-masing masih sedikit di bawah target. Sementara itu, subsektor jasa pertanian dan hortikultura menunjukkan realisasi yang cukup mendekati target. Data ini menggarisbawahi fokus dan efektivitas pembiayaan pada subsektor prioritas, khususnya pada perkebunan dan tanaman pangan, sebagai pendorong utama KUR di sektor pertanian.

Gambar 3.27 Target dan Realisasi KUR Sektor Pertanian hingga 19 November 2024, Rp Triliun

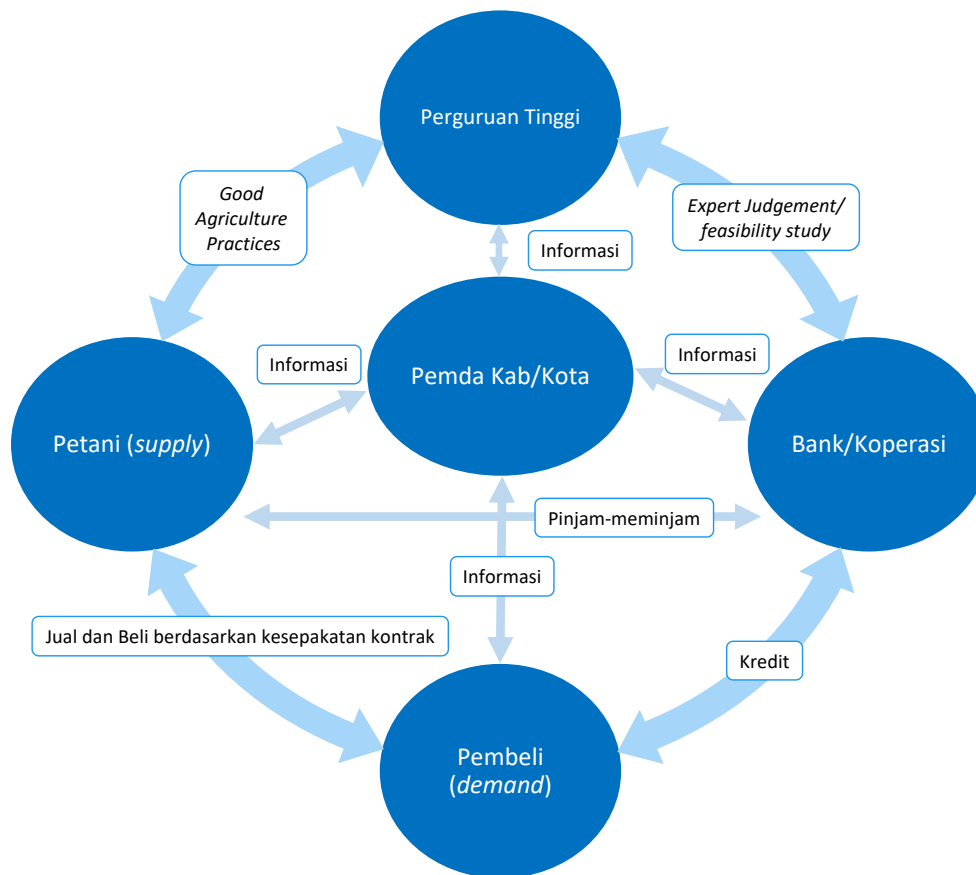


Sumber: Kementerian Pertanian, 2024

Jika melihat penetapan target dan realisasi KUR porsi terbesar secara berurutan diberikan kepada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. target ini sudah selaras dengan komoditas penopang PDB yaitu sub sektor perkebunan (kelapa sawit, kelapa, kopi dan tebu), tanaman pangan (padi, jagung), peternakan daging (ayam dan sapi). namun ke depan pemerintah dapat menambah sektor perikanan (ikan tongkol, tuna dan cakalang) sebagai sektor yang diberikan target KUR karena bersumbangsih signifikan terhadap perekonomian nasional.

Demi mendorong kredit sektor tanaman pangan dan hortikultura, model *close loop* pertanian dapat diimplementasikan. Model kemitraan *closed loop* merupakan pengembangan pola *contract farming*, perbedaan utama yaitu terlibatnya banyak pihak di dalam kegiatan kemitraan tersebut. Bantuan teknis *onfarm* dan *offfarm* dalam model *closed loop* ini menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh mitra yang terlibat di dalam kemitraan *close loop*. Kesepakatan atau perjanjian dibuat dalam bentuk nota kesepahaman antar pemangku kepentingan. Khusus untuk pemasaran hasil produksi petani dibuat kontrak terpisah antara petani dengan pihak pembeli/offtaker (Yanuar dkk, 2022).

Gambar 3.28 Model Closed Loop Pertanian



Sumber: Office of Chief Economist PERBANAS (2024)

3.3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.3.1 Kesimpulan

Kajian ini mengidentifikasi delapan komoditas pertanian strategis yang dianggap vital untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. Komoditas tersebut meliputi padi, jagung, ikan (tongkol, tuna, dan cakalang), daging (ayam dan sapi), kelapa sawit, kelapa, kopi, dan tebu (gula), ditambah dua komoditas input pertanian, yaitu pupuk (Urea dan NPK) serta benih. Dengan berbagai produk hilirisasi yang dihasilkan, komoditas-komoditas ini memiliki potensi nilai bisnis yang sangat besar, mencapai setidaknya US\$23,15 miliar atau sekitar Rp370 triliun per tahun, meskipun angka ini terbilang konservatif (*underestimate*). Potensi ekonomi ini menunjukkan betapa strategisnya peran delapan komoditas tersebut dalam pembangunan pertanian dan ekonomi nasional.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tercermin dari target dan realisasinya telah menunjukkan adanya keselarasan antara prioritas pembiayaan dengan subsektor pertanian strategis ini. Subsektor perkebunan menerima porsi terbesar aliran

KUR, diikuti oleh tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. Alokasi ini mencerminkan pengakuan atas pentingnya subsektor-sektor tersebut sebagai motor penggerak utama dalam sektor pertanian. Namun, beberapa komoditas strategis lain, seperti perikanan (tongkol, tuna, cakalang) dan input pertanian (pupuk dan benih), saat ini belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam penyaluran kredit.

Ke depan, pemerintah dapat mengintegrasikan sektor perikanan, khususnya untuk komoditas tongkol, tuna, dan cakalang, serta komoditas input pertanian seperti pupuk dan benih, ke dalam prioritas utama penyaluran kredit dan pembangunan pertanian. Peningkatan akses kredit untuk sektor-sektor ini akan mendorong optimalisasi potensi ekonomi dan meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan daya saing nasional. Selain itu, pemerintah dapat memastikan bahwa aliran kredit lebih terfokus pada komoditas-komoditas strategis lainnya, termasuk perkebunan (kelapa sawit, kelapa, kopi, dan tebu), tanaman pangan (padi dan jagung), serta peternakan daging (ayam dan sapi).

Langkah strategis ini memerlukan penguatan koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memastikan tersedianya pembiayaan yang efektif dan efisien. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan KUR tidak hanya memberikan dukungan modal, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat hilirisasi dan inovasi dalam sektor pertanian. Dukungan ini akan membantu menciptakan nilai tambah yang lebih besar pada komoditas strategis, sekaligus meningkatkan daya saing ekspor dan mendukung kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak.

Kesimpulannya, delapan komoditas strategis yang diidentifikasi dalam kajian ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi nasional, dengan potensi nilai bisnis yang sangat besar. Penyaluran KUR yang telah mendukung beberapa subsektor strategis perlu diperluas ke sektor perikanan dan komoditas input pertanian untuk mempercepat pembangunan pertanian secara holistik. Dengan langkah ini, diharapkan sektor pertanian dapat terus berkembang menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

3.3.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Memprioritaskan 8 komoditas strategis ini serta ketersediaan benih & pupuk guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam lima tahun ke depan (2024-2029) agar fokus sehingga sumber daya yang dialokasikan dapat optimal, termasuk insentif pemerintah dan aliran kredit perbankan ke sektor pertanian dapat menopang kedelapan komoditas ini dan berbagai bisnis penunjang dan produk hilirisasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan insentif untuk kredit sektor pertanian.
2. Menjadikan 8 komoditas strategis pertanian serta usaha benih & pupuk sebagai prioritas pemberian kredit pada sektor pertanian. Pemberian kredit dapat menysasar pelaku usaha pertanian terkait komoditas-komoditas ini, baik ditingkat usaha tani (*on farm/upstream*), industri barang setengah jadi

(*midstream*) dan industri barang jadi (*downsnstream*) dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan menopang target pertumbuhan 8%. Hal ini perlu ditopang dengan peningkatan kapasitas bank dalam memahami siklus bisnis sektor pertanian dan menilai kredit pertanian.

3. Menggenjot hilirisasi dan investasi pada pengembangan produk turunan dari 8 komoditas strategis, khususnya dengan memberikan insentif untuk mendorong pelaku usaha untuk membangun pabrik pengolahan di sentra-sentra pertanian.
4. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap data pertanian. Membangun sistem data nasional yang terintegrasi untuk sektor pertanian guna memberikan informasi akurat kepada lembaga perbankan, pelaku usaha, dan investor mengenai data produksi, konsumsi, investasi, ekspor, impor, dan risiko kredit untuk seluruh komoditas strategis serta berbagai produk hilirisasinya. Hal ini dilakukan untuk menekan persepsi risiko dan bunga tinggi.
5. Mengintegrasikan konsep kemitraan plasma-inti untuk komoditas perkebunan (di mana perusahaan besar menjamin petani kecil sehingga risiko kredit dapat diminimalkan. serta konsep kemitraan *close loop* untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura (di mana pemerintah memfasilitasi *offtaker* bagi petani). Konsep kemitraan *close-loop* dapat menjadi salah satu syarat pemberian kredit bagi petani tanaman pangan hortikultura dari perbankan.
6. Memperkuat skema asuransi pertanian yang melindungi petani dan lembaga keuangan dari risiko usaha pertanian, seperti gagal panen atau fluktuasi harga.

3.3.3 Rekomendasi Studi Berikutnya

1. Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Sektor Pertanian terhadap Pengembangan 8 Komoditas Strategis:

- Studi ini bertujuan mengevaluasi dampak aliran kredit perbankan dan pemberian insentif pada usaha tani, industri *midstream*, dan *downstream* terhadap pertumbuhan sektor pertanian, khususnya kedelapan komoditas strategis. Selain itu, studi selanjutnya dapat membahas strategi yang perlu diterapkan pada masing-masing industri untuk memaksimalkan nilai bisnis delapan komoditas strategis yang disimpulkan dalam studi ini.

2. Efek Ketersediaan Data Pertanian pada Persepsi Risiko Kredit Sektor Pertanian:

- Penelitian ini mengkaji sejauh mana aksesibilitas dan kualitas data nasional terkait pertanian dapat memengaruhi pengambilan keputusan perbankan dan investor dalam mendanai komoditas strategis dan produk hilirnya.

3. Analisis Risiko dan Solusi Asuransi Pertanian pada Pengelolaan 8 Komoditas Strategis:

- Studi ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara risiko agribisnis (gagal panen, fluktuasi harga) dengan keberlanjutan usaha tani, serta mengusulkan skema asuransi pertanian yang efektif.

4. Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Produktivitas dan Pengelolaan Risiko Pertanian:

- Penelitian ini mengeksplorasi adopsi teknologi modern, seperti IoT dan *blockchain*, dalam pengelolaan 8 komoditas strategis, termasuk manfaatnya untuk mitigasi risiko dan efisiensi produksi.

5. Studi Kasus dan *Best Practices*: Model Optimal Kemitraan “Close Loop” dan “Plasma-Inti”:

- Studi ini mengeksplorasi implementasi skema Close Loop dan Plasma-Inti yang berhasil, termasuk penjaminan oleh Perusahaan besar terhadap petani/pengusaha kecil, analisis risiko kredit, peningkatan produktivitas petani kecil, dan dampaknya pada rantai pasok komoditas strategis (termasuk aspek sustainabilitasnya untuk keperluan ekspor).

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. (2009). Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(1), 13–27
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 Maret*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/>
- Bank Indonesia (BI). (2024). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*.
- Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2021). *The 2019 Health Care Cost of Smoking in Indonesia*. Jakarta: CISDI
- Fauzi, D., Purnamasari, U., Wicaksono, S. A., & Maharani, C. (2023). When local customs meet the market: an analysis of coffee value chain in Tebat Benawa customary community, Indonesia. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 21(1). <https://doi.org/10.1080/14735903.2023.2231769>
- Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. (2018). *The Future of Food and Agriculture, Alternative Pathways to 2050*.
- Gandhi, P., & Purwana, I. S. (2023). Kelayakan Finansial Pendirian Bisnis Sosis Sapi PT XYZ di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. *PETERPAN (Jurnal Peternakan Terapan)*, 5(1), 30-40. <https://doi.org/10.25181/peterpan.v5i1.2858>
- Gandhi, P., & Takanashi, F. (2023). Differences in Organization Structure and the Supply Chain of Private with State-Owned Palm Oil Mills in North Sumatra, Indonesia," *E3S Web of Conferences*, vol. 454, p. 02025, Jan. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345402025>
- Haryono. (2012). *Maize for Food, Feed and Fuel in Indonesia: Challenges and Opportunity*. Paper presented in the International Maize Conference. Gorontalo
- Irianto, S.G. (2012). *Pedoman Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian*. Direktorat Pembiayaan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Keynes J.M. (1936), "The General Theory of Employment, Interest, and Money" New York, Harcourt, Brace.
- Malthus, T. (1798). *An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society with remarks on the specualtions of Mr.Godwin,M.Condorcet, and J.Johnson*. London : electronic scholarly publishing project.
- Nursihhah, M. (2021). Hubungan Kepatuhan Diet Terhadap Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Medika Hutama*, 2 , 1002-1010.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Indonesia*.

- Perwitasari, H., Mulyo, J., H. Sugiyarto., Widada, A. W., Siregar, A.P., & Fadhlani, Z. (2021). Economic Impact of Sugarcane in Indonesia: An Input-Output Approach. *AGRO EKONOMI*, Vol 32, Issue 1, June 2021, Page.1-11DOI : <http://doi.org/10.22146/ae.61051>
- Prabowo, S., & Gibran, R. (2023). *Asta Cita Pemerintahan 2045: Visi Indonesia Maju*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Ridwan, M. (2024). KKP: Produksi tuna-tongkol-cakalang capai 1,49 juta ton per tahun. Diunduh dari <https://www.antaraneews.com/berita/4160055/kkp-produksi-tuna-tongkol-cakalang-capai-149-juta-ton-per-tahun>. 8 Januari 2024
- Soekarno. (1952). Soal Hidup atau Mati. Pidato Presiden RI Pertama pada Peletakan Batu Pertama Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor 27 April 1952.
- Yanuar, R., Tinaprilla, N., Rachmania, M., & Harti, H. (2022). Dampak Kemitraan Closed Loop Terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Cabai . *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 10(1), 180-199. <https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.180-199>

**Strategi Pembiayaan Mortgage
bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
dan Program Tiga Juta Rumah
2024-2029**

RINGKASAN EKSEKUTIF

LATAR BELAKANG & TUJUAN PENELITIAN

Isu kurangnya kesediaan hunian yang layak atau *backlog* hunian telah menjadi masalah yang diperhatikan oleh tiap era kepemimpinan Indonesia. Pemerintah Prabowo-Gibran menawarkan Program 3 Juta Rumah sebagai solusi untuk mengatasi *backlog* perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Agar program ini efektif dan tepat sasaran, dua faktor utama harus diperhatikan, yaitu kemampuan membayar cicilan (*ability to pay*) dan kriteria penerima manfaat yang jelas agar subsidi tepat sasaran dan sumber daya, baik dari aspek program, kapasitas pembangunan dan pendanaan, dapat tersalurkan secara lebih optimal.

Penelitian ini bertujuan merumuskan desain kebijakan berdasarkan kedua prinsip tersebut, menjawab lima pertanyaan kunci terkait jumlah *backlog*, kriteria penerima manfaat, kemampuan membayar, profil calon penerima, dan tanggapan perbankan. Kajian ini membedah target 3 (tiga) juta rumah ini pada kelompok masyarakat yang dianggap akan paling membutuhkan bantuan atau insentif dalam kepemilikan rumah berdasarkan *ability to pay* mereka beserta lokasi di mana target ini dapat diprioritaskan. Secara lebih khusus, karakter utama kelompok masyarakat ini yang didominasi pekerja sektor informal, jaminan dalam bentuk kendaraan bermotor roda dua dan akses kredit yang terbatas memerlukan perlakuan yang khusus dalam kerangka manajemen risiko perbankan.

Kajian ini juga mencoba memberikan sebuah sudut pandang baru dengan membahas secara lebih luas sudut pandang dari sisi regulator, asosiasi pengembang (*developer*) dan perbankan untuk lebih memahami benang merah dan solusi *backlog* yang dibutuhkan dalam jangka waktu pendek dan panjang. Secara umum, faktor yang menjadi perhatian adalah ketidakcocokan kemampuan daya beli masyarakat dengan harga rumah yang tersedia, serta perlunya dukungan serius dari perbankan untuk dapat mengakomodasi profil risiko Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua hal ini tentunya membutuhkan subsidi fiskal yang tepat sasaran (baik langsung atau lewat perbankan) dan insentif bagi pelaku industri yang partisipatif (pengembang dan perbankan) dalam pengurangan *backlog* ini. Dengan kata lain, program ini sangat membutuhkan aspek koordinasi dari para *stakeholder* utama seperti Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, pengembang, dan perbankan, serta butuhnya dukungan/insentif dari lembaga lainnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

TEMUAN UTAMA:

1. Jumlah *Backlog*: Berdasarkan data Susenas BPS 2022, terdapat 11,7 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah.

2. Target Sasaran: Program ini disarankan menysasar kelas “Masyarakat Menuju Menengah” dengan pengeluaran bulanan Rp3–7 juta per rumah tangga atau pendapatan minimal UMR. Berdasarkan kriteria ini, sekitar 3,6 juta rumah tangga dapat menjadi target utama. Untuk mencapai target, pemerintah perlu membangun sekitar 600 ribu rumah subsidi per tahun, membutuhkan peningkatan kapasitas dan subsidi hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun 2024.
3. Cicilan Terjangkau: Cicilan bulanan ideal diusulkan sebesar Rp1,1 juta agar sesuai dengan kemampuan membayar MBR sekaligus memenuhi ekspektasi perbankan.
4. Profil Calon Penerima:
 - 80% tinggal di wilayah perkotaan.
 - 55% merupakan generasi milenial.
 - 82% menggunakan listrik di bawah 1300 watt.
 - Hampir setengahnya lulusan SMA.
 - 90% memiliki sepeda motor, dan 63% memiliki rekening tabungan, menunjukkan mereka sebagian besar *bankable*.
 - Mayoritas tinggal di Jawa dan Sumatera.
 - Tanggapan Perbankan: PERBANAS *Mortgage* INDEX 2024 menunjukkan bahwa perbankan menyambut baik program ini di tengah lesunya pasar properti dan siap mendukung implementasinya.

REKOMENDASI

Program ini disarankan agar dirancang untuk memprioritaskan kelompok masyarakat menuju kelas menengah (MBR), dengan skema pembiayaan yang sesuai kemampuan membayar mereka dan desain penerima manfaat yang tepat sasaran. Penelitian ini merekomendasikan untuk meninjau ulang batasan besaran penghasilan masyarakat yang berhak menerima subsidi rumah sebesar Rp8 juta rupiah dan Rp10 juta rupiah (khusus Wilayah Papua) sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, mengingat terdapat juga kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan rentang penghasilan di atas MBR yang juga kesulitan membeli rumah. Selain itu, mengingat mayoritas masyarakat bekerja pada sektor informal, perlu ada verifikasi alternatif selain slip gaji untuk mengakses KPR Subsidi untuk mengukur kemampuan membayar masyarakat (*ability to pay*) dengan data yang kredibel seperti tagihan listrik rumah. *Sharing* database antara Pemerintah & Perbankan diperlukan.

Dua hal penting yang patut diperhatikan secara khusus adalah bagaimana: menjaga daya beli dan mempertahankan harga tanah/hunian pada tingkat yang wajar. Dalam rangka mewujudkan kedua hal ini, pemerintah perlu melanjutkan intervensi jangka pendek dalam pemberian subsidi program (seperti FLPP), insentif pajak (seperti PPN DPT), dan disinsentif pajak bagi yang melakukan spekulasi pada tanah atau hunian. Dalam konteks ini, Pemerintah perlu meningkatkan alokasi subsidi perumahan sekitar

tiga kali lipat dibanding posisi 2024. Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mengarahkan pemerataan distribusi populasi dan arus urbanisasi agar tersebar lebih merata di berbagai kota-kota besar, tidak hanya terpusat di Jawa apalagi Jabodetabek.

4.1 PENDAHULUAN

4.1.1 *Backlog* Rumah dan Visi Membangun Peradaban Maju

Sesuai semangat dalam UUD'45 Undang Dasar (UU) pasal 28 H ayat (1), sejatinya kehidupan dalam bermasyarakat perlu ditopang dengan tersedianya tempat tinggal dan lingkungan yang layak. Menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, khususnya bagi mereka yang tergolong masyarakat menengah-bawah atau berpenghasilan rendah (MBR) menjadi masalah kompleks di negara manapun, termasuk Indonesia. Bahkan dalam konteks global, hingga diperlukan target bersama sebagaimana dalam *Sustainable Development Goals* (SDG) nomor 11 – *Sustainable Cities and Communities (Habitat for Humanity, 2021)*.

Secara definisi, *backlog* perumahan sendiri dapat diartikan sebagai permintaan kumulatif tempat tinggal yang tidak terpenuhi pada area atau pasar tertentu (Harris, 2024). Beberapa faktor yang turut mempengaruhi perhitungan *backlog* adalah jumlah rumah tangga tunawisma, rumah tangga yang belum memiliki properti, dan stok properti yang sudah tidak layak. Dalam melihat situasi *backlog*, pengambil kebijakan perlu memperhatikan bahwa rumah tidak hanya sekedar terjangkau secara ekonomi (*economically affordable*), tetapi juga dapat diakses secara sosial (*socially accessible*) dan bertanggung jawab secara lingkungan (*ecologically responsible*) (Boediardjo & Suhartoko, 2023). Prinsipnya, menghuni rumah tidak bisa sekedar “menghuni” tetapi perlu menjadi fondasi dalam meningkatkan taraf hidup keluarga sehingga tingkat *backlog* menjadi krusial dalam mengukur kesuksesan negara menyediakan kehidupan layak bagi masyarakat (lihat juga Koto, 2020).

The Hud Institute pada tahun 2012 mengusulkan lima Komponen Dasar Hak Bermukim (KDHB) yang perlu dipenuhi dan disediakan oleh Negara sebagaimana tergambar pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Komponen Dasar Hak Bermukim (KDHB)

No	Hak Dasar	Penjelasan	Landasan Peraturan
1	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Perlunya ada pengaturan ruang untuk fungsi pemukiman khususnya bagi yang masyarakat kurang mampu.	Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

No	Hak Dasar	Penjelasan	Landasan Peraturan
			2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (sebelumnya terdapat pada UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)
2	Pertanahan untuk Rakyat	Perlunya kemudahan dalam memiliki tanah untuk mendorong perumahan rakyat .	UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106
3	Infrastruktur Dasar	Perlunya penyediaan sarana dasar untuk menopang perumahan seperti air, listrik dan akses jalan.	PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dasar Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Pembiayaan yang Inklusif	Perlunya ada penyediaan fasilitas pembiayaan yang mendukung pembangunan serta pembelian rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Miskin (MM).	Peraturan Menteri PUPR No 34 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5	Bangunan Gedung, Teknik, Teknologi dan Bahan Bangunan Strategis	Perlunya pertimbangan dalam menjaga jaminan mutu bangunan, kewajaran biaya dan juga penyerapan tenaga kerja.	UUD 1945 Pasal 33

Sumber: The Hud Institute (2017)

Dalam membangun kebijakan perumahan yang pro-rakyat, faktor yang penting diperhatikan bagaimana mendefinisikan dan menentukan kriteria penerima subsidi perumahan. Berdasarkan data dari PUPR (2023), sebanyak 33% *backlog* berasal dari

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)² dan 60% berasal dari masyarakat miskin. Hal ini menjadi petunjuk bahwa kepemilikan rumah erat kaitannya tidak hanya dengan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat (*demand side*) tetapi juga isu kapasitas pembangunan rumah dan ketersediaan lahan (*supply side*). Berdasarkan hasil FGD riset ini, pengembang hanya mampu membangun sebanyak 400.000 unit setiap tahunnya di mana masih di bawah target 600.000 unit setiap tahunnya dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, program 3 juta rumah ini memiliki tantangan baik dari sisi permintaan (*demand side*) dan penawaran (*supply side*).

Kehadiran masalah *backlog* perumahan perlu dimaklumi tidak serta-merta dapat dilepaskan pada mekanisme pasar (*market mechanism*) di mana pemangku kepentingan berasumsi pemenuhan kebutuhan tempat tinggal (*residential demand*) akan pasti dipenuhi oleh para pelaku pasar, yaitu para pengembang dan pembeli rumah. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan ketidakcocokan (*mismatch*) antara permintaan (*demand*) dari masyarakat dengan penawaran/penyediaan (*supply*) dari pengembang di pasar perumahan. Faktor-faktor dapat menyumbang kepada adanya *mismatch* ini seperti: daya beli masyarakat, preferensi profit dari pengembang, serta harga lahan yang tersedia.

Faktor-faktor ini dapat timbul akibat adanya preferensi masyarakat kelas pekerja untuk mencari pekerjaan pada kota-kota besar yang dianggap lebih menjanjikan. Arus perpindahan pekerja dari daerah desa ke kota, atau yang lazim dikenal dengan istilah urbanisasi, menyebabkan konsentrasi penduduk di kota-kota tertentu, mendorong lonjakan harga properti, dan menimbulkan fenomena *spatial mismatch*, kondisi dimana terdapat perbedaan antara area penduduk bekerja dan di mana mereka tinggal (Gobillon & Selod, 2019). Alhasil, situasi ini juga menciptakan efek negatif yaitu *urban sprawl* (lihat Jaeger et al. (2010), pengembangan kawasan urban terjadi di luar pusat perkotaan (atau pekerjaan) sehingga menimbulkan tingkat kemacetan yang tinggi dan kepadatan infrastruktur transportasi di luar daya tampungnya (Turok & McGranahan, 2013). Hal ini menimbulkan inefisiensi ekonomi dan juga mengurangi kualitas hidup masyarakat karena waktu tempuh yang lebih lama dan polusi udara yang buruk.

Oleh karena itu, serupa dengan sumber daya lainnya yang dianggap penting untuk kelanjutan hidup yang layak seperti air dan listrik, maka penyediaan hunian juga memerlukan intervensi pemerintah yang tegas. Intervensi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam, mulai dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di mana

² Mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, batasan penghasilan MBR adalah Rp8 juta dan Rp10 juta sesuai dengan wilayah yang ditentukan dan status perkawinan.

pihak swasta dapat mengambil peran dalam *design, build, finance, operate, maintenance* (DBFOM)³.

Selain intervensi dari program Pemerintah, salah satu variabel yang turut menjadi kunci kesuksesan pengurangan *backlog* ini berasal dari efektivitas pasar keuangan (*financial market*) khususnya perbankan (*banking*). Perbankan dapat membantu dari 2 (dua) sisi: permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, penyaluran pembiayaan atau kredit ke konsumen dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau semacamnya. Dari sisi penawaran, bank dapat menyalurkan pembiayaan produktif kepada pengembang (*developer*) untuk membangun properti atau proyek dalam bentuk investasi ataupun modal kerja.

Dalam mencukupi kebutuhan modal dan likuiditas dalam membangun properti, pasar keuangan dalam hal ini pasar modal (*capital market*) juga berfungsi sebagai sarana likuiditas seperti penggunaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP). Dalam kebutuhan permodalan, mekanisme yang dapat dilakukan pengembang perumahan adalah seperti *Initial Public Offering* (IPO) ataupun *right issue*. Oleh karena itu, literasi dari pengembang rumah terhadap fasilitas dari pasar modal perlu dibentuk secara bertahap oleh regulator keuangan.

Perbankan, secara khusus, perlu memperhatikan kemampuan pembayaran (*repayment capacity*) dari nasabahnya. Dalam konteks ini, prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian mesti diperhatikan secara khusus. Fenomena gelembung kredit (*credit bubble*) pada pasar KPR atau *mortgage* di AS memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada bagaimana menyediakan hunian layak bagi MBR (sisi suplai) tetapi juga perlu memerhatikan aspek kemampuan membayar nasabah dalam pasar perumahan (sisi permintaan).

4.1.2 Perjalanan Membangun Perumahan dalam Lintas Kepemimpinan

Dalam menyikapi masalah ketersediaan perumahan yang pro-rakyat, beragam periode kepemimpinan telah menjadikan isu ini sebagai prioritas dan program nasional (Tabel 4.2). Meski begitu, penyediaan rumah rakyat tidaklah mudah, dalam implementasinya rumah rakyat menjadi lebih dominan dinikmati Pegawai Negeri baik sipil dan militer (Tirto, 18/07/2019)⁴, fokus area yang masih terkonsentrasi pada Jabodetabek serta keberlangsungan dana yang terpengaruh stabilitas fiskal dan moneter.

Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan, Pemerintah juga turut menggandeng mitra seperti Lembaga Internasional (*World Bank, Asian Development*

³ Pendalaman lebih lanjut terkait konsep KPBU dapat dilihat pada KPBU - Siapa yang Membiayai Proyek pada Skema KPBU? (kemenkeu.go.id)

⁴ https://tirto.id/sejarah-perum-perumnas-riwayat-rumah-murah-untuk-rakyat-eewJ#google_vignette

Bank), Perbankan (BUMN dan Swasta), dan Asosiasi Pengembang (APERSI DAN REI) sebagai mitra pendanaan dan juga implementasi dalam beberapa program. Hal ini tentunya didorong oleh beragam hal seperti perlunya alih pengetahuan (*knowledge transfer*), keterbatasan sumber pendanaan yang berasal dari kas negara dan juga perlunya mitra industri dalam membaca kebutuhan pasar yang lebih spesifik. Secara umum, beberapa program unggulan dari tiap periode kepemimpinan yang dirangkum dari kajian akademik dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Program Pembangunan Perumahan Rakyat

No	Periode Kepemimpinan	Nama Program
1	Soeharto	Kampung <i>Improvement Program</i>
2		Program Rumah Susun
3		Program Permukiman dan Perumahan Desa (P3D)
4	Megawati Sukarnoputri	Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR)
5	Susilo Bambang Yudhoyono	Pembangunan Berbasis Masyarakat di Indonesia
6		Program 1.000 Tower
7		Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
8	Joko Widodo	Program Sejuta Rumah
9		Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
10		Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
11	Prabowo Subianto	Program 3 Juta Rumah
		Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Sumber: Herdiyanto (2023)

Menuju era kepemimpinan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada 2024-2029, visi dan misi yang dibawa sejatinya mempertahankan *spirit* yang sama: Negara harus turun tangan membantu menciptakan perumahan bagi rakyat yang membutuhkan. Dalam era baru ini, ekonomi dibentuk berdasarkan asas Pancasila di mana kebebasan pasar akan dibangun bersama jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat rentan. Secara substansi, model ini lebih dekat dengan konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dengan turut ikut campur dalam urusan dan kegiatan masyarakat (Hadiyono, 2020).

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo mengelompokkan masyarakat yang menghadapi *backlog* menjadi 10 (sepuluh) desil sesuai dengan tingkat

pendapatan rata-rata rumah tangga⁵. Desil 1 mencerminkan pendapatan terendah dan Desil 10 mencerminkan pendapatan tertinggi. Bagi Desil 1-7 maka negara hadir memberikan kebijakan afirmatif (*affirmative policy*) melalui intervensi, sedangkan desil 8-10 maka pemerintah melepaskan *backlog* ini pada mekanisme pasar. Beragam program ini dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Salah satu inisiatif yang juga perlu disorot adalah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sejak PP ini disampaikan, pro-kontra terjadi di kaum pekerja, pemberi kerja dan akademisi. Secara prinsip, tujuan BP Tapera cukup mulia yaitu memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat memiliki hunian melalui penghimpunan dana jangka panjang.

Hanya saja, penolakan atas kebijakan ini terjadi terkait beberapa hal. Pertama, penerima manfaat BP Tapera tidak universal sehingga pekerja yang dipotong oleh iuran BP Tapera merasa ini memberatkan apalagi dengan berlakunya banyak iuran lain seperti BPJS dan adanya tarif PPh yang progresif. Kedua, kekhawatiran para peserta bahwa pengelolaan dana mereka akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang rendah. Ketiga, isu terkait keamanan dana mereka, khususnya di tengah kasus penyalahgunaan dana publik yang serupa.

4.1.3 Fokus Visi-Misi Prabowo-Gibran dalam *Backlog* Perumahan

Di dalam dokumen resmi yang diajukan oleh Tim Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024 terdapat Program yang salah satunya memiliki objektif “membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua”. Dalam dokumen yang sama, terdapat 17 Program Prioritas di mana program yang sama ditekankan dalam wacana menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

⁵ Tingkat Desil ini berdasarkan pemaparan data dari Presentasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan pengolahan data Susenas 2020.

Tabel 4.3 Contoh Program Pendukung Perumahan Rakyat

No	Fasilitas/Program	Penanggung jawab	Konsep
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	BP TAPERA	Bentuk fasilitas yang diberikan kepada Bank Pelaksana dalam bentuk fasilitas likuiditas penyaluran KPR Sejahtera
2	Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM)	PUPR	Subsidi bantuan untuk pembayaran uang muka (<i>down payment</i>) perumahan
3	Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi MBR	PUPR	Subsidi bantuan untuk biaya administratif dalam proses pengajuan KPR
4	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	PUPR	Bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang untuk renovasi hunian yang kurang layak
5	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	PUPR	Bantuan untuk pembayaran uang muka atau pembangunan rumah bagi nasabah yang telah memiliki saldo tabungan di bank
6	Bantuan Sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST)	Kementerian Sosial	Rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas sehingga memenuhi syarat rumah layak huni sebagai tempat tinggal dan atau tempat usaha
7	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun (PPN DTP)	Kementerian Keuangan	Pembebasan PPN untuk pembelian rumah dengan Dasar Pengenaan Pajak Rp2 milyar dan harga jual rumah maksimal Rp5 milyar

No	Fasilitas/Program	Penanggung jawab	Konsep
8	Relaksasi <i>Loan to Value</i> (LTV)	Bank Indonesia	Calon pembeli rumah pertama dimungkinkan untuk membeli properti dengan DP sampai 0%

Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selama 2020-2023 kapasitas rata-rata pemenuhan *backlog* untuk MBR dengan mekanisme FLPP berkisar di 180 ribu unit, masih di bawah target yang ditetapkan. Pada APBN 2025 target penyaluran KPR FLPP sebesar 220.000 unit. Dengan asumsi target 2025 ini bisa tercapai, dibutuhkan waktu lebih dari 13 tahun untuk menyediakan 3 (tiga) juta rumah bagi MBR. Di sisi lain, jika Pemerintah ingin mencapai 3 juta rumah ini dalam periode 5 tahun ke depan (2024-2029) maka setidaknya dibutuhkan anggaran tiga kali lebih besar dari yang dicanangkan pada APBN 2025. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan dan komitmen yang jauh lebih besar dari Pemerintah untuk menyukseskan program ini.

4.1.4 Membedah Karakteristik *Backlog* dan Kemampuan Membeli MBR

Mengingat adanya keterbatasan sumber daya pendanaan dari negara dan modal perbankan serta kapasitas membangun dari para pengembang, analisis terkait penentuan prioritas pemenuhan *backlog* berdasarkan karakter-karakter tertentu perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan *database* Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022 dan 2021 yang dikumpulkan oleh BPS. Variabel utama yang menjadi dasar petunjuk *backlog* dalam penelitian ini adalah status kepemilikan rumah. Dalam Susenas, status kepemilikan rumah dibagi menjadi dua yaitu milik sendiri dan bukan milik sendiri. Berdasarkan kategorisasi ini, pada 2022 dari seluruh rumah tangga (RT) di Indonesia (sekitar 72 juta RT), 16% (atau sekitar 11,7 juta RT) “belum memiliki rumah sendiri” sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4. Lalu, kategori “bukan milik sendiri” dapat dibedah lebih detil lagi menjadi lima sub-kategori, yaitu kontrak, sewa, bebas sewa, dinas dan lainnya. Dari 11,7 juta *backlog* pada 2022, sub-kategori terbesar merupakan bebas sewa sebesar 56%, kontrak 24%, sewa 14% (Tabel 4.5) Adapun definisi sub-kategori ini adalah sebagai berikut⁶:

- “Kontrak” berarti disewa oleh kepala rumah tangga atau anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- “Sewa” bila rumah disewa tanpa adanya jangka waktu tertentu.

⁶ Data Pendapatan Rumah Tangga sendiri sebetulnya tersedia sebagai data mentah (*raw data*) pada SUSENAS, akan tetapi variabel tersebut tidak didiseminasikan sehingga tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.

- “Bebas Sewa” bila rumah tersebut diperoleh dari orang lain tanpa mengeluarkan biaya apapun.
- “Dinas” berarti rumah disediakan oleh instansi tempat bekerja salah satu anggota keluarga dengan atau tanpa membayar.

Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan

Status Kepemilikan	Rumah Tangga (Unit)			Total Rumah Tangga (%)		
	2021	2022	Delta 2021-22	2021	2022	Delta 2021-22
Milik Sendiri	61.290.021	61.190.602	-99.419	81,06	83,99	-2,93
Bukan Milik Sendiri	14.325.070	11.666.887	-2.658.183	18,94	16,01	2,93
Total Rumah Tangga	75.615.09	72.857.489	-2.757.602	100,00	100,00	-

Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Tempat Tinggal

Status Penguasaan Tempat Tinggal	Total Rumah Tangga (Unit)			Total Rumah Tangga (%)		
	2021	2022	Delta	2021	2022	Delta
Kontrak	3.771.366	2.821.373	- 949.994	26,33	24,18	-2,14
Sewa	2.777.922	1.646.758	- 1.131.164	19,39	14,11	-5,28
Bebas Sewa	7.010.265	6.614.094	- 396.170	48,94	56,69	7,75
Dinas	678.488	579.958	- 98.529	4,74	4,97	0,23
Lainnya	87.030	4.704	- 82.326	0,61	0,04	-0,57
Total	14.325.070	11.666.887	2.658.183	100,00	100,00	0,00

Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Penelitian ini kemudian membedah lebih lanjut karakteristik 11,7 juta RT yang belum memiliki rumah sendiri ini. Hal-hal seperti, seberapa besar pendapatan mereka, dimana mereka tinggal, dan berbagai karakteristik lainnya coba dipetakan lebih lanjut. Dengan melakukan analisis ini, penelitian berharap dapat memperkaya desain kebijakan pembangunan rumah bersubsidi.

Penelitian ini menggunakan pengelompokan masyarakat Indonesia berdasarkan tingkat pengeluaran (*expense*) sebagaimana yang diajukan oleh *World Bank*⁷. Bank Dunia membagi masyarakat Indonesia menjadi lima kelas, yaitu: miskin (*poor*), rentan (*vulnerable*), menuju menengah (*aspiring middle class*), menengah (*middle class*),

⁷ Laporan ini dapat diunduh pada *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*

dan atas (*upper class*). Klasifikasi ini didasarkan pada garis kemiskinan pada tahun tersebut. Misal, dalam konteks Susenas 2022 garis kemiskinan nasional (Maret) yang digunakan sebesar Rp505.469 pengeluaran per kapita per bulan atau sekitar Rp2,02 juta per RT per bulan (dengan asumsi 1 RT terdiri dari 4 anggota keluarga). Adapun metode perhitungan sosio-ekonomi masyarakat ini dapat dilihat di Tabel 4.6. Sebagai contoh, untuk rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin adalah rumah tangga dengan pengeluaran bulanan maksimal sampai dengan Rp2.021.876 (Rp505.469 x 4 orang). Begitu juga untuk rumah tangga dalam kategori rentan, maka pengeluaran rumah tangganya maksimal sebesar Rp3.032.814 (Rp758.204 x 4 orang). Pendekatan pengeluaran ini dijadikan *proxy* atas tingkat pendapatan individu atau rumah tangga tersebut, mengingat data pendapatan seluruh masyarakat Indonesia tidak tersedia.

Tabel 4.6 Penentuan Kelas Masyarakat Berdasarkan Pengeluaran

No	Kelas	Garis Kemiskinan (GK) (A)	Multiplier (B)	Pengeluaran per Kapita (C=A x B)	Pengeluaran Per Rumah Tangga (C x 4)
1	Miskin	Rp505.469	<1 GK	<Rp505.469	<Rp2.021.876
2	Rentan		1.0 - 1.5 GK	Rp505.469 s.d. Rp758.204	Rp2.021.876 s.d. Rp3.032.816
3	Menuju Menengah		1.5 - 3.5 GK	Rp758.204 s.d. Rp1.769.142	Rp3.032.816 s.d. Rp7.076.568
4	Menengah		3.5 - 17 GK	Rp1.769.142 s.d. Rp8.592.973	Rp7.076.568 s.d. Rp34.371.892
5	Atas		> 17 GK	>Rp8.592.973	>Rp34.371.892

Sumber: *World Bank* (2019)

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.7, dominasi 11,7 juta *backlog* berada pada keluarga dari kelompok masyarakat “menuju menengah” sekitar 6 juta RT (52%) dan “menengah” sebesar 2,7 juta RT (24%). Berdasarkan pengelompokan ini, yang paling membutuhkan adanya ketersediaan rumah adalah mereka yang memiliki pengeluaran (*expense*) per kapita Rp1,7 juta (3,5x dari garis kemiskinan) sampai dengan Rp8,6 juta per kapita (17x dari garis kemiskinan). Data ini bisa menjadi indikasi awal mengenai berapa besaran cicilan rumah subsidi yang sebaiknya ditentukan oleh pihak perbankan dan Pemerintah.

Tabel 4.7 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Rumah Sendiri Berdasarkan Kelas

Kelas Masyarakat	Tidak Memiliki Rumah Sendiri (Unit)			Tidak Memiliki Rumah Sendiri (%)		
	2021	2022	Delta	2021	2022	Delta
Atas	84.727	55.686	- 29.041	0,6	0,5	-0,1
Menengah	4.564.453	2.783.062	- 1.781.391	31,9	23,9	-8,0
Menuju Menengah	6.771.259	6.079.462	- 691.798	47,3	52,1	4,8
Rentan	2.012.455	1.968.222	- 44.232	14,0	16,9	2,8
Miskin	892.177	780.455	- 111.722	6,2	6,7	0,5
Total	14.325.070	11.666.887	-2.658.183	100	100	0

Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Data olahan Susenas (2022) menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia mengalokasikan sekitar 25%-30% pengeluarannya untuk kebutuhan perumahan. Dengan asumsi bahwa 30% dari pengeluaran tersebut digunakan untuk membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagaimana perhitungan Tabel 4.8 menunjukkan kemampuan membayar cicilan masyarakat dengan membaginya ke dalam 11 rentang, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4.8.

Dengan mempertimbangkan besaran cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang berlaku bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saat ini, yaitu sekitar Rp1,1 juta per bulan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat sekitar 3,3 juta calon penerima manfaat potensial dari program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran (Warna Kuning di Tabel 4.8). Kelompok ini dapat dijadikan prioritas utama dalam implementasi program tersebut. Penentuan prioritas ini didasarkan pada analisis kemampuan membayar (*ability to pay*) dan memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran. Namun, jika batas minimum cicilan sebesar Rp1,1 juta diterapkan, diperkirakan sekitar 45% rumah tangga tanpa hunian tidak dapat mengakses program ini karena keterbatasan kemampuan mereka untuk memenuhi pembayaran cicilan di bawah nominal tersebut.

Tabel 4.8 Rentang Cicilan Rumah Tangga

Rentang Cicilan	Rumah Tangga (unit)			Rumah Tangga (%)		
	2021	2022	Delta	2021	2022	Delta
< Rp500.000	1.261.617	749.362	- 512.255	8,8	6,4	-2,4
Rp500.000 - Rp700.000	1.799.639	1.251.249	- 548.390	12,6	10,7	-1,8
Rp700.000 - Rp900.000	2.175.867	1.647.904	- 527.963	15,2	14,1	-1,1
Rp900.000 - Rp1.100.000	2.065.540	1.630.333	- 435.207	14,4	14,0	-0,4
Rp1.100.000 - Rp1.300.000	1.669.134	1.468.967	- 200.167	11,7	12,6	0,9
Rp1.300.000 - Rp1.500.000	1.242.924	1.198.800	- 44.125	8,7	10,3	1,6
Rp1.500.000 - Rp1.700.000	995.898	853.899	- 141.999	7,0	7,3	0,4
Rp1.700.000 - Rp1.900.000	739.584	628.917	- 110.668	5,2	5,4	0,2
Rp1.900.000 - Rp2.100.000	552.826	488.395	- 64.431	3,9	4,2	0,3
Rp2.100.000 - Rp2.300.000	390.240	344.306	- 45.934	2,7	3,0	0,2
> Rp2.300.000	1.431.801	1.404.757	- 27.043	10,0	12,0	2,0
Total	14.325.070	11.666.887	-2.658.183	100	100	0

Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Karakteristik MBR yang hanya mampu membayar cicilan bulanan sebesar Rp1,1 juta memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan target nasabah non-subsidi. Kelompok MBR cenderung bekerja di sektor informal, yang ditandai dengan pendapatan yang fluktuatif serta kontrak kerja yang tidak stabil. Selain itu, tingkat pendidikan yang relatif rendah, kepemilikan jaminan yang umumnya terbatas pada kendaraan bermotor roda dua, dan akses yang minim terhadap layanan keuangan formal menjadi ciri khas mereka. Kondisi ini membuat mereka dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah non-subsidi. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus dalam menghadapi kelompok masyarakat ini, agar keseimbangan antara akses perumahan dengan aspek kehati-hatian perbankan tetap terjaga.

Terdapat dua tantangan untuk memobilisasi dana perbankan, baik dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan dari masyarakat atau permodalan murni bank, untuk mengurangi *backlog* MBR:

- Dari aspek profitabilitas, mendorong penyaluran pembiayaan rumah subsidi dalam *backlog* membutuhkan modal (*capital*) yang besar dan penambahan modal di aspek perbankan membutuhkan justifikasi *return* atau keuntungan yang sesuai dengan selera pemilik modal karena akan berpengaruh pada rasio profitabilitas bank. Segmen rumah subsidi, sayangnya, bukan segmen yang tepat untuk mencari keuntungan yang besar karena adanya pembatasan harga atas rumah dan tingkat bunga atau *rate* yang diberikan.
- Dari aspek risiko, perbankan merupakan institusi yang sangat mempertimbangkan manajemen risiko (*risk management*). Portofolio rumah

subsidi secara bisnis, diperlakukan sebagai diversifikasi portofolio dan bukan sebagai portofolio pembiayaan utama (seperti pembiayaan produktif atau konsumtif lainnya). Meningkatkan portofolio pembiayaan rumah subsidi akan berpengaruh pada profil risiko bank.

4.1.5 Rekomendasi Target Masyarakat untuk Program 3 Juta Rumah

Gambar 4.1 Kerangka Target 3 Juta Rumah



Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Dalam membangun kerangka pemenuhan target 3 juta rumah, maka perlu dipahami setiap kelas masyarakat memiliki program bantuan yang didesain sesuai karakter khas setiap kelas. Untuk masyarakat miskin dan rentan, tentu kemampuan membayar cicilan untuk pinjaman KPR menjadi kurang ideal karena mereka ada kelemahan dalam kemampuan bayar yang relatif terbatas. Sehingga untuk kelompok miskin dan rentan, program yang bersifat bantuan (hibah) tanpa adanya kewajiban pengembalian akan lebih tepat, seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di ekstrem lainnya, seperti kelas menengah dan atas, kemampuan finansial mereka lebih mapan dan bantuan kepemilikan rumah dapat diserahkan pada insentif seperti PPN DT melalui mekanisme jual-beli pasar dibandingkan dengan skema bantuan hibah.

Oleh karena itu, dalam menyeimbangkan aspek profitabilitas perbankan (selaku sumber pendanaan utama) dan kebutuhan pemenuhan rumah pada segmen MBR, diusulkan bahwa target tiga juta rumah dapat diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang masuk ke dalam kelas "Menuju Menengah" dengan rentang kemampuan membayar cicilan Rp1,1-2,3 juta. Kelas ini, dapat dikatakan, berada pada titik persimpangan antara kemiskinan dan juga keamanan sehingga dorongan negatif eksternal (*external negative shock*) seperti PHK, kenaikan tarif dasar listrik dan pengurangan subsidi bahan bakar akan sangat berdampak pada daya beli mereka.

Dari 11,7 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah, kelompok yang masuk dalam kelas menuju menengah ini mendominasi dengan proporsi sebanyak 52%. Total Rumah Tangga (RT) yang masuk dalam kelas ini ada sekitar 3.637.440 atau 3,6 juta yang berasal dari rentang kemampuan mencicil per bulan Rp1,1 juta sampai dengan Rp2,3 juta. Data ini dapat terlihat pada hasil *pivot* yang disajikan pada Tabel 4.9 di bawah (kotak berwarna oranye).

Tabel 4.9 Target Masyarakat untuk Berdasarkan Program 3 Juta Rumah Berdasarkan Rentang Cicilan

Rentang cicilan (Rp ribu)	Atas	Menengah	Menuju Menengah	Rentan	Miskin	Total
< 500			231.424	203.615	314.323	749.362
500 - 700		100.728	296.947	545.345	308.229	1.251.249
700 - 900		116.175	770.744	646.960	114.026	1.647.904
900 - 1.100		145.356	1.142.907	312.783	29.287	1.630.333
1.100 - 1.300		236.695	1.058.120	165.870	8.283	1.468.967
1.300 - 1.500		186.016	951.804	56.281	4.699	1.198.800
1.500 - 1.700		227.880	601.913	23.319	786	853.899
1.700 - 1.900		244.475	374.009	9.610	822	628.917
1.900 - 2.100		191.194	294.749	2.452		488.395
2.100 - 2.300		207.596	135.833	877		344.306
> 2.300	55.686	1.126.948	221.012	1.111		1.404.757
Grand Total	55.686	2.783.062	6.079.462	1.968.222	780.455	11.666.887

Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Dari 3.6 juta rumah tangga yang masuk dalam usulan prioritas, *backlog* tertinggi masih didominasi oleh area perkotaan (80,4%) dan terletak pada provinsi di pulau Jawa yakni: Jawa Barat, DKI Jakarta, Utara, Jawa Timur dan Banten sebagaimana dapat dilihat di Tabel 1.10. Pulau berikutnya dengan *backlog* yang cukup tinggi ada di Sumatera yaitu provinsi Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat. Dapat disimpulkan, bahwa memang *backlog* akan terkonsentrasi pada area dengan aktivitas ekonomi yang tinggi dan menjadi sasaran urbanisasi. Dalam hal ini, perkotaan pada pulau Jawa dan Sumatera memerlukan intervensi seperti pembangunan rumah yang sifatnya vertikal alih-alih rumah tapak untuk mencapai efisiensi biaya dan pagu harga rumah.

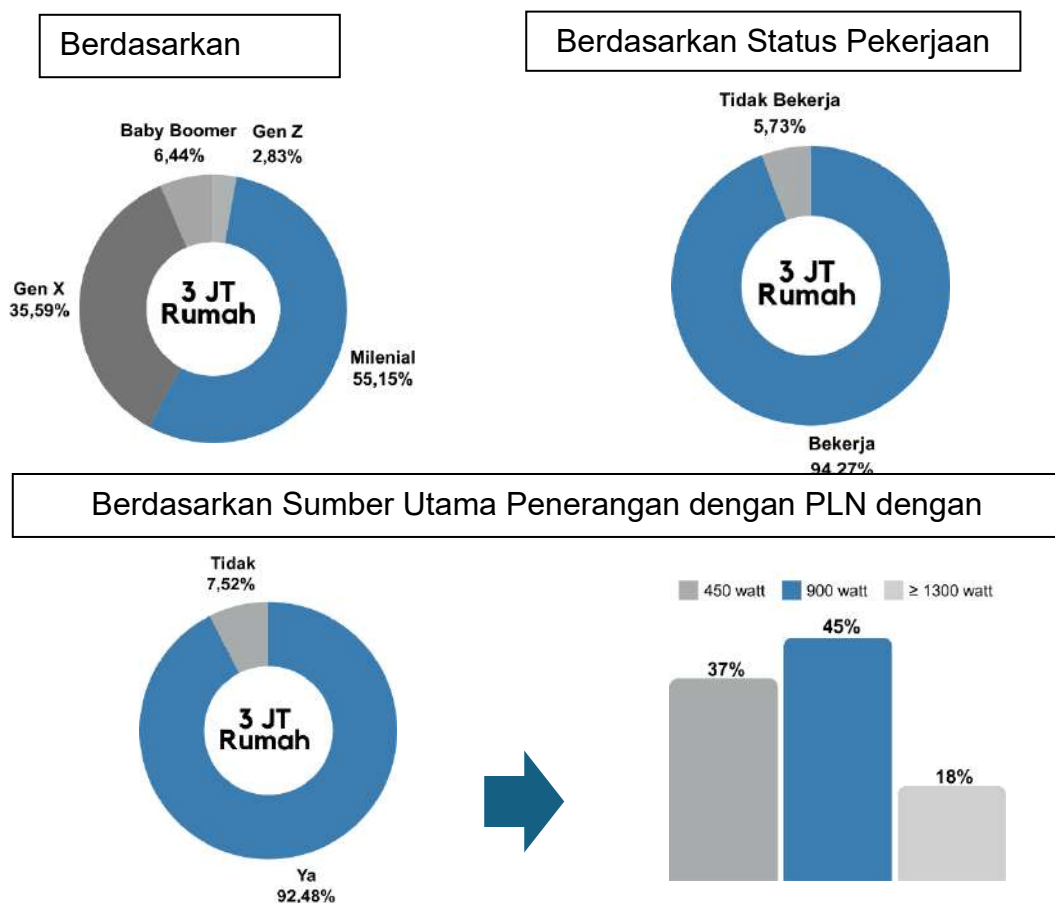
Tabel 4.10 Target Masyarakat untuk Berdasarkan Program 3 Juta Rumah Berdasarkan Rentang Cicilan

Kode	Provinsi	Kota	Desa	Total	Kota (%)	Desa (%)
32	Jawa Barat	481.549	39.688	521.238	92,39%	7,61%
31	DKI Jakarta	399.425	0	399.425	100,00%	0,00%
12	Sumatera Utara	238.514	110.482	348.996	68,34%	31,66%
35	Jawa Timur	195.048	26.557	221.605	88,02%	11,98%
36	Banten	160.383	14.308	174.690	91,81%	8,19%
33	Jawa Tengah	124.132	32.898	157.030	79,05%	20,95%
14	Riau	94.713	61.591	156.304	60,60%	39,40%
13	Sumatera Barat	93.528	44.634	138.162	67,69%	32,31%

Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Berdasarkan data SUSENAS yang diolah, selain demografis beberapa karakteristik lainnya dari target 3 juta rumah tangga adalah sebanyak 55,1% merupakan generasi milenial, 94,3% sedang bekerja, sebanyak 92,5% dari kelompok tersebut yang menggunakan listrik PLN dengan meteran dengan 82% menggunakan kapasitas <1.300 watt. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2.

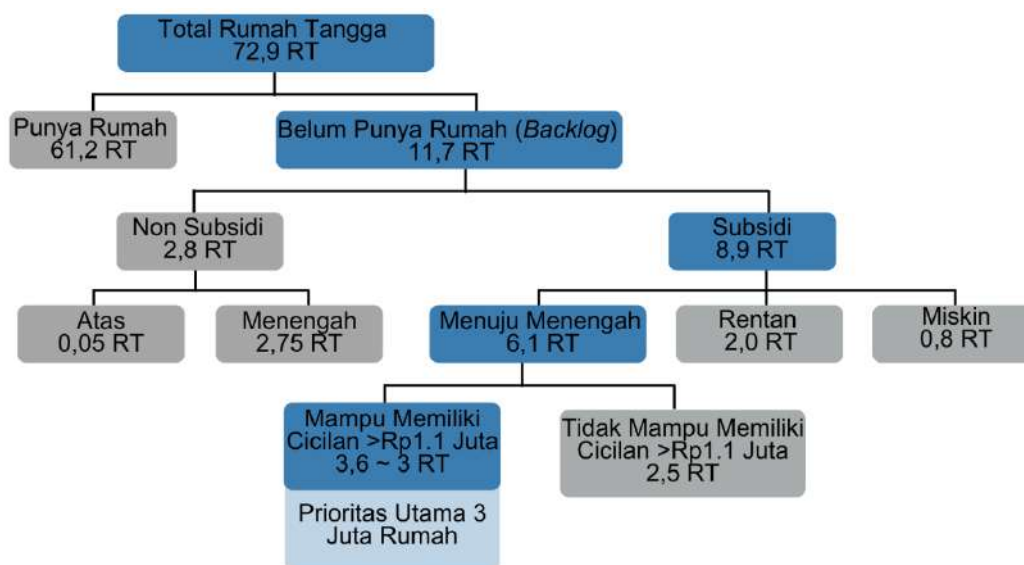
Gambar 4.2 Informasi Karakter Target 3 Juta Masyarakat



Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Sebagai kesimpulan, dengan asumsi pemenuhan 3 juta rumah per tahun perlu ada fokus kebijakan pada target kelas masyarakat. Pada tingkat pertama, dilakukan pemisahan antara rumah tangga yang belum memiliki rumah yaitu sebanyak 11,7 juta rumah tangga. Pada tingkat kedua, dilakukan pemisahan antara penyaluran rumah untuk non-subsidi (2,8 juta RT) dan subsidi (8,9 juta RT) berdasarkan kelas masyarakat. Rumah non-subsidi untuk kelompok atas dan menengah sedangkan subsidi untuk menuju menengah, rentan dan miskin. Terakhir, karena penelitian ini memerlukan kelas masyarakat yang memiliki kemampuan membayar cicilan KPR subsidi, maka ditentukan kelas yang mampu memiliki kemampuan membayar cicilan >Rp1,1 juta sebagai prioritas yaitu sebanyak kurang lebih 3 juta rumah tangga. Alur perhitungan dapat diilustrasikan dalam Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Rekomendasi Realisasi 3 Juta Rumah



Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan distribusi kuota rumah yang akan dibangun atau direnovasi yaitu untuk rumah non-subsidi, rumah subsidi dan rumah yang direnovasi. Penelitian ini mengusulkan bahwa prioritas distribusi pembangunan untuk rumah non-subsidi berdasarkan target 3 juta rumah dibagi secara merata dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sehingga per tahun rumah subsidi memiliki target 600.000 unit. Kemudian untuk mengejar total *backlog* berdasarkan data SUSENAS sebanyak 11,7 juta Rumah Tangga maka pembangunan rumah non-subsidi dapat diusulkan sebanyak 540.000 unit per tahun dan renovasi setidaknya 1.040.000 rumah. Berdasarkan perhitungan justifikasi tersebut dan mempertimbangkan kuota rumah untuk MBR dengan skema KPR FLPP yang dinyatakan dalam RAPBN 2025 sebanyak 220.000 unit. Maka untuk merealisasi skema 3 juta rumah dalam lima tahun, pemerintah harus meningkatkan kuota rumah untuk MBR menjadi 600.000 unit atau menaikkan 2-3 kali dari kuota yang ditetapkan saat ini.

Tabel 4.11 Rekomendasi Kuota Pembangunan dan Renovasi Rumah per Tahun

Keterangan	Rekomendasi (5 Tahun)	Target per Tahun
Subsidi	3.000.000 s.d 3.600.000	600.000 s.d 720.000
Non Subsidi	2.800.000	540.000
Renovasi	5.200.000	1.040.000
Total	11.000.000 s.d 11.600.000	2.180.000 s.d 2.300.000

Sumber: Susenas 2022 (diolah)

4.2 PERSPEKTIF AKAR MASALAH DALAM BACKLOG PERUMAHAN

4.2.1 Metode dan Analisis Data

Penelitian mencoba untuk memahami masalah dan tantangan terkait visi-misi *backlog* perumahan ini dengan melibatkan 3 (tiga) pemangku kepentingan: regulator, asosiasi dan perbankan. Dari sisi regulator, sesi pemaparan FGD melibatkan perwakilan Bank Indonesia, OJK dan Badan Kebijakan Fiskal. Asosiasi melibatkan APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), HIMPERRA (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat) dan REI (Real Estate Indonesia). Dari sisi perbankan diwakili oleh dua bank BUMN dan satu bank swasta. FGD dilakukan selama 1 (satu) hari penuh.

Pada langkah pertama, partisipan diberikan informasi terkait objektif FGD melalui surat undangan resmi beserta *Term of Reference* (ToR) untuk menyamakan persepsi atas objektif FGD. ToR sendiri dievaluasi oleh Tim PERBANAS untuk memastikan: (1) kecocokan afiliasi institusi partisipan dengan tema keuangan *mortgage*, (2) memastikan informasi yang diharapkan merupakan informasi yang boleh diakses secara publik (*non-confidential*) dan (3) perwakilan yang menjadi presenter diharapkan memiliki posisi minimal Ketua/Kepala Departemen/ *Group Head* atau *Division Head*.

Pada langkah kedua, partisipan diberitahukan bahwa data verbatim akan disimpan oleh tim peneliti dalam bentuk *file* audio dan transkrip audio. Partisipan diingatkan kembali oleh moderator FGD bahwa partisipan memiliki hak untuk tidak memberikan informasi yang dianggap rahasia atau berisiko. Untuk memastikan transkrip telah sesuai dengan substansi yang diberikan partisipan, tim peneliti menempatkan 2 (dua) orang berbeda untuk melakukan *peer-review* pada hasil transkrip. Hasil transkrip kemudian didiseminasikan kepada peserta dalam bentuk *minutes of meeting*.

Pada langkah terakhir, data dianalisis melalui analisis konten kualitatif dengan unit analisis berupa grup pemangku kepentingan (regulator, asosiasi dan industri perbankan). Hal ini dilakukan karena adanya *domain expertise* dan kepentingan yang berbeda antar grup. Tim peneliti menganalisis transkrip FGD dan mencoba untuk melihat tema yang berulang (*repeating themes*) dan relevan dengan pertanyaan ToR. Tema yang berulang dicatat secara manual untuk kemudian dilakukan *peer-review*

oleh orang yang berbeda dengan mencatat transkrip untuk mengurangi risiko *point of view* yang bias dan konflik kepentingan. Data pendukung yang disampaikan juga dicek kembali untuk memastikan reliabilitas argumen. Berdasarkan hasil analisis FGD tersebut, bagian ini mencoba membahas pandangan dari setiap pemangku kepentingan secara ringkas agar pemenuhan target *backlog* ini tercapai.

4.2.2 Perspektif Regulator

4.2.2.1 Ketidaksesuaian (*mismatch*) antara daya beli dan hunian yang tersedia

Salah satu hal yang paling menonjol adalah perbedaan harga rumah yang tersedia dengan daya beli masyarakat yang membutuhkan. Merangkum dari beberapa sumber data, minat generasi muda (seperti Milenial dan Gen-Z) yang memiliki tingkat penghasilan di bawah Rp7 juta cenderung mengarah pada rumah dengan harga di bawah Rp500 juta (Lamudi, 2022). Kebutuhan ini cukup berbeda dengan harga rumah yang tersedia didominasi (38%) oleh rumah dengan harga di atas Rp>500 juta sampai dengan Rp1 milyar. Oleh karena itu, membangun rumah yang sesuai dengan kemampuan membeli target masyarakat menjadi penting.

Secara teoritis, situasi ekonomi hanya merupakan salah satu variabel penentu pembelian rumah di antara variabel yang lain seperti kondisi lingkungan, perpindahan lokasi kerja, estimasi waktu *commuting* dan juga pernikahan (Boterman et al., 2010). Tetapi ada indikasi awal bahwa memang variabel pendapatan ini menjadi penghambat utama *backlog* di antara variabel lainnya (Hanifa et al., 2022). Isu *mismatch* pendapatan dengan harga rumah ini belum terlalu banyak diangkat secara empiris di Indonesia karena beberapa jurnal akademik lebih mengarah kepada isu lain, seperti: penyebab tidak dihuninya rumah subsidi (Adianto & Gabe, 2021) atau evaluasi terhadap program pemerintah seperti penyaluran FLPP (Mangeswuri, 2016).

4.2.2.2 Minimnya penggunaan sumber dana alternatif dari pasar keuangan

Salah satu masukan dari regulator dalam hal ini adalah sumber dan alternatif dari pasar keuangan yang belum optimal. Seperti yang umum dipahami, selain peningkatan modal dalam bentuk IPO atau *Right Issue*, pasar keuangan dapat memberikan opsi alternatif untuk meningkatkan likuiditas melalui beberapa instrumen seperti Efek Beragun Aset (EBA) dan obligasi perumahan.

Berdasarkan data KSEI per Oktober 2024⁸, relatif baru BTN yang secara rutin menggunakan instrumen ini dengan 7 (tujuh) EBA bernilai kurang lebih Rp1,6 Triliun dengan SMF berlaku sebagai penerbit, *arranger* dan pendukung kredit. Tentu minimnya penggunaan sumber dana ini perlu penelitian lebih dalam karena secara prinsip, perbankan akan mencari opsi terbaik (biaya rendah dan kemudahan transaksi). Opsi IPO dan *right issue* tidaklah sederhana dan bila memang perbankan akan mendukung Program 3 Juta Rumah, isu ini perlu diselesaikan secara lebih komprehensif.

⁸ Data ini dapat diakses pada Data Efek Beragun Aset (EBA)

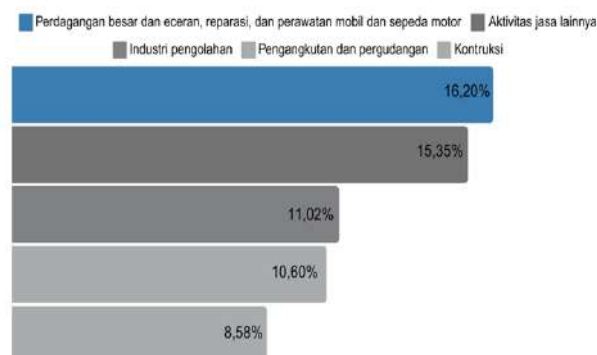
4.2.3 Perspektif Asosiasi

4.2.3.1 Dominasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memerlukan perlakuan khusus dari Perbankan

Asosiasi menyampaikan kekhawatiran mereka terkait dengan calon pembeli rumah yang masuk dalam kategori MBR karena tidak mudah untuk lolos analisis pembiayaan atau kredit perbankan. MBR memiliki beberapa karakter khas seperti: pekerjaan yang informal, jaminan yang umumnya berbentuk kendaraan motor dan akses keuangan yang minim sehingga sulit untuk menilai secara akurat kemampuan membayar selama KPR berlangsung.

Dalam pekerjaan yang informal, ini salah satu tantangan utama dalam menjawab kebutuhan MBR karena mereka bekerja dengan kontrak pendapatan yang tidak pasti. Tingkat pendapatan mereka tidak sepenuhnya sama setiap bulan dan ini tidak sesuai dengan asumsi perbankan yang menggunakan *fixed income* dalam menghitung rasio *debt service* atau kemampuan membayar hutang. Berdasarkan data olahan SUSENAS, yang menjadi lapangan usaha bagi target pembangunan 3 juta rumah didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor (16,20%), aktivitas jasa lainnya (15,35%), dan industri pengolahan (11,02%).

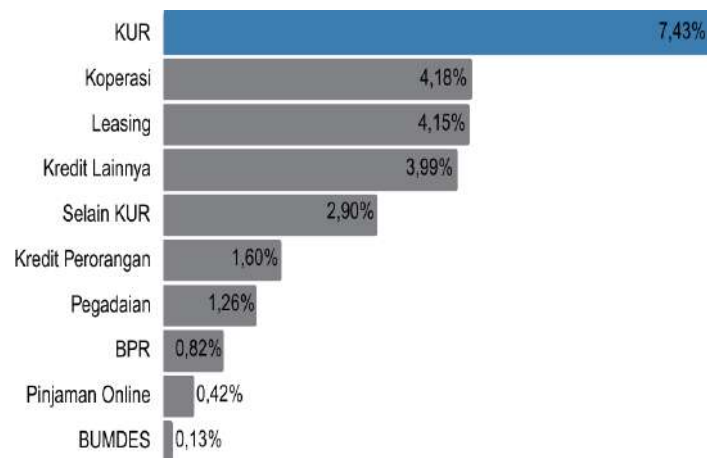
Gambar 4.4 Profil Masyarakat Target Program 3 Juta Rumah Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Dalam sisi akses kredit, pengolahan data SUSENAS menunjukkan bahwa dari 2,9 juta rumah tangga ini interaksi mereka pada produk perbankan (seperti KUR dan Non-KUR) baru sekitar 10,3% sedangkan produk keuangan lainnya mereka dapatkan dari Lembaga Keuangan Non-Bank seperti Koperasi (4,2%), *Leasing* (4,1%) dan Pegadaian (1,3%). Data ini menandakan masih perlunya perbankan untuk meningkatkan akses produk mereka pada masyarakat MBR. Salah satu rencana aksi yang dapat diambil adalah penyaluran pembiayaan KPR perlu paralel dengan upaya institusi keuangan meningkatkan inklusi keuangan bersama institusi keuangan daerah (seperti BUMD/BUMDes/BPR/BPRS).

Gambar 4.5 Profil Masyarakat untuk 3 Juta Rumah (Targeted) Berdasarkan Akses Kredit



Sumber: Susenas 2022 (diolah)

Mengacu pada ketiga karakter di atas, itu segmen MBR memang perlu sebuah adaptasi profil risiko sehingga mereka dapat akses pembiayaan yang adil. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud adaptasi di sini bukanlah semata-mata menurunkan standar risiko bank tetapi melakukan asesmen ulang terhadap profil MBR yang tidak bisa disamakan dengan kaum menengah serta menengah atas dengan pekerjaan formal.

Sebagai informasi yang penting, sebetulnya arahan utama dari regulator dalam hal ini OJK adalah perlunya manajemen risiko di tingkat perbankan dalam aspek risiko kredit sebagaimana tercantum pada POJK Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. OJK memberikan ruang bagi setiap bank untuk menentukan sendiri penetapan risiko, metode pengukuran dan limit risiko dari setiap bank sesuai preferensi risiko mereka sehingga asesmen terhadap kualitas calon nasabah atau debitur merupakan wewenang masing-masing bank penyalur kredit.

Beberapa asesmen ini dapat diterjemahkan dalam beberapa *term and condition* pembiayaan yang mempermudah MBR dalam mendapatkan rumah seperti pembayaran pokok yang ditunda, skema *rent-to-own* (atau sewa dengan opsi beli) seperti yang telah diterapkan di BTN dan membangun keterlibatan dengan BPR atau Lembaga Keuangan Institusi Non-Bank untuk dapat menyalurkan KPR Subsidi melalui skema *chanelling* atau *executing*.

4.2.3.2 Harga tanah yang semakin tinggi

Salah satu kendala yang turut perlu menjadi perhatian adalah terus meningkatnya harga tanah sehingga mempersulit pengembang tanah mendapatkan nilai komersialisasi tinggi dari lahan yang diakuisisi. Meskipun harga rumah telah disesuaikan secara berkala sesuai peraturan Kementerian PUPR, kenaikan harga tanah secara konsisten akan mempersulit model bisnis pengembang untuk dapat menyeimbangkan target laba dengan nilai sosial penyediaan rumah bagi MBR.

Tanah yang memang akan dikembangkan sebagai perumahan pro-rakyat perlu secara khusus dikelola dan di masukan sebagai bagian dari rencana strategis pengurangan *backlog*. Pembentukan Bank Tanah Indonesia (*Land Bank Authority*) melalui PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah merupakan langkah yang tepat dan perlu intensifikasi agar dapat menjalankan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.

4.2.3.3 Dukungan Perbankan bagi pengembang rumah subsidi

Perbankan diharapkan dapat lebih optimal dalam membantu pengembang rumah subsidi yang menggunakan pembiayaan atau kredit sebagai sumber modal (bukan dari pembayaran KPR baik Inden atau Non-Inden). Kredit ini dapat dikenal dengan kredit konstruksi atau kredit *developer* tapi esensinya juga sama di mana pembiayaan diberikan kepada pengembang.

Bagi pengembang yang memiliki rekam jejak (*track record*) pembangunan rumah subsidi yang baik dan tepat guna. Perbankan dapat mempertimbangkan memberikan keringanan seperti dari sisi tingkat bunga sehingga mereka memiliki insentif ekonomi untuk mengejar pembangunan perumahan atau hunian subsidi. Perlu dimaklumi bahwa prinsipnya, membangun rumah subsidi juga memerlukan insentif dari pemerintah untuk mendorong partisipasi pasar.

4.2.4 Perspektif Perbankan

4.2.4.1 Persaingan yang jenuh sehingga mengurangi daya tarik segmen KPR

Dalam menyalurkan pembiayaan KPR, pasar pada segmen ini sebetulnya sudah cukup jenuh dengan banyaknya bank yang bermain. Semakin banyak bank yang menyediakan kredit yang serupa (dalam hal ini KPR), semakin menguntungkan nasabah karena persaingan yang tercipta. Keuntungan bagi nasabah ini akan terlihat dari banyaknya bank yang menyediakan penawaran (*offering*) terbaik untuk mendapatkan nasabah seperti dari bunga/*rate* yang khusus, kelonggaran dalam pemblokiran dana, dan diskon provisi.

Persaingan ini juga memiliki pisau bermata dua bila terjadi praktik bisnis yang kurang sehat dalam jangka panjang. Sebagai contoh, beberapa pelaku perbankan menawarkan banyak promo dalam bentuk tawaran khusus di awal yang sebetulnya lebih rendah dari biaya modal (*cost of capital*) yang mereka miliki. Perbankan juga dapat secara agresif menawarkan komisi yang tinggi pada *broker* sehingga pemberian komisi ini dapat mengurangi profit pada laba perbankan. Salah satu konsekuensi lainnya juga adalah banyaknya nasabah yang mengambil kesempatan dengan berpindah (*switch*) bank begitu masa periode promo khusus mereka selesai, dengan kata lain, bank tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan perhitungan di awal akad.

Bila kecenderungan negatif ini terus menumpuk, secara rasional bank akan mengurangi portofolio KPR yang kecenderungannya kurang menguntungkan kepada

portofolio pembiayaan yang lebih menguntungkan bank. Hal ini tentu tidak ideal karena kapasitas kredit perbankan merupakan salah satu variabel utama dalam pengurangan *backlog* hunian.

4.2.4.2 Perlu adanya perubahan mekanisme manajemen risiko dalam penyaluran KPR untuk MBR

Backlog perumahan secara prinsip didominasi oleh masyarakat MBR yang memiliki profil risiko berbeda dengan pekerja pada umumnya. Perbankan perlu memahami beberapa karakteristik ini yang unik seperti: pendapatan yang tidak tetap dan kontrak yang informal. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan preferensi perbankan yang preferensinya condong ke pendapatan tetap dan kontrak yang formal. Hal ini karena perbankan ingin menghindari risiko gagal bayar pinjaman KPR yang disalurkan.

Untuk memberikan pembiayaan pada masyarakat MBR perlu ada sebuah pendekatan yang berbeda karena sifatnya tidak sepenuhnya komersial tetapi ada juga keberpihakan sosial. Bila murni berorientasi komersial, pembiayaan KPR subsidi kurang menarik secara perhitungan bisnis, lantaran pagu batas harga rumah dan tingkat bunga/*rate* yang diberikan dipatok di level tertentu (saat ini maksimal 5%) atau sesuai arahan regulator. Skema FLPP yang diberikan oleh pemerintah juga terbatas oleh kuota APBN sehingga kemampuannya terbatas dalam memberikan KPR subsidi, terlebih jika program rumah bersubsidi tidak menjadi prioritas utama Presiden. Jaminan asuransi yang dapat melindungi bank dari risiko gagal bayar perlu digarap secara seksama. Perlu ada *win-win* solution bagi MBR yang belum memiliki rumah untuk dapat mengakses hunian layak dan jaminan asuransi dapat meningkatkan peluang itu.

Di sisi lain, untuk dapat memvalidasi pendapatan mereka yang bekerja pada sektor informal, slip gaji umumnya tidak bisa menjadi satu-satunya sumber data. Oleh karena itu, perlu ada sumber data lain yang bisa mencerminkan kapasitas bayar dan gaya hidup calon debitur sebagai alat bantu pengambilan keputusan atau proses penilaian kredit (*credit scoring*). Tipe data yang dapat dipakai seperti tagihan listrik bulanan atau berbagai aset yang dimiliki penting untuk dimiliki perbankan, di mana data ini membutuhkan akses *sharing database* antara pemerintah dan perbankan.

4.2.4.3 Butuhnya insentif dari pemerintah untuk menjaga permintaan rumah

Menurut pelaku perbankan, insentif fiskal dari pemerintah untuk masyarakat membeli rumah tetap menjadi kunci utama menjaga permintaan rumah. Insentif seperti PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) dinilai berkontribusi untuk mendorong permintaan perumahan di tengah sektor properti yang cenderung stagnan. Ke depannya, sekitar 21% pajak yang dikenakan dari transaksi jual beli rumah seperti PPN, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh Final perlu dievaluasi ulang agar transaksi pembelian hunian menjadi terjangkau untuk MBR.

4.3 STRATEGI KEUANGAN MORTGAGE DAN MASA DEPAN PERUMAHAN

4.3.1 Gambaran Umum Strategi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang

Mengacu kompleksitas situasi yang terjadi di *backlog* perumahan Indonesia, strategi yang diusulkan perlu melihat dari sisi permintaan (*demand*) dan juga penawaran (*supply*). Strategi ini melihat adanya lingkaran kejam (*vicious cycle*) ketika aspek permintaan dan penawaran hunian tidak bertemu. Sebagai contoh, bila insentif untuk mengangkat daya beli diberikan sedangkan harga rumah (termasuk tanah) tidak terkendali atau sebaliknya harga tanah berhasil dibuat stabil tetapi daya beli masyarakat tergerus; dalam kedua skenario ini maka kebijakan perumahan untuk MBR menjadi kurang efektif. Di sisi lain, kebijakan jangka pendek perlu didesain agar searah dengan kebijakan yang bersifat panjang. Pemerintah perlu memerhatikan kapasitas anggaran yang dimiliki untuk mengoptimalkan penurunan *backlog* pada perumahan MBR.

Kebijakan jangka pendek akan fokus pada *quick wins* seperti contoh pemberian insentif pajak dan kewajiban portofolio KPR subsidi perbankan. Kelemahan kebijakan ini terletak pada ketergantungan pada kapasitas APBN atau dengan kata lain tidak didorong oleh mekanisme pasar. Secara natural, segmen KPR MBR bukanlah segmen yang paling menguntungkan bagi perbankan sehingga insentif diperlukan untuk menggairahkan segmen ini agar perbankan mau masuk ke pasar ini. Oleh karena itu, kebijakan jangka panjang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan insentif seperti ini dan lambat laun menyerahkannya ke mekanisme pasar.

Oleh sebab itu, kerangka strategi yang diusulkan mengacu pada 2 (dua) objektif utama: mendorong daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan harga hunian. Ditambahkan dengan dimensi waktu yaitu jangka pendek (1-3 tahun) dan jangka menengah-panjang (>3 tahun). Usulan ini perlu dilakukan secara simultan dari dua sisi permintaan dan penawaran untuk mendukung hasil yang optimal.

4.3.2 Mendorong Daya Beli Masyarakat

4.3.2.1 Memastikan Keberlangsungan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal untuk Mendorong Daya Beli Masyarakat

Menganalisis masukan dari asosiasi, perbankan dan juga respons masyarakat, intervensi pemerintah, baik fiskal atau non-fiskal dalam hal meningkatkan daya beli calon pemilik rumah sangat krusial karena ini merupakan faktor utama yang menghalangi MBR memiliki rumah. Beberapa program yang dinilai efektif dalam mendorong penyaluran pada kelompok MBR dan MM adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta adanya insentif pajak berupa pembebasan PPN DTP untuk Rumah Subsidi. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah setidaknya ada dua hal: keberlangsungan sumber pendanaan dan ketepatan penyaluran pendanaan.

Sumber pendanaan negara yang berdasarkan APBN dibutuhkan sekitar Rp24 Triliun⁹ untuk keberlanjutan program insentif perumahan bagi MBR. Angka ini sebetulnya relatif tidak besar dibandingkan dengan anggaran lainnya seperti pembangunan IKN pada tahun 2024 sebesar Rp42,5 triliun sehingga prioritas pemerintah diperlukan dalam menjaga komitmen ini. Di sisi lain, opsi iuran dari masyarakat opsi sebagai sumber pendanaan harus dipikirkan dua kali mengingat semakin tergerusnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah-bawah saat ini.

Hal penting lainnya adalah memastikan anggaran tersalurkan tepat pada mereka yang memang masuk dalam kategori MBR dan belum memiliki rumah. Hal ini memerlukan penguasaan data calon nasabah dan disiplin sistem dalam proses penentuan manfaat ketika meloloskan mereka yang layak mendapatkan fasilitas rumah subsidi.

4.3.2.2 Besaran Portofolio KPR Subsidi Sesuai Preferensi Bank

Salah satu dorongan yang dapat dipertimbangkan adalah mendorong alokasi portofolio KPR subsidi berdasarkan preferensi masing-masing bank. Penyaluran ini dapat dilakukan langsung kepada nasabah atau tidak langsung dengan skema kerja sama seperti *channeling* atau *executing*¹⁰ sesuai dengan selera risiko setiap bank. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi, memperluas aksesibilitas bagi calon debitur, dan menciptakan keseimbangan yang optimal antara keberlanjutan bisnis perbankan dan pencapaian target pemerintah dalam program perumahan subsidi.

Regulasi penyaluran dalam sektor perumahan sebagaimana yang diatur oleh PADG 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG KLM) dapat dikembangkan lebih lanjut. Saat ini cakupan definisi perumahan masih sebatas pada 4 (empat) kategori umum yakni:

Tabel 4.12 Kategori Perumahan dalam PADG 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG KLM)

No	Kategori
1	Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal
2	Rumah Tangga untuk Pemilikan Flat/Apartemen
3	Konstruksi
4	<i>Real Estate</i>

⁹ Berdasarkan pemaparan Kementerian Keuangan pada FGD Perbanas (Agustus 2024).

¹⁰ Menurut SE OJK No. 15/35/DPAU, pola *executing* dan *Channeling* merupakan konsep pembiayaan secara tidak langsung atau bekerja sama dengan pihak tertentu. Pola *executing* merupakan penyaluran pembiayaan kepada debitur melalui lembaga keuangan lain (seperti BPR) dan risiko wanprestasi debitur ditanggung oleh lembaga lain tersebut. *Channeling*, sebaliknya, risiko wanprestasi debitur akan tetap berada pada bank umum.

Dalam rangka penyaluran ini, umumnya perbankan membutuhkan insentif yang dapat mendorong adopsi kebijakan ini. Bila berkaca pada kasus penyaluran sebelumnya, relaksasi kepada perbankan seperti dalam hal rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang masuk ke dalam Insentif Likuiditas Makroprudensial berjalan cukup efektif. Hanya saja, perlu dicatat bahwa regulasi ini perlu secara konstan dikaji agar insentif yang diberikan tidak kontraproduktif, misal memicu pemberian kredit yang tidak hati-hati (*reckless*).

4.3.2.3 Mengoptimalkan Peran BP Tapera

Tujuan dan fungsi dari BP Tapera sudah selaras dengan upaya pemerintah menurunkan *backlog*. Tapi perlu diakui bahwa kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pengelolaan uang tersebut perlu dibangun terlebih dahulu sebelum kebijakan iuran ini diterapkan, terlebih di tengah berita negatif terkait dengan pengelolaan dana publik serupa. Oleh karena itu, sebelum melakukan penerapan kewajiban iuran ini setidaknya ada 2 (dua) hal yang perlu dibangun terlebih dahulu.

Pertama adalah transparansi terkait dengan pengelolaan dana yaitu di mana dana ditempatkan dan berapa tingkat pengembalian yang wajar dibandingkan dengan instrumen keuangan yang serupa. Masyarakat tentunya akan kritis apabila penempatan dana ditempatkan pada proyek atau instrumen yang irasional atau terlalu bersifat politis. Masyarakat juga perlu diberikan akses secara *real-time* untuk melihat hasil pengembangan dana yang mereka miliki. Untuk membangun kepercayaan, perlu juga ada opsi agar dana investasi dapat diambil sebelum usia 58 tahun ketika terjadi kondisi *force majeure*.

Kedua, isu iuran ini perlu disikapi dengan perspektif keadilan di mana asumsi “gotong royong” kurang masuk di akal logika publik. Iuran ini dikenakan secara universal kepada seluruh pekerja, padahal manfaatnya hanya dapat dinikmati oleh segmen tertentu. Berbeda dengan BPJS di mana seluruh masyarakat memiliki peluang yang sama dalam memanfaatkannya. Total iuran yang mencapai 3% (2,5% oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja) menambah jumlah iuran yang harus dibayar dan beban hidup bagi masyarakat yang dapat berujung pada penurunan daya beli lebih dalam (INDEF, 2024). Oleh karena itu, sebaiknya opsi iuran ini dibuat secara sukarela bagi mereka yang memang berniat untuk memiliki rumah melalui skema BP Tapera ini.

4.3.3 Menjaga Kestabilan Harga Hunian dan Tanah

4.3.3.1 Perumahan Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)

Mengingat kompleksitas dalam pembangunan perumahan termasuk kesediaan lahan, akses infrastruktur dan perizinan, pembangunan perumahan MBR dapat dijadikan sebagai salah satu Proyek Nasional Strategis (PSN). Secara historis, Kementerian PUPR pernah melaksanakan pembangunan perumahan atau tempat tinggal yang terdaftar sebagai PSN seperti perumahan rumah susun Kemayoran (Wisma Atlet), perumahan khusus perbatasan di Riau, Aceh dan Kalimantan serta proyek hunian vertikal di Semarang dan Morowali.

Perumahan rakyat secara substansi memenuhi kriteria dasar dan kriteria strategis untuk dapat dijadikan sebagai PSN. Terlebih jika hal ini sesuai dengan RPJMN/D dan tata ruang/wilayah setempat. Perumahan rakyat memiliki karakteristik khusus karena rumah tersebut secara prinsip memerlukan penetapan harga jual terjangkau sesuai peraturan Kementerian PUPR sehingga kontrol biaya (seperti akuisisi tanah dan perizinan) berperan penting bagi kesuksesan program ini. Sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, akan ada keunggulan yang didapatkan seperti: kemudahan perizinan, fasilitas penyelesaian permasalahan dan pengadaan tanah dan pembiayaan dengan jaminan pemerintah.

4.3.3.2 Mencegah Spekulasi Lahan atau Hunian

Kepemilikan tanah serta hunian perlu dibatasi secara wajar agar tidak terjadi spekulasi yang dapat mendorong kenaikan harga properti. Dalam hal ini, pemerintah perlu membuat disinsentif para spekulasi ini dengan melalui mekanisme seperti pajak progresif bagi tanah/hunian yang tidak produktif atau kelebihan (*excess*) kepemilikan tanah/hunian. Skema ini bisa masuk dalam kategori Pajak Bumi Bangunan atau PPh, dan mekanisme bisa dipilih apakah dalam bentuk (CGT) atau Pajak Final Progresif (PGF).

Secara prinsip, kebijakan mesti didesain agar tanah dan bangunan tidak dijadikan sebagai instrumen spekulasi. Wacana ini sudah ada setidaknya sejak tahun 2017, namun belum ada regulasi jelas. Penetapan pajak ini bisa menjadi bukti penting keberpihakan pemerintah dalam menjaga harga hunian bagi MBR faktor keterjangkauan menjadi penentu utama keputusan masyarakat dalam mengambil KPR bersubsidi.

4.3.3.3 Menjadikan Aksesibilitas Internet Sebagai Pemerataan Urbanisasi

Soedjatmoko (1983) pada esainya “Nilai-Nilai Budaya pada Masalah Pemukiman” menyebutkan bahwa:

“Kita tidak akan dapat mengatasi masalah perkotaan, termasuk Jakarta, tanpa mengembangkan pedesaan dengan lebih pesat. Sudah semakin jelas bahwa kita harus memperlakukan kota dan desa sebagai “unit” perencanaan regional yang tunggal sifatnya, yang seimbang dalam fungsi dan kekuatannya, di mana daerah pedesaan mampu meningkatkan produktivitasnya.....”

Salah satu faktor pendorong utama meningkatnya harga rumah di perkotaan adalah arus urbanisasi (Wang et al., 2021). Dalam konteks ini dan horizon jangka panjang, perlu ada upaya lebih serius dalam mengurangi arus urbanisasi secara organik serta meratakan arusnya agar menyebar ke pulau-pulau lain di luar Jawa. Per 2024 diestimasi dua pertiga masyarakat tinggal di perkotaan (LPEM FEB UI, 2024). Dominasi ini menyebabkan tekanan pada harga dan ketersediaan perumahan di berbagai kota utama seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar.

Friedman (2006) dalam bukunya *Hot, Flat and Crowded* menyampaikan bahwa ketersediaan akses internet pada daerah desa (*rural*) dapat meredam arus urbanisasi

dari desa ke kota. Friedman menceritakan bagaimana sebagian masyarakat bertahan di desa karena mereka menikmati faktor kedekatan kampung halaman, keluarga besar, ketenangan dan kenyamanan bekerja yang lebih baik tanpa harus kehilangan pendapatan. Hal ini dimungkinkan dengan adanya akses internet dalam menopang pekerjaan mereka sehari-hari. Fenomena ini dapat menjadi gambaran bagaimana urbanisasi dapat ditekan bila penetrasi atau akses internet tersedia di daerah *rural*. Dengan tingkat urbanisasi yang menurun, hal ini akan menahan kenaikan harga rumah.

4.3.3.4 Fokus pada Pembangunan Rumah Transit Oriented Development (TOD)

Dalam menyikapi urbanisasi dan kenaikan harga rumah yang sebelumnya dibahas, muncul sebuah paradigma baru untuk membangun rumah yang memiliki orientasi transit (perpindahan) atau *Transit Oriented Development* (TOD). TOD secara definisi umum adalah “komunitas serba guna yang mendorong orang untuk tinggal di dekat layanan transit dan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada mengemudi” (Carlton, 2007).

Dalam Koto (2020), yang menjadi ciri khas pembangunan adalah pembangunan rumah vertikal yang dekat dengan simpul transportasi (misalkan *shelter busway*, stasiun LRT/MRT dan stasiun KRL). Secara substansi, pembangunan rumah vertikal seperti apartemen yang berada pada lingkup akses transportasi (atau dimiliki oleh perusahaan transportasi) memiliki beberapa keunggulan utama: efisiensi penggunaan lahan yang terbatas, peningkatan pendapatan dari *fare gate* (atau gerbang tiket), tumbuhnya ekosistem ekonomi yang baru pada daerah dekat TOD tersebut (seperti UMKM) dan juga mengurangi penggunaan mobil pribadi.

Sebagai model pembangunan yang paling ideal dalam mengurangi *backlog* dan memperbaiki taraf kehidupan. TOD perlu menjadi arah strategis pemerintah khususnya dalam meyakinkan masyarakat bahwa hunian rumah vertikal tidak kalah menarik dengan hunian tapak (*landed house*) dengan memperhatikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), aksesibilitas permainan yang terjangkau dan memang hunian ditujukan bagi mereka yang membutuhkan rumah alih-alih sebagai sarana investasi belaka.

Pembangunan urban yang didominasi dengan model “*gated community*” kurang ideal dalam perspektif *backlog*. Konsep ini lebih tepat ditujukan untuk pasar menengah dan atas, kelompok yang dinilai lebih mudah membeli rumah bahkan dengan harga pasar. Selain itu, dalam sudut pandang sosio-ekonomi akan ada dampak negatif dari *gated community* yaitu minimnya interaksi sosial antar masyarakat (Lestari et al., 2019) sehingga bisa mendorong individualisme, kesenjangan fasilitas publik, terputusnya jalan umum sehingga meningkatkan jarak tempuh (Sun et al., 2020) dan fasilitas eksklusif yang tidak aksesibel untuk masyarakat umum.

4.3.4 PERBANAS Mortgage Confidence Index (PMCI) 2024

Dalam rangka mengetahui dan menilai tingkat kepercayaan dunia perbankan terhadap sektor pembiayaan *mortgage* di Indonesia maka dalam penelitian ini juga dilakukan survei. Survei dilakukan secara daring (*online*) dari tanggal 11 hingga 18

Oktober 2024. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam survei sebanyak 27 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan berkaitan dengan:

- *Operational Confidence* sebanyak 5 pertanyaan,
- *Market Confidence* sebanyak 8 pertanyaan,
- *Regulatory Confidence* sebanyak 4 pertanyaan,
- Program 3 Juta Rumah sebanyak 10 pertanyaan.

Masing-masing pertanyaan menggunakan skala likert dari 1 (tidak setuju) sampai dengan 4 (sangat setuju). Total responden yang terkumpul sebanyak 18 bank yang mana 3 diantaranya adalah Bank BUMN, sisanya non-BUMN.

Hasil dari survei selanjutnya digunakan untuk menyusun PERBANAS *Mortgage Confidence Index* (PMCI). Metode yang digunakan untuk menghitung PMCI 2024 adalah dengan menggunakan metode indeks rata-rata ternormalisasi (*Average Normalised Index*) yang merupakan rata-rata dari total nilai aktual dibagi dengan total nilai maksimum. Hasil perhitungan indeks berada di antara 0% (*lowest confidence*) – 100% (*highest confidence*) di mana: 0 – 25%: *Low*; (ii) 25 – 50%: *Mid-low*; (iii) 50 – 75%: *Mid-high*; (i) > 75%: *High*. Hasil dari survei PMCI menyatakan bahwa:

- Perbankan nasional siap menangkap berbagai peluang di sektor *mortgage*, tercermin dari *Operational Confidence Index* yang tinggi sebesar 85,59%.
- Antusiasme ini menjadi kabar baik di tengah *Market Confidence* yang tergolong *Mid-high* dengan indeks hanya sebesar 67,83%.
- Antusiasme ini perlu didukung dengan daya dukung kebijakan, *Regulatory Confidence* (71,32%).
- Perbankan menyambut cukup antusias Program 3 Juta Rumah dengan indeks tergolong *Mid-high* sebesar 74,71%.
- Indeks keseluruhan PMCI 2024 sebesar 74,18% atau tergolong *Mid-high*.
- Bank BUMN memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi (81,17%) dibandingkan Non-BUMN (72,69%).

4.4 KESIMPULAN

Masalah *backlog* perumahan Indonesia mencapai 11,7 juta rumah tangga (SUSENAS, 2022). Program 3 Juta Rumah memiliki peran strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Keberhasilan program ini bergantung pada strategi yang terarah, termasuk penyaluran subsidi rumah yang tepat sasaran dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar cicilan setidaknya sebesar Rp1,1 juta per bulan. Berdasarkan kriteria ini, terdapat sekitar 3,6 juta rumah tangga dengan pengeluaran Rp3–7 juta per bulan atau pendapatan setara UMR yang memenuhi syarat sebagai target penerima manfaat. Selain itu, evaluasi terhadap batas penghasilan penerima subsidi, seperti Rp8 juta untuk wilayah umum dan Rp10 juta untuk Papua, diperlukan untuk menjangkau kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT), yang meskipun tidak tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetap kesulitan membeli rumah.

Mayoritas *backlog* masyarakat 80% terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, penyediaan rumah susun terjangkau di perkotaan mesti menjadi prioritas utama bagi Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pendekatan ini relevan karena kebutuhan perumahan di perkotaan sangat mendesak, sejalan dengan tingginya konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi mereka. Profil penerima manfaat program ini menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan generasi milenial (55%), pengguna listrik kurang dari 1300 watt (82%), 90% dari mereka memiliki kendaraan roda dua, dan 63% memiliki tabungan. Namun, karena sebagian besar penerima manfaat berada di Jawa dan Sumatera, diperlukan strategi distribusi yang juga memerhatikan aspek pemerataan geografis.

Selain itu, para calon penerima manfaat program ini biasanya bekerja di sektor informal sehingga memerlukan metode verifikasi alternatif agar dapat mengakses KPR subsidi. Data yang kredibel, seperti tagihan listrik rumah tangga, dapat menjadi solusi untuk mengukur kemampuan mereka dalam membayar cicilan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan perbankan untuk berbagi data menjadi hal penting guna memastikan proses verifikasi yang transparan dan efisien.

Untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah dalam lima tahun atau 600 ribu rumah subsidi setiap tahunnya, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan subsidi hingga tiga kali lipat dari APBN 2024. Lebih jauh, program ini dapat dimaksimalkan melalui kebijakan tambahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), atau insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Kebijakan ini perlu diiringi langkah organik, seperti perluasan akses internet di daerah pedesaan dan penerapan *Transit-Oriented Development* (TOD) di kawasan urban. TOD mengintegrasikan tata ruang dengan jaringan transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi massal, pejalan kaki, serta pesepeda.

Optimisme terhadap keberhasilan program ini didukung oleh hasil survei PERBANAS Mortgage Confidence Index (PMCI) 2024, yang mencatat indeks sebesar 74,18% (*mid-high*). Optimisme ini terutama didorong oleh kemampuan operasional perbankan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan, meskipun pasar properti sedang lesu. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi antar pemangku kepentingan, Program 3 Juta Rumah memiliki potensi besar tidak hanya untuk mengurangi *backlog* perumahan tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan MBR dan memperkuat daya saing sektor perbankan nasional.

Peran perbankan sebagai *enabler* dalam mengurangi *backlog* perumahan sangat krusial, khususnya melalui penyaluran KPR subsidi. Penyesuaian manajemen risiko perlu dilakukan agar selaras dengan karakteristik MBR, seperti pendapatan tidak stabil, tingkat pendidikan rendah, dan akses terbatas terhadap layanan keuangan formal. Pendekatan *top-down* dari pemerintah juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini, dengan memberikan insentif seperti pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) atau insentif Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

kepada bank yang berkontribusi aktif dalam program ini, guna mendorong partisipasi yang optimal.

4.5 REKOMENDASI KEBIJAKAN & PENELITIAN BERIKUTNYA

1. Per 2022, terdapat 11,7 juta rumah tangga (RT) yang belum memiliki rumah (*backlog*). Program 3 Juta Rumah dapat memainkan peran dalam menangani permasalahan *backlog* perumahan ini. Permasalahan *backlog* terkonsentrasi (80%) di perkotaan. Penyediaan rumah susun terjangkau dan berorientasi transit bagi kaum *urban* mesti menjadi prioritas.
2. Program 3 Juta Rumah Subsidi 2024-2029 mesti mempertimbangkan setidaknya: (1) kemampuan membayar cicilan (*ability to pay*) masyarakat, setidaknya sebesar Rp1,1 juta per bulan; (2) memastikan agar subsidi tepat sasaran. Terdapat sekitar 3,6 juta RT yang memenuhi kedua kriteria ini yang dapat dijadikan target program ini, yaitu rumah tangga dengan total pengeluaran per bulan berkisar Rp3–7 juta per bulan atau pendapatan setidaknya sebesar UMR.
3. Penelitian ini memanfaatkan data SUSENAS 2022 untuk menghitung *backlog* perumahan serta memetakan kemampuan membayar cicilan dan karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk memperbarui dan memperkuat temuan, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan menggunakan data SUSENAS versi terbaru. Hal ini akan memungkinkan pengukuran yang lebih akurat terhadap perubahan *backlog* perumahan dan dinamika kemampuan membayar cicilan MBR, serta memberikan basis data yang lebih relevan untuk menyusun kebijakan perumahan di masa mendatang.
4. Meninjau ulang batasan besaran penghasilan masyarakat yang berhak menerima subsidi rumah sebesar Rp 8 juta rupiah dan Rp10 juta rupiah (khusus Wilayah Papua) sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, mengingat terdapat juga kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan rentang penghasilan di atas MBR yang juga kesulitan membeli rumah.
5. Mengingat mayoritas masyarakat bekerja pada sektor informal, perlu ada verifikasi alternatif selain slip gaji untuk mengakses KPR Subsidi untuk mengukur kemampuan membayar masyarakat (*ability to pay*) dengan data yang kredibel seperti tagihan listrik rumah. *Shared database* antara Pemerintah & Perbankan diperlukan.
6. Untuk mencapai targetnya, dengan asumsi Pemerintah akan membangun sekitar 600 ribu rumah subsidi tiap tahunnya, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan subsidi sekitar tiga kali lipat dibandingkan kondisi 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, J., & Gabe, R. T. (2021). Determinants of vacant subsidized house in Greater Metropolitan Jakarta Area, Indonesia. *Journal of Housing and the Built Environment*, 36(4), 1813–1830. <https://doi.org/10.1007/s10901-021-09828-x>
- Boterman, W. R., Karsten, L., & Musterd, S. (2010). Gentrifiers Settling Down? Patterns and Trends of Residential Location of Middle-Class Families in Amsterdam. *Housing Studies*, 25(5), 693–714. <https://doi.org/10.1080/02673037.2010.483586>
- Carlton, I. (2007). *Histories of Transit-Oriented Development: Perspectives on the Development of the TOD Concept Real Estate and Transit, Urban and Social Movements, Concept Protagonist*.
- Gobillon, L., & Selod, H. (2019). Spatial Mismatch, Poverty, and Vulnerable Populations. In *Handbook of Regional Science* (pp. 1–16). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-36203-3_7-1
- Habitat for Humanity. (2021). *Housing and the Sustainable Development Goals*.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).
- Hanifa, D. R., Yudana, G., & Rini, E. F. (2022). Backlog kepenghunian rumah di Kota Surakarta dan faktor yang mempengaruhinya. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 407. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.43366>
- Herdiyanto, T. U. (2023). Griya Untuk Kawula: Pembangunan Perumahan Rakyat di Kota Yogyakarta, 1950- 1978. *HISTMA*, 8(1).
- Jaeger, J. A. G., Bertiller, R., Schwick, C., & Kienast, F. (2010). Suitability criteria for measures of urban sprawl. *Ecological Indicators*, 10(2), 397–406. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2009.07.007>
- Koto, Z. S. (2020). *Ekonomi Politik PROGRAM SEJUTA RUMAH MEMBANGUN UNTUK SIAPA? The HUD Institute*.
- Lamudi. (2022). *Lamudi Property Highlights 2022*.
- LPEM FEB UI. (2024). *Ribut Soal Tapera: Kebijakan “Harga Mati” untuk Turunkan Angka Kekurangan Perumahan Nasional?*
- Mangeswuri, D. R. (2016). Kebijakan Pembiayaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Sun, G., Wallace, D., & Webster, C. (2020). Unravelling the impact of street network structure and gated community layout in development-oriented transit design. *Land Use Policy*, 90, 104328. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104328>
- The Hud Institute. (2017). *Laporan Studi Banding Perumahan Indonesia - Malaysia 2017*.
- Turok, I., & McGranahan, G. (2013). Urbanization and economic growth: the arguments and evidence for Africa and Asia. *Environment and Urbanization*, 25(2), 465–482. <https://doi.org/10.1177/0956247813490908>

- Wang, L., Rong, X., & Mu, L. (2021). The Coupling Coordination Evaluation of Sustainable Development between Urbanization, Housing Prices, and Affordable Housing in Tiongkok. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2021, 1–14. <https://doi.org/10.1155/2021/3937226>
- World Bank. (2019). *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*.



PERBANAS
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL

Griya Perbanas, Lt. 1
Jln. Perbanas Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940

P. 62 21 5223038, 62 21 5255731
F. 62 21 5223037, 5223339

E-mail : sekretariat@perbanas.org